LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BATAM TAHUN 2016 - 2021

Pemerintah Kota Kota Batam
Tahun 2016

WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA BATAM TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota terpilih;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA BATAM TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
5. Pemerintah Pusat, yang disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selajutnya disebut Badan Pengusahaan adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.

8. Perangkat Daerah yang untuk selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan, yang diberikan kepada kementerian/lembaga/dinas/PD untuk setiap program kegiatan.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD TAHUN 2016-2021

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan :

a. visi, misi, dan program Walikota sebagai Kepala Daerah;

b. berisikan arah kebijakan pembangunan, kebijakan umum, keuangan daerah, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; dan

c. berisikan program yang menggambarkan keterlibatan dunia usaha, masyarakat dan juga Pemerintah yang mendukung perwujudan visi, misi dan program Walikota.

(2) RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD dan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD TAHUN 2016-2021

Pasal 3

Sistematika RPJMD Tahun 2016–2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V	:	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII	:	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANA

Pasal 4

RPJMD Tahun 2016–2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD Tahun 2016–2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016-2021 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya.

(2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Anggaran Badan Pengusahaan serta sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota hanya yang bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021.

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penilaian atas evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RPJMD Tahun 2016-2021, dilakukan hanya terhadap seluruh program dan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

(1) RPJMD Tahun 2016-2021 dapat diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan keadaan atau karena penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Dalam hal perubahan RPJMD yang akan dilakukan berupa perubahan capaian sasaran tahunan, tetapi tidak mengubah target pencapaian target sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dibahas dengan DPRD.

(3) Dalam hal perubahan RPJMD yang akan dilakukan karena terjadinya perubahan yang mendasar, mencakup antara lain; terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional, sehingga dapat berakibat berubahnya target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penetapan perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Oktober 2016

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2016 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (6/45/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kota Batam
u.b.
Kepala Bagian Hukum

DEMI HASFINUL NASUTION, SH, M.Si
Pembina Tk.I NIP. 19672412 199403 1 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH (RPJMD) TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Daerah sesuai dengan Visi, Misi Kepala Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, perlu di susun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kurun waktu 5 Tahun mendatang.

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 107

LAMPIRAN

PERDA RPJMD
KOTA BATAM
TAHUN 2016-2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**
DAFTAR GAMBAR ..... **V**
DAFTAR TABEL ..... **VII**

BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang I-2
1.2 Dasar Hukum I-4
1.3 Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup I-6
1.3.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD I-6
1.4 Proses Penyusunan RPJMD..... I-7
1.5 Hubungan Antar Dokumen I-9
1.5.1 Hubungan RPJMN dengan RPJMD..... I-10
1.5.2 Hubungan RPJMD dengan RPJPD I-11
1.5.3 Hubungan RPJMD dengan RTRW I-11
1.5.4 Hubungan RPJMD dengan Renstra PD I-11
1.5.5 Hubungan RPJMD dengan RKPD I-12
1.5.6 Hubungan RPJMD Kota Batam dengan RPJMD Kota/Kabupaten Tetangga... ..... I-12
1.6 Sistematika Laporan I-15

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 Sejarah Singkat Kota Batam II-2
2.2 Aspek Geografi dan Demografi II-6
2.2.1 Karakteristik Wilayah..... II-6
2.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi II-6
2.2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis..... II-8
2.2.1.3 Topografi dan Kemiringan Lereng..... II-11
2.2.1.4 Geologi II-14
2.2.1.5 Hidrologi..... II-16
2.2.1.6 Klimatologi II-18
2.2.1.7 Penggunaan Lahan II-19
2.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah..... II-20
2.2.2.1 Struktur Ruang Wilayah II-20
2.2.2.2 Pola Ruang Wilayah II-24
2.2.3 Wilayah Rawan Bencana II-23
2.2.4 Demografi..... II-28
2.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah..... II-36
2.3.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-38
2.3.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-38
2.3.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat..... II-46
2.3.2.1 Pendidikan..... II-46
2.3.2.2 Kesehatan..... II-51
2.3.2.3 Tenaga Kerja..... II-55
2.3.2.4 IPM II-56

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga II-66
2.4 Aspek Pelayanan Umum II-66
2.4.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib II-66
2.4.1.1 Pendidikan II-66
2.4.1.2 Kesehatan II-73
2.4.1.3 Pekerjaan Umum II-85
2.4.1.4 Perumahan II-91
2.4.1.5 Perencanaan Pembangunan II-95
2.4.1.6 Perhubungan II-96
2.4.1.7 Lingkungan Hidup II-99
2.4.1.8 Kependudukan dan Catatan Sipil II-102
2.4.1.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak II-104
2.4.1.10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera II-106
2.4.1.11 Sosial II-107
2.4.1.12 Ketenagakerjaan II-110
2.4.1.13 Koperasi Usaha Kecil atau Menengah II-111
2.4.1.14 Penanaman Modal II-113
2.4.1.15 Kebudayaan II-116
2.4.1.16 Kepemudaan dan Olahraga II-116
2.4.1.17 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri II-117
2.4.1.18 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian II-118
2.4.1.19 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-120
2.4.1.20 Statistik II-122
2.4.1.21 Kearsipan II-122
2.4.1.22 Komunikasi dan Informatika II-123
2.4.1.23 Perpustakaan II-125
2.3.1.24 Pertanahan II-125
2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-130
2.4.2.1 Pertanian II-130
2.4.2.2 Kehutanan II-131
2.4.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral II-132
2.4.2.4 Pariwisata II-133
2.4.2.5 Kelautan dan Perikanan II-134
2.4.2.6 Perdagangan II-137
2.4.2.7 Perindustrian II-137
2.5 Aspek Daya Saing Daerah II-139
2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-139
2.5.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian II-139
2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-140
2.5.2.1 Perhubungan II-140
2.5.2.2 Penataan Ruang II-141
2.5.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian II-143

2.5.2.4 Komunikasi dan Informatika II-145
2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-146
2.5.4 Fokus Sumber Daya Manusia II-147
2.5.4.1 Ketenagakerjaan II-147
2.6 Aspek Lingkungan II-149
2.6.1 Kualitas Air II-149
2.6.1 Kualitas Udara II-153
2.7 Gambaran Umum Peran, Strategi, dan Kegiatan BP Batam Tahun 2015-2019 ..... II-155

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
3.1 Kinerja Keuangan Daerah III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD III-3
3.1.2 Neraca Daerah III-18
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Periode 2012-2015 ..... III-28
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran III-28
3.2.2 Analisis Pembiayaan III-29
3.3 Kerangka Pendanaan III-33
3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama III-33
3.3.2 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama III-35
3.3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021 ..... III-36
3.3.4 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah III-41

BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Kota Batam IV-3
4.2 Dualisme Sistem Birokrasi Pemerintahan di Kota Batam IV-27
4.2.1 Pengembangan KPBPB menjadi KEK IV-27
4.3 Penelaahan RPJPD Kota Batam 2005-2025 ..... IV-31
4.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Batam IV-34
4.5 Kajian Kebijakan Pembangunan Nasional dan Agenda Pembangunan Internasional/ Isu Global IV-40
4.5.1 Kebijakan Pembangunan Nasional IV-41
4.5.1.1 Penelaahan RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kepri 2015-2021 ..... IV-41
4.5.2 Agenda Pembangunan Internasional/ Isu Global IV-46
4.5.2.1 Masyarakat Ekonomi ASEAN IV-46
4.5.2.2 Perubahan Iklim IV-49
4.5.2.3 Terorisme Global IV-51
4.5.2.4 Trafficking IV-52
4.5.2.5 Penularan HIV dan Peredaran Narkoba di Kota Batam IV-53
4.5.2.5 Sustainable Development Goals IV-56
4.6 Penetapan Isu-isu Strategis Kota Batam Tahun 2016-2021 ..... IV-59

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1 Visi V-3
5.2 Misi V-4

5.2.1 Hubungan Visi dan Misi RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021.....V-7
5.3 Tujuan dan Sasaran V-9
5.4 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan Visi, Misi RPJMN Tahun 2015-2019 .....V-22

BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1 Lingkungan Strategis VI-3
6.1.1 Lingkungan Internal.....VI-3
6.1.2 Lingkungan Eksternal.....VI-6

BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..... VII-2

BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN..... VIII-2

BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH IX-1

BAB X. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN..... X-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
Gambar 2.1	Peta Pola Ruang Ranperda RTRW Kota Batam 2011-2031	II-7
Gambar 2.2	Peta Topografi Kawasan Batam	II-12
Gambar 2.3	Peta Struktur Ruang	II-23
Gambar 2.4	Peta Pola Ruang Kota Batam	II-25
Gambar 2.5	Peta Rawan Bencana	II-28
Gambar 2.6	Komponen Pembentuk Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Batam	II-37
Gambar 2.7	Laju Pertumbuhan PDRD ADHK 2010 Kota Batam	II-39
Gambar 2.8	Persentase Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010	II-40
Gambar 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam	II-41
Gambar 2.10	Laju Inflasi Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Target Inflasi Nasional	II-42
Gambar 2.11	PDRB per Kapita Kota Batam	II-43
Gambar 2.12	Indeks Gini Kota Batam, Kepri, dan Nasional	II-44
Gambar 2.13	Persentase Penduduk Miskin Kota Batam	II-46
Gambar 2.14	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan di Kota Batam	II-50
Gambar 2.15	Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kota Batam	II-50
Gambar 2.16	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Batam	II-52
Gambar 2.17	Angka Kematian Bayi di Kota Batam	II-53
Gambar 2.18	Angka Kematian Ibu di Kota Batam	II-54
Gambar 2.19	Perkembangan IPM Kota Batam (Metode Lama dan Metode Baru)	II-60
Gambar 2.20	Perkembangan Peringkat IPM Kota Batam Tahun 2009-2014	II-61
Gambar 2.21	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tertangani di Kota Batam	II-77
Gambar 2.22	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Batam	II-77
Gambar 2.23	Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Batam	II-78
Gambar 2.24	Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kota Batam	II-79
Gambar 2.25	Angka Kesembuhan Program DOTs TB. Paru	II-79
Gambar 2.26	Prevalensi TB. Paru per 100.000 Penduduk di Kota Batam	II-80
Gambar 2.27	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Batam	II-81
Gambar 2.28	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	II-82
Gambar 2.29	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Batam	II-83
Gambar 2.30	Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Batam	II-84
Gambar 2.31	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Batam	II-85
Gambar 2.32	Persentase Penanganan Sampah di Kota Batam	II-99
Gambar 2.33	Persentase Pemantauan Pencemaran dan Status Mutu Air di Kota Batam	II-100
Gambar 2.34	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL di Kota Batam	II-101
Gambar 2.35	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Batam	II-101
Gambar 2.36	Persentase Tingkat Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Limbah	

	di Kota Batam	II-102
Gambar 2.37	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Batam	II-104
Gambar 2.38	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Batam	II-105
Gambar 2.39	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam	II-106
Gambar 2.40	Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Batam	II-107
Gambar 2.41	Jumlah Program Keluarga Harapan yang Direalisasikan di Kota Batam	II-109
Gambar 2.42	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam	II-120
Gambar 2.43	Perkembangan Perhotelan di Kota Batam	II-145
Gambar 3.1	Persentase Komponen Pendapatan Daerah Kota Batam	III-10
Gambar 3.2	Persentase Komponen Pembentuk PAD Kota Batam	III-11
Gambar 3.3	Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Batam	III-12
Gambar 3.4	Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kota Batam	III-14
Gambar 3.5	Persentase Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Kota Batam	III-15
Gambar 3.6	Persentase Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah	III-15
Gambar 4.1	Skema Pembahasan Bab 4	IV-3
Gambar 5.1	Keterkaitan Visi dan Misi RPJPDdengan Visi dan Misi RPJMD	V-9
Gambar 5.2	Keterkaitan Visi RPJPN, RPJMN dan RPJMD	V-23
Gambar 5.3	Keterkaitan Misi RPJPN, RPJMN dan RPJMD	V-24
Gambar 8.1	Keterkaitan Misi RPJPN, RPJMN dan RPJMD	VIII-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Batam	II-7
Tabel 2.2	Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng	II-13
Tabel 2.3	Luas dan Prosentase Jenis Geologi di Kawasan Batam	II-15
Tabel 2.4	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Batam	II-17
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kota Batam	II-19
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kota Batam	II-31
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kelompok Umur	II-32
Tabel 2.8	Persentase Penduduk Menurut Agama Tahun 2011-2015	II-33
Tabel 2.9	Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2011-2015	II-34
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Menurut Jenjang PendidikanTahun 2011-2015	II-35
Tabel 2.11	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan 2010-2020	II-35
Tabel 2.12	PDRB Kota Batam	II-38
Tabel 2.13	Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Kota Batam Tahun 2011-2015	II-45
Tabel 2.14	Angka Melek Huruf Kota Batam Tahun 2009-2013	II-47
Tabel 2.15	Harapan Lama Sekolah Kota Batam Tahun 2011-2015	II-48
Tabel 2.16	Rata-rata Lama Sekolah di Kota Batam	II-48
Tabel 2.17	Angka usia harapan hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Riau	II-51
Tabel 2.18	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Batam	II-55
Tabel 2.19	Perkembangan indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2010-2015	II-58
Tabel 2.20	Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam Tahun 2010-2015	II-59
Tabel 2.21	Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011-2015	II-62
Tabel 2.22	IPM Kota Batam dan Beberapa Kota-kota Besar Lainnya di Sumatera, Tahun 2013-2014	II-64
Tabel 2.23	IPM Kota Batam dan Beberapa Kota-kota Besar Lainnya di Luar Sumatera, Tahun 2013-2014	II-65
Tabel 2.24	Perkembangan Kepemudaan Dan Olahraga Di Kota Batam	II-66
Tabel 2.25	Hasil Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Kota Batam Tahun 2009-2014	II-68
Tabel 2.26	Rasio Posyandu/Polindes per Satuan Balita di Kota Batam	II-73
Tabel 2.27	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk di Kota Batam	II-74
Tabel 2.28	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Batam	II-75
Tabel 2.29	Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Batam	II-75
Tabel 2.30	Cakupan Puskesmas di Kota Batam	II-83
Tabel 2.31	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Batam	II-84
Tabel 2.32	Ruas Jalan Arteri Primer (JAP) di Kota Batam	II-86
Tabel 2.33	Ruas Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) di Kota Batam	II-87
Tabel 2.34	Ruas Jalan Kolektor Primer (JKP) di Kota Batam	II-87
Tabel 2.35	Indikator Keluaran Kegiatan Dinas PU Kota Batam	II-90

Tabel 2.36	Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam	II-92
Tabel 2.37	Jumlah Rusun di Kota Batam s/d Tahun 2016	II-93
Tabel 2.38	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Batam	II-95
Tabel 2.39	Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota BatamPeriode 2011-2015	II-96
Tabel 2.40	Jumlah Arus Penumpang Pada Pelabuhan Laut dan Udara di Kota Batam.	II-97
Tabel 2.41	Rasio Ijin Trayek di Kota Batam	II-98
Tabel 2.42	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Batam	II-99
Tabel 2.43	Penduduk Menurut Wajib dan Kepemilikan KTP Tahun 2011-2015	II-103
Tabel 2.44	Jumlah Pasangan yang Memiliki Akta Nikah	II-103
Tabel 2.45	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batam	II-108
Tabel 2.46	Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam	II-110
Tabel 2.47	Hasil Kinerja Urusan KUMKM Kota Batam	II-113
Tabel 2.48	Hasil Kinerja Penanaman Modal di Kota Batam	II-115
Tabel 2.49	Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Batam	II-116
Tabel 2.50	Hasil Kinerja Urusan Kepemudaan dan OlahragaPemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-117
Tabel 2.51	Hasil Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Batam Periode 2011-2015	II-118
Tabel 2.52	Hasil Kinerja Urusan Perangkat Daerah Satpol PPPemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-119
Tabel 2.53	Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPemerintah Daerah Kota Batam 2011-2015	II-121
Tabel 2.54	Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-122
Tabel 2.55	Hasil Kinerja Urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-123
Tabel 2.56	Hasil Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-124
Tabel 2.57	Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-125
Tabel 2.58	Kampung Tua Kota Batam	II-128
Tabel 2.59	Hasil Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-130
Tabel 2.60	Hasil Kinerja Urusan KehutananPemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-131
Tabel 2.61	Hasil Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya MineralPemerintah Daerah Kota BatamPeriode 2011-2015	II-132
Tabel 2.62	Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2011 – 2015	II-133
Tabel 2.63	Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-134
Tabel 2.64	Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-135
Tabel 2.65	Hasil Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-137

Tabel 2.66	Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015	II-138
Tabel 2.67	Rasio Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2011-2015	II-140
Tabel 2.68	Lalu Lintas Orang dan Barang Pada Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Kota Batam	II-141
Tabel 2.69	Informasi Luas Wilayah Penataan Ruang Kota Batam	II-142
Tabel 2.70	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang di Kota Batam Tahun 2011-2015	II-143
Tabel 2.71	Indikator Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	II-145
Tabel 2.72	Angka Kriminalitas dan Demo di Kota Batam	II-146
Tabel 2.73	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Batam Tahun 2011-2015	II-147
Tabel 2.74	Rasio Ketergantungan Kota Batam Tahun 2011-2015	II-148
Tabel 2.75	Waduk yang berada di Kota Batam	II-150
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam	III-3
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Batam	III-3
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011 – 2015	III-5
Tabel 3.4	Nilai Belanja Daerah Kota Batam Periode 2013 – 2015	III-9
Tabel 3.5	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Batam	III-12
Tabel 3.6	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Batam	III-12
Tabel 3.7	Neraca Daerah Kota Batam Tahun 2011-2015	III-15
Tabel 3.8	Hasil Perhitungan Neraca Daerah Kota Batam	III-18
Tabel 3.9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batam	III-20
Tabel 3.10	Analisis Defisit Riil Anggaran Kota Batam	III-20
Tabel 3.11	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Batam	III-21
Tabel 3.12	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	III-23
Tabel 3.13	Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama	III-24
Tabel 3.14	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Batam 2016-2021	III-25
Tabel 3.15	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Batam untuk Mendanai Pembangunan Daerah	III-27
Tabel 4.1	Permasalahan dan Faktor Penentu Keberhasilan Berdasarkan Bidang/ Urusan	IV-4
Tabel 4.2	Sasaran Pokok RPJMD Kota Batam 2016-2021 (ke-3)Berdasarkan RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025	IV-31
Tabel 4.3	Identifikasi Kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021	IV-38
Tabel 4.4	Jumlah Kamar Hotal dan Rata-rata Tingkat Hunian	IV-55
Tabel 4.5	Obyek Wisata Belanja Kota Batam	IV-55
Tabel 5.1	Tabel Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	V-1
Tabel 5.2	Hubungan Antara Misi RPJMD Kota Batam 2016-2021 dengan Misi dan Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019	V-22
Tabel 6.1	Analisis SWOT Kota Batam	VI-6
Tabel 6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Batam	VI-8
Tabel 7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batam	VII-3
Tabel 8.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	VIII-4

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Makro Daerah..... IX-1
Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah..... IX-3

BAB I
PENDAHULUAN

Bab I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RPJMD Kota Batam disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas

Pada tahun 2016, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Batam bertujuan untuk menetapkan Walikota dan Wakil Walikota Batam periode 2016-2021. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Batam perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2016-2021.

Dalam pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala

daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Perda dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, RPJMD Kota Batam disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dimaksudkan dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, mengarah pada percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD meliputi: tahap perumusan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD; pelaksanaan Musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100).

1.3 Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

1.3.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJMD

Maksud dari penyusunan RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam perencanaan lima tahun, guna memberikan arah dalam melaksanakan

pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat umum.

Adapun tujuan penyusunan Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus menjelaskan strategi dan arah untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah;
b. Memberikan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagai acuan resmi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Renstra PD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan PD, dan RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah tahunan;
c. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
d. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

1.4 Proses Penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021

Proses penyusunan RPJMD melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJMD meliputi:

- Penyusunan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- Orientasi mengenai RPJMD;
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD meliputi:
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Analisis gambaran umum Kota Batam;
   - Analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan;
   - Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
   - Perumusan isu strategis dan analisa SWOT.
   - Perumusan penjelasan visi misi, tujuan dan sasaran.
   - Perumusan strategi dan arah kebijakan selama lima tahun.
   - Perumusan rencana indikasi program prioritas yang disertai pendanaan.
   - Penetapan indikator kinerja daerah.
   - Pelaksanaan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
   - Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran yang diwujudkan dengan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Program Prioritas.
3. Penyusunan rancangan RPJMD meliputi:
   - Penyusunan surat edaran Walikota tentang penyusunan rancangan Renstra PD.

- Verifikasi rancangan Renstra PD.
- Rancangan Renstra PD digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD.
- Pelaksanaan Musrenbang RPJMD; Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

4. Perumusan rancangan akhir RPJMD meliputi :
   - Penyusunan rancangan akhir RPJMD dengan memperhatikan hasil Musrenbang RPJMD
   - Penyempurnaan rancangan Akhir RPJMD sesuai hasil konsultasi.
5. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD melalui :
   - Penyusunan Ranperda
   - Pembahasan pansus DPRD Kota Batam
   - Konsultasi rancangan akhir RPJMD ke Provinsi Kepulauan Riau
   - Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

1.5 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang terdiri dari unsur-unsur perencanaan keuangan dan perencanaan pembangunan lain yang berkaitan dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021. Adapun gambaran hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan pada Gambar 1.1 di bawah ini.

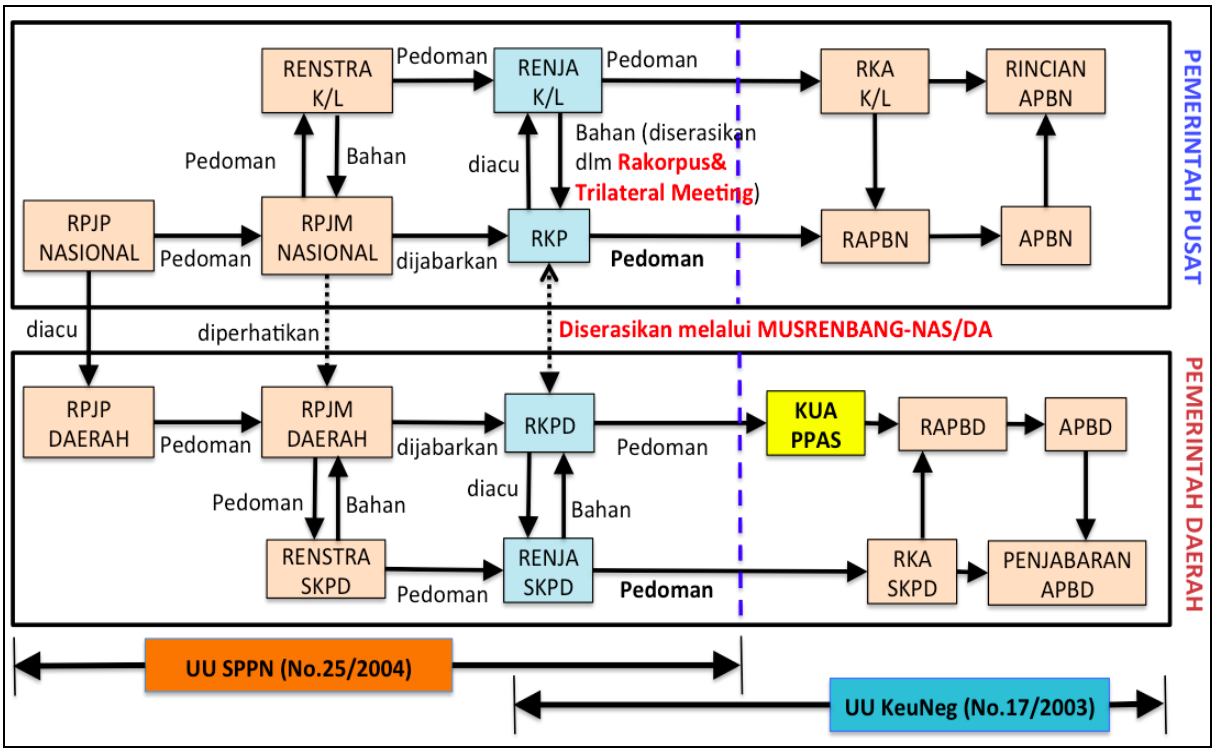

Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional, karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021

yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

1.5.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan RPJMD Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2005-2025.

1.5.3. Hubungan RPJMD dan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai Perpes Nomor 87 Tahun 2011 dan Ranperda RTRW Kota Batam sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Batam.

1.5.4. Hubungan RPJMD dengan Renstra PD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam.

1.5.5. Hubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota. Selanjutnya PD dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) PD.

1.5.6. Hubungan RPJMD Kota Batam dengan RPJMD Kota/Kabupaten Tetangga

Kedekatan letak geografis Kota Batam terhadap beberapa kota/kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga meskipun dibatasi oleh perairan namun masih dapat memberikan dampak satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sistematika laporan terdiri dari:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab IV. Analisis Isu-isu Strategis

Bab V. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Kabupaten Bintan:

Dengan mengusung visi Kabupaten Bintan 2016-2021 '*Terwujudnya Kabupaten Bintan yang Madani dan Sejahtera Melalui Pencapaian Bintan Gemilang 2025 (Gerakan Melangkah Maju di Bidang Kelautan, Pariwisata, dan Kebudayaan)*", Bintan memiliki beberapa isu utama dalam menuju "Bintan Gemilang 2025" yang dapat memberikan dampak dan potensi kerjasama dengan Kota Batam, adapun 3 (tiga) bidang dimaksud yaitu: kelautan, pariwisata dan kebudayaan. Hal ini dapat menjadi peluang bagi pengembangan dunia kepariwisataan kota Batam dengan menjalin kerjasama aktif dan saling mendukung antara kedua kota/kabupaten, dan selama ini sudah diinisiasi namun perlu dioptimalkan lagi kedepannya. Pelaksanaan kegiatan bersama dalam mendongkrak jumlah kunjungan pariwisata yang telah berjalan selama ini cukup berhasil dan diharapkan akan lebih banyak lagi kerjasama sinergi destinasi wisata seperti Lagoi-industri Lobam dan lainnya.

Kabupaten Karimun:

Kabupaten Karimun yang berjarak sekitar hampir 2 jam perjalanan laut dari Kota Batam mencanangkan Visi dalam RPJMD 2016-2021 yakni *"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"* dan dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi pembangunan. Terdapat 3 (tiga) misi yang sangat berkaitan erat dengan misi yang diusung juga oleh Kota Batam yakni: pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah

serta meningkatkan ketahanan pangan, meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal. Kesamaan fokus sektor pengembangan tersebut membuka peluang bagi kerjasama yang saling menguntungkan antara Kota Batam dengan Kabupaten Karimun bagi percepatan pembangunan menuju pencapaian visi misi kedua kepala daerah.

Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga yang berada di sebelah selatan Kota Batam, mempunyai luas wilayah daratan dan lautan mencapai 211,772 km^2 dengan luas daratan 2.117,72 km^2 (1 %) dan lautan 209,654 km^2 (99%) (*RPJMD Kab Lingga 2016-2021)*.Dengan mencanangkan Visi "*Menjadikan Lingga Sebagai Pusat Sumber Daya Kelautan Menuju Masyarakat Maju, Sejahtera, Agama Dan Berbudaya*", membuka peluang dan kesempatan untuk menjalin kerjasama aktif dengan Batam. Pada penjabaran Visi di Misi 5 yaitu: *Meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dari jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif serta transportasi*, ini sejalan sektor ekonomi yang dominan di Kota Batam yaitu jasa dan pariwisata. Hubungan kerjasama pembangunan dari sisi birokrasi memang belum optimal selama ini, lebih kepada hubungan ekonomi antar pihak swasta yang bergerak sendiri. Namun dengan pencanangan Visi-Misi 2016-2021 Kota Batam dan Kabupaten Lingga, menjadi potensi dan peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya

kerjasama yang saling menguntungkan antar keduanya baik dari sisi pemerintahan maupun peningkatan kerjasama dari sisi swasta.

1.6 Sistematika Laporan

Bab I. **Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan sistematika laporan.

Bab II. **Gambaran Umum Kondisi Daerah**, berisi tentang gambaran kondisi daerah dilihat dari Aspek Geografis dan Administratif, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dan Aspek Daya Saing.

Bab III. **Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan**, berisi tentang penjabaran mengenai kinerja keuangan masa lalu, neraca daerah, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan, analisis permasalahan, isu strategis daerah, kebijakan prioritas pembangunan, Program Prioritas serta indikator kinerja RPJMD per urusan.

Bab IV. **Analisis Isu—isu Strategis**, berisi tentang analisis permasalahan pembangunan daerah, arahan RPJPD Kota Batam pada RPJMD tahun ke-3; Arahan Pengembangan Wilayah Sesuai RTRW Kota Batam; Arahan RPJMN Tahun 2015-2019; dan sasaran pokok pembangunan daerah tahun 2016-2021, serta rumusan isu strategis pembangunan Kota Batam 2016 – 2021.

Bab V. **Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**, berisi tentang Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam 2016 – 2021.

Bab VI. Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan serta arah kebijakan dari tiap strategi.

Bab VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, berisi tentang hubungan antara kebijakan umum pembangunan berupa strategi dan arah kebijakan dengan target pencapaian pembangunan berupa indikator kinerja pembangunan, serta program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target kinerja pembangunan.

Bab VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, berisi tentang hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait disertai program yang menjadi tanggung jawab PD. Selain itu disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah, berisi tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

Bab X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, berisi pedoman menyelesaikan masalah-masalah pembangunan beserta kaidah pelaksanaannya.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. SEJARAH SINGKAT KOTA BATAM

Pada tahun 1969 Pemerintah Indonesia mengembangkan Wilayah Batam sebagai pangkalan logistik dan operasional yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai PN Pertamina. Seiring dengan perkembangan Wilayah tersebut, Pemerintah Indonesia membentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) guna pemantapan pengembangan fungsi Pulau Batam menjadi daerah industri dan perdagangan, alih kapal, penumpukan dan basis logistik serta pariwisata.

Pemerintah Indonesia membentuk Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OBDIPB) guna pemantapan pengembangan fungsi Pulau Batam menjadi daerah industri dan perdagangan, alih kapal, penumpukan dan basis logistik serta pariwisata

Pada periode pertama (1969-1975) Otorita Batam diketuai oleh Dr. Ibnu Sutowo. Periode ini merupakan periode persiapan dan permulaan pengembangan yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai. Kemudian periode kedua (1975-1978) terjadi pergantian Ketua Otorita Batam menjadi Prof. Dr. JB Soemarlin, pada periode ini dititikberatkan

untuk konsolidasi dan pemeliharaan prasarana-prasarana dan aset-aset yang telah terbangun. Beranjak pada periode ketiga (1978-1983) Otorita Batam diketuai oleh Prof. Dr. Ing. BJ. Habibie yang menitikberatkan pada pemantapan rencana dan lanjutan pembangunan prasarana utama, termasuk penanaman modal dan industrialisasi. Sejak periode ketiga tersebut, daerah industri Pulau Batam mulai dipasarkan dan secara nyata sudah menunjukkan hasil serta perkembangannya.

Sejalan dengan perkembangan Wilayah Batam, dibentuklah Kotamadya Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983

Sejalan dengan perkembangan Wilayah Batam, dibentuklah Kotamadya Batam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983. Secara administratif Pemerintah Kotamadya Batam dipimpin oleh seorang Walikotamadya yang berkedudukan setingkat dengan

pemimpin kabupaten/ kotamadya daerah tingkat II lainnya dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Tingkat I Riau.

Pembentukan Kotamadya Batam merupakan implementasi dari asas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Tujuan dibentuknya Kotamadya Batam adalah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan wilayah tersebut, sebagai akibat dari pengembangan Pulau Batam menjadi kawasan Industri, Perdagangan, Alih kapal dan Pariwisata. Konsekuensi logis dari hal ini adalah meningkatnya status Kecamatan Batam yang semula masuk dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau menjadi wilayah tersendiri dalam bentuk Pemerintahan Kotamadya Administratif Batam yang terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan.

Adapun tata cara penyelenggaraan pemerintahan dijabarkan dalam KEPRES No.7 Tahun 1984 yang mengatur hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. Dalam KEPRES tersebut diatur koordinasi sebagai berikut; Pasal 2 menyebutkan "*Walikotamadya Batam, sebagai Kepala Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti memimpin pemerintahan membina kehidupan masyarakat Kotamadya Batam di semua bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan pembangunan daerah industri Pulau Batam*". Pasal 3 huruf F menyebutkan "*Walikotamadya Batam bersama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya, guna mewujudkan sinkronisasi program diantara mereka dan sejauh mana mengenai pelaksanaan pembangunan, sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka pengembangan Daerah Industri Pulau Batam*".

Kota Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Seiring dengan peristiwa reformasi yang mencetuskan semangat otonomi daerah, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menetapkan perubahan Kotamadya Administratif Batam menjadi Daerah Otonom Kota Batam yang membawahi 8 kecamatan dan 35 kelurahan serta 16 desa. Kemudian dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, maka wilayah administrasi Kota Batam membawahi 8 kecamatan dan 51 kelurahan. Pada bulan Juni tahun 2006 Pemerintah Kota Batam memberlakukan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam, sehingga jumlah kecamatan di Kota Batam yang semula 8 Kecamatan berubah menjadi 12 kecamatan dan jumlah kelurahan dari 51 menjadi 64 kelurahan.

Selanjutnya pada tahun 2007 Kota Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*) berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan

Bebas Batam. Pada PP tersebut disebutkan bahwa Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) dengan beberapa perubahan yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

2.2. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.2.1. Karakteristik Wilayah

2.2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Wilayah Kota Batam adalah 426.447,06 Ha, yang terdiri dari 108.778,09 Ha wilayah darat dan 317.668,97 Ha wilayah perairan/laut. Kota Batam meliputi lebih dari 370 pulau dan beberapa diantaranya berstatus sebagai pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Kota Batam memiliki 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Galang (220.932,18 Ha) dan yang paling sempit adalah Kecamatan Bengkong (1.942,49 Ha). Kecamatan dengan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Galang (8 kelurahan), sedangkan Kecamatan dengan kelurahan paling sedikit (4 kelurahan) meliputi Kecamatan Sei Beduk, Nongsa, Batu Ampar, Batu Aji dan Bengkong. Lebih lanjut pembagian wilayah administrasi Kota Batam

disajikan dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Batam

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)		
			Darat	Laut	Total
1.	Belakang Padang	6	7.004,62	68.790	75.794,29
2.	Bulang	6	15.911,73	30.101	46.013,20
3.	Galang	8	35.783,60	185.149	220.932,18
4.	Sungai Beduk	4	10.611,66	1.496	12.107,66
5.	Nongsa	4	11.806,92	20.718	32.525,31
6.	Sekupang	7	7.584,09	3.138	10.721,69
7.	Lubuk Baja	5	1.714,22	2.245	3.959,56
8.	Batu Ampar	4	1.425,05	3.119	4.543,79
9.	Batam Kota	6	4.455,79	229	4.684,74
10.	Sagulung	6	6.341,80	643	6.985,06
11.	Batu Aji	4	4.568,43	1.669	6.237,09
12.	Bengkong	4	1.570,18	372	1.942,49
Jumlah		**64**	**108.778,09**	**317.668,97**	**426.447.06**

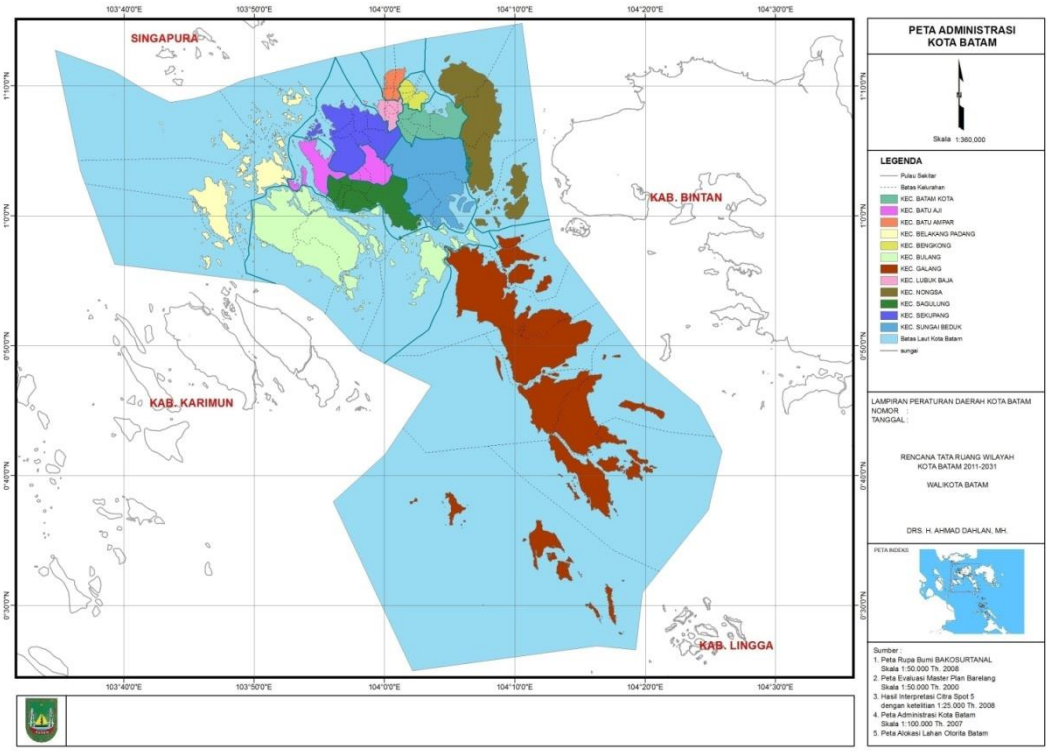

Gambar 2.1. Peta Pola Ruang Ranperda RTRW Kota Batam 2011 – 2031 SK.76/MenLHK-II/2015

2.2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

A. Posisi Astronomis

Secara geografis wilayah Kota Batam terletak antara 0°25’29”-1°15'00” Lintang Utara dan 103°34'35”-104°26'04” Bujur timur. Di sebelah utara wilayah Kota Batam berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan Laut Internasional, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bintan serta Kota Tanjung Pinang. Letak Kota Batam yang berdekatan dengan negara-negara tetangga dan laut internasional menjadikan posisi Kota Batam sangat strategis. Waktu tempuh dari Kota Batam menuju Singapura dengan menggunakan transportasi laut hanya 40 menit dengan jarak sekitar 25 Km. Sedangkan waktu tempuh dari Kota Batam ke Pelabuhan Johor Malaysia melalui transportasi laut hanya 1 jam 45 menit dengan jarak sekitar 50 Km. Kondisi tersebut menjadi keunggulan kompetitif bagi Kota Batam.

B. Posisi Geostrategik

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa letak Kota Batam berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, Wilayah Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk merelokasikan aktivitas ekonomi mereka ke Batam,

mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa. Hal ini dikarenakan ketersediaan lahan dan tenaga kerja yang cukup serta adanya kemudahan investasi yang diberikan.

Lebih jauh lagi, bentuk Wilayah Batam yang terdiri atas gugusan kepulauan sangat berpotensi untuk membangun industri maritim. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 bahwa pengembangan sektor kemaritiman dilaksanakan melalui pendekatan kewilayahan terpadu. Pendekatan ini memandang wilayah laut Indonesia atas dua fungsi: (i) sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antarwilayah, dan (ii) sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah. Dari laut, tersedia beragam potensi untuk membangun industri maritim yang sangat beragam, misalnya untuk bidang pangan, kosmetik, farmasi, energi, transportasi, turisme, riset ilmiah dan jasa. Kondisi ini menjadi magnet Kota Batam untuk menarik investasi dalam bidang-bidang tersebut. Dalam perspektif keamanan dan pertahanan Nasional, Batam sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan dengan negara tetangga, sekaligus sebagai pintu masuk kunjungan wisman terbesar setelah Jakarta dan Bali memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara. Konsekuensi logis dari hal tersebut, segala aspek yang berpotensi mengganggu keamanan dan pertahanan di Wilayah Batam menjadi prioritas di tingkat nasional. Hal ini semakin memantapkan Kota Batam sebagai kota yang kondusif, aman dan nyaman.

C. Kondisi Kawasan

Wilayah Kota Batam secara geografis berada di perairan laut dangkal, dengan wilayah pesisir seluas 108.778,09 Ha dan laut seluas 317.668,97 Ha dari luas total 426.447,06 Ha (*sumber: Ranperda RTRW Kota Batam Tahun 2011-2031*). Terdapat 370 buah pulau besar dan kecil (*sumber: hasil verifikasi BIG tahun 2012*). Pulau-pulau tersebut pada umumnya merupakan sisa-sisa erosi atau pencetusan dari daratan pratersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia di bagian utara sampai dengan Pulau Moro, Kundur, serta Karimun di bagian selatan. Adapun urutan beberapa pulau dari yang besar sampai terkecil antara lain di Kecamatan Bulan terdapat Pulau Buluh, di Kecamatan Galang terdapat Pulau Karas, Pulau Galang Baru, Pulau Rempang, Pulau Air Raja, Pulau Subang Mas dan Pulau Abang.

Sementara itu di Kecamatan Belakang Padang terdapat 55 pulau-pulau kecil yang masuk dalam wilayah kecamatan Belakang Padang: 1) Pulau Belakang Padang; 2) Pulau Sambu; 3) Pulau Dendang; 4) Pulau Lengkana; 5) Pulau Meriam; 6) Pulau Tolop; 7) Pulau Suwe; 8) Pulau Air Manis; 9) Pulau Jagung; 10) Pulau Sekilak; 11) Pulau Leroi; 12) Pulau Layang Besar; 13) Pulau Tapung; 14) Pulau Suba; 15) Pulau Nirup; 16) Pulau Mercan Besar; 17) Pulau Sarang; 18) Pulau Semakau; 19) Pulau Serapat; 20) Pulau Negeri; 21) Pulau Penyalang; 22) Pulau Bertam; 23) Pulau Lingke; 24) Pulau Padi; 25) Pulau Bakau; 26) Pulau Pemping; 27) Pulau Labum Besar; 28) Pulau Labum Kecil; 29) Pulau Kasu; 30) Pulau Batu Ampar; 31) Pulau Lumba; 32) Pulau Sei Cudung; 33) Pulau Pelangi;

34) Pulau Ketapah; 35) Pulau Katung; 36) Pulau Buntung; 37) Pulau Tandut; 38) Pulau Panjang; 39) Pulau Sali; 40) Pulau Kepala Jeri 41) Pulau Ladang; 42) Pulau Pecung; 43) Pulau Dandan; 44) Pulau Cumin; 45) Pulau Semukir; 46) Pulau Santo; 47) Pulau Bayan; 48) Pulau Paloi Kecil; 49) Pulau Paloi Besar; 50) Pulau Terong; 51) Pulau Teluk Bakau; 52) Pulau Telan; 53) Pulau Ketumbar; 54) Pulau Kepala Gading; dan 55) Pulau Geranting dan pulau-pulau kecil lainnya.

Karakteristik kepulauan di Kota Batam memiliki keunikan tersendiri, dengan hamparan pulau-pulau yang banyak dan bentangan pantai yang cukup panjang. Sehingga dalam perspektif ke depan, Kota Batam dapat mengembangkan sumberdaya kelautan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pesisir dan wilayah perairan laut.

2.2.1.3. Topografi dan Kemiringan Lereng

Wilayah Kota Batam memiliki kontur permukaan relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di tengah pulau dengan ketinggian antara 7 meter hingga 160 meter di atas permukaan laut (m dpl). Wilayah yang memiliki ketinggian 0 sampai 7 m dpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang.

Wilayah yang memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau

kecil lainnya, sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah yang memiliki ketinggian sampai 100 m dpl dengan topografi berbukit-bukit, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan Galang serta Galang Baru. Wilayah tersebut sangat sesuai untuk kawasan resapan air dan cadangan air baku. Berdasarkan hasil interpretasi peta topografi skala 1:50.000, informasi kemiringan lereng di Kota Batam diklasifikasikan dalam Tabel 2.2.

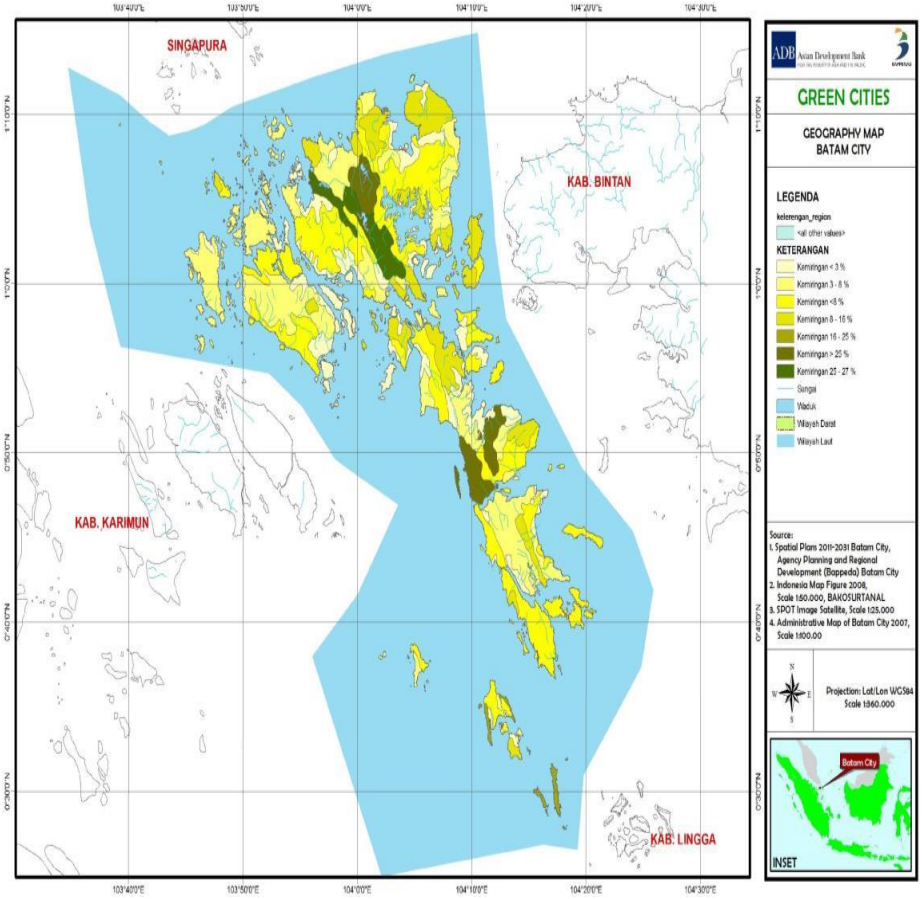

Gambar 2.2. Peta Topografi Kawasan Batam

Tabel 2.2. Luas Kawasan Batam pada Tiap Kelas Kemiringan Lereng

% Kemiringan	Luas Kemiringan lereng (Ha)
0 – 2 %	55.481,405
2 – 5 %	13.631,615
5 – 15 %	18.062,410
15 – 40 %	6.414,213
>40 %	980,721

Sumber : Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Batam Tahun 2011

- Kemiringan Lereng 0-2%, merupakan kelas kemiringan yang mendominasi sebagian besar kawasan sebesar 60,60% dari luas total wilayah. Kemiringan lereng ini ditandai dengan morfologi wilayah yang datar sehingga cocok dikembangkan untuk semua jenis kegiatan. Adapun sebarannya terutama di kawasan pesisir.
- Kemiringan Lereng 2-5%, merupakan kelas kemiringan dari landai sampai dengan berombak yang tersebar di seluruh kawasan secara terpencar-terpencar dalam bentuk kawasan-kawasan kecil. Kawasan dengan kelas kemiringan lereng ini relatif dapat dikembangkan untuk semua jenis kegiatan.
- Kemiringan Lereng 5-15%, merupakan kelas kemiringan yang ditunjukkan dengan morfologi agak miring atau bergelombang. Kawasan dengan kelas kemiringan ini masih dapat dikembangkan untuk semua jenis kegiatan, namun masih harus dilakukan dengan rekayasa konstruksi. Kawasan dengan kelas kemiringan ini terdapat di Pulau Batam dan Pulau Rempang.
- Kemiringan Lereng 15-40%, merupakan kelas kemiringan dengan

morfologi berbukit sampai dengan agak curam. Kawasan dengan kelas kemiringan ini dapat digunakan untuk kegiatan konstruksi terbatas dengan berbagai persyaratan teknis, antara lain seperti KDB yang rendah dan KDH yang tinggi, itupun hanya pada morfologi berbukit. Kawasan dengan kelas kemiringan ini tersebar di daerah perbukitan Sekupang dan Pulau Rempang.

- Kemiringan Lereng > 40%, merupakan kelas kemiringan dengan morfologi sangat curam yang hanya dapat digunakan untuk kawasan konservasi (hutan lindung). Kawasan dengan kelas kemiringan ini terdapat di tengah pulau Batam.

2.2.1.4. Geologi

Wilayah Kota Batam seperti daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan daratan protersier yang membentang dari Semenanjung Malaysia/Singapura di bagian utara sampai dengan Pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian selatan.

Wilayah Kota Batam merupakan bagian dari daerah Paparan Sunda yang secara stratigrafi merupakan daerah yang berpotensi endapan plases bawah laut. Berdasarkan interpretasi rekaman *seismic*, dinyatakan bahwa struktur bentang geologi yang terdapat di dasar laut perairan Kepulauan Riau merupakan patahan dengan pola Barat Laut-Tenggara di bagian Barat perairan dan pola Barat-Timur di bagian Timur perairan hingga semuanya berkembang mengikuti tingkat kesuburan perairan yang tinggi, sehingga menjadikan perairan Kota Batam sebagai

wilayah yang memiliki potensi sumberdaya perikanan besar (baik jumlah maupun keragaman). Di samping itu, perairan Kota Batam juga kaya akan kelimpahan tutupan atau spesies terumbu karang (*coral reef*) dan berbagai jenis ikan karang (*demersal*) maupun ikan hias (*ornamental fish*).

Pembentukan struktur geologi di Pulau Batam terdiri dari kelurusan-kelurusan berarah timur laut- barat daya yang oleh Katili (1977) dimasukkan ke dalam Lajut Karimata yang berada di sebelah timur lajur timur. Selain itu terbentuk sesar normal (Kusnama, dkk., 1994). Seperti pulau-pulau kecil yang berada di garis khatulistiwa, kepulauan Kota Batam dan sekitar mempunyai kekhasan/ karakteristik hidrogeologi dengan air permukaan melimpah dan air tanah dangkal. Adapun informasi mengenai luas dan persentase jenis geologi di Kawasan Batam disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Luas dan Persentase Jenis Geologi di Kawasan Batam

No.	Jenis Geologi	Luas (Ha)	Persentase
1.	Aluvium	87.406	0,09
2.	Andesit	0	0
3.	Endapan Permukaan	0	0
4.	Endapan Permukaan Tua	0	0
5.	Formasi Duriangkang	536.36	0,55
6.	Formasi Goungon	387.80	39,48
7.	Formasi Pulau Panjang	555.42	0,57
8.	Formasi Tanjung Kerontang	161.95	16,49
9.	Granit	944.93	9,62
10.	Lainnya	326.33	33,22

Sumber : Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup Kota Batam 2011

Oleh karena merupakan gugusan kepulauan yang secara geografis keberadaannya di perairan laut dangkal, maka wilayah Kota Batam yang sangat potensial untuk tumbuh kembang terumbu karang. Namun karena aktivitas antropogenik yang intensif, menjadikan kehidupan terumbu karang di wilayah Indonesia Barat hanya 5% luasan yang baik. Dalam perspektif ke depan, kiranya perlu dilakukan upaya pelestarian terhadap sumber daya alam bawah laut di wilayah Batam.

2.2.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kota Batam dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air bawah tanah/air tanah dan air permukaan. Untuk jenis air tanah tersebar di 2 wilayah, yaitu:

1. Perbukitan lipatan yang terdapat hampir di sebagian wilayah.

   Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu lempung, fillit, dan kuarsit yang bersifat padu. Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau secah, serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal.

2. Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku.

   Jenis air tanah ini terdapat di bagian timur Pulau Batam yang tersusun oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulan Lintang, Pulau Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Mekawa, Pulau Dendang, dan Pulau Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.

Sedangkan untuk jenis air permukaan di Kota Batam terdapat pada Waduk Sei Baloi, Waduk Sei Ladi, Waduk Sei Harapan, Waduk Nongsa, Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, Waduk Sungai Rempang, Waduk Sekanak I, Waduk Sekanak II, Waduk Pulau Pemping, Waduk Pulau Bulan Lintang, Waduk Pulau Bulan, serta air permukaan lainnya yang bersumber dari Daerah Aliran Sungai (DAS)/waduk/mata air Bengkong Mahkota, Bengkong Laut, Jodoh, Sagulung, Batu Aji, Sei Panas, Tiban dan Pulau Galang. Masing-masing waduk dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sehingga waduk tersebut berfungsi sebagai penampung air baku untuk penyediaan air bersih di Kota Batam. Adapun informasi mengenai DAS beserta luasannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kota Batam

No.	Nama DAS	Luas (Ha)
1.	DAS Abang Besar	2.920,34
2.	DAS Balo	3.270,92
3.	DAS Bukit Jodoh	4.700,14
4.	DAS Gading	10.800,46
5.	DAS Galang	8.828,91
6.	DAS Galang Baru	3.502,98
7.	DAS Gata	6.577,15
8.	DAS Kangka	4.810,91
9.	DAS Ladi	4.840,67
10.	DAS Nongsa	6.751,71
11.	DAS Penatu	7.190,77
12.	DAS Pesung	4.941,22
13.	DAS Sembulang	4.175,20
14.	DAS Seraya Cundung	1.523,63
15.	DAS Terong	2.636,03
16.	DAS Tiban Lama	7.165,71

Sumber: Peta Ranperda RTRW Kota Batam 2011-2031

2.2.1.6. Klimatologi

Kota Batam beriklim tropis dengan suhu minimum tahun 2015 berkisar antara 22°C hingga 25°C dan suhu maksimum antara 32°C hingga 34°C. Suhu rata-rata minimum sepanjang tahun 2015 adalah 22°C dan suhu rata-rata maksimum adalah 34°C . Tekanan udara minimum per bulan berkisar antara 1.005 sampai 1.009 mb (milibar) dan tekanan maksimun per bulan berkisar antara 1.015 sampai dengan 1.017 mb. Rata-rata tekanan udara minimum pada tahun 2015 sebesar 1.005 mb dan rata-rata tekanan maksimum sebesar 1017 mb. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 77 persen hingga 84 persen. Kecepatan angin maksimum berkisar antara 16 sampai 29 knot dengan rata-rata kecepatan maksimum 29 knot sedangkan rata-rata kecepatan minimum sebesar 6 knot. Banyaknya hari hujan di Kota Batam pada tahun 2015 adalah 112 hari dengan curah hujan sebanyak 1.344,5 mm. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun 2014 banyaknya hari hujan berkurang sebanyak 59 hari atau 52,68 persen sedangkan curah hujan berkurang sebanyak 681,40 mm atau 50,68 persen. Adapun banyaknya hari hujan pada tahun 2014 adalah 171 hari dengan curah hujan sebanyak 2.025,9 mm. Sehingga mengakibatkan persediaan air baku pada waduk-waduk yang ada di Kota Batam debitnya menurun drastis dan distribusi pasokan air bersih ke rumah tangga sangat mengkhawatirkan. PT. ATB selaku perusahaan pengelola air bersih di Kota Batam harus melakukan penjatahan *(rationing)* air bersih kepada pelanggan.

2.2.1.7. Penggunaan Lahan

Rencana penggunaan lahan di Kota Batam dilihat dari rencana pola ruang Kota Batam, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Penggunaan Lahan Berdasarkan Pola Ruang Kota Batam

Peruntukan	Luas (Ha)
Fasilitas Pelabuhan	2.622
Fasilitas Umum	834
Industri	10.103
Jasa	3.745
Perikanan	37
Pertahanan	334
Pertanian/ Peternakan	10.822
Perumahan	15.731
Pusat Pemerintahan	60
RTH	9.665
Waduk/ Tubuh Air	3.229
Wisata	7.709
Total	**64.891**

Kawasan Hutan	Luas (Ha)
Hutan Produksi yang dapat dikonversi	3.799
Hutan Produksi Terbatas	4.515
Hutan Bakau	331
Hutan Lindung	20.152
Hutan Produksi	3.341
Kawasan Lindung	1.186
Kawasan Suaka Alam	8.070
Kawasan Suaka Alam/ Taman Buru	2.493
Total	**43.887**
Peruntukan + Kawasan Hutan	**108.778**

Sumber: Peta Pola Ruang Ranperda RTRW Kota Batam 2011 – 2031

2.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2011-2031 yang telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum, dalam kurun waktu perencanaan tersebut pengembangan wilayah, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.2.1 Struktur Ruang Wilayah

1. Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan di Kota Batam sebagai komponen pembentuk struktur ruang wilayah kota dikembangkan dengan Sistem Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat Lingkungan, yang melayani tidak hanya internal Kota Batam dan kawasan perbatasan, namun juga lingkup regional, nasional, dan internasional. Sesuai arahan RTRWN dan penetapan Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional di bidang ekonomi dan tujuan investasi sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) yang direncanakan akan bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
2. Sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kota Batam yang dilandaskan pada layanan langsung kebutuhan masyarakat dan layanan pendukung pengembangan kegiatan-kegiatan usaha produktif, berdasarkan hirarki dan skala pelayanannya dibedakan atas:
    - Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 1 (satu) untuk pelayanan lokal seluruh kota, regional, nasional,

dan internasional;

- Sub Pusat Kota, yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 2 (dua) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kecamatan; dan
- Pusat Lingkungan (*Neighbourhood Services Center*), yang merupakan pusat pelayanan hirarki ke 3 (tiga) untuk pelayanan lokal setingkat wilayah kelurahan atau setingkat satuan lingkungan permukiman (*neighbourhood unit*).

3. Dalam jangka waktu tahun 2011–2031, Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota di Pulau Batam termasuk pengembangannya di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata.
4. Pada Pusat Kota dialokasikan kegiatan-kegiatan pelayanan perkotaan untuk mendukung pengembangan fungsi-fungsi utama wilayah Kota Batam (pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, alih muat angkutan laut, pariwisata, dan lain-lain) serta kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu yang dibutuhkan oleh Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang nantinya akan bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus yang didukung dengan infrastruktur yang memadai.

5. Untuk memperkuat orientasi dan pergerakan eksternal Kota Batam di era persaingan global, struktur ruang wilayah kota dimantapkan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengembangan simpul-simpul (*outlet*) transportasi berupa bandara, pelabuhan laut, dan pelabuhan penyeberangan untuk menciptakan akses regional, nasional, dan internasional yang lebih berdayaguna, berhasilguna, dan berdaya saing.
6. Arahan RTRWN untuk pengembangan Pelabuhan Internasional Batam sesuai kondisi realistik setempat diterjemahkan sebagai sebuah sistem pelabuhan bebas berskala pelayanan nasional dan internasional dengan dermaga *outlet* di Pelabuhan Batu Ampar dan Pelabuhan Kabil, yang telah ditetapkan untuk ditingkatkan hirarkinya menjadi "pelabuhan internasional hub" (*hub international port*).
7. Dalam jangka menengah arus pergerakan penumpang dan barang nasional serta internasional masih akan dilayani oleh pelabuhan nasional dan internasional yang ada di Pulau Batam, namun untuk selanjutnya akan dikembangkan pelabuhan baru pada lokasi yang strategis.
8. Untuk menciptakan aksesibilitas yang tinggi antar Pusat Kota dan dengan Sub Pusat Kota, dan ke/dari simpul-simpul (*outlet*) utama transportasi (Kawasan Primer), serta ke/dari kawasan-kawasan sekunder (Kawasan Industri, Kawasan Pusat Pemerintahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan lain-lain) dikembangkan jalan tol, jalan lintas atas (*flyover*), simpang

susun (*interchange*), jalan lintas bawah (*underpass*), dan jaringan transportasi massal (MRT/LRT/BRT) yang dapat berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah/air.

9. Untuk menunjang berbagai kegiatan penghidupan dan kehidupan kota, selain sistem jaringan transportasi juga ditingkatkan pengembangan sistem jaringan prasarana dan sarana yang lain yaitu : jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan penyehatan lingkungan permukiman.

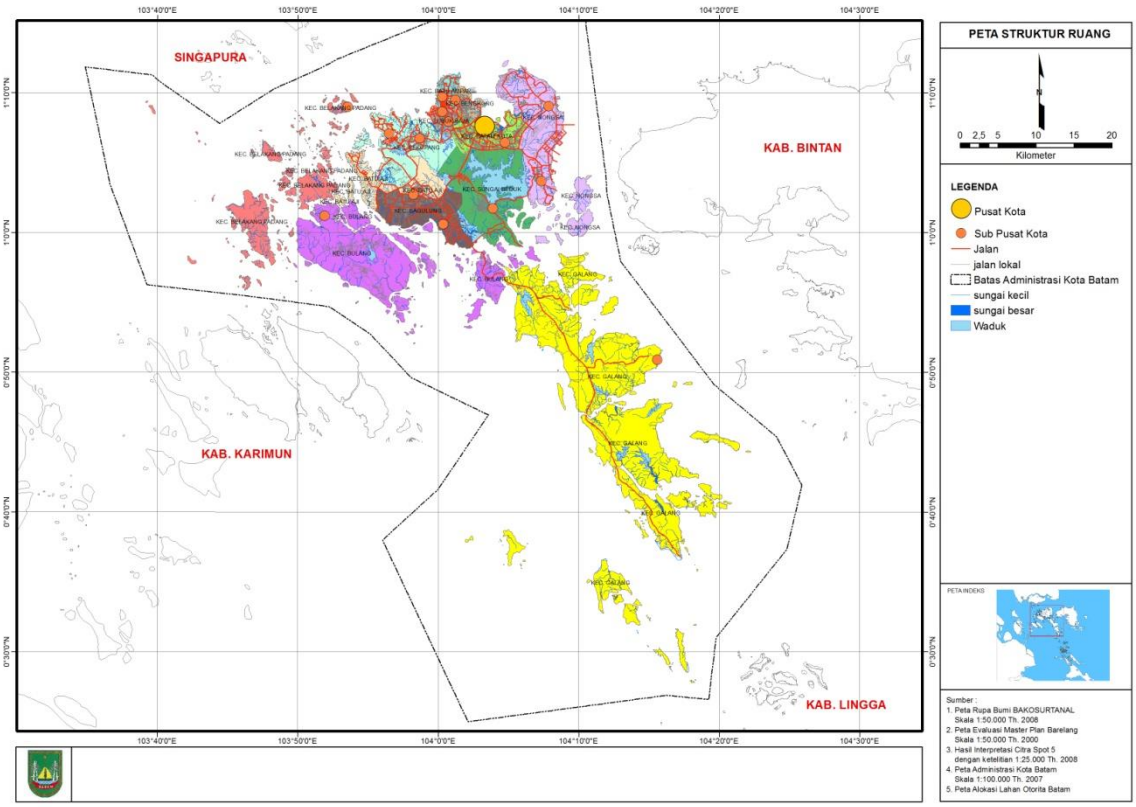

Gambar 2.3. Peta Struktur Ruang

2.2.2.2 Pola Ruang Wilayah

1. Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup di wilayah darat dan laut;

2. Mengembangkan ragam Ruang Terbuka Hijau Kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota, taman lingkungan, bumi perkemahan, dll) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30 % dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
3. Mengembangkan kawasan-kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumber daya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan;
4. Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan pembangunan antara wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang nantinya akan bertransformasi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dengan pulau-pulau sekitar yang dapat dikembangkan juga sebagai Kawasan Strategis, Kawasan Cepat Tumbuh, dan Kawasan-kawasan Prioritas atau melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
5. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan

pengembang kepada Pemerintah Kota untuk peningkatan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota;

6. Mengintensifkan pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di Pulau Batam, Pulau Rempang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal;
7. Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di Pulau Batam, dan melakukan substitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut; dan
8. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.

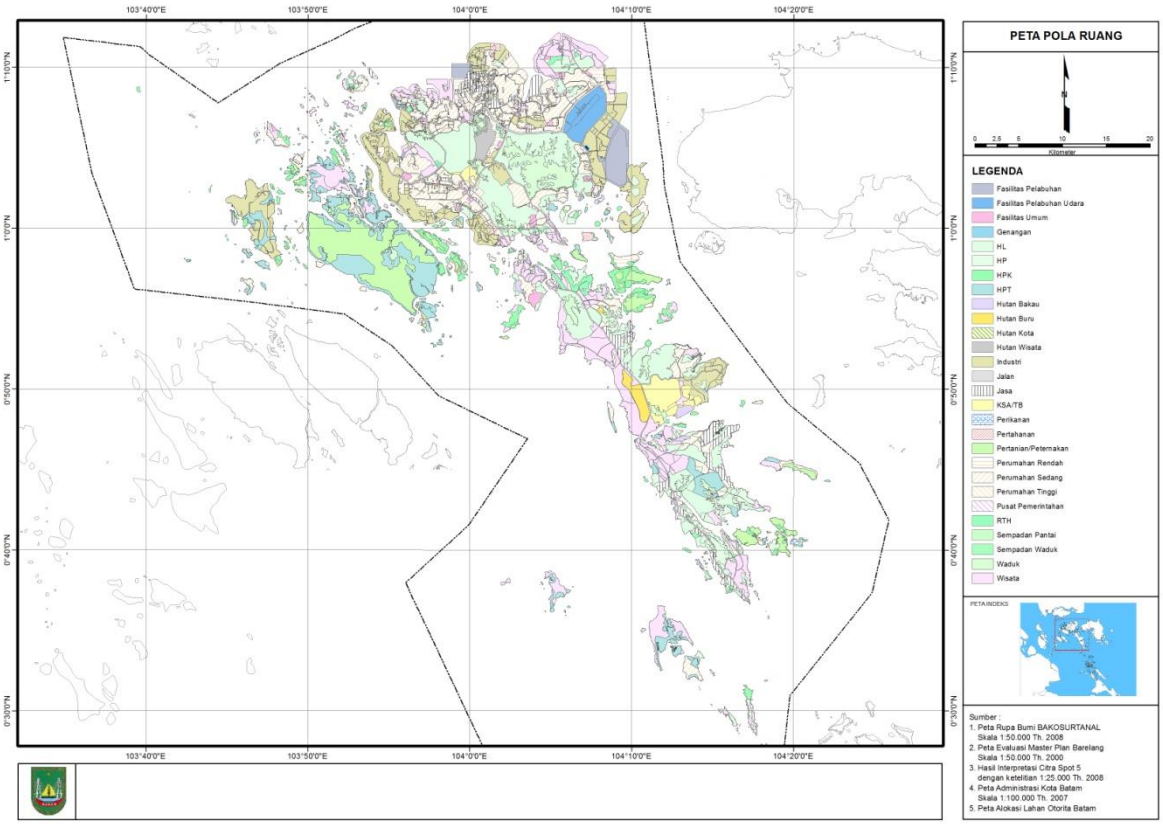

Gambar 2.4. Peta Pola Ruang Kota Batam

2.2.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana Kota Batam terdiri dari:

- *Kawasan Rawan Banjir*, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;
- *Kawasan Rawan Longsor*, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan

struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan;

- *Kawasan Rawan Abrasi*, yaitu kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan
- *Kawasan Rawan Gerakan Tanah,* yaitu kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter di kiri-kanan garis sesar.
- *Kawasan Rawan Gelombang Pasang,* yaitu kawasan yang berada pesisir pantai yang terutama yang menghadap langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan pada musim-musim tertentu rawan gelombang pasang.

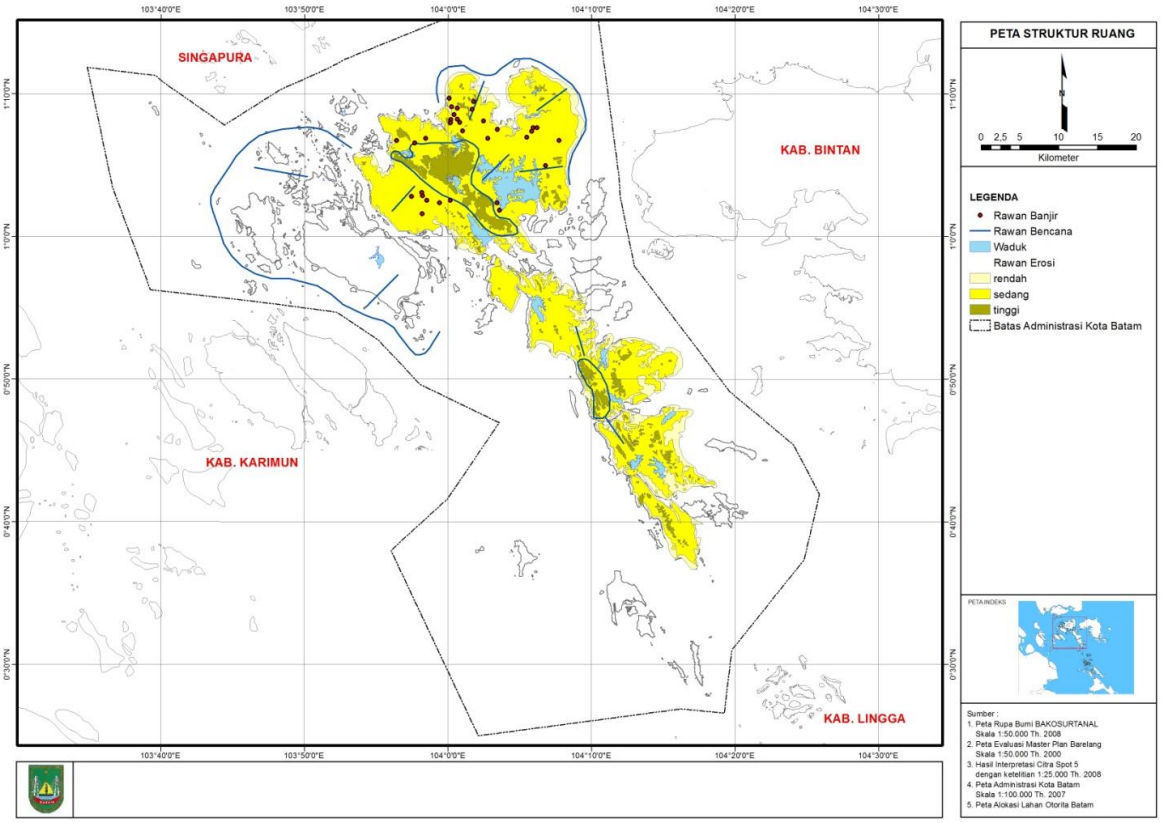

Gambar 2.5. Peta Rawan Bencana

pada tahun 2014 pertumbuhan penduduk Batam mengalami penurunan 9,24% dan mengalami peningkatan di tahun 2015

2.2.4. Demografi

Dalam perencanaan pembangunan, kondisi, dan perkembangan demografi berperan sangat penting. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, distribusi serta kompetensi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi demografi

sebesar 0,65%

memiliki kedudukan strategis dalam perumusan kebijakan.

Penduduk Kota Batam bersifat heterogen terdiri dari berbagai suku yang ada di Indonesia, dengan penduduk aslinya adalah suku Melayu. Pada tahun 2010 pertumbuhan penduduk Kota Batam sebesar 6,89%, kemudian naik menjadi 7,68% di tahun 2011. Pada tahun 2012 masih mengalami kenaikan menjadi 8,59%, sementara itu pada tahun 2013 pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 8,11% dan kembali menurun di tahun 2014 sebesar 9,24% dan pada tahun 2015 pertumbuhan penduduk Kota Batam mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,65%.

Terjadinya penurunan penduduk sejak tahun 2013 tersebut dikarenakan telah diadakan pembersihan data ganda nasional oleh Tim Pengolah Data Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Secara teknis data ganda dan perekaman KTP-elektronik yang terekam ganda akan dibersihkan atau dihapus dari *database* kependudukan Kota Batam, sehingga mengakibatkan terjadi penurunan

jumlah penduduk.

Jika dilihat dari penyebaran penduduk pada tahun 2015, maka penduduk Kota Batam masih lebih dominan berada di wilayah Kecamatan *mainland* yaitu Kecamatan Sagulung dan Batam Kota sedangkan yang terendah berada pada wilayah Kecamatan *hinterland* yaitu Kecamatan Bulang dan Galang. Sedangkan jika dilihat dari komposisi penduduk Kota Batam pada tahun 2015,

maka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah 107, hal ini bermakna setiap 107 orang penduduk laki-laki terdapat 100 orang penduduk perempuan. Dengan perkataan lain, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Secara rinci penjelasan mengenai jumlah dan pertumbuhan penduduk, serta distribusinya dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kota Batam

No.	Kecamatan	Luas (Daratan)	Jumlah Penduduk (Jiwa)							Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk
		(Km2)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(%)	(Jiwa/Km2)
1	BELAKANG PADANG	69.12	24,527	23,953	24,469	25,184	24,137	21,608	21,836	2.10	313
2	BATU AMPAR	11.19	91,619	93,914	97,465	101,035	86,986	73,443	76,212	7.13	6,565
3	SEKUPANG	68.30	119,926	126,008	136,579	148,927	137,472	123,972	127,288	12.03	1,815
4	NONGSA	114.55	50,145	56,182	61,737	66,150	62,140	57,601	59,844	5.59	503
5	BULANG	158.75	11,921	11,905	12,223	12,687	11,299	11,484	11,625	1.11	72
6	LUBUK BAJA	11.43	97,565	102,823	109,438	114,093	105,114	94,249	93,868	9.15	8,249
7	SUNGAI BEDUK	106.45	109,046	115,468	123,189	126,697	107,928	88,858	89,648	8.62	835
8	GALANG	350.76	19,880	15,192	15,842	17,468	16,419	16,955	16,585	1.65	48
9	BENGKONG	13.21	98,214	110,740	120,639	127,744	115,912	104,398	105,301	10.13	7,901
10	BATAM KOTA	38.96	121,309	136,082	152,976	175,515	165,271	152,737	155,077	14.82	3,920
11	SAGULUNG	54.78	142,526	156,459	170,238	188,317	176,491	165,517	163,750	16.06	3,021
12	BATU AJI	41.34	101,942	107,975	113,099	131,834	126,243	119,706	116,153	11.62	2,896
	KOTA BATAM	*1,038.84*	*988,620*	*1,056,701*	*1,137,894*	*1,235,651*	*1,135,412*	*1,030,528*	*1,037,187*	*100*	*992*

Sumber : Profil Kota Batam

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 2.6., dapat diketahui bahwa terdapat 3 (tiga) kecamatan yang memiliki luas wilayah daratan yang relatif kecil dengan kepadatan penduduk tinggi, yakni Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Baja, dan Kecamatan Bengkong. Sedangkan terdapat 4 (empat) kecamatan yang memiliki luas wilayah daratan yang besar dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah, yakni Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang. Proporsi luas wilayah daratan dengan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah seyogyanya memiliki proporsi yang seimbang. Hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga langkah perluasan wilayah kecamatan dapat menjadi solusi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal.

Selanjutnya penduduk di Kota Batam dapat dianalisis berdasarkan struktur umurnya, sebagai informasi yang penting karena berkaitan dengan resiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok umur. Jika dilihat dari struktur usia penduduk, selama tahun 2011-2015 Kota Batam didominasi penduduk usia 30-34 tahun. Dengan demikian jumlah penduduk usia produktif di Kota Batam relatif sangat besar. Kemudian jumlah balita dalam tahun yang sama cenderung meningkat, artinya penduduk yang akan mengenyam pendidikan dasar dan menengah dalam 5-10 tahun mendatang akan meningkat. Secara rinci jumlah penduduk menurut kelompok umur disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kelompok Umur Tahun 2011-2015

Kelompok Umur	**Tahun**				
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
0-4	74.838	72.947	63.629	68.361	81.190
5-9	117.854	129.289	118.799	111.985	111.027
10-14	77.154	89.657	89.734	91.980	96.123
15-19	61.711	67.032	63.669	64.340	66.674
20-24	134.819	131.971	108.415	85.370	82.549
25-29	189.447	198.308	166.550	126.608	115.286
30-34	169.491	188.318	170.423	142.899	134.506
35-39	124.126	138.053	132.544	123.806	124.220
40-44	79.747	94.038	92.604	88.363	90.181
45-49	44.687	51.290	53.403	54.244	58.023
50-54	26.689	31.093	31.003	30.602	32.711
55-59	16.801	19.418	19.583	18.701	20.087
60-64	9.484	11.649	11.930	11.359	11.680
65-69	5.097	6.064	6.254	5.865	6.408
70-74	2.721	3.722	3.825	3.290	3.430
≥75	2.126	2.802	3.047	2.755	3.092

Kelompok Umur	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
Jumlah	1.137.894	1.235.651	1.135.412	1.030.528	1.037.187

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Penduduk Kota Batam jika dianalisis menurut agama sebagian besar atau rata-rata sebesar 71 persen beragama Islam, 18 persen beragama Kristen Protestan, sebanyak 7 persen beragama Budha dan 3 persen beragama Kristen Khatolik, sisanya beragama Hindu, Khonghucu dan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persentase penduduk menurut agama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. Persentase Penduduk Menurut Agama Tahun 2011-2015

Tahun		Penduduk Menurut Agama						
		Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha	Khonghucu	AK
2011	**Jumlah**	820.583	205.054	36.717	1.355	72.881	1.143	161
	%	72,11	18,02	3,23	0,12	6,40	0,10	0,01
2012	**Jumlah**	890.450	223.785	40.438	1.419	78.149	1.200	210
	%	72,06	18,11	3,27	0,11	6,32	0,10	0,02
2013	**Jumlah**	803.532	215.556	38.962	1.190	74.849	1.131	192
	%	70,77	18,98	3,43	0,10	6,59	0,10	0,02
2014	**Jumlah**	732.166	190.983	35.649	925	69.548	1.099	158
	%	71,05	18,53	3,46	0,09	6,75	0,11	0,02
2015	**Jumlah**	737.902	191.941	34.476	854	70.700	1.123	191
	%	71,14	18,51	3,32	0,08	6,82	0,11	0,02

Ket : AK : Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Penduduk Kota Batam jika dilihat menurut jenis kelamin rata-rata sejak

tahun 2011-2015 sebesar 52 persen adalah berjenis kelamin laki-laki dan sebesar 48 persen berjenis kelamin perempuan, secara rinci penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.9. Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2011-2015

Kec	Tahun									
	2011		2012		2013		2014		2015	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
BELAKANG PADANG	12.463	12.006	12.811	12.373	12.353	11.784	10.933	10.675	11.111	10.725
BATU AMPAR	52.017	45.448	53.832	47.203	46.575	40.411	38.580	34.863	40.522	35.690
SEKUPANG	71.277	65.302	77.610	71.317	71.962	65.510	64.019	59.953	65.881	61.407
NONGSA	33.086	28.651	35.415	30.735	33.403	28.737	30.372	27.229	31.686	28.158
BULANG	6.361	5.862	6.608	6.076	5.886	5.413	5.931	5.553	6.045	5.580
LUBUK BAJA	55.737	53.701	58.129	55.964	53.789	51.325	47.565	46.684	47.695	46.173
SUNGAI BEDUK	58.347	64.842	60.345	66.352	52.890	55.038	43.875	44.983	45.102	44.546
GALANG	8.325	7.517	9.208	8.260	8.785	7.634	9.053	7.902	8.857	7.728
BENGKONG	62.134	58.505	65.769	61.975	60.183	55.729	53.455	50.943	54.196	51.105
BATAM KOTA	78.955	74.021	90.147	85.368	85.302	79.969	77.753	74.984	78.753	76.324
SAGULUNG	91.038	79.200	100.276	88.041	94.216	82.275	86.612	78.905	85.580	78.170
BATU AJI	58.816	54.283	68.254	63.580	65.836	60.407	61.597	58.109	59.719	56.434
Jumlah	**1.137.894**		**1.235.651**		**1.135.412**		**1.030.528**		**1.037.187**	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Selanjutnya struktur penduduk juga dapat dilihat dari aspek kualitas tingkat pendidikan 12 tahun, selama periode 2011-2015 tingkat pendidikan di Kota Batam sebenarnya mengalami peningkatan namun berdasarkan data kependudukan cenderung mengalami tren penurunan, hal ini lebih disebabkan karena berkaitan dengan adanya pembersihan data ganda nasional oleh tim pengolah data administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 2.10. Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2011-2015

No	Keterangan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Tdk/Blm Sekolah	293.785	322.302	305.757	305.257	324.439
2	Blm Tamat SD/Sederajat	86.032	96.286	92.512	92.270	94.213
3	Tamat SD/ Sederajat	83.808	91.842	86.143	80.054	76.800
4	SLTP/Sederajat	98.686	107.536	98.743	89.412	86.312
5	SLTA /Sederajat	508.365	545.787	487.651	406.808	398.142
6	DI/II	6.251	6.441	5.515	4.790	4.422
7	Akademi/DIII/Sarjana Muda	21.853	23.266	20.800	18.294	18.191
8	DIV/S1	37.623	40.315	36.603	32.267	33.277
9	S2	1.374	1.679	1.528	1.256	1.288
10	S3	117	197	160	120	103
Jumlah		**1.137.894**	**1.235.651**	**1.135.412**	**1.030.528**	**1.037.187**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Sedangkan proyeksi jumlah penduduk di Kota Batam tahun 2010-2020 dengan proyeksi peningkatan tertinggi ada pada Kecamatan Sagulung, kemudian peningkatan penduduk kedua tertinggi berada pada Kecamatan Batam Kota. Lebih lanjut penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.11. di bawah ini.

Tabel 2.11. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kecamatan
Tahun 2010-2020

Kecamatan		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kode	Nama						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
71	**B A T A M**	**954.450**	**1.000.661**	**1.047.534**	**1.094.623**	**1.141.816**	**1.188.985**
010	BELAKANG PADANG	18.598	18.723	18.837	18.944	19.043	19.137
020	BULANG	9.576	9.646	9.708	9.767	9.822	9.873
030	GALANG	15.070	15.215	15.344	15.458	15.559	15.647
040	SEI BEDUK	80.903	82.065	83.157	84.160	85.079	85.919
041	SAGULUNG	152.091	165.870	180.269	195.155	210.480	226.188
050	NONGSA	50.339	52.558	54.757	56.917	59.034	61.101

Kecamatan		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kode	Nama						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
051	BATAM KOTA	164.553	177.110	190.052	203.243	216.636	230.187
60	SEKUPANG	101.090	105.144	109.141	113.045	116.851	120.549
061	BATU AJI	128.974	136.384	143.859	151.323	158.753	166.125
070	LUBUK BAJA	81.296	82.313	83.249	84.100	84.871	85.565
080	BATU AMPAR	59.172	60.359	61.486	62.544	63.535	64.463
081	BENGKONG	92.788	95.274	97.675	99.967	102.153	104.231

Kecamatan		2016	2017	2018	2019	2020
Kode	Nama					
(1)	(2)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
71	**B A T A M**	**1.236.399**	**1.283.196**	**1.329.773**	**1.376.009**	**1.421.961**
010	BELAKANG PADANG	19.229	19.311	19.387	19.461	19.529
020	BULANG	9.924	9.969	10.012	10.052	10.088
030	GALANG	15.723	15.788	15.843	15.889	15.927
040	SEI BEDUK	86.691	87.386	88.018	88.590	89.108
041	SAGULUNG	242.355	258.674	275.259	292.044	309.036
050	NONGSA	63.133	65.094	67.002	68.854	70.657
051	BATAM KOTA	243.952	257.674	271.454	285.248	299.057
060	SEKUPANG	124.165	127.637	131.001	134.252	137.401
061	BATU AJI	173.479	180.680	187.788	194.785	201.681
070	LUBUK BAJA	86.193	86.751	87.249	87.692	88.085
080	BATU AMPAR	65.335	66.141	66.894	67.594	68.247
081	BENGKONG	106.220	108.091	109.866	111.548	113.145

Sumber : BPS Kota Batam

2.3 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bagian ini dijabarkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Batam tahun 2011-2015 sesuai amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010. Adapun skema pembahasan meliputi indikator/urusan yang tertera pada Gambar 2.6. di bawah ini.

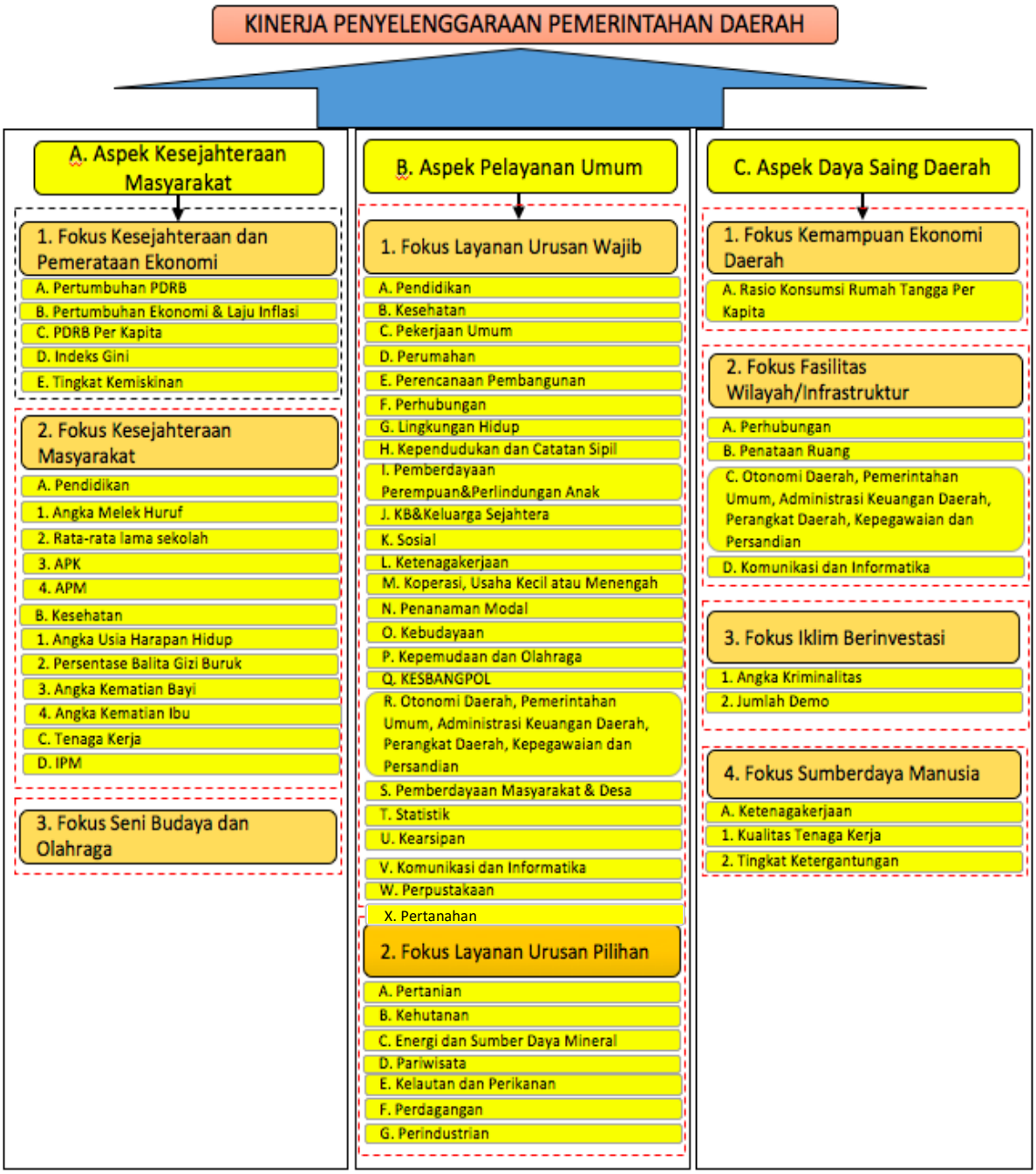

Gambar 2.6. Komponen Pembentuk Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Batam

2.3.1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.3.1.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Batam.

A. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.12. PDRB Kota Batam

Tahun	PDRB ADHB (Juta Rupiah)	PDRB ADHK Tahun 2010 (Juta Rupiah)
2011	74.181.300,3	68.621.399,0
2012	83.751.112,9	73.698.072,7
2013*	96.661.045,0	78.991.102,5
2014*	107.213.021,3	84.677.310,4
2015**	121.130.808,7	90.397.099,2

Sumber: BPS Kota Batam

* Angka Perbaikan

** Angka Sementara

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Kota Batam terus mengalami kenaikan. Dari Tabel 2.12. terlihat bahwa PDRB ADHB pada tahun 2011 semula Rp 74.181.300,3 triliun menjadi Rp 107.213.021,3 triliun pada tahun 2014 (ADHB) dan pada tahun 2015 menjadi Rp 121.130.808,7 triliun. Sedangkan berdasarkan ADHK tahun 2000 PDRB Kota Batam juga mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 68.621.399,0 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 90.397.099,2 triliun pada tahun 2015. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, maka terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB Kota Batam atas dasar harga konstan cenderung mengalami perlambatan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar2.7.

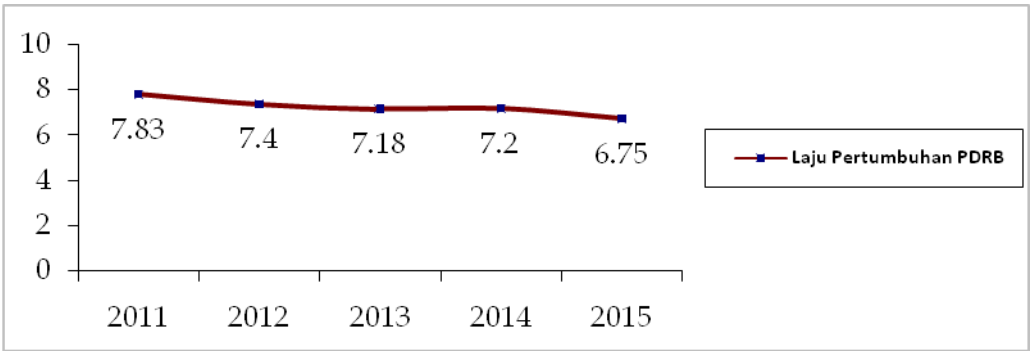

Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kota Batam
Sumber : BPS Kota Batam

Dari Gambar 2.7. terlihat bahwa laju pertumbuhan PDRB ADHK terus mengalami perlambatan sejak tahun 2011, yaitu yang semula 7,83 persen menjadi 6,75 persen pada tahun 2015. Apabila dilihat dari kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor industri pengolahan yang merupakan kontributor terbesar terhadap

PDRB Kota Batam juga mengalami penurunan nilai kontribusi. Sektor ekonomi yang mengalami peningkatan kontribusi adalah sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor informasi dan komunikasi. Adapun sektor lainnya memberikan nilai kontribusi yang stabil dan tidak terlalu berfluktuatif. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.8.

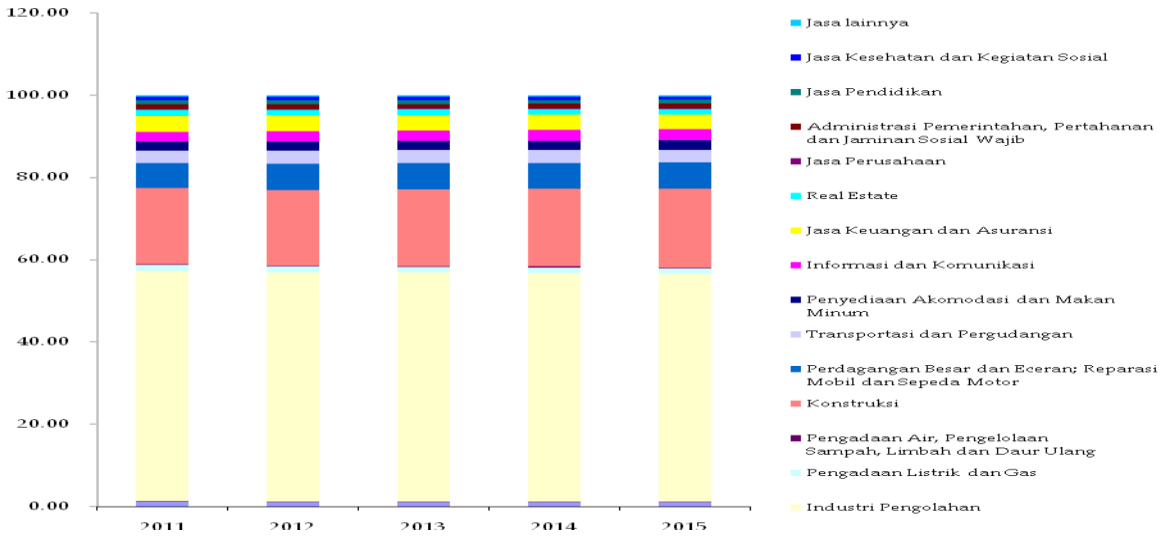

Gambar 2.8. Persentase Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010
Sumber : BPS Kota Batam

Gambar 2.8. juga memperlihatkan struktur ekonomi Kota Batam, dimana ekonomi Kota Batam lebih banyak dikontribusi oleh sektor industri pengolahan, lalu kemudian sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi Kota Batam terletak pada ketiga sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan

pembangunan ekonomi Kota Batam khususnya oleh Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam lebih diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi ketiga sektor tersebut, sedangkan strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Batam melakukan dukungan terhadap sektor–sektor tersebut.

B. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi Kota Batam memiliki kecenderungan menurun sejak tahun 2011, yaitu yang semula 7,83 persen pada tahun 2011 melambat menjadi 6,75 persen pada tahun 2015.

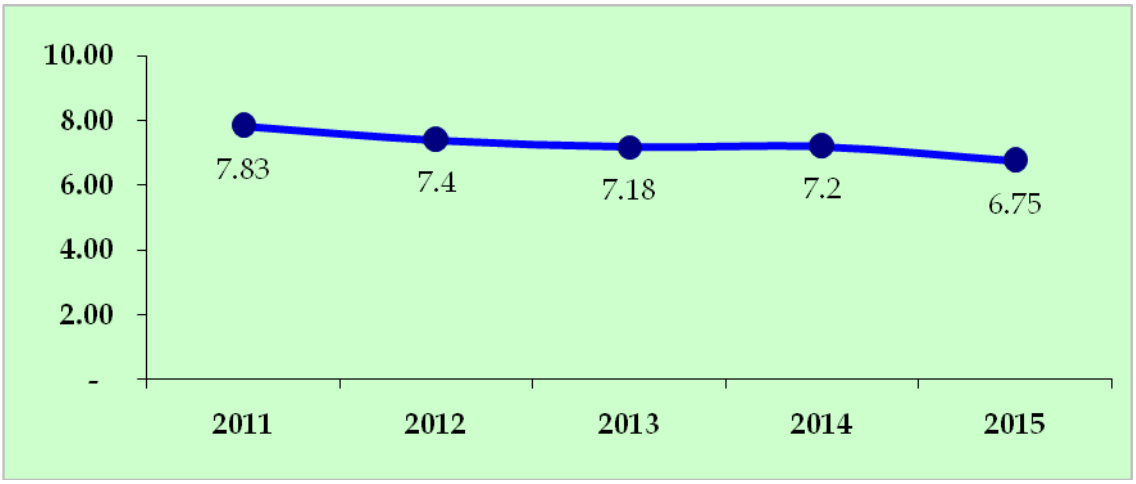

Gambar 2.9. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam

Sumber : BPS Kota Batam

Adapun laju inflasi Kota Batam mengalami fluktuasi antara tahun 2011 hingga 2015 (Gambar 2.10). Inflasi terendah di Kota Batam terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 2,02 persen (yoy) dan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,81 persen (yoy). Penurunan laju inflasi di Kota Batam terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7,49 persen menurun

hingga menjadi 4,73 persen pada tahun 2015.

Laju inflasi yang bersifat fluktuatif menunjukkan bahwa laju inflasi di Kota Batam tidak stabil sehingga menyebabkan ekspektasi pasar cenderung pesimis. Adanya pesimisme pasar diduga menjadi penyebab menurunnya pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Selain itu, laju inflasi Kota Batam pada tahun 2011 dan 2015 berada dibawah laju inflasi nasional. Meski demikian, laju inflasi Kota Batam pada tahun 2015 lebih tinggi daripada laju inflasi yang terjadi di Kota Tanjung Pinang.

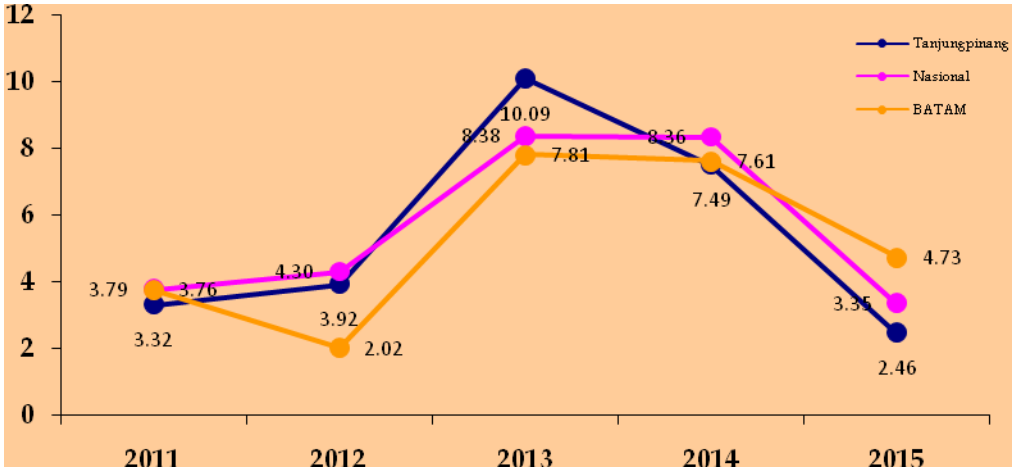

Gambar 2.10. Laju Inflasi Kota Batam, Tanjung Pinang, dan Target Inflasi Nasional

Sumber : BPS Kota Batam

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Batam dan fluktuasi laju inflasi Kota Batam diduga menjadi penyebab menurunnya PDRB Kota Batam. Laju inflasi yang fluktuatif dapat menyebabkan lesunya aktivitas ekonomi masyarakat Kota Batam sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang juga berpengaruh terhadap PDRB Kota Batam.

C. PDRB per Kapita

PDRB per kapita Kota Batam cenderung meningkat (Gambar 2.11). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Pada tahun 2011, PDRB per kapita Kota Batam atas dasar harga konstan sebesar Rp 68,57 juta meningkat menjadi Rp 76,03 juta pada tahun 2015. Adanya peningkatan PDRB per kapita ini diiringi juga dengan peningkatan jumlah penduduk Kota Batam. Hal ini berarti pertumbuhan pendapatan per kapita juga terjadi secara kualitas. Namun demikian, PDRB per kapita belum menggambarkan pendapatan masyarakat secara riil, karena PDRB per kapita belum memperhitungkan pendapatan yang masuk dan keluar wilayah Kota Batam (*Net Factor Income from Abroad*) sehingga PDRB per kapita ini hanya merupakan indikator untuk mengukur rata-rata pendapatan per kapita penduduk.

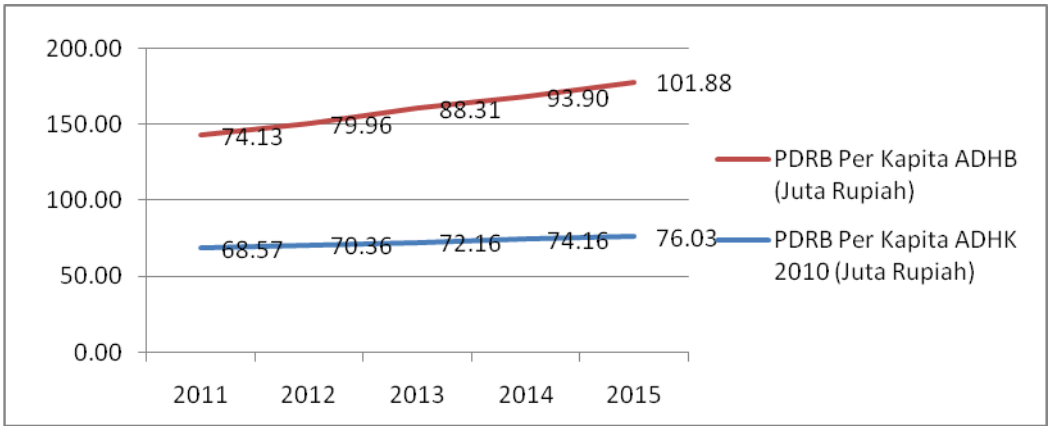

Gambar 2.11. PDRB per Kapita Kota Batam
Sumber : BPS Kota Batam

D. Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada Indeks Gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Dengan demikian, Indeks Gini bernilai 0 (nol) berarti terjadinya pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti terjadinya ketimpangan sempurna.

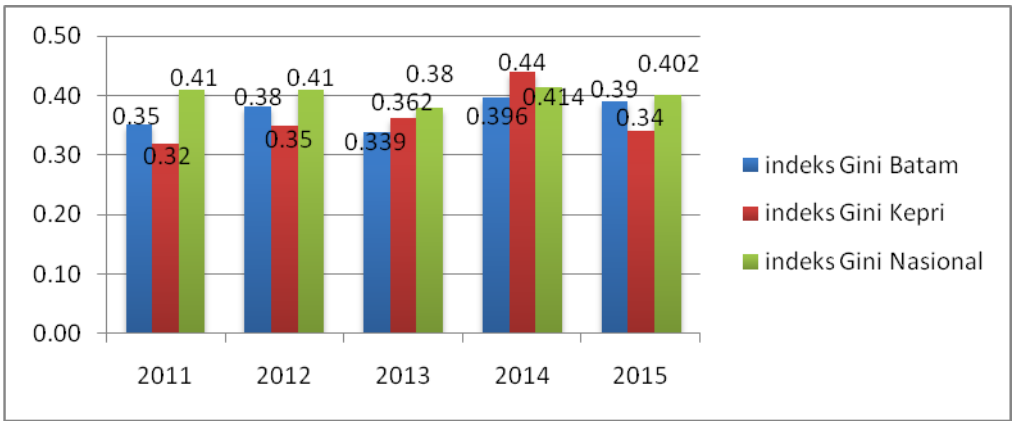

Gambar 2.12. Indeks Gini Kota Batam, Kepri, dan Nasional
Sumber : BPS Kota Batam

Gambar 2.12 memperlihatkan perbandingan Indeks Gini Kota Batam, Provinsi Kep. Riau, dan Nasional. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Indeks Gini Kota Batam pada tahun 2011 dan tahun 2012 berada di atas Indeks Gini Provinsi Kep. Riau. Sementara itu pada tahun 2013 dan 2014 Indeks Gini Kota Batam berada di bawah Indeks Gini Provinsi Kep. Riau dan Nasional, kemudian memasuki tahun 2015 Indeks Gini Kota Batam kembali berada di atas Indeks Gini Provinsi Kep. Riau namun di bawah Nasional. Tren perkembangan angka Indeks Gini Kota Batam tersebut menunjukkan bahwa distribusi kesejahteraan di Kota Batam masih lebih baik daripada pemerataan kesejahteraan di tingkat Provinsi maupun Nasional. Lebih lanjut, uraian Indeks Gini Kota Batam secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13. Indeks Gini dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Kota Batam Tahun 2011-2015

Tahun	Indeks Gini	Tingkat Ketimpangan	Kelompok Penduduk		
			40% Terendah	40% Menengah	20% Teratas
2011	0,351	Sedang	19,39	37,11	43,50
2012	0,381	Sedang	18,05	36,09	45,85
2013	0,339	Sedang	19,08	38,92	42,00
2014	0,396	Sedang	16,20	36,41	47,39
2015*	0,390	Sedang	16,04	37,32	46,64

Keterangan :
*Angka Sementara

E. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Batam terus mengalami penurunan (Gambar 2.13). Hal ini sesuai dengan capaian Indeks Gini Kota Batam

yang juga rendah. Dengan demikian, pemerataan kesejahteraan juga dinikmati oleh masyarakat miskin di Kota Batam sehingga persentasenya menurun. Pada tahun 2011, penduduk miskin di Kota Batam sebesar 6,11% dari total penduduk, dan menurun hingga 4,97% dari total penduduk Kota Batam pada tahun 2015 (hasil PBDT 2015).

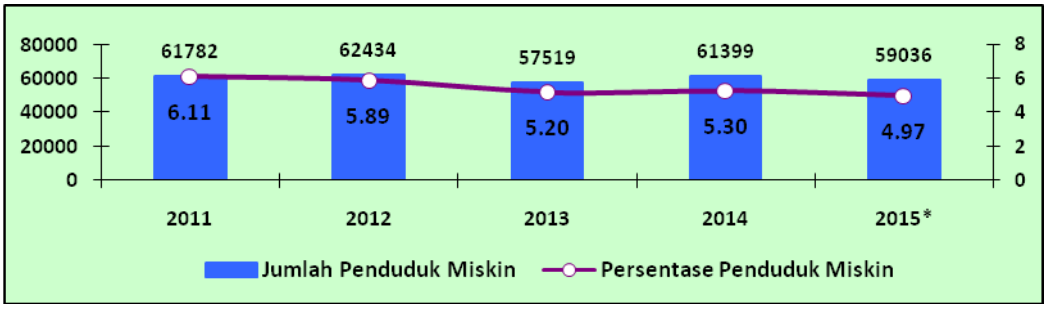

Gambar 2.13. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam

Sumber : BPS Kota Batam

2.3.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

2.3.2.1 Pendidikan

Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang pendidikan adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, dan angka partisipasi murni.

A. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Dari Tabel 2.14 terlihat bahwa angka melek huruf di Kota Batam merupakan yang tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Riau. Meski demikian, angka tersebut masih belum ideal yaitu 100%. Hal ini dikarenakan adanya penduduk lanjut usia yang masih buta huruf

(0,39%) dan tidak dapat belajar baca tulis. Angka ini sulit untuk diturunkan dan akan menurun secara alamiah jika penduduk yang buta huruf tersebut meninggal dunia.

Tabel 2.14. Angka Melek Huruf Kota Batam Tahun 2011-20115

No	Kab/ Kota	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Karimun	96,36	96,83	97,35	98,65	97,36
2	Bintan	96,14	96,92	97,32	98,50	98,22
3	Natuna	96,63	96,82	97,22	98,78	98,97
4	Lingga	91,79	91,79	91,86	89,03	94,04
5	Kepulauan Anambas	91,87	91,87	92,14	92,98	96,06
6	Kota Batam	98,97	99,29	99,30	99,65	99,61
7	Kota Tanjung Pinang	98,70	98,70	98,74	98,71	98,79

Sumber : BPS Kota Batam

Mulai tahun 2014 indikator Angka Melek Huruf (AMH) diganti dengan Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS). Adapun penyebab penggantian indikator AMH karena indikator tersebut sudah tidak relevan lagi dalam mengukur pendidikan secara utuh dan tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Adapun jika AMH Kota Batam dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya di Provinsi Kepri maka angkanya sudah cukup tinggi.

Tabel 2.15. Harapan Lama Sekolah Kota Batam Tahun 2011-2015

No	Kab/Kota	Harapan Lama Sekolah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Karimun	N/A	11,74	11,80	11,86	11,87
2	Bintan	N/A	N/A	N/A	11,80	11,98
3	Natuna	N/A	N/A	N/A	13,84	13,85
4	Lingga	N/A	N/A	N/A	11,59	11,78
5	Kepulauan Anambas	11,75	12,12	12,23	11,62	11,63
6	Kota Batam	11,37	11,75	12,23	12,62	12,65
7	Kota Tanjung Pinang	N/A	N/A	N/A	14,03	14,05
8	**Provinsi Kepri**	11,61	11,90	12,26	12,51	12,60

Sumber : BPS Kota Batam

B. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kota Batam masih berada di bawah angka yang diharapkan yaitu dikisaran 10 tahun, sedangkan angka ideal menurut Kemendikbud yaitu 12,35 tahun (Tabel 2.16).

Dari Tabel 2.16 di bawah ini terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kota Batam lebih tinggi daripada kota/kabupaten lainnya di Provinsi Kep. Riau. Meski demikian, data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Batam menempuh pendidikan hanya sampai tingkat SMA kelas 1.

Tabel 2.16. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Batam

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
1	Karimun	8,14	8,16	8,22	7,73	7,74
2	Bintan	8,91	8,95	9,01	8,30	8,32
3	Natuna	7,64	7,78	7,94	8,07	8,45
4	Lingga	7,24	7,27	7,31	5,53	5,54
5	Kepulauan	6,38	6,67	6,68	6,16	6,62

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
	Anambas					
6	Kota Batam	10,78	10,84	10,90	10,80	10,81
7	Kota Tanjung Pinang	9,68	10,18	10,18	9,94	9,95
8	Provinsi Kepri	9,46	9,58	9,63	9,64	9,65

Sumber : BPS Kota Batam

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK SD di Kota Batam melebihi 100% menunjukkan jumlah murid yang menempuh pendidikan SD melebihi jumlah penduduk pada usia 7-12 tahun (Gambar 2.14). Hal ini dapat terjadi karena adanya pengulangan kelas, penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan.

Adapun APK SMA jauh di bawah 100% menunjukkan partisipasi penduduk untuk menempuh pendidikan SMA rendah (Gambar 2.-14). Ini bisa juga berarti pendidikan SMA di Kota Batam kurang diminati oleh warga Kota Batam, karena permintaan tenaga kerja pendidikan SMA sedikit. Hal ini dapat dilihat dari angka pengangguran SMA yang lebih besar dibandingkan dengan pengangguran SD dan SMP dalam dokumen Rencana Tenaga Kerja Batam 2015-2019.

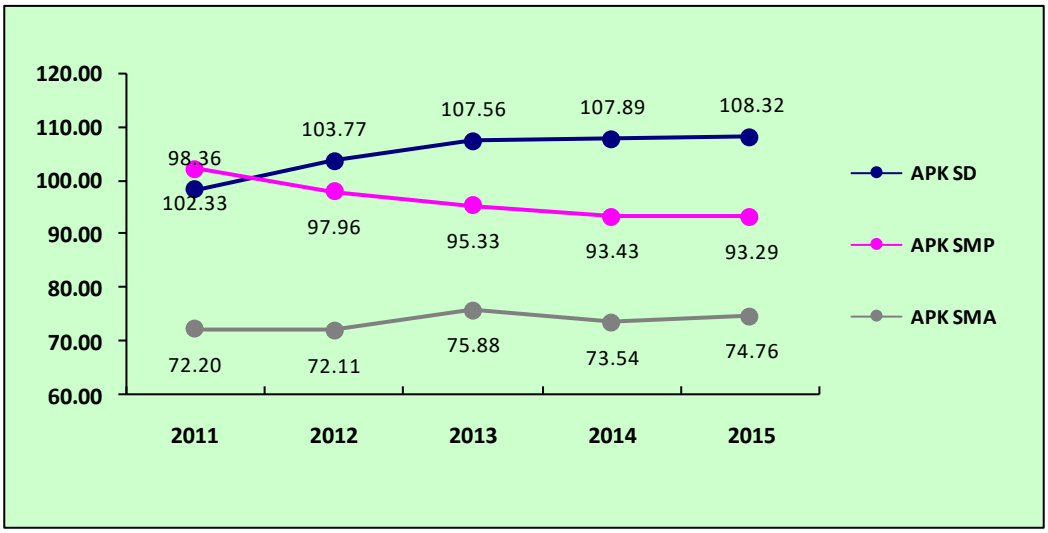

Gambar 2.14. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan di Kota Batam
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam

D. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM SD/sederajat dan SMP/sederajat di Kota Batam mendekati 100% menunjukkan hampir seluruh penduduk pada usia sekolah bersangkutan berpartisipasi dalam menempuh pendidikan sesuai usia sekolah (Gambar 2.15). APM SMA/sederajat berada jauh di bawah nilai ideal 100% menunjukkan rendahnya partisipasi penduduk pada usia sekolah SMA untuk menempuh pendidikan SMA/sederajat.

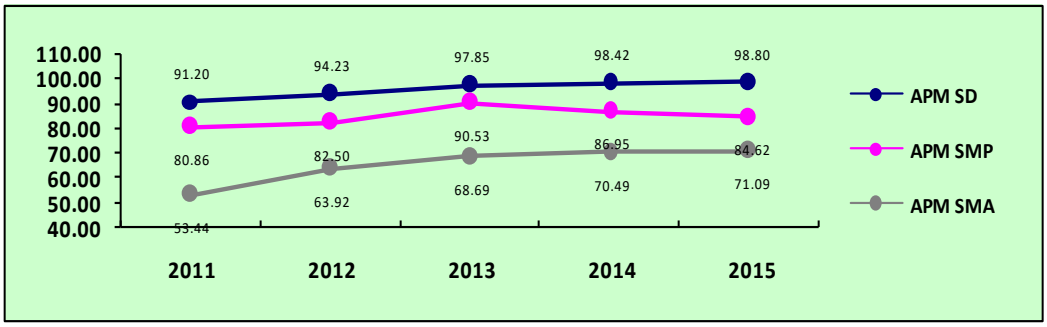

Gambar 2.15. Angka Partisipasi Murni Pendidikan di Kota Batam
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam

2.3.2.2 Kesehatan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang kesehatan ditunjukkan oleh indikator angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian ibu (AKI).

A. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup penduduk kota Batam berada pada kisaran 70 tahun (Tabel 2.17.), namun belum mencapai standar nasional. Angka usia harapan hidup standar nasional adalah 71 Tahun (WHO, 2014). Hal ini berarti kesehatan penduduk Kota Batam hampir memenuhi standar nasional.

Tabel 2.17. Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Riau

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
1	Karimun	69,93	69,94	70,11	69,01	69,71
2	Bintan	69,76	69,80	69,91	69,91	69,92
3	Natuna	68,37	68,43	68,57	63,24	63,64
4	Lingga	70,26	70,37	70,84	59,47	59,77
5	Kepulauan Anambas	67,53	67,66	67,80	66,23	66,33
6	Kota Batam	70,86	70,91	70,96	72,80	73,00
7	Kota Tanjung Pinang	69,67	69,72	69,75	71,55	71,65
8	Provinsi Kepri	68,63	68,85	69,05	69,15	69,41

Sumber : BPS Kota Batam

B. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk mengalami tren menurun. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.16. Persentase balita gizi buruk tertinggi hanya terjadi pada tahun 2010 sebesar 3,07%. Persentase gizi buruk pada

tahun 2010 tergolong tinggi, hal ini antara lain disebabkan oleh kurang memadai dana pengentasan kemiskinan untuk pemberian makanan tambahan pada balita sehingga sasarannya tidak tercapai. Namun pada tahun-tahun selanjutnya penyuluhan dilakukan dengan gencar oleh dinas kesehatan untuk meningkatkan status gizi balita serta mencapai target MDG's. Target MDG's tahun 2015 adalah sebesar 3,60%. Dengan adanya dukungan dari semua *stakeholder* di luar dinas kesehatan maka pada tahun 2015 persentase balita gizi buruk di Kota Batam dapat ditekan. Upaya ini terbukti berhasil, yakni pada tahun 2011 persentase balita gizi buruk di Kota Batam sebesar 0,55 % dan pada tahun 2015 turun menjadi sebesar 0,28%.

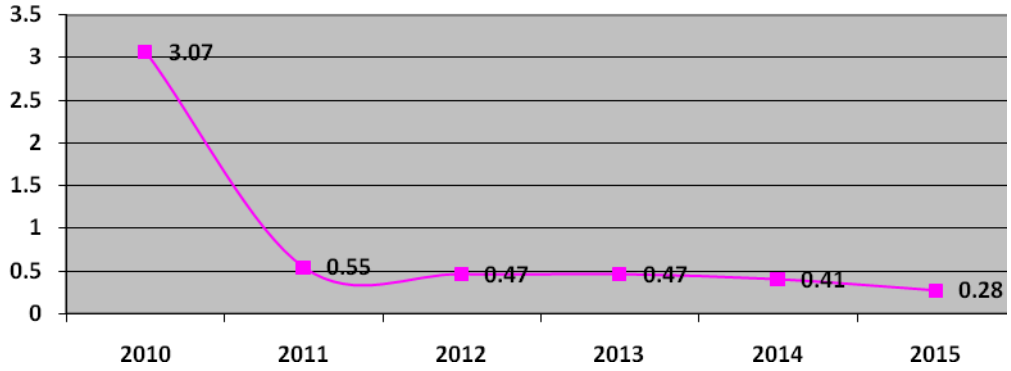

Gambar 2.16. Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

C. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi di Kota Batam mengalami fluktuasi, yaitu yang semula sebesar 6,29/1.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun 2010 menjadi 3,2/1.000 KH pada tahun 2012, kemudian meningkat lagi menjadi 8,7/1.000 KH pada tahun 2014 (Gambar 2.17) dan menurun

pada tahun 2015 menjadi 8,1/1.000 KH. Angka kematian bayi pada tahun 2013 mengalami lonjakan yang tinggi, terjadinya peningkatan ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan alat di rumah sakit (ruang *Neonatal Intensive Care Unit*/NICU)serta faktor kesehatan ibuhamil seperti menderita anemia, gizi kurang dan komplikasi pada kehamilan. Namun, secara keseluruhan pencapaian indikator ini melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Batam yaitu sebesar 13/1.000 KH dan juga target MDGs sebesar 32/1.000 KH. Dari Gambar 2.17 terlihatbahwa AKB Kota Batam berfluktuasi dan menunjukkan tren meningkat sehingga perlu diwaspadai serta diantisipasi agar tidak terus terjadi peningkatan.

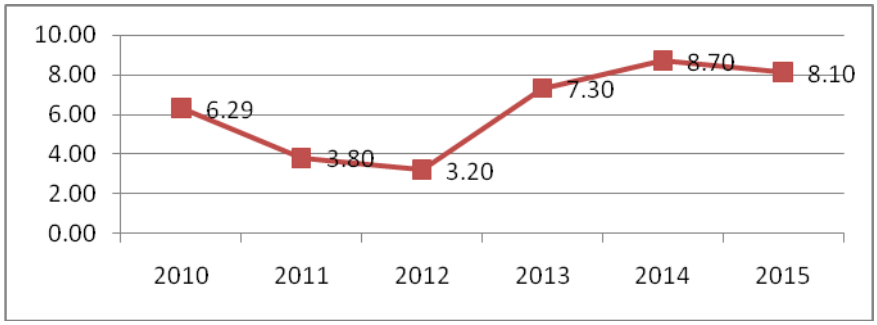

Gambar 2.17. Angka Kematian Bayi di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

D. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu di Kota Batam mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren yang meningkat (Gambar 2.18). Hal ini perlu diantisipasi agar angka kematian ibu tidak terus meningkat. Pada tahun 2014, angka kematian ibu mengalami lonjakan dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2013. Peningkatan AKI ini antara lain disebabkan oleh:

1. Penapisan kehamilan resiko tinggi kehamilan trimester 1,2,3 belum berjalan baik.
2. Adanya faktor 3T (tiga terlambat), yaitu: terlambat mengambil keputusan dalam menyetujui tindakan dari pihak keluarga; terlambat merujuk dari Proporsi Pertolongan Kelahiran (PPK) I ke rumah sakit; terlambat penanganan adekuat di tempat rujukan.
3. Adanya perubahan sistem jaminan kesehatan dari Jaminan Persalinan (Jampersal) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
4. Pengetahuan masyarakat terhadap tanda bahaya pada kehamilan belum optimal.

Meski demikian, secara umum pencapaian AKI di Kota Batam melampaui Target MDG's yaitu 112/100.000 KH. Pencapaian AKI di bawah target MDG's di Kota Batam untuk periode tahun 2011-2015 terjadi selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2011, 2012 dan 2013. Namun pada tahun 2014 dan 2015, AKI Kota Batam sudah berada di atas target MDG's.

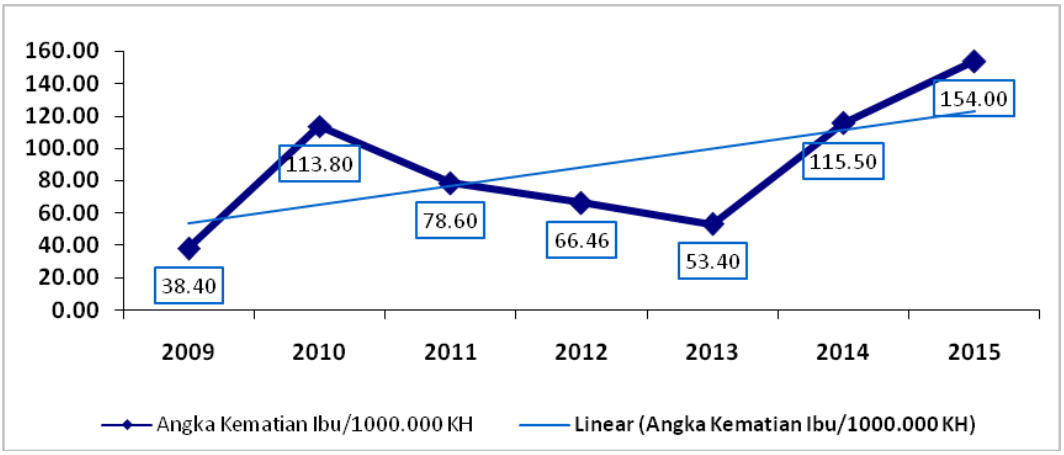

Gambar 2.18. Angka Kematian Ibu di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.3.2.3 Tenaga Kerja

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Berdasarkan Tabel 2.18, rasio penduduk yang bekerja di Kota Batam pada tahun 2011 sebesar 96%, tahun 2012 sebesar 95%, tahun 2013 sebesar 94% dan pada tahun 2015 sebesar 94%. Rasio penduduk yang bekerja persentasenya berfluktuasi. Berdasarkan Tabel 2.18., dapat dianalisis bahwa jumlah penduduk yang tidak bekerja atau menganggur berkisar antara 4 sampai 7 persen, angka ini tergolong tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ideal adalah berkisar antara 2-3 persen. Untuk bisa berada dalam TPT yang ideal perlu ditopang dengan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 8-10 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan sehingga mempengaruhi rasio penduduk yang bekerja di Kota Batam.

Tabel 2.18. Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Batam

Tahun	Penduduk yang bekerja	Angkatan kerja	Rasio Penduduk yang bekerja (%)
2011	457.150	477.011	96
2012	493.252	518.643	95
2013	493.539	525.570	94
2014	502.179	537.914	93
2015	524.046	558.038	94

Sumber : BPS Kota Batam

2.3.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan suatu daerah dalam satu angka tunggal. Dengan kata lain, IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak.

Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Perkembangan angka harapan hidup Kota Batam dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pelan, tapi pasti. Dari angka 72,56 tahun pada tahun 2011, meningkat menjadi 73,00 pada tahun 2015. Lambatnya kenaikan angka harapan hidup ini menggambarkan bahwa tidak mudah meningkatkan angka harapan hidup dalam jangka waktu satu tahun, karena harapan hidup seseorang dipengaruhi oleh berbagai hal yang kompleks, antara lain terkait dengan sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia, jumlah tenaga media dan paramedis yang tersedia, sertakebiasaan seseorang dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga, perlu upaya keras di bidang pelayanan kesehatan, dan pelayanan lainnya yang terkait untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dari semua kalangan umur mulai dari seseorang masih dalam

kandungan, balita, remaja sampai menjadi lansia.

Sementara itu, dimensi pengetahuan diukur dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah menunjukkan berapa tahun penduduk usia 7 tahun ke atas diharapkan dapat mengenyam pendidikan di sekolah, sedangkan rata-rata lama sekolah menunjukkan berapa tahun penduduk yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata menduduki bangku sekolah. Harapan lama sekolah berkembang lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah. Dalam kurun waktu lima tahun, harapan lama sekolah di Kota Batam berkembang dari 11,75 tahun pada tahun 2011 menjadi 12,65 tahun pada tahun 2015, sedangkan rata-rata lama sekolah perubahannya hanya dari 10,74 tahun pada tahun 2011 menjadi 10,81 tahun pada tahun 2015. Dengan kata lain, pada tahun 2015 penduduk berusia 7 tahun ke atas di Kota Batam secara rata-rata diharapkan dapat bersekolah hingga kelas 3 SLTA. Adapun rata-rata lama sekolah yang dijalani oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2015 adalah hingga kelas 2 SLTA. Sulitnya menggeser angka rata-rata lama sekolah ini disebabkan karena penduduk yang tidak bersekolah lagi cenderung akan tetap seperti itu dan akan terus diperhitungkan selama penduduk itu masih ada.

Indikator komponen IPM lainnya yaitu konsumsi rill per kapita yang disesuaikan. Indikator ini memberikan gambaran mengenai keadaan perekonomian penduduk. Dalam konteks ini, satu rupiah di Kota Batam akan memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. Pada tahun 2015, konsumsi rill per kapita Kota Batam mencapai 16,826 juta rupiah per tahun. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun

sebelumnya, terdapat peningkatan sekitar 90 ribu rupiah. Namun jika dibandingkan dengan kondisi lima tahun yang lalu, peningkatannya sekitar 748 ribu rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian penduduk semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya daya beli. Secara rinci uraian perkembangan indikator komponen IPM Kota Batam Tahun 2010-2015 disajikan pada Tabel2.19.

Tabel 2.19. Perkembangan indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2010-2015

Tahun	Angka Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Konsumsi Rill per Kapita disesuaikan
2010	72,53	11,37	10,53	16,078
2011	72,63	11,75	10,74	16,290
2012	72,71	12,12	10,77	16,479
2013	72,77	12,23	10,79	16,639
2014	72,80	12,62	10,80	16,735
2015	73,00	12,65	10,81	16,825

Sumber : BPS Kota Batam

Sebelum menjadi angka IPM, indikator-indikator komponen IPM di atas dikonversi terlebih dahulu menjadi indeks komponen IPM, yang perkembangannya disajikan dalam tabel 2.20. Dengan diterjemahkan ke dalam indeks, posisi setiap dimensi komponen IPM lebih jelas terlihat karena skalanya sama, yakni dari 0 hingga 100.

Tabel 2.20. Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Batam Tahun 2010-2015

Tahun	Indeks Harapan Hidup	Indeks Pengetahuan	Indeks Daya Beli	IPM
2010	80,82	66,68	84,65	76,98
2011	80,97	68,44	85,05	77,82
2012	81,09	69,57	85,40	78,39
2013	81,18	69,94	85,70	78,65
2014	81,23	71,06	85,87	79,13
2015	81,54	71,19	86,04	79,34

Sumber : BPS Kota Batam

Selama lima tahun terakhir, indeks pengeluaran merupakan yang tertinggi nilainya, sedangkan indeks pengetahuan merupakan indeks yang paling rendah di antara ketiga indeks tersebut. Kondisi terakhir (tahun 2015) menunjukkan bahwa indeks pengetahuan sebesar 71,19%, indeks kesehatan sebesar 81,54%, dan indeks pengeluaran sebesar 86,04%. Untuk meningkatkan IPM, bisa ditinjau dari ketiga indeks tersebut. Indeks yang masih tergolong rendah berarti lebih memiliki ruang untuk ditingkatkan.

Namun demikian, meskipun indeks pengetahuan lebih memiliki potensi untuk meningkat dari segi pencapaian nilai indeks, indeks pengetahuan ini ternyata paling sulit ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata kenaikan indeks per tahun selama 5 tahun terakhir, indeks ini memiliki rata- rata peningkatan paling kecil, yaitu sebesar 0,10 per tahun. Sebaliknya, indeks pengeluaran yang menjadi indeks dengan nilai tertinggi justru mempunyai rata-rata kenaikan nilai indeks terbesar, yaitu sebesar 1,09.

Dinamika penghitungan IPM di Indonesia mengalami perubahan metode pada tahun 2014, perhitungan tersebut dilakukan dari tahun 2010. sejak dihitungnya IPM pada tahun 2004 (metode lama), Kota Batam memiliki IPM sebesar 75,80 dan terakhir di tahun 2013 angka IPM mencapai 78,68. Ketika IPM dihitung ulang dengan menggunakan metode baru, maka IPM Kota Batam pada tahun 2010 sebesar 76,98 dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 79,13, sedangkan pada tahun 2015 (angka sementara) sebesar 79,34. Capaian IPM pada kedua metode sama-sama menunjukkan tren IPM yang selalu meningkat. Namun, capaian IPM dengan metode baru menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan. Artinya, perubahan beberapa indikator dan metode agregasi ternyata lebih bisa menunjukkan upaya yang telah dilakukan dalam pembangunan manusia di daerah. Terlepas dari perubahan metode, capaian IPM Kota Batam pada tahun 2015 tergolong tinggi dan mendekati pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan upaya yang serius dari Pemerintah Kota Batam dalam pembangunan manusia. Adapun perkembangan IPM Kota Batam dari tahun ke tahun disajikan pada Gambar 2.19 berikut ini.

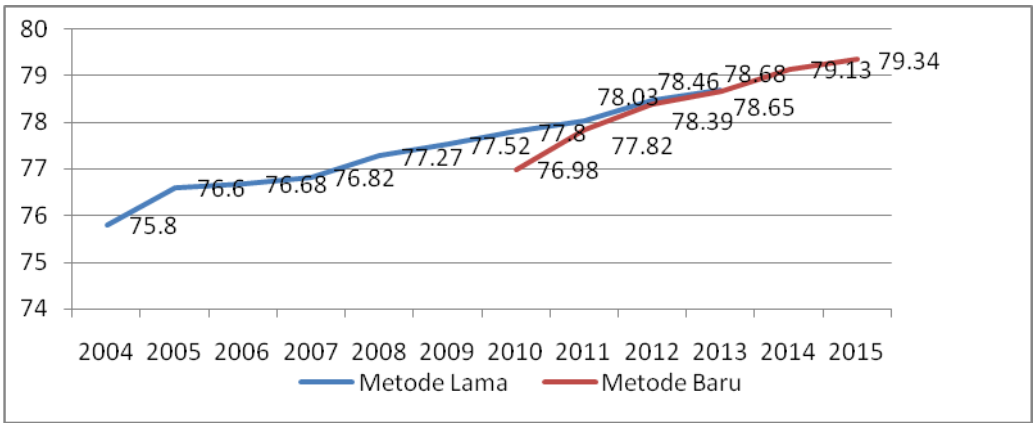

Gambar 2.19 Perkembangan IPM Kota Batam (Metode Lama dan Metode Baru)

Sumber : BPS Kota Batam

Kemajuan pencapaian IPM suatu daerah juga dapat dilihat dari perkembangan peringkat IPM secara nasional. Perubahan peringkat dapat diartikan bahwa terdapat daerah lain yang upaya pembangunan manusianya lebih cepat atau lebih lambat. Sejak tahun 2004, dengan IPM sebesar 75,80 Kota Batam menempati peringkat ke-8 secara nasional. Setelah itu, peringkat IPM KotaBatam semakin menurun, hingga keluar dari 20 besar nasional. IPM Kota Batam tergolong dalam kategori tinggi (< 80), sedangkan jika IPM > 80 maka tergolong dalam kategori sangat tinggi. Secara rinci diuraikan dalam Gambar 2.20. berikut ini.

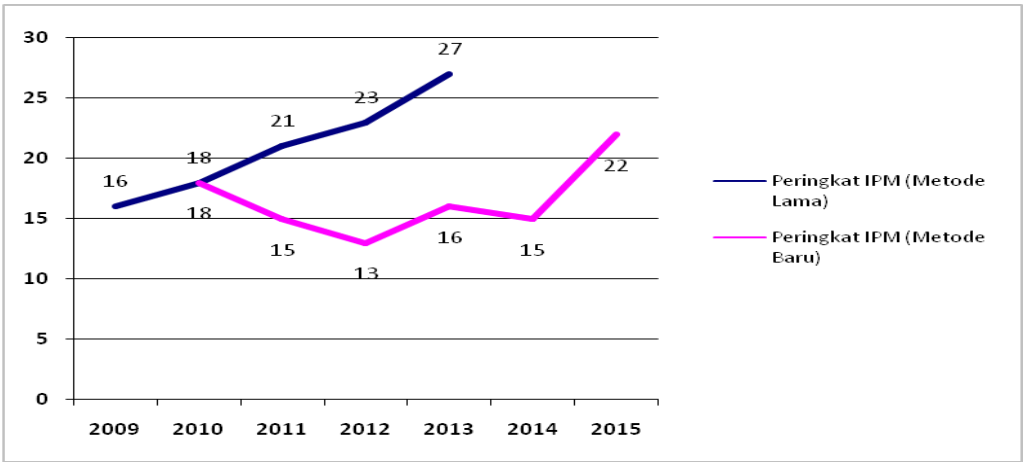

Gambar 2.20. Perkembangan Peringkat IPM Kota Batam Tahun 2009-2015

Sumber : BPS Kota Batam

Ketika terjadi perubahan metode penghitungan IPM dan dilakukan penghitungan mundur mulai dari tahun 2010, terjadi pula perubahan peringkat IPM karena indikator yang digunakan berubah dan setiap

daerah berbeda-beda pula kondisinya. Dengan menggunakan metode baru tersebut, peringkat IPM Kota Batam pada tahun 2010 berada pada posisi 18, kemudian meningkat ke peringkat 15 dan 13 pada dua tahun berikutnya, lalu turun lagi ke peringkat 16, dan akhirnya pada tahun 2014, IPM Kota Batam menempati peringkat ke-15 dan tahun 2015 menempati peringkat 22 di antara seluruh kabupaten/kota secara nasional. Penurunan peringkat IPM dari tahun ke tahun bukan berarti nilai IPM-nya menurun, melainkan peningkatan IPM daerah lainnya yang lebih cepat. Adapun perkembangan peringkat IPM secara rinci disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.21. Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota	**IPM**					**Peringkat IPM 2015**
	2011	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	
01. Karimun	66,82	67,67	68,52	68,72	**69,21**	173
02. Bintan	70,74	71,01	71,31	71,65	**71,92**	99
03. Natuna	67,76	68,80	69,39	70,06	**70,87**	120
04. Lingga	58,51	59,38	60,13	60,75	**61,28**	452
05. Kep. Anambas	63,71	64,32	64,86	65,12	**65,86**	296
71. BATAM	**77,82**	**78,39**	**78,65**	**79,13**	**79,34**	**22**
72. Tanjung Pinang	74,86	75,91	76,70	77,29	**77,57**	38
Provinsi KEPRI	**71,61**	**72,36**	**73,02**	**73,40**	**73,75**	**4**

Sumber : BPS Kota Batam

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu menduduki peringkat pertama. Peringkat IPM kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau yang paling mendekati peringkat IPM Kota Batam adalah peringkat 38 yaitu Kota Tanjungpinang, dan yang paling jauh adalah peringkat 452 yakni Kabupaten Lingga. Apabila dilihat dari angkanya, nilainya selalu berada diatas 75 dan semakin mendekati 80 dalam kurun waktu empat tahun terakhir, seperti yang diuraikan dalam Tabel2.21. Hal ini menggambarkan pembangunan manusia di Kota Batam selama periode 2011-2015 cukup berhasil di Kepulauan Riau.

Pada tahun 2013, di tingkat Pulau Sumatera, Kota Batam merupakan salah satu dari sedikit yang memiliki IPM di angka 78. Hal ini menggambarkan bahwa status pembangunan manusia di Kota Batam termasuk salah satu yang terbaik di antara kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Pada tahun 2015, kondisi pembangunan manusia di Kota Batam semakin membaik, capaian IPM Kota Batam saat itu telah berhasil mencapai angka 79. Meskipun peringkatnya turun dari peringkat ke15 menjadi peringkat ke-22. Daerah yang merupakan ibukota provinsi di Pulau Sumatera dengan pencapaian IPM sebesar 79 atau di atasnya hanya Kota Banda Aceh (82,22) dan Kota Padang (79,83). Secara nasional, kedua kota ini berada pada peringkat ke-3 dan ke-9 (dapat dilihat pada tabel di bawah ini).

Tabel 2.22. IPM Kota Batam dan Beberapa Kota-kota Besar Lainnya di Sumatera,
Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	Nilai IPM		
	2013	2014	2015
Kota Banda Aceh	81,84 (3)	82,22 (3)	N/A
Kota Padang	79,23 (9)	79,83 (9)	N/A
Kota Batam	78,65 (16)	79,13 (15)	N/A
Kota Pekanbaru	78,16 (26)	78,42 (27)	N/A
Kota Medan	78,00 (28)	78,26 (29)	N/A
Kota Bengkulu	76,16 (43)	76,49 (44)	N/A
Kota Pangkal Pinang	76,14 (44)	76,28 (45)	N/A
Kota Palembang	75,49 (48)	76,02 (48)	N/A
Kota Jambi	74,21 (63)	74,86 (62)	N/A
Kota Bandar Lampung	73,93 (67)	74,34 (67)	N/A

Sumber : BPS RI

Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan peringkat

IPM Kota Batam yang berada dalam peringkat 20 besar membuat Kota Batam menjadi kota yang layak disejajarkan dengan kota-kota besar lainnya dalam hal pembangunan manusia. Apabila IPM Kota Batam disandingkan dengan IPM beberapa kota besar lainnya di Indonesia, status pembangunan manusia Kota Batam bisa dikatakan termasuk dalam jajaran atas nasional, karena nilai IPM Kota Batam bersaing dengan kota-kota tersebut, bahkan bisa di atas kota-kota besar lainnya, seperti Jakarta Pusat, Bandung, Surabaya, Depok, Balikpapan dan Jakarta Utara (lihat tabel di bawah ini), dimana kota-kota tersebut secara karakteristik juga memiliki kemiripan dengan Kota Batam.

Namun demikian, status pembangunan manusia Kota Batam tetap perlu terus ditingkatkan agar bisa sejajar dengan daerah seperti Yogyakarta, Jakarta Selatan dan Denpasar.

Tabel 2.23. IPM Kota Batam dan Beberapa Kota-kota Besar Lainnya di Luar Sumatera,
Tahun 2013-2015

Kabupaten/Kota	Nilai IPM		
	2013	2014	2015
Kota Yogyakarta	83,61 (1)	83,78 (1)	N/A
Kota Jakarta Selatan	82,72 (2)	82,94 (2)	N/A
Kota Denpasar	81,32 (4)	81,65 (4)	N/A
Kota Jakarta Timur	79,88 (7)	80,40 (7)	N/A
Kota Surakarta	78,89 (8)	79,34 (8)	N/A
Kota Jakarta Barat	78,79 (13)	79,38 (10)	N/A
Kota Makassar	78,98 (10)	79, 35 (11)	N/A
Kota Semarang	78,68 (14)	79,24 (13)	N/A
Kota Batam	78,65 (16)	79,13 (15)	N/A
Kota Jakarta Pusat	78,81 (12)	79,03 (18)	N/A
Kota Bandung	78,55 (19)	78,98 (19)	N/A
Kota Surabaya	78,51 (20)	78,87 (21)	N/A
Kota Bekasi	78,63 (18)	78,84 (22)	N/A
Kota Depok	78,27 (24)	78,58 (24)	N/A
Kota Balikpapan	77,53 (32)	77,93 (32)	N/A
Kota Jakarta Utara	77,16 (35)	77,29 (37)	N/A

Sumber : BPS RI

Keterangan : Angka dalam kurung menunjukkan peringkat

Data 2015 Belum tersedia

2.3.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Terkait bidang olahraga, Pemerintah Kota Batam telah membina sejumlah klub olahraga di Kota Batam dan membangun 1 gedung olahraga yang dibangun pada tahun 2014 (Tabel 2.24). Dari tabel tersebut terlihat bahwa klub olahraga yang ada belum mencapai rasio 1 klub per 10.000 penduduk. Hal ini disebabkan oleh minat olahraga penduduk Batam yang belum tinggi atau persebaran penduduk Batam yang tersebar di beberapa pulau dan kecamatan sehingga keberadaan klub olahraga hanya terpusat di beberapa kecamatan saja.

Tabel 2.24. Perkembangan Kepemudaan Dan Olahraga Di Kota Batam

No.	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah klub olahraga (per 10.000 penduduk	0,40	0,36	0,49	0,54	0,56
2	Jumlah gedung olahraga (per 10.000 penduduk)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,021

Sumber : Kanpora Kota Batam

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Fokus Pelayanan Urusan Wajib

2.4.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan telah banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah pendidikan dasar. Pada tahun 2011 angka

partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) sebesar 777,24 dimana hal ini bermakna terdapat 777,24 murid usia 7-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) dari 1.000 penduduk usia 7-15 tahun (Tabel 2.25). Selain itu, tren angka partisipasi sekolah pendidikan dasar menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2012, angka partisipasi sekolah pendidikan dasar di Kota Batam sebesar 728,43 per 1.000 penduduk usia 7-15 tahun, dan pada tahun 2015 menurun menjadi 685,63 murid per 1.000 penduduk usia 7-15 tahun.

Angka rasio guru terhadap murid menunjukkan jumlah guru per 10.000 murid, dimana rasio ideal adalah 500 guru per 10.000 murid. Pada tahun 2011, rasio guru terhadap murid sebesar 771,51 pada tahun 2012 meningkat menjadi 786,29 namun mulai tahun 2013 rasio guru terhadap murid di Kota Batam untuk jenjang pendidikan dasar mengalami penurunan dan menjadi 429,03 (Tabel 2.25). Hal ini menunjukkan bahwa Kota Batam membutuhkan tenaga tambahan guru untuk jenjang pendidikan dasar. Kebutuhan tersebut juga terlihat dari rasio guru/murid per kelas rata-rata yang terus menurun sejak tahun 2012. Pada tahun 2011 rasio guru/murid per kelas rata-rata sebesar 0,17 dan pada tahun 2015 menurun menjadi 0,04.

Tabel 2.25. Hasil Kinerja Indikator Bidang Pendidikan Kota Batam Tahun 2011-2015

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendidikan Dasar					
i.	Angka partisipasi sekolah	777,64	728,43	774,07	685,63	685,63
ii.	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	26,47	21,84	31,98	19,97	19,97
iii.	Rasio guru/ murid	771,51	786,29	612,53	429,03	429,03
iv	Rasio guru/ murid per kelas rata-rata	0,17	0,09	0,01	0,08	0,04
2	Pendidikan Menengah					
i.	Angka partisipasi sekolah	773,22	872,55	666,17	678,74	678,74
ii.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	30,45	31,53	29,96	29,67	31,38
iii.	Rasio guru terhadap murid	831,37	651,72	345,59	628,47	728,47
iv.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	1,06	0,57	0,15	0,50	0,70
3	Fasilitas Pendidikan					
i.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	91,38	100	84,06	53,07	43,07
ii.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik (%)	94,2	97,65	93,82	78,04	68,04
4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	25,33	18,11	24,45	24,34	24,02
5	Angka Putus Sekolah					

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2011	2012	2013	2014	2015
i.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,75	0,70	0,67	0,13	0,03
ii.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,50	1,43	1,38	0,63	0,13
iii.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA (%)	1,50	1,45	1,43	0,30	0,10
6	Angka Kelulusan					
i.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	99,67%	100,00%
ii.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,33%	99,48%	99,64%	99,35%	100,00%
iii.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98,84%	98,93%	99,15%	100,00%	100,00%
iv.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	94,57%	94,58%	128,77%	97,10%	99,10%
v.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	94,68%	92,19%	96,16%	87,64%	97,64%
vi.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	64,07%	65,17%	81,59%	81,60%	84,70%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam (data diolah)

Tren rasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan dasar terhadap penduduk usia jenjang pendidikan SD-SMP mengalami penurunan. Pada tahun 2011, nilai rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar terhadap penduduk usia pendidikan dasar sebesar 26,47 per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar, dan menurun menjadi 19,97 per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar pada tahun 2015 (tabel 2.25). Hal ini diakibatkan karena penambahan jumlah

gedung sekolah SD-SMP tidak seimbang dengan pertambahan penduduk usia 7-15 tahun.

Angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) menunjukkan tren menurun sejak tahun 2012. Pada tahun 2011 angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah sebesar 773,22 pada tahun 2012 meningkat menjadi 872,55. Namun pada tahun 2015 menurun menjadi 678,74.

Adapun rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan menengah menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2011, rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah sebesar 30,45 dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 31,38.

Rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan menengah menunjukkan tren menurun, pada tahun 2011 sebesar 831 per 10.000 murid namun pada tahun 2015 menjadi 728,47 per 10.000 murid. Penurunan ini juga terlihat dari rasio guru/murid per kelas rata-rata yang juga menurun yaitu yang semula sebesar 1,06 pada tahun 2011 menurun menjadi 0,70 pada tahun 2015. Hal ini perlu diantisipasi agar Kota Batam tidak mengalami kekurangan guru untuk jenjang pendidikan menengah.

Sarana pendidikan berupa gedung sekolah yang berada pada kondisi baik di Kota Batam juga menunjukkan tren menurun. Untuk gedung sekolah SD/MI, jumlah gedung yang berada pada kondisi baik pada tahun 2011 sebesar 91,38%, dan pada tahun 2015 menjadi sebesar 43,07%. Hal ini tentunya membutuhkan anggaran yang besar untuk

merehabilitasi kondisi sekolah yang sudah dalam kondisi rusak berat.

Pada level pendidikan pra sekolah, perkembangan angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Batam selama periode 2011-2015 juga menunjukkan tren menurun, pada tahun 2011 angka partisipasi PAUD sebesar 25,33%, pada tahun 2015 menjadi 24,02%. Hal ini terjadi disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan pra sekolah. Penyebab lainnya kemungkinan adalah jumlah sekolah PAUD tidak memadai untuk melayani seluruh anak usia pra sekolah.

angka putus sekolah di Kota Batam mengalami tren menurun selama periode 2011-2015 pada semua jenjang pendidikan

Adapun angka putus sekolah di Kota Batam mengalami tren menurun selama periode 2011-2015 pada semua jenjang pendidikan. Angka putus sekolah pada jenjang SD pada tahun 2011 sebesar 0,75% kemudian menurun hingga 0,03% pada tahun 2015. Pada jenjang SMP, juga mengalami penurunan tren sejak tahun 2011. Angka putus sekolah jenjang SMP pada tahun 2011 sebesar 1,50% dan turun menjadi 0,13% pada tahun 2015. Adapun pada jenjang SMA juga mengalami hal yang sama yaitu terjadinya penurunan tren sejak tahun 2011, yaitu sebesar 1,50% menurun menjadi 0,10% pada tahun 2015.

Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2011, persentase murid yang melanjutkan sekolah

dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 94,57% meningkat menjadi 99,10% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan minat murid SD/MI di Kota Batam untuk melanjutkan studi ke tingkat selanjutnya semakin tinggi. Adapun angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mengalami tren fluktuatif, pada tahun 2012 angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 92,19% mengalami penurunan sebesar 2,49% dari tahun 2011, besar angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA tahun 2011 adalah 94,68%. Pada tahun 2015 angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA meningkat menjadi 97,64%. Tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk lulusan SMP daripada SMA diduga menjadi penyebab menurunnya minat murid SMP/MTs di Kota Batam untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

angka melanjutkan sekolah dari pendidikan SD/MI ke SMP/MTs meningkat trennya

Di sisi SDM guru, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV di Kota Batam mengalami peningkatan setiap tahunnya selama periode 2011-2015. Pada tahun 2011, persentase guru yang memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV sebanyak 64,07% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 84,70%.

2.4.1.2 Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum pembangunan kesehatan di Kota Batam telah menunjukkan pencapaian yang positif, walaupun di beberapa indikator masih belum mencapai hasil yang optimal.

A. Rasio Posyandu/Polindes per satuan balita

Pemerintah Kota Batam telah menyediakan Polindes untuk memenuhi kebutuhan kesehatan balita. Meski demikian, jumlah Polindes di Kota Batam dirasakan masih sangat kurang. Idealnya Rasio Posyandu/Polindes per satuan balita adalah 1:50, adapun hingga pada tahun 2015 rasio Polindes per satuan balita di Kota Batam baru mencapai 1:5.014 (Tabel 2.26).

Tabel 2.26. Rasio Posyandu/ Polindes per Satuan Balita di Kota Batam

Tahun	Jumlah Balita (0-4 thn)	Jumlah Polindes		Rasio
		Pemerintah	Swasta	
2009	49.120	23	7	1:1.637
2010	113.718	27	3	1:3.791
2011	84.067	23	7	1:2.802
2012	65.341	0	34	1:1.923
2013	72.947	38	0	1:1.920
2014	134.206	29	0	1:4.628
2015	145.413	29	0	1:5.014

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

B. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Rasio Ideal Puskesmas adalah 1:30.000 jiwa, sementara itu rasio

puskesmas di Kota Batam sampai pada tahun 2015 mencapai 1:61.011 jiwa (Tabel 2.27). Kondisi tersebut diimbangi dengan adanya Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang pada tahun 2015 masing-masing memiliki rasio 1:18.196 dan 1:23.572, sehingga dapat dikatakan mencukupi untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kota Batam.

Tabel 2.27. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk di Kota Batam

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Penduduk	992.095	1.056.701	1.137.894	1.235.651	1.135.412	1.030.528	1.037.187
2	Puskesmas	13	14	15	16	16	17	17
2.1	**Rasio Puskesmas**	**1:76.315**	**1:75.479**	**1:75.860**	**1:77.228**	**1:70.963**	**1:60619**	**1:61.011**
3	Puskesmas Pembantu	49	50	50	54	55	57	57
3.1	**Rasio Pustu**	**1:20.247**	**1:21.134**	**1:22.758**	**1:22.882**	**1:20.644**	**1:18.079**	**1:18.196**
4	Puskesmas Keliling	35	35	35	32	38	38	44
4.1	**Rasio Puskesmas Kel**	**1:28.346**	**1:30.191**	**1:32.511**	**1:38.614**	**1:29.879**	**1:27.119**	**1:23.572**
5	Poliklinik Pemerintah	N/A	N/A	N/A	2	2	2	3
5.1	Poliklinik Swasta	180	191	189	166	164	182	182
5.2	**Rasio Poliklinik**	**1:5.512**	**1:5.532**	**1:6.021**	**1:7.355**	**1:6.840**	**1:5.601**	**1:5.606**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam (data diolah)

C. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Sampai pada tahun 2015, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Batam sebesar 1:69.146 penduduk (Tabel 2.28). Jika dibandingkan

dengan rasio ideal rumah sakit, yakni 1:100.000 penduduk, maka ketersediaan rumah sakit di Kota Batam masuk dalam kategori mencukupi.

Tabel 2.28. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Batam

Tahun	Jumlah Rumah Sakit/Rumah		Jumlah Penduduk	Rasio
	Pemerintah	Swasta		
2009	2	12	992.095	1:70.864
2010	2	12	1.056.701	1:75.479
2011	2	12	1.137.894	1:81.278
2012	8	6	1.235.651	1:88.261
2013	8	6	1.135.412	1:81.101
2014	2	13	1.030.528	1:68.702
2015	2	13	1.037.187	1:69.146

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam (data diolah)

D. Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Jika dilihat rasio dokter dan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Batam, maka dapat diketahui bahwa sampai pada tahun 2015 rasio dokter umum adalah 1:2.418, rasio dokter spesialis adalah 1:4.165, rasio dokter gigi adalah 1:7.356, dan rasio perawat adalah 1:624, serta rasio farmasi/apoteker adalah 1:3.870 (Tabel 2.29). Adapun rasio ideal dokter per satuan penduduk adalah 1:2.500, sedangkan rasio ideal tenaga keperawatan adalah 1:1.250, kemudian rasio ideal apoteker/farmasi adalah 1:4.000. Dengan demikian Kota Batam masih kekurangan jumlah dokter spesialis, dokter gigi, dan farmasi/ apoteker.

Tabel 2.29. Rasio Dokter dan Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Batam

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk	992,095	1,056,701	1,137,894	1,187,574	1,135,412	1.030.528	1.037.187

No	Uraian	Tahun						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
2	Dokter Umum	411	152	586	210	594	233	429
2.1	**Rasio Dokter Umum**	**1:2.414**	**1:6.952**	**1:1.942**	**1:5.655**	**1:1.911**	**1:4.422**	**1:2.418**
3	Dokter Spesialis	94	95	115	97	160	199	249
3.1	**Rasio Dokter Spesialis**	**1:10.554**	**1:11.123**	**1:9.895**	**1:12.243**	**1:7.096**	**1:5.178**	**1:4.165**
4	Dokter Gigi	71	32	120	57	134	62	141
4.1	**Rasio Dokter Gigi**	**1:13.973**	**1:33.022**	**1:9.482**	**1:20.835**	**1:8.473**	**1:16.621**	**1:7.356**
5	Perawat	1.679	1.442	1.744	1.249	1.589	1.475	1.662
5.1	**Rasio Perawat**	**1:591**	**1:733**	**1:652**	**1:951**	**1:715**	**1:766**	**1:624**
6	Farmasi	479	384	312	134	196	229	268
6.1	**Rasio Farmasi**	**1:2.071**	**1:2.752**	**1:3.647**	**1:8.862**	**1:5.793**	**1:4.500**	**1:3.870**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam (data diolah)

E. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tertangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kota Batam dari periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 belum mencapai 100%, artinya bahwa semua ibu hamil dengan komplikasi yang datang ke sarana kesehatan atau ditemukan oleh tenaga kesehatan belum tertangani seluruhnya (Gambar 2.21). Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga kebidanan.

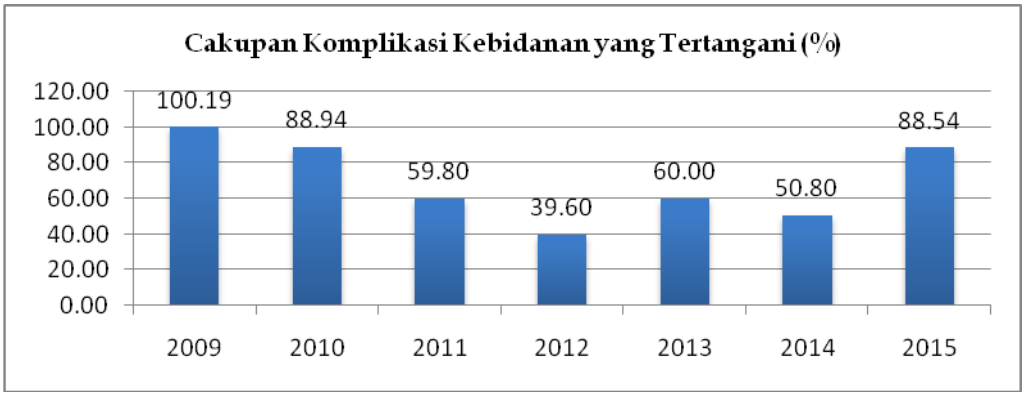

Gambar 2.21. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tertangani di Kota Batam

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

F. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Batam dari periode tahun 2012, 2013, 2014 belum mencapai 100% (Gambar 2.22), artinya bahwa proses persalinan di Kota Batam belum seluruhnya ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga kebidanan.

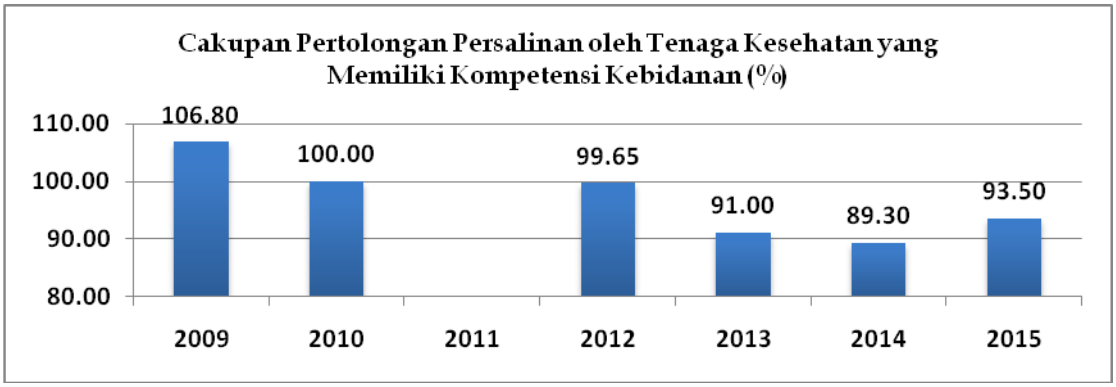

Gambar 2.22. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Batam

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

G. Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Perkembangan cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Batam selama periode 2011-2015 belum mencapai 100% (Gambar 2.23). Hal ini berarti masih terdapat bayi yang belum mendapat imunisasi dasar lengkap di setiap kelurahan dalam waktu satu tahun.

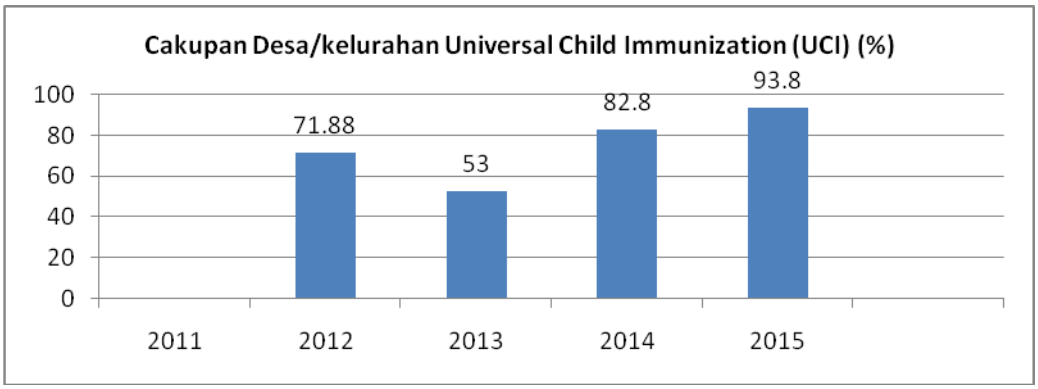

Gambar 2.23. Cakupan Desa/ Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Batam

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

H. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kota Batam selama periode 2011-2015 sudah mencapai 100% (Gambar 2.24). Hal ini menunjukkan bahwa kasus balita gizi buruk sudah tertangani seluruhnya.

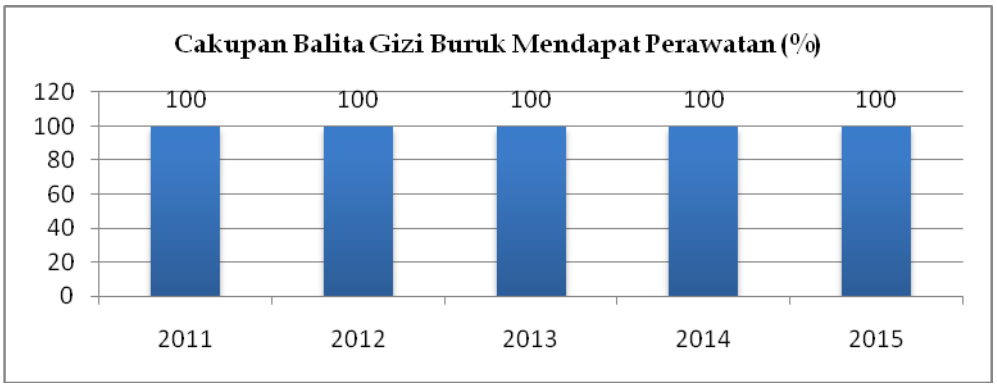

Gambar 2.24. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan di Kota Batam

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

I. Angka Kesembuhan TB. Paru

Angka Kesembuhan TB. Paru adalah angka persentase pasien baru TB paru BTA positif yang sembuh setelah selesai masa pengobatan, diantara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Perkembangan Angka Kesembuhan TB. Paru di Kota Batam selama periode 2011-2015 mengalami peningkatan (Gambar 2.25), namun masih kurang jika dibandingkan dengan standar angka kesembuhan TB. Paru, yakni 85%.

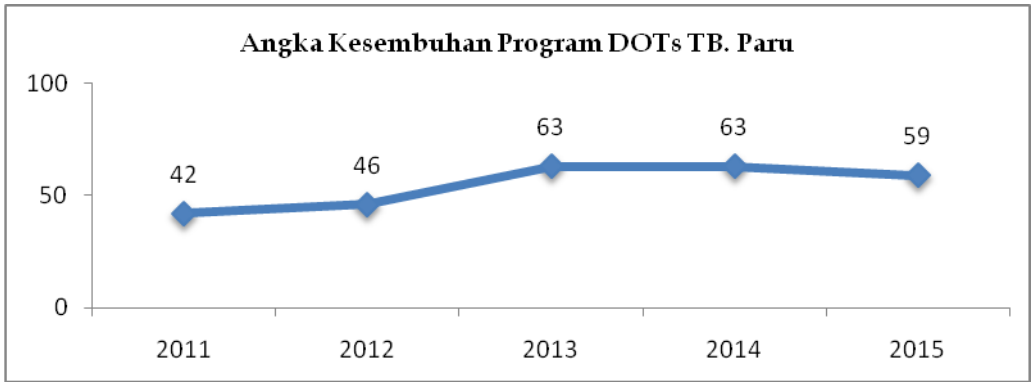

Gambar 2.25. Angka Kesembuhan Program DOTs TB. Paru

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

J. Prevalensi TB. Paru per 100.000 penduduk

Prevalensi TB. Paru per 100.000 penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat di antara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. PrevalensiTB. Paru di Kota Batam pada tahun 2013 menurun drastis menjadi 38,4 per 100.000 penduduk namun setelah periode tersebut prevalensi TB. Paru di Kota Batam terus meningkat menjadi 160 per 100.000 penduduk (Gambar 2.26). Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena penyakit ini merupakan penyakit yang menular. Oleh karena itu, penderita perlu ditanggani secara kontinyu dalam jangka waktu yang relatif panjang serta diperlukan tindakan preventif untuk mendeteksi penderita penyakit ini dan penanganan yang tepat agar tidak menularkan kepada orang lain.

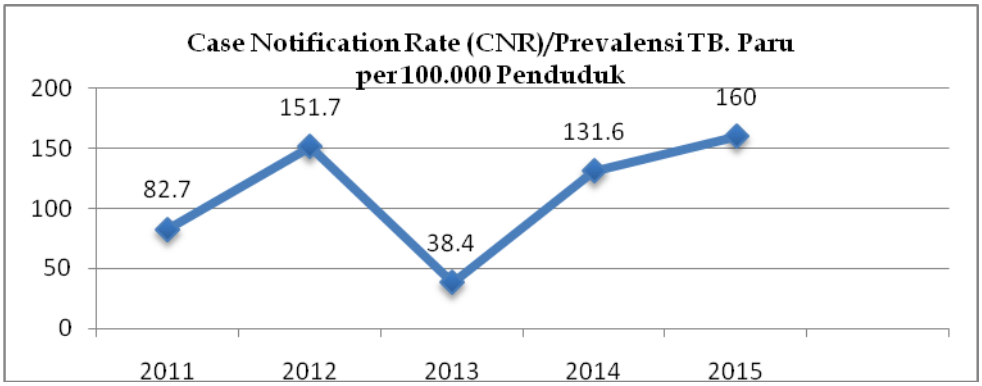

Gambar 2.26. Prevalensi TB. Paru per 100.000 Penduduk di Kota Batam
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

K. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Batam selama periode 2011-2014 sudah mencapai 100% (Gambar 2.27). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kasus DBD telah tertangani dengan baik.

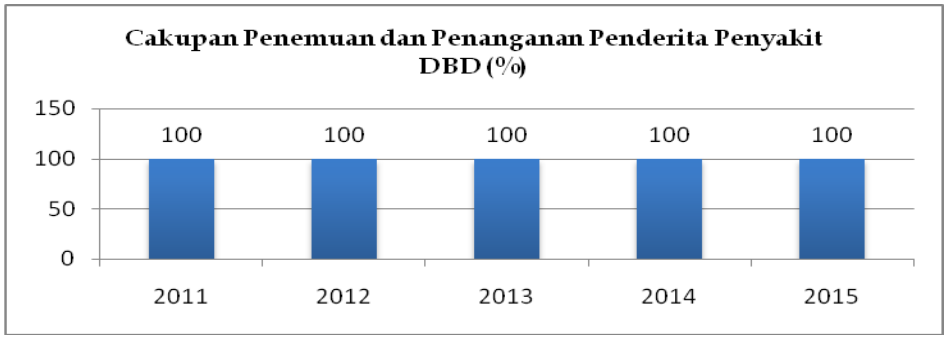

Gambar 2.27. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kota Batam

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

L. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

Menurut SPM Kementrian Kesehatan, cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2015. Jika melihat tren pada Gambar 2.28 maka terlihat bahwa sampai dengan pada tahun 2015, Kota Batam sudah seluruhnya memberikan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

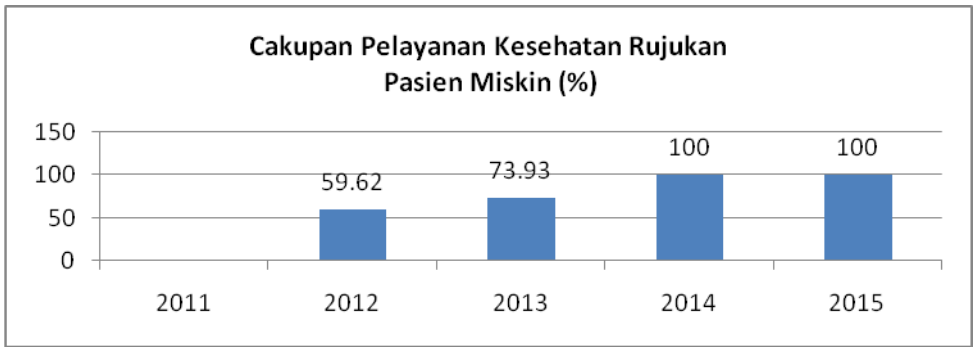

Gambar 2.28. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

M. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar kesehatan oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Menurut SPM Kementerian Kesehatan, cakupan kunjungan bayi ditetapkan sebesar 90% pada tahun 2010.

Cakupan kunjungan bayi di Kota Batam mengalami tren menurun dimana pada tahun 2012 cakupan kunjungan bayi sebesar 59,1% menurun menjadi 33% pada tahun 2013 dan kembali meningkat pada tahun 2014 dan 2015. Dengan demikian, cakupan kunjungan bayi di Kota Batam selama periode 2011-2015 belum memenuhi SPM Kementerian Kesehatan.

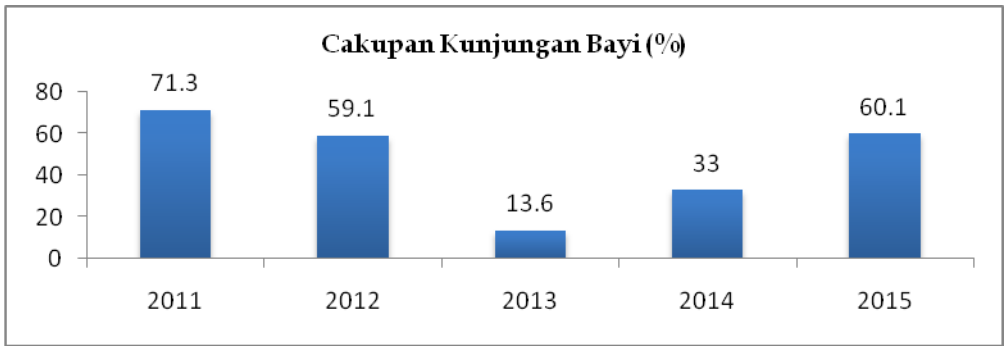

Gambar 2.29. Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Batam

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

N. Cakupan Puskesmas

Dari perbandingan jumlah Puskesmas dengan jumlah Kecamatan yang ada di wilayah Kota Batam, maka diperoleh persentase cakupan puskesmas di Kota Batam. Pada Tabel 2.30 dapat diketahui bahwa jumlah puskesmas terus bertambah setiap tahunnya, dimana pada tahun 2011 cakupan puskesmas sebesar 125% meningkat menjadi 142% pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap kecamatan terdapat lebih dari satu Puskesmas.

Tabel 2.30. Cakupan Puskesmas di Kota Batam

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Puskesmas	15	16	16	17	17
Jumlah Kecamatan	12	12	12	12	12
Cakupan Puskesmas (%)	125	133	133	142	142

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

O. Cakupan Puskesmas Pembantu

Dari data pada Tabel 2.31 diketahui bahwa tren cakupan Puskesmas pembantu di Kota Batam meningkat setiap tahunnya. Data di tabel tersebut juga menunjukkan bahwa pada setiap kecamatan terdapat

lebih dari satu puskesmas pembantu. Secara umum cakupan puskesmas pembantu sudah mencukupi untuk Kota Batam.

Tabel 2.31. Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Batam

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Puskesmas Pembantu	50	54	55	75	57
Jumlah Kecamatan	12	12	12	12	12
Cakupan Puskesmas Pembantu (%)	417	450	458	625	475

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

P. Cakupan Desa Siaga Aktif

Kementerian Kesehatan menetapkan SPM desa siaga aktif sebesar 100% pada tahun 2015. Dari data pada Gambar 2.30 terlihat bahwa persentase desa siaga aktif Kota Batam tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 telah mencapai SPM yang ditetapkan.

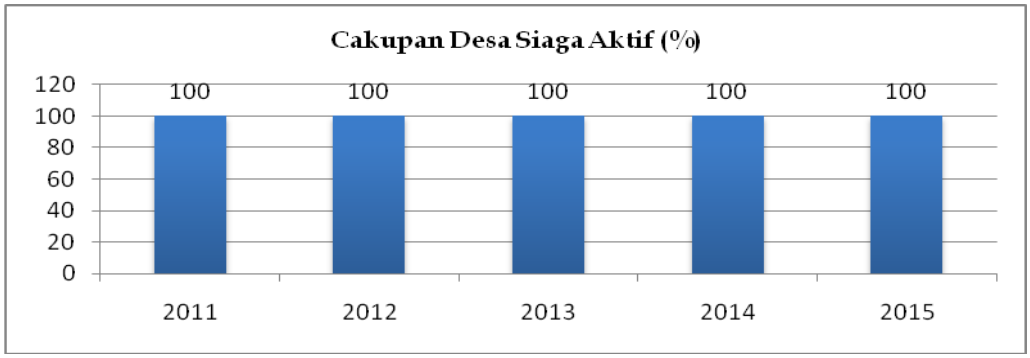

Gambar 2.30. Cakupan Desa Siaga Aktif di Kota Batam

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Batam

2.4.1.3 Pekerjaan Umum

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan (Gambar 2.31). Pada 2011, proporsi panjang jaringan jalan dengan kondisi baik sebesar 60,72% dari total panjang jalan keseluruhan. Kondisi ini masih menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2014 dan 2015 dengan proporsi masing-masing sebesar 67,13% dan 68,57%.

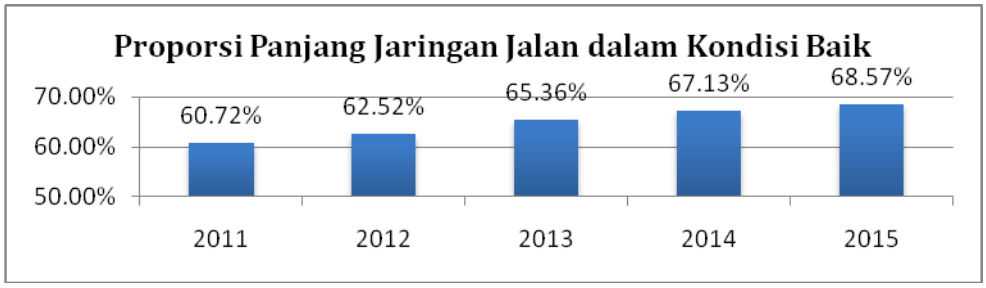

Gambar 2.31. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Batam

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam

Tabel 2.32. Ruas Jalan Arteri Primer (JAP) di Kota Batam berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lokasi
1	Batam Centre – Sp. Franky (Jl. A.	1,72	Kota Batam
2	Yani)	1,93	Kota Batam
3	Sp. Frangky – Sp. Kabil (Jl. A. Yani)	3,82	Kota Batam
4	Sp. Kabil – Muka Kuning (Jl. A. Yani)	4,91	Kota Batam
5	Muka Kuning – Tembesi (Jl. Letjen	7,76	Kota Batam
6	Suprapto)	3,39	Kota Batam
7	Tembesi – Tanjung Berikat	8,67	Kota Batam
8	Sp. Kabil – Sp. Jam (Jl, Jend	3,92	Kota Batam
9	Sudirman)	6,27	Kota Batam
10	Sp. Jam – Sei Harapan (Jl. Gajah	7,04	Kota Batam
11	Mada)	15,03	Kota Batam
	Sei Harapan – Sekupang (Jl. RE		
12	Martadinata)	11,64	Kota Batam
13	Sp. Kabil – Sp. Punggur (Jl. Jend.	5,65	Kota Batam
14	Sudirman)	9,09	Kota Batam
15	Sp. Punggur – Batu Besar (Jl. Hang	8,00	Kota Batam
	Tuah)		
16	Batu Besar – Nongsa (Jl. Hang Jebat,	3,90	Kota Batam
17	Jl. Hang Lekiu)	1,60	Kota Batam
	Sp. Punggur – Telaga Punggur (Jl. Hasanuddin)		
	Tembesi – Batu Aji (Jl. Letjen Suprapto)		
	Batu Aji – Tanjung uncang (Jl. Brigjrn Katamso)		
	Jl. Diponegoro (Sp. Sei Harapan – Sp. Basecamp Batu Aji)		
	Jl. Duyung (Pel. Batu Ampar – Sp.		

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lokasi
	Baloi Centre) Baloi Centre – Sp. Sei Ladi (UIB)		
TOTAL		**104,34**	Kota Batam

Sumber : Kepmen PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015

Tabel 2.33. Ruas Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1) di Prov Kepulauan Riau (Kota Batam) Kepmen PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lokasi
1	Tanjung Berikat – Sp. Sembulang	25,83	Kota Batam
2	Sp. Sembulang – Pel. Galang	30,03	Kota Batam
TOTAL		**55,86**	Kota Batam

Sumber : Kepmen PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015

Tabel 2.34. Ruas Jalan Kolektor Primer (JKP) di Provinsi Kepulauan Riau (Kota Batam) SK Gubernur No 1863 Tahun 2016

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lokasi
1.	Simp. Muka Kuning – Tanjung piayu (Jl.	13,70	Kota
2.	S. Parman)	8,90	Batam
3.	Simp.Sei Harapan – Sei Temiang (Kh.	6,50	Kota
	Ahmad Dahlan)		Batam
4.	Simp. Kalista - Simp. Frangky - Simp.	2,70	Kota
	Underpass Pelita (Jln. Laksamana		Batam
5.	Bintan) - Simp. Telkom (Jln. Sriwijaya)	2,70	
6.	Simp. Patung KudaSei. Panas - Simp.	6,60	Kota
7.	Bengkong Seken (Jl. Raya Sei Panas)	3,30	Batam
8.	Simp. Garama - Golden Prawn (Jl. Yos	8,20	
9.	Sudarso, Jl. Sumatera)	4,40	Kota
10.	Simp. Marina City - Simp. Base Camp	6,60	Batam
11.	Pelabuhan Sagulung - Simp. Polsek	2,80	Kota

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lokasi
12.	Tanjung Uncang	3,20	Batam
13.	Simp. Industri Taiwan - Simp. Batu Besar	1,10	Kota
14.	(Jl. Hang Kesturi)	5,10	Batam
	Simp. Jam - Simp. Masjid Raya Batam		Kota
15.	Centre (Jl. Raja Haji Fisabililah)	3,70	Batam
16.	Simp. Jam – Batu Ampar (Jl. YosSudarso)	2,70	Kota
	Simp. Kalista - Simp. Kantor Camat		Batam
17.	Batam Kota (Jl. Orchad Boulevard)	2,10	Kota
18.	Simp. Trakindo/BintangIndustri - Tj.	3,50	Batam
19.	Sengkuang (Jl. Kerapu)	11,80	Kota
20.	Simp. Bundaran Ob - Simp. Baru Ocarina	1,70	Batam
21.	(Jl. Ibnu Sutowo)	2,00	Kota
22.	Simp. Arteri Kda - Simp. Bi - Bundaran	1,95	Batam
23.	Ob (Jl. Raja Isa, Jl. Engku Putri Timur, Jl.	3,30	Kota
24.	Engku Putri Utara)	2,40	Batam
25.	Simp. KDA - Simp. ArteriDotamana (Jl.	1,40	Kota
	Selasih, Jl. Raja M. Saleh)		Batam
	Simp. Dotamana - Simp. Sman 3 - Simp.		
	Bandara (Jl. Tengku Sulung, Jl. Hang		Kota
	Nadim)		Batam
	Bundaran Tuah Madani – Ocarina		Kota
	Simp. Kawasan Industri - Indah Puri		Batam
	(Patam Lestari)		
	Simp. Trans Barelang - Kantor Camat		Kota
	Sembulang (Jl. Batin Limat)		Batam
	Simp. Tobing - Simp. Taman Makam		Kota
	Pahlawan		Batam
	Simp. Unrika - Simp. Mkgr Batuaji		Kota
	Simp. Mitra Mall - Simp. Hidayatullah		Batam
	Batuaji		Kota
	Simp. Pertamina Tongkang - Kaw.		Batam
	Industri Bosowa Kabil		Kota
	Jalan Lingkar Kawasan Industri Batamex		Batam
	Tanjung Uncang		Kota
	Sp. Indomobil – Sp. Baloi Center (Jl.		Batam
	Bunga Raya)		Kota

No	Nama Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lokasi
			Batam Kota Batam Kota Batam
TOTAL		**112,35**	

Sumber : ***SK Gubernur Kepri No 1863 Tahun 2016***

B. Drainase

Saluran drainase di Kota Batam pada umumnya memanfaatkan sungai-sungai kecil yang ada sebagai saluran primer, yang mengalir secara gravitasi. Selain itu, tidak ditemui pompa di sekitar saluran primer yang biasanya digunakan untuk memompa air saat hujan besar. Dengan kondisi topografi yang berbukit, genangan yang terjadi tidak lama dan tidak luas, jika dibandingkan dengan yang terjadi di tanah berkontur datar. Adapun permasalahan dalam penanggulangan banjir di Kota Batam antara lain adalah :

a. Jaringan drainase yang masih berbentuk saluran alam dan kapasitas drainase yang kurang memadai serta belum optimalnya sistem saluran drainase eksisting.
b. Lokasi/kawasan yang sudah terbangun memiliki elevasi tidak memadai sehingga selalu menjadi lokasi/kawasan yang rentan terjadi genangan/banjir.
c. Adanya perubahan bentang alam (daerah tangkapan air) sehingga menyebabkan genangan air saat adanya curah hujan dengan intensitas tinggi dan berdurasi lama.

d. Belum terintegrasi dengan maksimal pola pembangunan drainase dan adanya kegiatan *cut and fill* (*grading plan*).

Tabel 2.35. Indikator Keluaran Kegiatan Dinas PU Kota Batam

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Panjang saluran drainase yang dipelihara (m)	40.000	45000	40.000	40.000	40.000
2	Panjang saluran drainase yang dibangun/ ditingkatkan (m)	0	107	1.105	4.4745	3.595
3	Panjang jalan yang dipelihara	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km	35 Km
4	Terbangunnya lampu PJU (titik)	75	60	266	250	214
5	Terpeliharanya lampu PJU (titik)	9.423	9.498	9.767	10.253	10.553
6.	Terbangunnya sarana sanitasi limbah domestik (unit)	2	4	-	-	2

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam

Terdapat 2 (dua) kewenangan untuk urusan pekerjaan umum di Kota Batam, yakni Dinas PU dan BP Batam. Oleh karena itu, perlu koordinasi yang intens antara kedua instansi tersebut, khususnya dalam memperjelas kewenangannya untuk urusan pekerjaan umum. Sehingga tercipta sinergi positif untuk menghasilkan insfrastruktur yang handal di Kota Batam. Adapun indikator keluaran kegiatan Dinas PU Kota Batam periode 2011-2015 disampaikan dalam Tabel 2.35. berikut.

2.4.1.4 Perumahan dan Permukiman

Tingginya mobilitas pendatang dan pertumbuhan penduduk telah berdampak kepada permasalahan sosial dan kerusakan lingkungan di Kota Batam. Hal tersebut terlihat dari menjamurnya rumah bermasalah dan kios-kios yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan.

Permasalahan umum kawasan permukiman terutama pada kawasan yang dikategorikan dalam kawasan permukiman kumuh adalah infrastruktur permukiman yang buruk seperti jaringan jalan lingkungan, jaringan drainase, jaringan persampahan, dan jaringan air bersih. Jaringan jalan pada kawasan permukiman sebagian besar masih berupa jalan tanah dan belum dilakukan peningkatan konstruksi. Pada saat hujan menjadi becek dan berlumpur sehingga mengganggu aksesibilitas internal kawasan.

Permasalahan jaringan drainase lebih kepada belum adanya pembangunan jaringan dengan konstruksi permanen sehingga mempermudah terjadinya sedimentasi. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya kegiatan perawatan terhadap jaringan yang sudah ada.

Jaringan persampahan secara umum dapat dikatakan kurang terlayani dengan baik, serta tidak terdapat fasilitas pendukung dan manajemen persampahan. Hal ini dipengaruhi juga oleh aksesibilitas internal kawasan yang buruk sehingga menghambat pengangkutan sampah dari rumah tangga menuju TPS.

Jaringan air bersih sudah dapat melayani seluruh kawasan. Selain itu, debit air bersih juga sudah cukup untuk melayani kawasan.

Permasalahan yang ada yaitu tekanan pada Sambungan Rumah (SR) yang lemah terutama pada saat *peak hour*.

Permasalahan penyediaan infrastruktur masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan sampai saat ini. Masyarakat yang sebagian besar adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak mampu secara swadaya untuk menyediakan infrastruktur dasar. Selain infrastruktur dasar yang menjadi kendala adalah kualitas fisik hunian yang cenderung rendah (masih terdapat hunian tanpa *finishing* pada dinding rumah). Kondisi ini disebabkan oleh tingkat kemampuan masyarakat yang rendah. Permasalahan infrastruktur dan kualitas hunian tidak hanya bisa dipandang sebagai dampak dari pembangunan sektor infrastruktur dan rumah yang masih kurang, akan tetapi juga harus dilihat dari sisi kebijakan dan regulasi yang mengatur pembangunan infrastruktur permukiman dan skema pembiayaan perumahan.

Berdasarkan SK Walikota Batam Nomor 68/HK/I/2015, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Batam adalah seluas 178 Ha, yang tersebar di 10 Kelurahan yaitu sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.36 berikut.

Tabel 2.36. Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Batam

NO	KAWASAN	LUAS (Ha)	KELURAHAN	TINGKAT KEKUMUHAN
1.	Tanjung Piayu	10.15	Tanjung Piayu	Sedang
2.	Mangsang	34	Mangsang	Sedang
3.	Nusa Jaya - Bukit Berbunga	5.37	Duriangkang	Sedang

4.	KSB Sei. Lekop	11	Sei. Lekop	Sedang
5.	KSB Sei. Pelunggut	56.47	Sei. Pelunggut	Sedang
6.	KSB Kabil	28	Kabil	Sedang
7.	Tiban Kampung	10	Tiban Lama	Sedang
8.	Bengkong Palapa	6.5	Tanjung Buntung	Sedang
9.	Bengkong Sadai	10	Sadai	Sedang
10.	Tanjung Sengkuang	6.5	Tanjung Sengkuang	Sedang
	TOTAL	**178**		

Penyediaan perumahan murah yang layak dalam bentuk rumah susun merupakan salah satu upaya mengatasi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama tenaga kerja. Rumah susun yang tersedia di Kota Batam sampai saat ini sebanyak 76 (tujuh puluh enam) *twin* blok terdiri dari 7.117 unit. Pembangunan rumah susun tersebut dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Batam, Otorita Batam, Perumnas dan Jamsostek.

Tabel 2.37. Jumlah Rusun Di Kota Batam s/d Tahun 2016

NO	PENGELOLA	JUMLAH BLOK	TYPE	UNIT	LOKASI	TAHUN PEMBANGUNAN
1	PERUMNAS	4 TB	21	384	TJ PIAYU	2001s/d2002
2	PERUMNAS	1 TB	21	96	TJ PIAYU	2007 s/d 2009
3	BPJS	6 TB	21	576	BT AMPAR	2001 s/d 2003
4	BPJS	1 TB	21	96	MK KUNING	2008 s/d 2009
5	BPJS	10 TB	27	1000	KABIL	2009 s/d 2011

6	BP	4 TB	21	384	BT AMPAR	2003 s/d 2004
7	BP	9 TB	21	864	MK KUNING	2004
8	BP	4 TB	21	384	SEKUPANG	2004 s/d 2006
9	BP	2 TB	27	160	KABIL	2009
10	BP	2 TB	27	170	KABIL	2010 s/d 2011
11	BP	1 TB	27	80	KABIL	2009
12	PEMKO	2 TB	27	160	MK KUNING	2004 s/d 2005
13	PEMKO	2 TB	27	160	MK KUNING	2009
14	PEMKO	2 TB	27	160	TJ UNCANG	2009 s/d 2010
15	PEMKO	2 TB	27	178	TJ UNCANG	2010 s/d 2011
16	PEMKO	1 TB	27	80	MK KUNING	2006 s/d 2007
17	PEMKO	4 TB	24	384	TJ UNCANG	2010 s/d 2011
18	PEMKO	2 TB	24	192	MK KUNING	2008 s/d 2009
19	PEMKO	4 TB	24	384	SEKUPANG	2008 s/d 2009
20	PEMKO	2 TB	27	160	TJ UNCANG	2009 s/d 2010
21	PEMKO	4 TB	24	384	TJ UNCANG	2011 s/d 2012
22	PEMKO	2 TB	24	192	TEMBESI	2012 s/d 2013
23	PEMKO	3 TB	24	297	MK KUNING	2013 S/D 2014
24	REI	2 TB	21 & 36	192	BTM CENTRE	2008 s/d 2009
	JUMLAH	76 TB		7,117		

Tren persentase rumah tangga (RT) pengguna listrik di Kota Batam periode 2011 sampai 2015 mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat

dari persentase RT pengguna listrik pada tahun 2011 sebanyak 37,72% dari total RT di Kota Batam, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 44,72% dan menurun menjadi 45,11% pada tahun 2015. Meskipun demikian, bila dilihat dari jumlah pelanggan listrik RT dan jumlah RT terlihat adanya peningkatan. Hal ini bermakna rumah tangga pengguna listrik bisa melakukan penghematan pemakaian listrik meskipun jumlah RT bertambah namun persentase pengguna listrik mengalami penurunan.

Tabel 2.38. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Batam

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah pelanggan listrik RT	196.294	194.351	192.580	191.766	190.667
Jumlah RT	520.310	545.249	524.143	428.787	422.709
RT pengguna listrik (%)	**37,72**	**35,64**	**36,74**	**44,72**	**45,11**

Sumber : PLN Batam

2.4.1.5 Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), yaitu melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batam Tahun 2005-2025. Ini berarti selama periode 2011-2014 telah ada dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi (Tabel 2.39).

RPJMD Kota Batam juga sudah ditetapkan menjadi Perda melalui Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2011-2016. Selain itu, selama periode 2011-2014 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal).

Tabel 2.39. Hasil Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Pemerintah Daerah Kota Batam
Periode 2011-2015

No.	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	ada	ada	ada
B.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	-	-	-	-
C.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
D.	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Lakip 2015

2.4.1.6 Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Secara umum, jumlah arus penumpang yang menggunakan transportasi laut dan udara menunjukkan tren yang meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011, jumlah orang yang berkunjung ke Batam sejumlah 6,983 juta orang melalui pelabuhan laut dan sejumlah 2,336 juta orang berkunjung melalui pelabuhan udara. Kondisi ini terus meningkat hingga pada

tahun 2015 sejumlah 8,778 juta orang berkunjung ke Batam melalui pelabuhan laut serta sejumlah 5,031 juta orang berkunjung melalui pelabuhan udara. Hal ini bermakna Kota Batam memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan, meskipun kunjungan bersifat sementara/hanya transit. Kondisi ini dapat diketahui dari rendahnya tingkat hunian kamar hotel berbintang/non berbintang.

Tabel 2.40. Jumlah Arus Penumpang Pada Pelabuhan Laut dan Udara di Kota Batam

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
		Orang	Orang	Orang	Orang	Orang
1	Pelabuhan Laut	4.647.093	7.708.012	8.229.844	8.717.652	8.777.919
2	Bandara	2.336.108	3.762.352	4.213.412	4.772.873	5.030.765
3	Jumlah	6.983.201	11.470.364	12.443.256	13.490.525	13.808.684

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Batam

Sementara itu dilihat dari ijin trayek yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam (Tabel 2.41), terlihat bahwa jenis kendaraan taksi paling banyak beroperasi di kawasan Kota Batam. Sebanyak 2.299 ijin trayek untuk taksi telah dikeluarkan selama periode 2011–2015. Sementara itu sebanyak 1.772 ijin trayek cabang telah dikeluarkan selama periode 2011– 2015. Meski demikian, apabila dilihat dari rasio ijin trayek terlihat bahwa angkutan umum di Kota Batam masih kecil. Rasio ijin trayek untuk taksi pada tahun 2011 hanya sebesar 0,00202 dan pada tahun 2015 hanya sebesar 0,00223. Hal ini berarti terdapat 2,02 taksi untuk setiap 1.000 penduduk Kota Batam pada tahun 2011,

dan sebanyak 2,23 taksi setiap 1.000 penduduk Kota Batam pada tahun 2015.

Tabel 2.41. Rasio Ijin Trayek di Kota Batam

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk	1.056.701	1.137.894	1.187.574	1.135.412	1.030.528	1.030.528
2	Jumlah izin trayek:						
	Taksi	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299
	trayek utama	631	631	631	631	631	631
	trayek cabang	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772
	trayek ranting	101	101	101	101	101	101
	angkutan karyawan	271	271	281	281	301	301
	angkutan pariwisata	83	83	98	98	105	105
3	Rasio izin trayek:						
	Taksi	0,00218	0,00202	0,00194	0,00202	0,00223	0,00223
	trayek utama	0,00060	0,00055	0,00053	0,00056	0,00061	0,00061
	trayek cabang	0,00168	0,00156	0,00149	0,00156	0,00172	0,00172
	trayek ranting	0,00010	0,00009	0,00009	0,00009	0,00010	0,00010
	angkutan karyawan	0,00026	0,00024	0,00024	0,00025	0,00029	0,00029
	angkutan pariwisata	0,00008	0,00007	0,00008	0,00009	0,00010	0,00010

Terkait uji KIR angkutan umum, dari tabel 2.42 terlihat bahwa truk dan mobil angkutan barang merupakan jenis kendaraan yang paling banyak melakukan uji KIR. Hal ini sesuai dengan fungsi Kota Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diarahkan sebagai kota industri dan perdagangan.

Tabel 2.42. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Batam

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	Jumlah uji KIR angkutan umum:						
1	Taksi	3.221	2.299	2.395	2.507	2.507	2.507
2	Oplet	1.653	1.657	1.667	1.737	1.737	1.737
3	Bis	2.566	2.618	2.660	2.763	2.897	3.004
4	Truk	13.783	14.622	15.400	17.122	18.921	20.818
5	truk tempel	645	673	722	775	840	856

2.4.1.7 Lingkungan Hidup

Penanganan sampah di Kota Batam masih belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari persentase penanganan sampah di Kota Batam yang belum 100% (Gambar 2.32). Timbulan sampah di Kota Batam dari tahun 2011 sebanyak 332.624 ton terus meningkat setiap tahunnya sehingga mencapai 432.264 ton pada tahun 2015. Meski demikian, persentase sampah yang tertangani berfluktuasi tiap tahunnya.

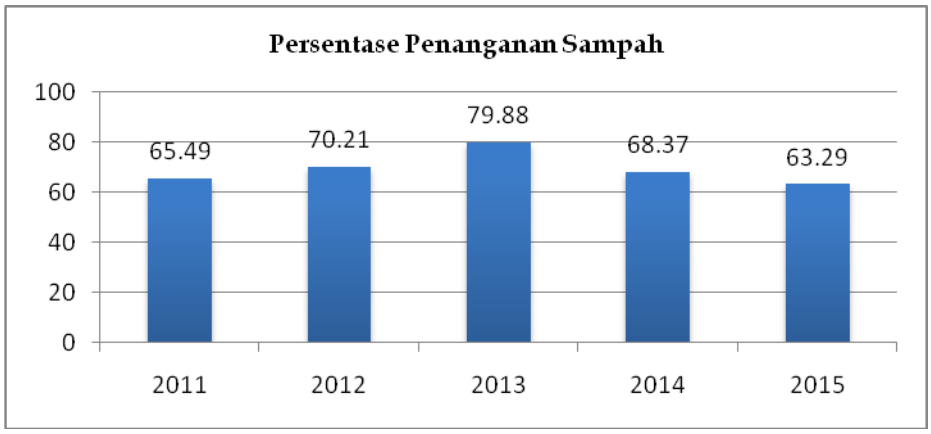

Gambar 2.32. Persentase Penanganan Sampah di Kota Batam

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam

Terkait pencemaran air, sepanjang tahun 2013-2015 Pemerintah Kota

Batam telah melaksanakan pemantauan pencemaran dan status mutu air di seluruh kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air (Gambar 2.33). Sedangkan pada tahun 2011-2012, pemantauan hanya terlaksana sebanyak 80% dari keseluruhan kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian terhadap pencemaran sumber air yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2011-2012.

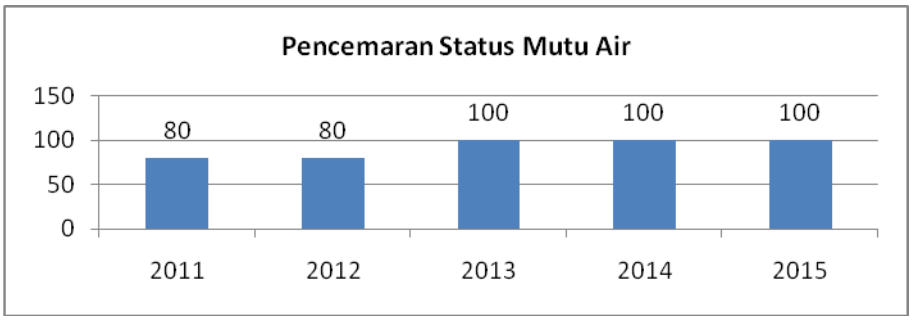

Gambar 2.33. Persentase Pemantauan Pencemaran dan Status Mutu Air di Kota Batam

Sumber : Bapedalda Kota Batam

Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL masih belum terlaksana 100% mengingat terbatasnya kemampuan SDM Pemerintah Kota Batam dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan wajib AMDAL. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL pada tahun 2015 hanya sebanyak 60% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL (Gambar 2.34). Meski demikian, capaian tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang hanya sebanyak 25% dari seluruh perusahaan wajib AMDAL.

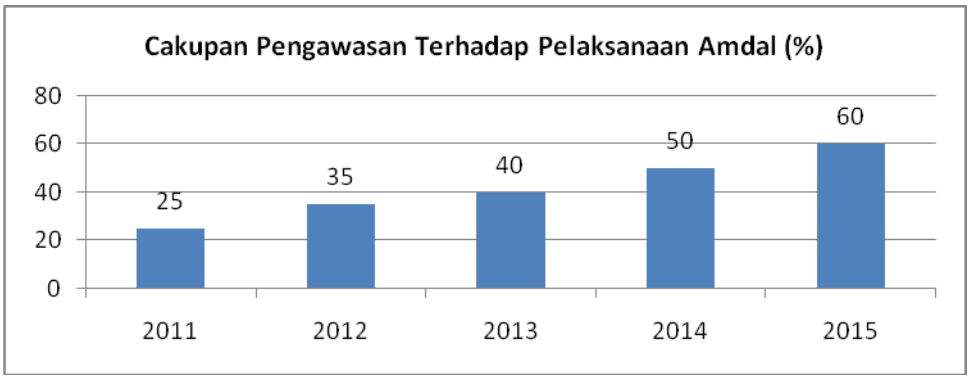

Gambar 2.34. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL di Kota Batam

Sumber : Bapedalda Kota Batam

Adapun penegakan hukum lingkungan di Kota Batam pada periode 2011-2015 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam periode 2011-2016 (Gambar 2.35). Sampai pada tahun 2015, pencapaian kinerja penegakan hukum lingkungan telah mencapai 100%. Hal ini bermakna Pemerintah Kota Batam mampu menyelesaikan kasus lingkungan yang terjadi.

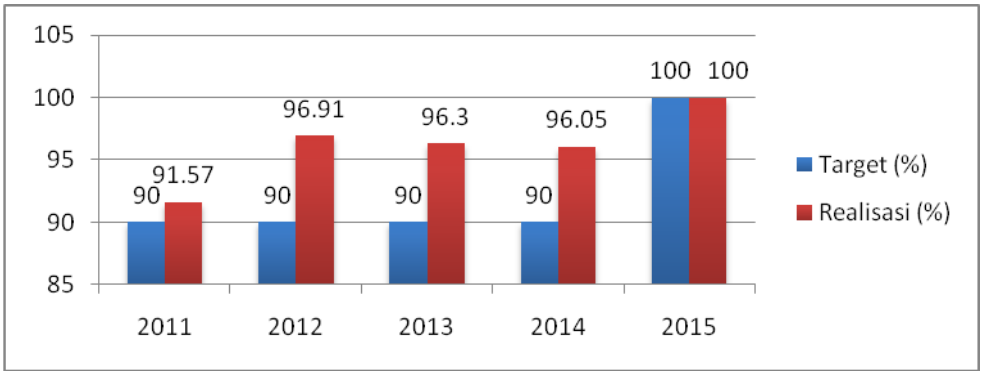

Gambar 2.35. Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Batam

Sumber : Dinas Bapedalda Kota Batam

Adapun persentase tingkat pengawasan pengendalian pencemaran air limbah (%) di Kota Batam pada periode 2011 hingga 2015 mengalami kenaikan tren (Gambar 2.36). Pada tahun 2012 hingga 2015 realisasinya

berhasil melampaui target yang telah ditentukan dalam RPJMD 2011-2016, yaitu masing-masing sebesar 28%, 46%, dan 72%. Terjadinya pencemaran lingkungan berpengaruh terhadap air tanah dangkal, sehingga pengawasan dan pengendalian pencemaran air limbah perlu ditingkatkan.

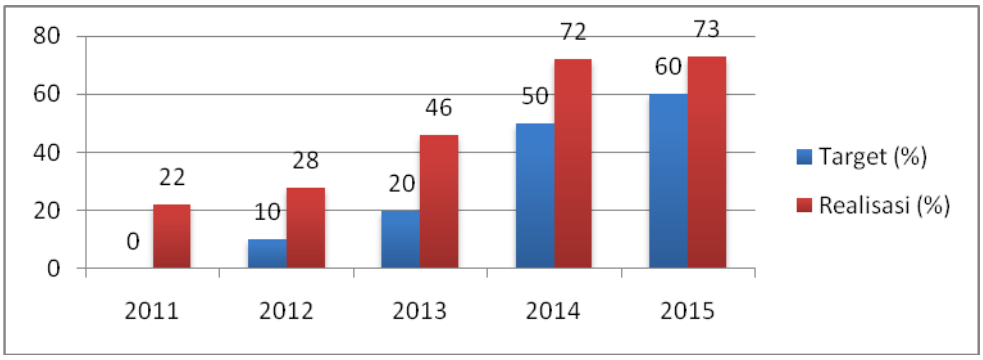

Gambar 2.36. Persentase Tingkat Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Limbah di Kota Batam

Sumber : Bapedalda Kota Batam

2.4.1.8 Kependudukan dan Catatan Sipil

Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk Kota Batam baru mencapai pada tahun 2015 baru sebesar 70,9%. Pencapaian tersebut masih dibawah SPM yaitu 100%. Lemahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan bayi yang baru lahir secara administrasi kependudukan dan adanya warga masyarakat berusia lanjut yang tidak memiliki akta lahir diduga menjadi penyebab masih adanya penduduk yang tidak memiliki akta lahir.

Begitu juga dengan persentase kepemilikan KTP penduduk Kota Batam masih belum memenuhi SPM yaitu 100%. Persentase kepemilikan KTP pada tahun 2011 sebanyak 72,44%, tahun 2012 hanya sebanyak 75,85%

dari total penduduk, dan pada tahun 2013 sebanyak 78,79% dan sampai dengan tahun 2015 persentase penduduk yang memiliki KTP sebanyak 84,99%. Belum tercapainya target 100%, disebabkan karena banyaknya warga masyarakat yang merupakan pendatang tanpa memiliki kelengkapan administrasi kependudukan.

Tabel 2.43. Penduduk Menurut Wajib dan Kepemilikan KTP Tahun 2011-2015

Tahun	Wajib KTP			Kepemilikan KTP			%
	LK	PR	Jumlah	LK	PR	Jumlah	
2010	299.901	376.181	776.082	278.835	254.757	533.592	68,75
1. 2011	437.180	408.622	845.802	320.655	292.043	612.698	72,44
2. 2012	473.912	444.515	918.427	362.536	334.054	696.590	75,85
3. 2013	437.763	401.231	838.994	346.269	314.779	661.048	78,79
4. 2014	375.664	357.318	732.982	309.547	300.592	610.139	83,24
5. 2015	370.815	348.958	719.772	312.459	299.299	611.758	84,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

Sedangkan jumlah pasangan yang memiliki akte nikah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 jumlah pasangan yang memiliki akte nikah sebanyak 2.057 pasang dan meningkat menjadi 4.534 pasangan pada tahun 2015.

Tabel 2.44. Jumlah Pasangan yang Memiliki Akte Nikah

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pasangan Memiliki Akte Nikah

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pasangan Memiliki Akte Nikah
2011	1.137.894	2.057
2012	1.235.651	1.648
2013	1.135.412	6.607
2014	1.030.528	3.426
2015	1.037.187	4.534

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam

2.4.1.9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam konteks ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita pada umumnya dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur ekonomi yang terjadi dalam proses pembangunan. Jika dilihat perkembangannya, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah cenderung menurun. Selama kurun waktu tahun 2010-2013, angkatan kerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah sebesar 15,8% (Gambar 2.37). Kondisi tersebut kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 8,23%. Sedangkan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2011-2016 sebesar 30%. Hal ini bermakna bahwa terdapat perbedaan peluang dan tingkat partisipasi antara perempuan dan laki laki dalam berkarir dalam lingkungan pemerintahan.

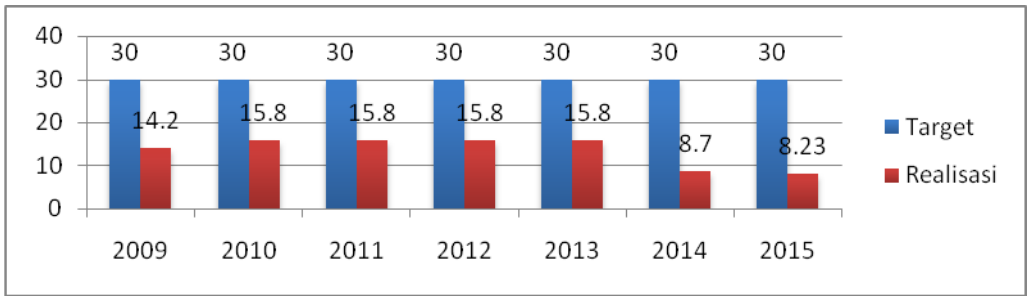

Gambar 2.37. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintah Kota Batam

Sumber : BPPPA KB Kota Batam

Adapun persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Kota Batam pada periode 2011 hingga 2015 masih belum mencapai target yang ditetapkan Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2011-2016 sebesar 30% (Gambar 2.38). Kondisi ini diduga disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan atau keterampilan perempuan pencari kerja sehingga sulit untuk bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini bermakna bahwa terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki laki dalam berpartisipasi di dalam lingkungan swasta.

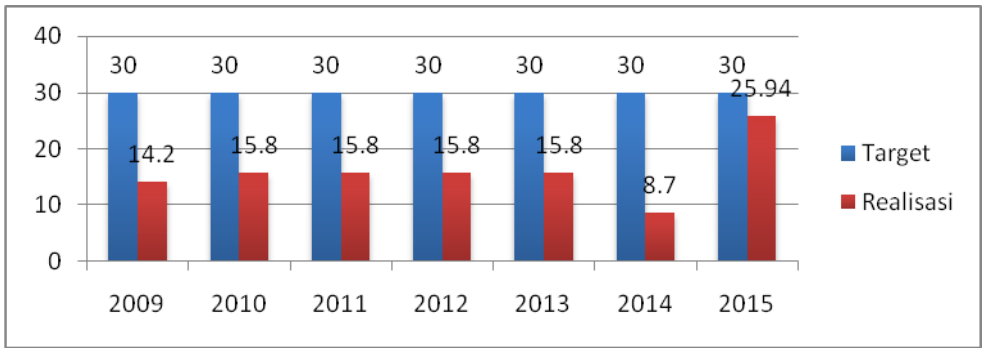

Gambar 2.38. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Batam

Sumber : BPPPA KB Kota Batam

Menurut target yang ditetapkan dalam MDG's tentang partisipasi angkatan kerja perempuan, kontribusi perempuan dalam pekerjaan diharapkan ada peningkatan. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pekerjaan di Kota Batam cenderung menurun.

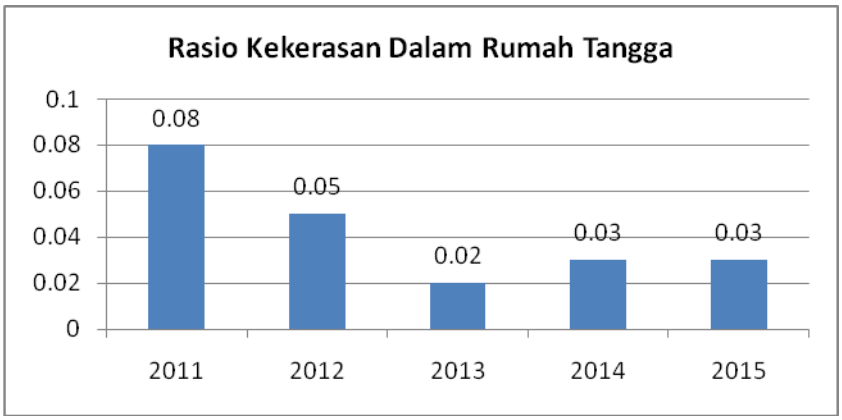

Gambar 2.39. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam
Sumber: BPPPAKB Kota Batam

Kondisi perempuan di Kota Batam relatif terlindungi. Hal ini dapat dilihat dari rasio KDRT di Kota Batam (Gambar 2.39) relatif rendah dan terus menurun sejak tahun 2011 yang sebesar 0,08 menjadi 0,03 pada tahun 2015.

2.4.1.10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Jika dilihat perkembangannya, cakupan peserta KB di Kota Batam mengalami peningkatan. Realisasi cakupan peserta KB aktif di Kota Batam pada tahun 2012, 2013 dan 2015 sudah berhasil melampaui target SPM yang ditentukan yaitu masing-masing sebanyak 73,6%, 72,7%, dan 71,94% (Gambar 2.40). Pencapaian ini berindikasi positif terhadap pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam.

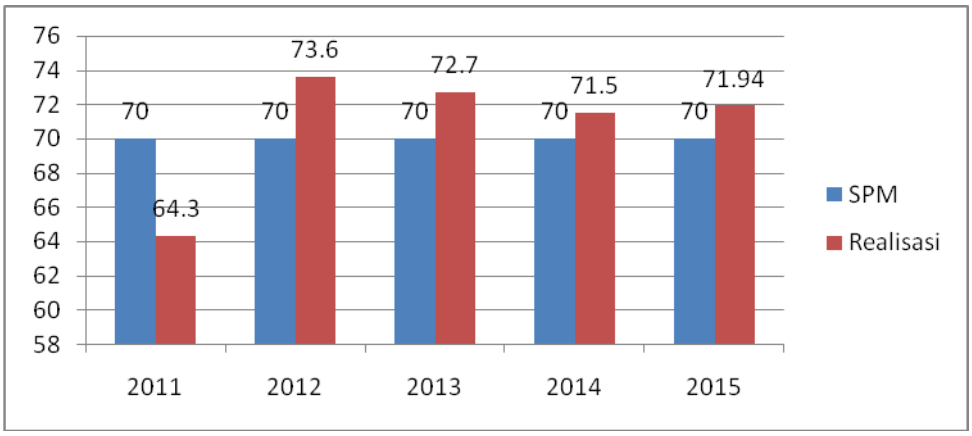

Gambar 2.40. Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Batam

Sumber : BPPPA KB Kota Batam

2.4.1.11 Sosial

Ketersediaan sarana sosial bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Batam beserta masyarakat telah menyediakan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi Nilam Suri. Sampai dengan tahun 2015 jumlah panti asuhan yang ada di Kota Batam ada sebanyak 71 panti, 1 unit panti jompo dan 1 unit panti rehabilitasi. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial berfluktuasi, pada tahun 2011 jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 1.213 orang, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 3.755 orang yang terdiri dari bantuan untuk pekerja migran dan korban bencana. Jumlah PMKS yang ada di Kota Batam tahun 2011-2015 cenderung meningkat namun penanganannya belum bisa 100% dilakukan. Persentase penanganan PMKS yang dilakukan selama tahun 2011-2015 berfluktuasi. Pada tahun 2011, PMKS yang ditangani

sebanyak 14,60%, tahun 2012 meningkat menjadi 18,50%, tahun 2013 turun menjadi 6,43% dan tahun 2014 meningkat menjadi 54,66% kemudian turun menjadi 37,58% pada tahun 2015.

Tabel 2.45. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batam

Jumlah PMKS yang ada		**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**
A	Wanita Tuna Susila	2676	2621	2621	1867	2157
B	Waria	536	522	522	483	266
C	Paca	566	566	324	809	809
C.1	Paca yang diberi bantuan	N/A	60	56	0	0
D	Eks Paca Kronis	0	0	0	0	0
E	Pekerja Migran	233	312	118	0	0
E.1	Pekerja Migran yang diberi bantuan	63	125	118	118	139
F	Keluarga Veteran	29	29	19	19	0
G	Anak Terlantar	0	1943	208	208	109
G.1	Anak Terlantar yang diberi bantuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H	Orang Gila	37	50	0	0	50
I	Lansia/Miskin	936	600	600	600	600
J	Gepeng	261	250	50	250	150
K	Korban Bencana	52	0	94	170	315
K.1	Korban Bencana yang diberi bantuan	1150	650	1000	3286	1800
L	Koms Adat Terpencil	612	0	612	7	7
M	Rumah Tak Layak Huni	3000	696	696	1714	898
M.1	RTHS yang direnovasi	100	300	696	816	747
N	Eks Korban Napza	0	0	0	0	0
O	Eks Napi	0	92	0	0	0
P	Wanita Rawan Sosial	286	286	539	0	0
Jumlah Total PMKS yang ada		8991	6135	29074	10918	8028
Jumlah Total PMKS yang tertangani		1313	1135	1870	5968	3017
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		**14.60**	**18.50**	**6.43**	**54.66**	**37.58**

Sumber : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam

Selain masalah PMKS, Dinas Sosial Kota Batam juga menangani Program Keluarga Harapan (PKH). PKH adalah program perlindungan sosial yang

memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuan program ini adalah untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan millennium. Adapun tujuan dalam jangka pendek adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Program ini membantu mewujudkan 5 komponen tujuan MDG's, yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; serta Pengurangan kematian ibu melahirkan.

Realisasi Program Keluarga Harapan di Kota Batam pada periode 2011 hingga 2014 telah mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2011-2016 (Gambar 2.41). Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk mewujudkan tujuan MDG's dan memutus rantai kemiskinan di Kota Batam.

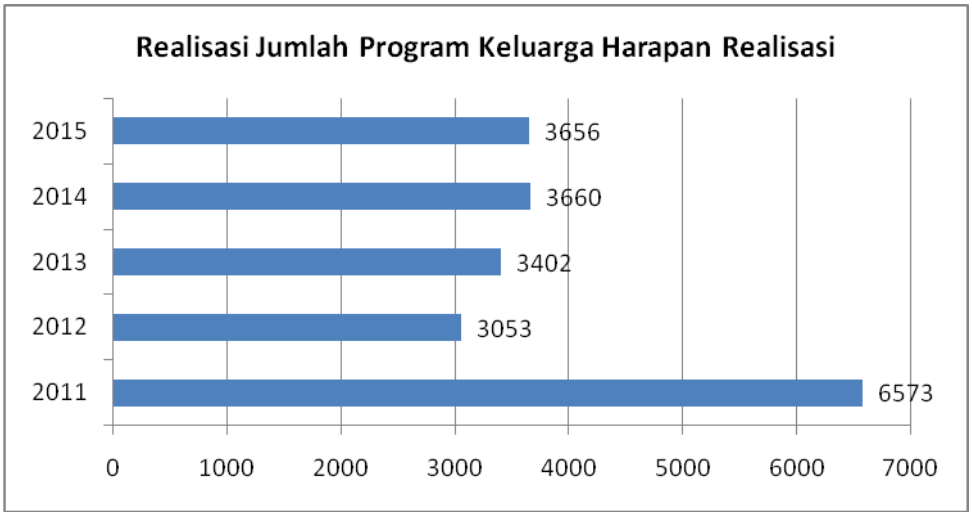

Gambar 2.41. Jumlah Program Keluarga Harapan yang Direalisasikan di Kota Batam

Sumber : Dinas Sosial Kota Batam

2.4.1.12 Ketenagakerjaan

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, dan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang masuk ke dalam kelompok tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Di Kota Batam, hasil kinerja urusan ketenagakerjaan memperlihatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan angkatan kerja yang ditempatkan menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2011, TPAK Kota Batam sebesar 68,10% dan pada tahun 2015 menurun menjadi 67,46%. Persentase pencari kerja yang ditempatkan juga menunjukkan tren meningkat, dari sebesar 43,56% pada tahun 2011 meningkat menjadi 47,66% di tahun 2015.

Tabel 2.46. Hasil Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	Angka Sengketa Pengusaha - Pekerja Per Tahun	186	107	172	243	280
B	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	484.678	518.643	525.57	537.914	558.038
C	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,10	70,77	68,68	67,63	67,46
D	Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)	43,56	41,27	33,63	34,62	47,66

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
E	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,16	4,90	6,09	6,64	6,09
F	Keselamatan dan perlindungan	N/A	5.952	5.444	4.854	4.798
G	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	24	19	34	42	-

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Angka sengketa antara pengusaha dan pekerja per tahun menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2011 terjadi 186 sengketa dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 280 sengketa. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Kota Batam, untuk terus mengurangi angka sengketa agar iklim ketenagakerjaan di Kota Batam dalam kondisi kondusif. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfluktuasi dan cenderung meningkat, namun pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan tren menurun, dimana pada tahun 2014 sebesar 6,64 persen menjadi 6,09 persen di tahun 2015. Hal ini bermakna jumlah pengangguran terbuka di Kota Batam menurun pada akhir periode RPJMD. Selanjutnya secara rinci hasil kinerja urusan ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.46.

2.4.1.13 Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah dimaksudkan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis

dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Secara umum, persentase aktif rata-rata di kota Batam di bawah 50% dari keseluruhan koperasi yang ada di Kota Batam. Hal tersebut menunjukkan bahwa keaktifan koperasi di Kota Batam masih rendah, meskipun trennya meningkat. Hal ini terjadi karena minat masyarakat untuk menggunakan hasil produksi koperasi rendah atau kemampuan manajemen koperasi belum dapat mengelola sumberdaya secara optimal. Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak eksternal. Persentase jumlah usaha mikro dan kecil mengalami penurunan selama kurun waktu 2011-2015. Pada tahun 2011, jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 93,27% dari seluruh KUMKM di Kota Batam mengalami penurunan yang signifikan menjadi 23% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan penurunan yang tajam terhadap usaha mikro dan usaha kecil di Kota Batam sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menggairahkan kembali usaha-usaha tersebut ke depan. Tentunya diharapkan usaha mikro dan kecil ini akan menjadi penopang usaha menengah dan dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

Persentase UKM non-BPR juga mengalami penurunan, dimana persentase UKM non-BPR/LKM pada tahun 2011 sebanyak 89,10% menurun hingga menjadi 23,14% pada tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan penyerapan kredit untuk UMK sehingga perlu upaya untuk meningkatkan penyerapannya dapat mendorong aktivitas ekonomi UKM di Kota Batam.

Tabel 2.47. Hasil Kinerja Urusan KUMKM Kota Batam

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	93,27%	95,27%	95,48%	85,40%	23%
2	Persentase Koperasi aktif	41,90%	43,20%	47,80%	47,80%	63%
3	Persentase UKM non BPR/LKM	89,10%	65,31%	65,90%	64,03%	23,14%

Sumber : Dinas PMPKUKM Kota Batam

2.4.1.14 Penanaman Modal

Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berskala nasional di Kota Batam pada tahun 2011 mencapai Rp 112,987 milyar. Nilai investasi tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 143,995 milyar pada tahun 2012, dan Rp 251,326 milyar pada tahun 2013. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional dan global. Pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 245,352 milyar (Tabel 2.48). Target investasi yang dibuat oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM PTSP) selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp 4,7 triliun. Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp 865.846.000.000 atau sebesar 18,24%. Secara umum perolehan nilai investasi PMDN di Kota Batam tidak mencapai target yang ditetapkan oleh BPM PTSP Kota Batam. Target investasi tersebut tidak dapat terealisasi karena asumsi yang menjadi penetapan nilai target adalah rencana investasi berdasarkan izin prinsip yang diterbitkan oleh BPM PTSP pada tahun berjalan, sementara masa berlaku izin prinsip adalah

1-5 tahun berdasarkan karakteristik bidang usahanya, sehingga investor tidak dapat dipastikan akan merealisasikan investasinya pada tahun yang sama dengan penetapan izin prinsipnya.

Selain itu, nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) berskala nasional di Kota Batam mengalami fluktuasi. Nilai investasi terbesar terjadi pada tahun 2015 dengan nilai investasi mencapai US$ 460,225 juta. Adapun nilai investasi terendah terjadi pada tahun 2012 dengan nilai investasi mencapai US$ 133,69 juta.

Apabila dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja, maka dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada PMA. Meski demikian, apabila melihat trennya maka dapat diketahui bahwa rasio daya serap tenaga kerja pada PMA menunjukkan tren yang menurun, sedangkan pada PMDN menunjukkan tren yang meningkat (Tabel 2.48).

Tabel 2.48. Hasil Kinerja Penanaman Modal di Kota Batam

No	Indikator	2011		2012		2013		2014		2015	
		Terdaftar	Realisasi	Terdaftar	Realisasi	Terdaftar	Realisasi	Terdaftar	Realisasi	Terdaftar	Realisasi
1.		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)									
A.	PMDN	65	2	201	4	106	22	48	25	38	19
B.	PMA	99	90	94	53	79	31	147	128	164	58
2		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)									
A.	PMDN (Juta Rp)	112.235,27	112.987,93	603.936,11	143.955,05	2.589.496,04	251.326,27	220,42	112.225,60	2.450.443	245.352
B.	PMA (Juta US $)	N/A	167,10	N/A	133,69	351,23	10.146,50	968,11	281,73	1.987.196.664	460.225.794
3.		Rasio daya serap tenaga kerja									
A.	PMDN	1.067	316	201	286	1708	582	1699	870		832
B.	PMA	12016	9861	7205	8303	8303	2952	N/A	N/A		3.040
4.	Kenaikan/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	N/A	752,66	N/A	-459.981	N/A	-2.338.169	N/A	-108.193		133.126

Sumber : BPM dan PTSP

2.4.1.15 Kebudayaan

Pada tahun 2011, penyelenggaraan festival seni dan budaya yang diadakan di Kota Batam hanya terjadi satu kali, dan meningkat hingga 10 festival pada tahun 2014, namun menurun menjadi 7 festival di tahun 2015. Festival diselenggarakan sebagai wahana untuk dapat melestarikan seni dan budaya yang ada di masyarakat Kota Batam. Selain itu, festival seni dan budaya dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk menginap di Kota Batam mengingat Kota Batam banyak dikunjungi wisatawan dari sejumlah negara. Namun banyaknya kunjungan wisatawan tidak disertai dengan meningkatnya tingkat hunian hotel di Kota Batam.

Tabel 2.49. Hasil Kinerja Urusan Kebudayaan Kota Batam

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1	7	4	10	7
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	0	0	0	0	0
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	0	0	0	0

Sumber : Disparbud Kota Batam

2.4.1.16 Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Hasil kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Batam dapat dilihat

dari penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga yang diselenggarakan dari tahun 2011 sampai 2015. Untuk jumlah organisasi pemuda pada tahun 2015 tercatat sebanyak 56 organisasi, kemudian untuk jumlah organisasi olahraga sebanyak 29 organisasi. Sedangkan fasilitas gelanggang/balai remaja selama periode 2011-2015 tidak terdapat penambahan yakni hanya memiliki 1 buah, kemudian fasilitas lapangan olahraga pada tahun 2015 tercatat 11 lapangan. Ketersediaan fasilitas olahraga dan balai remaja ini sangat penting sebagai pusat aktivitas dari organisasi kepemudaan dan olahraga untuk penyelenggaraan kegiatan organisasi dalam rangka meningkatkan kemampuan para atlet dan kreativitas para pemuda. Dalam konteks ini, penambahan fasilitas penunjang organisasi kepemudaan dan olahraga menjadi sangat penting.

Tabel 2.50. Hasil Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah
Kota Batam Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah organisasi pemuda	N/A	N/A	N/A	53	56
2	Jumlah organisasi olahraga	28	28	29	29	29
3	Jumlah kegiatan kepemudaan	6	8	9	13	13
4	Jumlah kegiatan olahraga	2	3	8	10	10
5	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	1	1	1	1	1
6	Lapangan olahraga	N/A	10	11	11	11

Sumber : Kanpora Kota Batam

2.4.1.17 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pada Tabel 2.51, dapat diketahui bahwa kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP serta kegiatan pembinaan politik daerah tidak mengalami

peningkatan sejak tahun 2012 sampai dengan 2015. Padahal jumlah ormas di Kota Batam cukup banyak bahkan mencapai 328 ormas pada tahun 2014, walaupun di tahun 2013 dan 2015 mengalami penurunan. Sedikitnya kegiatan pembinaan ini berdampak pada sedikitnya kegiatan kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa yang diselenggarakan. Bahkan, pada pemilu tahun 2014, tingkat partisipasi masyarakat hanya sebesar 48%.

Tabel 2.51. Hasil Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Batam Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	N/A	1	1	1	1
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	1	2	2	2	**2**
3	Jumlah kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa	1	3	3	3	4
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	**N/A**	**N/A**	N/A	**48**	N/A
5	Jumlah Ormas di Kota Batam	N/A	139	32	328	**56**

Sumber : Kesbangpol Kota Batam

2.4.1.18 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A. Rasio Jumlah Satpol PP dan Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk pada periode 2011-2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk sebesar 310, pada tahun 2015 meningkat menjadi 795 per 10.000 penduduk. Kondisi ini juga disertai dengan meningkatnya cakupan patroli petugas Satpol PP, dari 200 cakupan patrol pada tahun 2011 menjadi 240 cakupan patroli pada tahun 2015. Meskipun

demikian, berdasarkan SPM cakupan patroli petugas Satpol PP adalah sebanyak 3 kali dalam 24 jam, yang berarti sebanyak 1.080 kali dalam satu tahun. Dengan demikian, cakupan patroli petugas Satpol PP di Kota Batam belum mencapai standar. Untuk mengejar standar tersebut perlu adanya peningkatan cakupan jumlah patroli oleh petugas Satpol PP dengan cara melalui perekrutan personil baru 310 orang Satpol PP untuk 10.000 penduduk. Data mengenai rasio jumlah Satpol PP dan cakupan patroli disajikan dalam Tabel 2.52.

Tabel 2.52. Hasil Kinerja Urusan Perangkat Daerah Satpol PP Pemerintah Daerah Kota Batam
Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 penduduk	310	310	316	544	795
2	Cakupan Patroli petugas Satpol PP	200	200	210	220	240

Sumber : Satpol PP Kota Batam

B. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kota Batam selama periode 2010-2015 mengalami penurunan, pada tahun 2011 persentase penduduk miskin sebesar 6,11% dan pada tahun 2015 menjadi 4,97%. Meskipun kondisi pertumbuhan

ekonomi Kota Batam mengalami perlambatan.

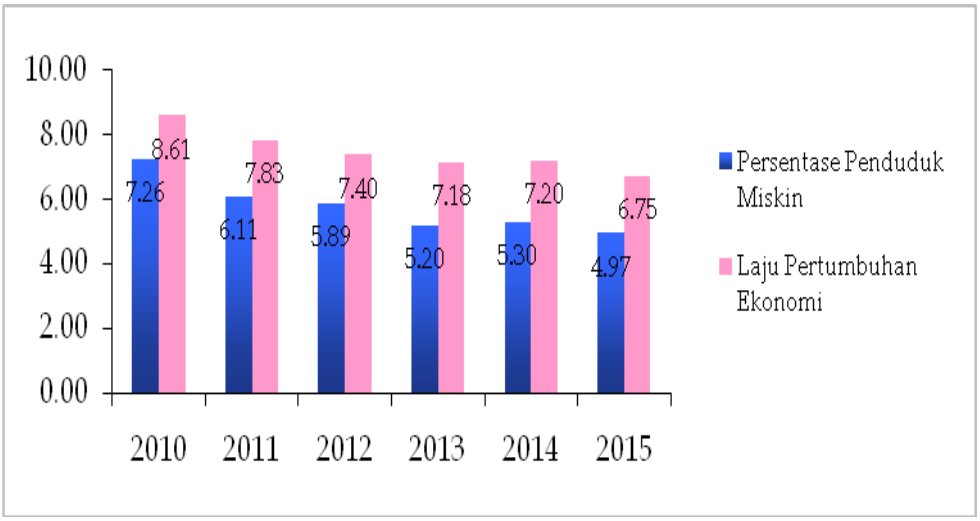

Gambar 2.42. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kota Batam

Sumber : BPS Kota Batam

2.4.1.19 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan. Dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan inisiatif dari masyarakat untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat dan desa hanya bisa terjadi apabila masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Pada Tabel 2.53. dapat dilihat bahwa jumlah kelompok binaan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berprestasi dan PKK aktif dari tahun 2011 hingga 2015 tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya administrasi

pencatatan yang dilakukan pada tingkat PKK kelurahan dan kecamatan atau usaha pembinaan yang dilakukan oleh kader-kader PKK di lingkungan wilayah kerja masing-masing masih belum maksimal. Untuk itu upaya pendidikan danlatihan, pembinaan, sosialisasi serta monitoring dengan melibatkan kader-kader PKK di semua jenjang perlu terus dilakukan agar tercipta kader-kader PKK yang punya motivasi tinggi serta profesional dalam menjalankan perannya.

Tabel 2.53. Hasil Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah
Kota Batam Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	44	44	44	44	44
3	Jumlah LSM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	LPM Berprestasi	3	3	3	3	3
5	PKK aktif	64	64	64	64	64
6	Posyandu aktif	30	34	38	N/A	N/A
7	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : PMPKUKM Kota Batam dan BPPPA-KB

2.4.1.20 Statistik

Buku Kota Batam Dalam Angka selama periode 2011-2015 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota Batam yang dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kota Batam selama periode 2011-2015 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Batam. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam Tabel2.54.

Tabel 2.54. Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Buku Batam Dalam Angka	Ada	ada	ada	ada	ada
2	Buku PDRB Batam	Ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bapppeda Kota Batam

2.4.1.21 Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kota Batam pada tahun 2011 sudah mencapai 100%. Meskipun demikian, dalam perspektif ke depan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola

kearsipan yang handal dan profesional perlu terus ditingkatkan agar kualitas pengelolaan arsip selalu terjaga. Selama tahun 2011-2015 tidak terdapat kegiatan dalam peningkatan SDM pengelola kearsipan, namun kegiatan tersebut pernah dilakukan pada tahun 2009. Lebih lanjut informasi mengenai kearsipan dapat dilihat dalam Tabel2.55.

Tabel 2.55. Hasil Kinerja Urusan Kearsipan Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	100	100	100	100	100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	-	-	-	-

Sumber : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Batam

2.4.1.22 Komunikasi dan Informatika

Sistem komunikasi, informasi dan media massa di Kota Batam ditunjang melalui pengembangan jaringan komunikasi, kondisi perkembangan wartel/warnet di masyarakat, perkembangan jumlah surat kabar nasional/lokal, pengembangan informasi dan komunikasi melalui penyiaran radio/TV lokal serta pembangunan *website* pemerintah daerah.

Penerapan teknologi informasi melalui media *online* dalam hal ini *website* telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat luas. Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Batam memiliki 54 *website*, salah satunya adalah http://www.batamkota.go.id/. Dalam *website* tersebut terdapat berbagai informasi terkait Kota Batam yang dapat secara mudah diakses oleh masyarakat.

Lebih jauh lagi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, layanan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya menjadi sebuah keharusan. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran pengelola pemerintah kota diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kota Batam dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

Kebutuhan akan kemudahan akses internet bagi masyarakat Kota Batam sudah dirasa cukup besar, hal ini sebagai implikasi dari perkembangan Kota Batam sebagai pusat jasa dan industri modern. Sehingga pembangunan jaringan internet yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Batam menjadi pilihan strategis yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akses internet bagi masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip internet sehat. Informasi mengenai kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel2.56.

Tabel 2.56. Hasil Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kota Batam
Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	0,054	0,061	0,077	0,025	0,128
2	Jumlah surat kabar nasional/lokal	19	26	37	6	6
3	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	16	15	15	11	11
4	Web site milik pemerintah daerah	54	54	55	54	54

Sumber : Badan Kominfo Kota Batam

2.4.1.23 Perpustakaan

Ketersediaan perpustakaan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Berdasarkan tren, jumlah pengunjung perpustakaan dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata pengunjung per hari lebih dari 100 orang, hal ini menandakan animo masyarakat dalam membaca cukup tinggi. Saat ini di Kota Batam hanya terdapat 1 perpustakaan, namun demikian ada penambahan layanan perpustakaan keliling dengan 2 unit mobil dan terdapat 8 pos perpustakaan yang tersebar di 5 kecamatan. Dalam perspektif ke depan, fungsi perpustakaan sebagai sumber informasi dan sumber ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan masyarakat harus terus ditingkatkan. Informasi mengenai kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel2.57.

Tabel 2.57. Hasil Kinerja Urusan Perpustakaan Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Perpustakaan	1	1	1	1	1
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	54.720	57.600	57.600	60.480	60.810
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	32.463	33.010	34.261	35.674	36.524

Sumber : Arsip dan Perpustakaan Kota Batam

2.4.1.24 Pertanahan

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan merupakan wahana atau landasan dalam menciptakan

Sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional yang mencakup konsepsi, kebijakan dan sistem Pertanahan Nasional. Namun di sisi lain landasan pengelolaan penatagunaan tanah yang ada di Pulau Batam masih mengacu pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di daerah Industri Pulau Batam telah menetapkan memberikan hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terhadap seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam termasuk areal tanah di gugusan Pulau Janda Berhias, Tanjung Sauh, Ngenang dan Pulau Kasam sesuai dengan syarat-syarat/ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi Batam (Tanah Melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, namun dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, di samping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan. Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami penggusuran, hal tersebut dikarenakan batas-batasnya tidak jelas dan tidak terdokumentasikan secara tertulis.

Dalam upaya melestarikan dan mempertahankan kelestarian budaya melayu, telah dikeluarkan Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Lama/Tua di Kota Batam, yang kemudian ditindaklanjuti oleh

Pemerintah Kota Batam dengan melakukan pengukuran dan pemetaan kampung tua yang ada di Kota Batam, dimana kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2006 dan telah selesai dilakukan pada tahun 2011. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melestarikan kampung tua yang bernuansa Melayu dan perlindungan hak masyarakat melayu.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengukuran dan pemetaan kampung tua, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala BP Kawasan Batam Nomor Kpts 41/SKB/HK/I/2012 – Nomor 03/SKB/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Tim Penyelesaian Kampung Tua di Kota Batam. Mulai tahun 2012-2014 telah dilakukan (1) kegiatan verifikasi kampung tua di 33 lokasi kampung tua yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang beranggotakan unsur-unsur BP Kawasan, RKWB (Rumpun Khasanah Warisan Budaya), dan Pemko Batam, (2) kegiatan pemasangan patok batas di 12 lokasi kampung tua (2014-2015) dan 21 lokasi kampung tua (rencana tahun 2016), dan dilanjutkan dengan (3) kegiatan inventarisasi lahan masyarakat perkampungan tua pada tahun 2015 di 13 lokasi kampung tua dan pada tahun 2016 direncanakan dilaksanakan di 20 lokasi kampung tua.

Sampai dengan tahun 2015, progres penyelesaian kampung tua di Kota Batam telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan telah ditetapkan Penetapan Lokasi (PL) Kampung Tua oleh BP Batam pada 7 (tujuh) lokasi, yaitu Kampung Tua Nongsa Pantai, Batu Besar, Kampung Panau, Tanjung Riau, Cunting, Sei Binti, dan Sei Lekop. Dari 7 (tujuh) PL Kampung Tua yang telah diterbitkan, ada 2 (dua) PL yang tidak sesuai luasannya dengan usulan Tim dan Hasil Kesepakatan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan Batam yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri, yaitu kampung tua Batu Besar dan kampung tua Kampung Panau.

Penyelesaian kampung tua memerlukan kesungguhan, keseriusan, dan komitmen pihak-pihak terkait terutama BP Kawasan Batam, sehingga pengakuan hak masyarakat perkampungan tua dapat segera terwujud, serta terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung tua. Selanjutnya dilakukan pemberdayaan terhadap kampung tua tersebut melalui legalitas lahan, penataan kampung tua, dan peningkatan infrastruktur pendukung kemajuan kampung tua di berbagai bidang.

Tabel 2.58. Kampung Tua Kota Batam

No	Nama Kampung	Luas Verifikasi (Ha)			Kesepakatan TIM	PL BP	Tahun Verifikasi	Tahun Inventarisasi	Keterangan
		Pemko	Masy	BP					
1	Nongsa Pantai	46,47	17,58	17,58	17,58	17,58	2012	2015	Sepakat
2	Batu Besar	118,58	102,10	59,75	98,65	59,75	2012	2015	Sepakat dengan catatan
3	Kampung Panau	89,38	22,00	17,43	22,00	17,43	2012	2015	Sepakat dengan catatan
4	Tanjung Riau	16,44	43,40	23,80	23,80	23,01	2012	2015	Sepakat
5	Cunting	8,01	8,01	6,98	6,98	6,98	2012	2015	Sepakat
6	Sei Binti	10,86	10,86	6,01	6,01	6,01	2013	2015	Sepakat
7	Sei Lekop	3,58	3,58	1,90	1,90	1,90	2013	2015	Sepakat
8	Tiawangkang	10,17	9,84	9,84	9,84	-	2013	2015	Sepakat
9	Bakau Serip	7,06	2,74	2,74	2,74	-	2013	2015	Sepakat
10	Kampung Tereh	17,01	9,76	9,76	9,76	-	2013	2015	Sepakat
11	Tanjung Gundap	117,39	14,88	8,88	14,88	-	2013	2015	Sepakat dengan catatan
12	Teluk Lengung	30,98	37,98	30,98	37,98	-	2013	2015	Sepakat dengan catatan
13	Setengar	70,73	70,73	70,73	70,73	-	2014	2016	Sepakat
14	Bagan	100,58	100,58	35,42	100,58	-	2014	2016	Sepakat dengan

No	Nama Kampung	Luas Verifikasi (Ha)			Kesepakatan TIM	PL BP	Tahun Verifikasi	Tahun Inventarisasi	Keterangan
		Pemko	Masy	BP					
									catatan
15	Piayu Laut	93,82	93,82	14,38	14,38	-	2014	2016	Sepakat dengan catatan
16	Patam Lestari	13,58	23,58	5,03	23,58	-	2014	2016	Sepakat dengan catatan
17	Tembesi	23,05	23,05	10,65	23,05	-	2014	2016	Sepakat dengan catatan
18	Telaga Punggur	11,54	6,37	5,37	6,37	-	2014	2016	Sepakat dengan catatan
19	Batu Merah	68,58	68,58	9,00	68,58	-	2014	2016	Sepakat dengan catatan
20	Sei Tering	54,25	54,25	1,90	1,90	-	2014	2016	Sepakat
21	Teluk Mata Ikan	77,67	77,67	8,95	36,52	-	2014	2016	Sepakat dengan catatan
22	Dapur 12	10,79	10,03	5,53	10,03	-	2014	2016	Sepakat dengan catatan
23	Kampung Melayu	96,85	135,60	-	96,85	-	2014	2016	Verifikasi BP
24	Kampung Tengah	180,33	50,78	-	50,78	-	2014	2016	Verifikasi BP
25	Kampung Jabi	110,81	110,81	-	110,81	-	2014	2016	Verifikasi BP
26	Tanjung Bemban	165,46	68,22	-	68,22	-	2014	2016	Verifikasi BP
27	Bengkong Sadai	38,42	38,42	-	38,42	-	2014	2016	Verifikasi BP
28	Tanjung Sengkuang	32,50	34,00	-	32,50	-	2014	2016	Verifikasi BP
29	Belian	20,71	20,71	0,30	20,71	-	2014	2016	Belum Sepakat

No	Nama Kampung	Luas Verifikasi (Ha)			Kesepakatan TIM	PL BP	Tahun Verifikasi	Tahun Inventarisasi	Keterangan
		Pemko	Masy	BP					
30	Tanjung Uma	55,82	80,00	60,80	80,00	-	2014	2016	Belum Sepakat
31	Panglong	4,05	34,40	4,05	34,40	-	2014	2016	Sepakat dengan catatan
32	Tanjung Buntung	20,39	20,43	-	20,39	-	2014	2016	Verifikasi BP
33	Teluk Nipah	9,41	9,41	-	9,41	-	2014	2016	Verifikasi BP
34	Bengkong Laut	43,90	43,90	-	43,90	-	2014	2016	Verifikasi BP

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.2.1 Pertanian

Meskipun Kota Batam bukan merupakan wilayah pertanian, namun terdapat beberapa kawasan yang digunakan oleh masyarakat untuk aktivitas pertanian palawija dan perkebunan. Adapun kontribusi sektor pertanian di Kota Batam terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan selama periode 2011-2013. Pada periode yang sama, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tanaman pangan turut meningkat. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59. Hasil Kinerja Urusan Pertanian Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB (Juta Rupiah)					
A. Atas dasar harga berlaku (ADHB)		1,110.58	1,214.15	1,333.99	N/A	N/A

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
B. Atas dasar harga konstan (ADHK)		597.50	603.53	614.27	N/A	N/A
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (Juta Rupiah)					
A. Atas dasar harga berlaku (ADHB)		22,992.93	24,954.05	27,105.09	N/A	N/A
B. Atas dasar harga konstan (ADHK)		11,843.42	11,962.55	12,127.63	N/A	N/A
3	Penduduk yang Bekerja di Sektor Pertanian Tanaman Pangan					
Jumlah		5,737	5,900	6,846	9,328	6,418

Sumber : BPS Kota Batam dan Dinas KP2K

2.4.2.2 Kehutanan

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya kehutanan meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta pengambilan daun-daunan, getah-getahan serta akar-akaran, termasuk juga kegiatan perburuan. Komoditi hasil kehutanan diantaranya adalah; kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, arang, bambu, terpentin, kopal, menjangan, babi hutan serta hasil hutan lainnya.

Tabel 2.60. Hasil Kinerja Urusan Kehutanan Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (Juta Rupiah)					
	A. Atas dasar harga berlaku	4,048.33	4,283.26	4,515.41	N/A	N/A

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	B. Atas dasar harga konstan	1,761.22	1,762.13	1,762.66	N/A	N/A

Sumber : BPS Kota Batam

Adapun kontribusi sektor kehutanan di Kota Batam terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan dilihat dari harga konstan (Tabel 2.60). Hal ini dapat bermakna adanya peningkatan produktivitas sektor kehutanan selama periode 2011-2013.

2.4.2.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

Aktivitas pertambangan di Kota Batam berupa penggalian dan pemotongan lahan (*cut and fill*) untuk keperluan pembangunan jalan, perumahan, dan infrastruktur lainnya. Adapun kontribusi sektor pertambangan di Kota Batam terhadap PDRB pada periode 2011-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya (Tabel 2.61). Hal ini bermakna adanya peningkatan produktivitas sektor pertambangan selama periode tersebut.

Tabel 2.61. Hasil Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)					
	A. Atas dasar harga berlaku	57,337.00	64,584.40	72,160.15	N/A	N/A
	B. Atas dasar harga konstan	39,137.46	39,532.75	39,856.92	N/A	N/A

Sumber : BPS Kota Batam

2.4.2.4 Pariwisata

Kota Batam merupakan salah satu kota destinasi wisata unggulan Provinsi Kepulauan Riau, nasional bahkan internasional. Kota Batam menempati urutan ke 3 dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak setelah Bali dan Jakarta. Pada tahun 2015, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batam sebanyak 1,5 juta jiwa. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 62. Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2011 – 2015 (orang)

Periode	2011	2012	2013	2014	2015
Januari	77,925	102,630	89,250	119,054	114,478
Februari	86,318	83,089	105,380	97,445	119,642
Maret	87,776	103,626	120,271	122,019	124,019
April	92,055	93,813	93,163	111,929	125,816
Mei	96,206	94,117	109,335	115,323	148,920
Juni	111,619	117,049	126,277	140,218	132,569
Juli	108,383	92,636	91,056	101,996	109,931
Agustus	84,918	95,725	112,340	111,455	134,540
September	90,569	95,423	108,215	113,090	117,089
Oktober	95,250	102,251	103,511	126,169	123,750
November	100,404	101,881	123,835	123,505	124,983
Desember	130,158	137,368	153,797	171,907	170,081
Januari-Desember	1,161,581	1,219,608	1,336,430	1,454,110	1,545,818

Jumlah kunjungan wisman ini secara langsung akan meningkatkan nilai tambah pada sektor perdagangan, hotel, restoran, transportasi, hiburan dan rekreasi yang pada akhirnya akan meningkatkan PDRB Kota Batam. Adapun

kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Batam periode 2011-2015 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.63 di bawah ini.

Tabel 2.63. Hasil Kinerja Urusan Pariwisata Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2014	2014	2015
1	Kunjungan wisata					
Jumlah (jiwa)		1,161,581	1,219,608	1,336,430	1,454,110	1.545.818
2	Kontribusi hiburan dan rekreasi terhadap PDRB (Juta Rupiah)					
A. Atas dasar harga berlaku (ADHB)		86,680.96	97,697.55	110,241.91	N/A	N/A
B. Atas dasar harga konstan (ADHK)		47,582.92	49,131.96	51,067.76	N/A	N/A
3	Kontribusi hotel terhadap PDRB (Juta Rupiah)					
A. Atas dasar harga berlaku (ADHB)		615,889.97	710,860.20	822,820.69	N/A	N/A
B. Atas dasar harga konstan (ADHK)		347,448.69	375,661.52	402,504.98	N/A	N/A
4	Kontribusi restoran terhadap PDRB (Juta Rupiah)					
A. Atas dasar harga berlaku (ADHB)		597,238.75	687,899.59	801,678.19	N/A	N/A
B. Atas dasar harga konstan (ADHK)		137,601.31	150,824.80	183,041.25	N/A	N/A

Sumber : BPS Kota Batam

2.4.2.5 Kelautan dan Perikanan

Kegiatan sektor kelautan dan perikanan di Kota Batam meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar maupun air asin. Komoditi perikanan mencakup berbagai jenis ikan, antara lain :

- Kelompok pelagis (ikan tongkol krai dan tenggiri),
- Kelompok pelagis kecil (ikan teri, selar, kembung, tembang dan gulamah),
- Kelompok ikan demersal (manyung, bawal putih, bawal hitam, belanak, dan kakap putih),
- Kelompok ikan karang (kakap merah/ bambangan, ekor kuning/ pisang-pisang, kerapu karang, ikan baronang dan lencam),
- Kelompok *crustacea* (udang putih, kepiting dan rajungan),
- Kelompok moluska (cumi-cumi dan sotong).

Jumlah produksi perikanan di Kota Batam mengalami peningkatan, tahun 2011 sebesar 28.440 ton, meningkat menjadi 32.838,36 ton pada tahun 2015. Hal ini juga diikuti dengan pertambahan jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) baik perikanan tangkap, maupun perikanan budidaya. Dalam konteks ini, peningkatan produksi perikanan perlu didukung dengan usaha pengolahan dan pemasaran yang baik agar dapat meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan RTP. Selain itu, kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kota Batam pun mengalami peningkatan pada periode 2009-2013. Adapun informasi lebih spesifik dapat dilihat pada Tabel 2.64 di bawah ini.

Tabel 2.64. Hasil Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kota Batam Periode 2011-2015

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Produksi perikanan(ton)	28.440,00	28.533,00	30.249,00	32.513,23	32.838,36
A. Perikanan Tangkap		26.220,00	26.293,00	27.897,00	30.095,61	30.396,56
B. Perikanan Budidaya		2.220,00	2.240,00	2.352,00	2.417,62	2.441,80
2.	Jumlah rumah tangga perikanan					
A. Perikanan		9.492	9.501	14.134	14.155	14.297

No	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Tangkap						
B. Perikanan Budidaya		2.717	2.732	5.292	5.436	5.590
3	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (Juta Rupiah)					
A. Atas dasar harga berlaku (ADHB)		241.031,65	254.384,80	276.592,60	N/A	N/A
B. Atas dasar harga konstan (ADHK)		150.738,07	151.230,99	153.590,19	N/A	N/A

Sumber : BPS Kota Batam dan Dinas KP2K

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.39/MEN/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan, Kota Batam merupakan salah satu Kota yang ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan dari 223 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Berdasarkan kajian teknis, pusat minapolis di Kota Batam terletak di Pulau Galang Baru, sedangkan pada hirarki II berada pada Pulau Karas Besar dan Pulau Abang Kecil sebagai penunjang dari sarana dan prasarana sub pusat minapolis dan hirarki III berada pada Pulau Nguan, Pulau Sembur dan Pulau Mubut laut sebagai sentra penghasil produk perikanan. Pada awalnya penerapan kawasan minapolitan di Kota Batam sampai saat ini belum bisa dilaksanakan karena terkendala belum adanya Rencana Zonasi Wilayah Pulau-Pulau (RZWP) Kecil dan Daerah Pesisir, namun pada tahun 2015 ini RZWP ini sedang dalam pengerjaan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan BSPL Padang. Diharapkan dengan adanya RZWP ini nantinya program minapolitan di Kota Batam dapat dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan produksi sektor perikanan di Kota Batam.

2.4.2.6 Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor unggulan Kota Batam dan terus menunjukkan tren meningkat. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Batam. Jika pada tahun 2011 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (ADHB) mencapai 25,23 %, maka di tahun 2013 kontribusinya meningkat menjadi 26,69 %. Ekspor bersih perdagangan Kota Batam menunjukkan peningkatan volume selama periode 2011-2015. Informasi lebih lanjut dapat disimak dalam Tabel2.65.

Tabel 2.65. Hasil Kinerja Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Kota Batam
Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB										
A. Atas dasar harga berlaku		13.277.399,69	25,23	14.907.864,37	25,86	17.494.378,83	26,69	N/A	N/A	N/A	N/A
B. Atas dasar harga konstan		7.265.289,04	24,11	8.008.528,11	24,89	8.763.732,31	25,74	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Ekspor Bersih Perdagangan (berat bersih; Kg)										
Jumlah		4.865.067.078		4.939.779.716		5.823.077.945		5.412.016.814		6.730.694.968	

Sumber : BPS Kota Batam

2.4.2.7 Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan sektor yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Kota Batam. Namun pada periode 2011-2013 kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Batam mulai mengalami

sedikit perlambatan. Tahun 2011 tercatat kontribusi sektor perindustian sebesar 57,85%, pada tahun 2013 menurun menjadi 55,65%. Hal ini dapat dikarenakan relatif lebih tingginya pertumbuhan sektor lain terhadap PDRB mengakibatkan kontribusi sektor industri mengalami penurunan. Sementara itu kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB Kota Batam juga mengalami perlambatan dari tahun 2011-2013. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Tabel2.66.

Tabel 2.66. Hasil Kinerja Urusan Perindustrian Pemerintah Daerah Kota Batam
Periode 2011-2015

No.	Indikator	Tahun									
		2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp	%	Rp	%	RP	%	RP	%	RP	%
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB										
A. Atas dasar harga berlaku		30.445.651,54	57,85	32.639.824,07	56,62	36.480.590,19	55,65	N/A	N/A	N/A	N/A
B. Atas dasar harga konstan		18.285.883,65	60,69	19.278.915,85	59,92	20.087.875,16	58,99	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (Juta Rupiah)										
A. Atas dasar harga berlaku		1.942.896,31		2.030.715,23		2.253.484,69		N/A		N/A	
B. Atas dasar harga konstan		1.041.162,70		1.071.939,47		1.110.743,67		N/A		N/A	

Sumber : BPS Kota Batam

2.5 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.5.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas untuk menarik pelaku ekonomi baik di dalam maupun di luar Kota Batam untuk melakukan aktivitas ekonomi di Kota Batam yang dapat menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Ada beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan daya saing daerah, yaitu iklim yang kondusif, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Di samping itu, untuk meningkatkan daya saing, beberapa indikator yang perlu diperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, di mana indikator daya saing dilihat dari beberapa aspek seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca antara ekspor dan impor serta tersedianya fasilitas dan kualitas infrastruktur yang mencukupi.

2.5.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

A. Rasio Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Adapun rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Batam pada periode 2011-2015 menunjukkan tren

yang meningkat. Pada tahun 2012, rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 14,62 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 18,41. Begitu juga dengan rasio pengeluaran konsumsi non pangan per kapita menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Batam lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan non pangan, dengan kata lain secara umum masyarakat kota kesejahteraannya semakin meningkat. Rasio konsumsi rumah tangga per kapita dapat dilihat pada tabel 2.67.

Tabel 2.67. Rasio Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Rasio Pengeluaran Konsumsi RT Per Kapita	N/A	14,62	15,79	18,84	18,41
2	Rasio Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per kapita	N/A	8,72	8,91	7,66	10,49

Sumber : BPS, Susenas 2012-2015 (dikutip dari buku indikator sosial Kepulauan Riau 2011-2015) diolah

2.5.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

2.5.2.1 Perhubungan

Salah satu indikator perhubungan terkait dengan daya saing adalah pergerakan lalu lintas barang dan jasa. Di Kota Batam, pergerakan lalu lintas orang dan barang diukur dari aktivitas di Bandar udara dan pelabuhan. Aktivitas pergerakan lalu lintas orang dan barang pada bandar udara periode

2011-2015 Kota Batam mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, jumlah penumpang yang datang, berangkat dan transit sebanyak 2.336.108 orang dan pada tahun 2015 telah terjadi peningkatan sehingga menjadi sebanyak 5.030.785 orang. Begitu juga dengan lalu lintas barang. Jumlah barang yang muat dan bongkar pada tahun 2011 hanya sebanyak 20.045 ton, pada tahun 2015 telah meningkat menjadi 38.335 ton.

Lalu lintas orang dan barang juga terjadi melalui pelabuhan laut. Pada tahun 2011 jumlah penumpang antar pulau (interinsulir) dan penumpang luar negeri pada pelabuhan laut hanya sebanyak 4.647.093 orang dan lalu lintas barang melalui kapal laut hanya sebesar 10.052 ton tetapi pada tahun 2015 lalu lintas orang melalui kapal laut telah meningkat menjadi 8.777.919 orang dan lalu lintas barang telah meningkat menjadi 11.250 ton. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68. Lalu Lintas Orang dan Barang

Pada Pelabuhan Laut dan Bandar Udara Kota Batam

No.	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Orang	barang (ton)	Orang	barang (ton)	Orang	barang (ton)	Orang	barang (ton)	Orang	barang (ton)
1	Pelabuhan Laut	4.647.093	10.052	7.708.012	10.329	8.229.844	12.080	8.717.652	11.250	8.777.919	11.250
2	Bandara	2.336.108	20.045	3.762.352	35.529	4.213.412	35.434	4.772.873	33.116	5.030.765	38.335
3	Jumlah	6.983.201	30.097	11.470.364	45.858	12.443.256	47.514	13.490.525	44.366	13.808.684	49.585

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Batam dan BPP Laut BP

2.5.2.2 Penataan Ruang

Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota maupun keserasian dengan wilayah di

sekitarnya. Pola ruang dan struktur ruang Kota Batam juga membutuhkan pembenahan secara matang dan holistik agar mampu menopang perkembangan kehidupan masyarakat. Suatu kota harus mampu berfungsi sebagai tempat untuk hidup (*to live*), bekerja (*to work*), dan bermain (*to play*), sehingga kelancaran mobilitas masyarakat yang tinggal di kota tersebut harus menjadi perhatian dan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas baik menjadi hal yang utama. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dan pengendalian yang komprehensif dalam pemanfaatan ruang kota.

Kegiatan penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya berfokus pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikator tersedianya dokumen perencanaan tata ruang ialah adanya Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengaturan mengenai RTRW Kota Batam sampai dengan tahun 2015 belum ditetapkan. Meskipun demikian Kota Batam telah menyusun *draft* Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2011-2031. Adapun informasi luas wilayah penataan ruang Kota Batam disajikan dalam Tabel 2.69.

Tabel 2.69. Informasi Luas Wilayah Penataan Ruang Kota Batam

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Luas hutan yang Dapat di Konversikan (Ha)	30.537	30.537	22.028	22.004	4.116
2	Luas Hutan Produksi (HP & HPT)	14.205	14.205	14.038	14.037	11.619
3	Luas hutan Lindung (Ha)	13.643	13.643	18.258	14.846	20.944
4	Luas Wilayah Industri	7.249	7.249	7.249	7.249	7.249

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
	(Ha)					
5	Luas Wilayah Perkotaan	21.550	21.550	21.976	26.302	26.046

Sumber : Bappeda Kota Batam

2.5.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Perekonomian daerah sangat tergantung dari ketersediaan fasilitas jasa perbankan yang digunakan untuk transaksi ekonomi antar pelaku usaha. Jumlah kantor bank di Kota Batam mengalami peningkatan pada periode 2011-2015. Hal ini diketahui dari pertambahan jumlah bank beserta kantor cabangnya. Tahun 2011, terdapat 60 bank dengan 188 kantor cabang danpada tahun 2015 jumlah bank meningkat menjadi 70 dengan 236 kantor cabang (Tabel 2.70).

Tabel 2.70. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang di Kota Batam Tahun 2011-2015

No.	Deskripsi	2011		2012		2013		2014		2015	
		Bank	Cabang	Bank	Cabang	Bank	Cabang	Bank	Cabang	Bank	Cabang
I.	**Bank Umum**	**31**	**145**	**32**	**220**	**32**	**138**	**39**	**155**	**41**	**191**
1	Bank Persero	4	65	5	112	4	61	4	61	4	91
2	Bank Devisa	22	67	22	81	18	55	25	72	28	79
3	Bank non Devisa	1	3	1	5	2	7	2	7	3	5
4	Bank Pembangunan Daerah	2	8	2	20	3	8	3	8	2	12
5	Bank Asing&Campuran	2	2	2	2	5	7	5	7	4	4

No.	Deskripsi	2011		2012		2013		2014		2015	
		Bank	Cabang	Bank	Cabang	Bank	Cabang	Bank	Cabang	Bank	Cabang
II.	**Bank Perkreditan Rakyat**	**27**	**40**	**40**	**58**	**40**	**68**	**42**	**71**	**29**	**45**
1.	Konvensional	29	43	42	61	42	71	40	68	27	43
2.	Syariah	2	3	2	3	2	3	2	3	2	2
Jumlah Total		**60**	**188**	**74**	**281**	**74**	**209**	**81**	**226**	**70**	**236**

Sumber : Bank Indonesia

B. Jumlah Kamar Hotel Dan Rata-Rata Hunian Kamar

Pada tahun 2011, jumlah kamar hotel di Kota Batam tercatat sebanyak 9.317 kamar, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 12.548 kamar. Sementara itu, selama periode 2011-2015, rata-rata tingkat hunian kamar hotel berbintang sedang yaitu 51,7 persen. Tingkat hunian kamar tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan tingkat hunian kamar hotel sebesar 57 persen, dengan kata lain terdapat 4.721 kamar hotel yang tidak dihuni dari 10.980 kamar. Informasi perkembangan perhotelan dalam grafik dapat dilihat pada Gambar 2.43.

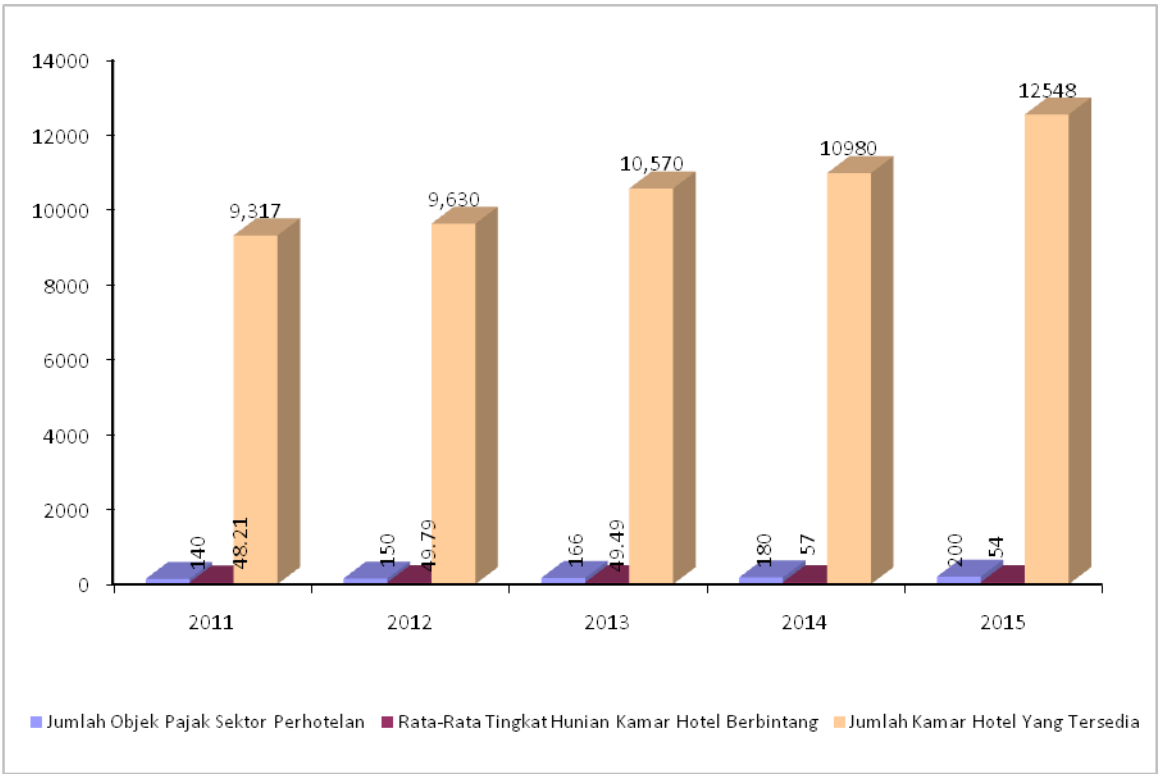

Gambar 2.43. Perkembangan Perhotelan di Kota Batam

Sumber : Dispenda Kota Batam

2.5.2.4 Komunikasi dan Informatika

Jumlah pelanggan RT yang tersambung listrik, daya tersambung, dan jumlah penjualan daya listrik menunjukkan tren meningkat selama periode 2011-2015 (Tabel 2.71). Hal ini berpengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi penduduk Kota Batam, karena listrik merupakan elemen dasar yang mendukung aktivitas manusia.

Tabel 2.71. Indikator Urusan Sarana Kelistrikan

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pelanggan Rumah Tangga	189,069	194,351	192,580	191,766	190,667
2	Daya Tersambung (KVA) Rumah Tangga	317,222	335,990	338,458	341,182	343,412

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
3	Jumlah Penjualan (MWA) Rumah Tangga	419,983	493,957	539,488	582,735	603,858

Sumber : PT. PLN Batam

2.5.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada, sehingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban, seperti tindakan penanggulangan kriminalitas, serta upaya mengurangi demonstrasi merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dilakukan untuk mewujudkan stabilitas daerah. Angka kriminalitas di Kota Batam pada tahun 2012 sebesar 467 kasus dan meningkat menjadi 1.167 pada tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan kondisi perekonomian yang terus menurun, ditambah dengan banyaknya pengurangan tenaga kerja dan pencari kerja baru yang datang dari luar Kota Batam yang bila tidak tertampung berpotensi menjadi pengangguran. Selain itu, jumlah aksi demonstrasi mengalami peningkatan dari 29 pada tahun 2012, menjadi 40 di tahun 2015. Jumlah demo di Kota Batam biasanya berkaitan dengan aspirasi buruh untuk penyesuaian Upah Minimum Kota Batam, dan beberapa kasus berkaitan dengan lahan serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Tabel 2.72.

Tabel 2.72. Tindak Pidana dan Demontrasi di Kota Batam

No.	Indikator	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Tindak Pidana	467	690	862	1.167

No.	Indikator	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
2	Jumlah demontrasi	29	48	65	40

Sumber : Poltabes Barelang dan Satpol PP Kota Batam

2.5.4 Fokus Sumberdaya Manusia

2.5.4.1 Ketenagakerjaan

A. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka kualitas SDM dapat semakin baik. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di Kota Batam. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2011-2015 cukup berfluktuasi. Pada tahun 2011, rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Batam mencapai 3,44. Pada tahun tahun 2012, rasio lulusan S1/S2/S3 merupakan rasio lulusan tertinggi yaitu sebesar 3,55. Pada tahun 2013, rasio lulusan S1/S2/S3 mengalami sedikit penurunan menjadi 3,37. Pada tahun 2015, rasio lulusan S1/S2/S3 Kota Batam sebesar 3,34. Hal ini bermakna bahwa terdapat 334 orang lulusan S1/S2/S3 dari 10.000 penduduk Kota Batam.

Tabel 2.73. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Batam Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah lulusan	39.114	42.191	38.291	33.643	34.668
2	Jumlah Penduduk	1.137.89	1.187.57	1.135.41	1.030.52	1.037.18

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
3	Rasio lulusan	3,44	3,55	3,37	3,26	3,34

Sumber : Disnaker Kota Batam (data diolah)

B. Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan untuk melihat apakah suatu daerah merupakan kategori daerah maju (produktivitas penduduk yang tinggi) atau daerah berkembang (produktivitas penduduk yang rendah). Rasio ini merupakan indikator demografi yang sangat penting. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah angka rasio menunjukkan semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Usia ketergantungan penduduk di Kota Batam dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yakni kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) dan penduduk usia tidak produktif (usia <15 tahun dan >64 tahun). Pada periode 2011-2015, rasio ketergantungan di Kota Batam mengalami peningkatan. Hal ini dapat diketahui dari rasio tahun 2011 sebesar 32,19 menjadi 46,21 di tahun 2015 (Tabel 2.74). Dengan demikian, setiap 100 orang penduduk produktif mempunyai tanggungan sebanyak 32 orang pada tahun 2011, sementara 100 orang di tahun 2015 mempunyai tanggungan 46 orang.

Tabel 2.74. Rasio Ketergantungan Kota Batam Tahun 2011-2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015

No.	Indikator	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk Usia tidak produktif (Usia <15 tahun + Usia >64 tahun)	276.241	291.343	285.288	284.236	375.754
2	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 thn)	858.261	896.231	850.124	746.292	813.231
3	Rasio Ketergantungan	32,19	32,51	33,56	38,09	46,21

Sumber : Rencana Tenaga Kerja Kota Batam 2015-2019 (data diolah)

2.6 ASPEK LINGKUNGAN

2.6.1 Kualitas Air

Air sebagai salah satu komponen lingkungan hidup sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sebagai salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan, maka fungsi air tersebut harus dilestarikan agar tetap berada pada kondisi yang dapat memenuhi standar yang diperlukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelestarian dan pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiah.

Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang dapat menunjang kesejahteraan dan kesehatan. Pengembangan jaringan penyediaan air bersih diarahkan untuk mendukung kegiatan budidaya dan kegiatan sosial-ekonomi penduduk. Pengadaan sistem penyediaan air bersih harus memenuhi standar yang telah ditentukan, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Seiring dengan keberhasilan pembangunan dan pengembangan Kota Batam sebagai daerah industri, maka kebutuhan akan air bersih semakin meningkat. Pengelola dan penyedia kebutuhan air bersih di Kota Batam adalah Badan Pengusahaan

Kawasan (Otorita) Batam bekerjasama dengan pihak swasta PT. Adhya Tirta Batam (ATB), dimana sumber air bersih berasal dari air hujan yang ditampung di waduk-waduk yang ada di Kota Batam.

Penduduk yang belum terlayani air bersih oleh Perusahaan Air Minum (PAM), memenuhi kebutuhan air bersihnya melalui penampungan air hujan. Sedangkan bagi penduduk yang tinggal di pulau-pulau yang di wilayahnya terdapat sumber air tanah memenuhi kebutuhan air bersih melalui pembuatan sumur-sumur, baik yang dikelola secara individu maupun secara komunal. Adapun pulau-pulau yang terdapat sumber air tanah, diantaranya terdapat di Pulau Buluh dengan kedalaman sumur antara 6 hingga 90 meter, Pulau Bulan Lintang dengan kedalaman sumur antara 2 hingga 70 meter, Pulau Pemping serta di Daerah Belakang Padang yang mempunyai struktur batuan lulus air sehingga berfungsi sebagai akuifer tempat air tanah tersimpan, seperti Pulau Lengkana dengan kedalaman sumur antara 2,8–10 meter, Pulau Sekanak dan Pulau Melawa dengan kedalaman sumur bor antara 6–32 meter, Daerah Perigi Papan yang mempunyai mata air dengan debit 1 lt/dt, Pulau Denfang dan Pulau Air Asam Melawa dengan debit air antara 0,2–1 lt/dt, serta pulau-pulau lainnya.

Untuk pemenuhan kebutuhan air di Pulau Batam dan sekitarnya, telah dilakukan pembangunan sebanyak 7 (tujuh) DAM atau Waduk yang tersebar di Kota Batam. Luas dan volume air masing-masing DAM dapat dilihat pada Tabel 2.75 berikut:

Tabel 2.75**.** Waduk yang berada di Kota Batam

No	Nama	Luas (Ha)	Volume (m^3)
1	Waduk Duriangkang	1.692,92	78.180.000
2	Muka Kuning	151,67	12.720.000
3	Sei Harapan	87,17	3.600.000

4	Sei Baloi	8,99	270.000
5	Sei Ladi	120,03	9.490.000
6	Sei Nongsa	23,18	720.000
7	Tembesi	-	41.876.000

Sumber : BP Batam,2011

Kualitas air yang jelek akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk, sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas dan kuantitas air akan menurunkan daya guna dan manfaat air. Produktivitas akan menurunkan kekayaan sumber daya alam. Dampak negatif pencemaran air menurunkan nilai ekonomis, di samping nilai ekologis dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air tercemar jelas akan membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan nilai manfaat finansial dari kegiatan yang menimbulkan pencemaran. Demikian pula kondisi air yang tercemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat atau dampak negatif yang ditimbulkan dari air tercemar. Parameter *Chemical Oxygen Demand* (COD) sebagai salah satu parameter dalam kualitas air di dam-dam yang ada di Kota Batam seperti tertera pada Gambar 2.44

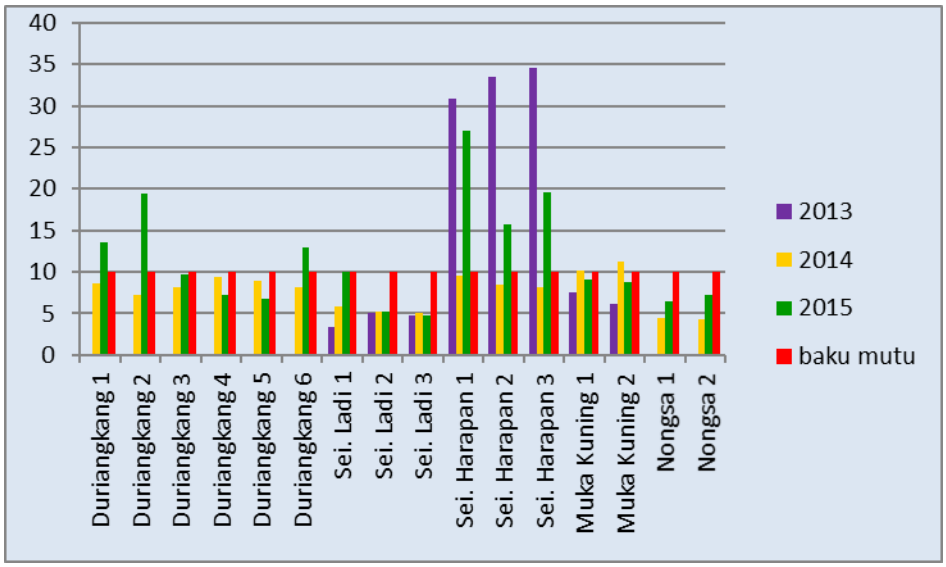

Gambar 2.44. Parameter COD sebagai Salah Satu Parameter Kualitas Air Dam Kota Batam Tahun 2013-2015

Sumber: Bapedal Kota Batam, 2016

Grafik di atas menunjukkan parameter COD di DAM Sei Harapan dan Duriangkang telah melewati baku mutu lingkungan. Penyebab tingginya COD di DAM Duriangkang diprediksi berasal dari kegiatan industri, perumahan liar, dan kegiatan perikanan dan pertanian di sekitar DAM. Adapunpenyebab tingginya COD di DAM Sei Harapan diduga karena berdekatan dengan daerah perbengkelan dan pemukiman.

Untuk menjamin kualitas air baku, maka pemantauan kualitas air baku (air dam) dengan melakukan *sampling* adalah hal yang penting secara rutin dilakukan. Pengambilan *sampling* dilakukan terhadap 16 (enam belas) titik pemantauan dengan masing-masing frekuensi pemantauan 2 (dua) kali, yaitu pada musim hujan (basah) dan musim kemarau (kering). Pemantauan dilakukan pada 5 (lima) waduk, kecuali Dam Baloi dan Dam Tembesi.

Adapun parameter yang diukur sesuai dengan persyaratan dalam PP Nomor 82 Tahun 2001 atau perundang-undangan yang berlaku dalam pemantauan air baku untuk air bersih.

Tingkat persentase kualitas air dalam RPJMD Kota Batam adalah banyaknya parameter uji yang memenuhi persyaratan baku mutu dari kualitas air baku dari keseluruhan titik dibagi dengan parameter total yang dipersyaratkan dikali seratus persen.

$$\%Kualitas\ Air = \frac{Parameter\ yang\ Memenuhi\ Baku\ Mutu\ Keseluruhan\ Titik}{Parameter\ Total\ yang\ Dipersyaratkan\ Keseluruhan\ Titik} \times 100\%$$

2.6.2 Kualitas Udara

Konsekuensi adanya proses transformasi masyarakat agraris ke masyarakat industri, terutama di daerah perkotaan dan sub perkotaan, adalah terjadinva peningkatan pencemaran/polusi lingkungan. Polusi udara sebagai dampak adanya aktivitas industri dan transportasi menjadi sangat penting untuk diperhatikan, sehingga sangat diperlukan adanya suatu informasi yang cepat tentang pengembalian tingkat polusi udara terhadap waktu, terutama pada daerah pusat perkotaan. Informasi ini perlu dibuat secara sederhana sehingga masyarakat awam yang tidak mengetahui bcml tentang bahasa polusi udara dapat mengerti dengan mudah dan jelas tentang polusi udara.

Banyak cara untuk menyebarkan pengertian tentang kualitas udara, dari bentuk informasi yang terintegrasi sampai dengan bentuk secara rinci dari konsentrasi tiap-tiap individu polutan. Tentunya hal ini perlu dibuat bentuk informasi yang mudah dimengerti bagi masyarakat awam, atau bentuk gabungan yang dapat menginformasikan arti konsentrasi suatu polutan yang mengarah pada dampaknya. Indeks Kualitas Udara sebagai bentuk *ballast*

polusi udara dapat dipergunakan untuk menjembatani pemberian informasi tentang kualitas udara suatu perkotaan kepada komunitas masyarakat awam yang tidak mengenal betul tentang polusi udara. Indeks Kualitas Udara merupakan salah satu metode tidak langsung yang digunakan untuk menginformasikan kondisi kualitas udara suatu perkotaan kepada masyarakat awam.

Kualitas udara setempat adalah masalah penting untuk masyarakat. Emisi dari nitrogen oksida (NOx), senyawa organik yang mudah menguap , karbon monoksida (CO), dan bahan partikel (PM) umumnya dianggap penyebab terpenting masalah kualitas udara. Beberapa pemantauan yang dilakukan untuk kualitas udara seperti Uji Petik Emisi Kendaraan Bermotor, Pemantauan Kualitas udara jalan raya "roadside monitoring", Pemantauan kinerja lalu lintas "Kecepatan dan Kerapatan", Pemantauan Kualitas Bahan Bakar dan Pemantauan Kualitas Udara Ambien. Untuk pemantauan kualitas udara ambien telah rutin dilaksanakan dua kali dalam setahun sebanyak 19 titik lokasi yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Batam.

Indeks kualitas udara didefinisikan sebagai gambaran atau nilai hasil tranformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang saling berhubungan, seperti konsentrasi S02, NOx, SPM, Ox, CO menjadi satu nilai atau satu set nilai sehingga mudah dimengerti bagi masyarakat awam. Sebagai hasilnya diperoleh suatu persamaan transformasi nilai parameter yang dapat mentransformasikan nilai-nilai parameter polusi udara seperti tersebut di atas menjadi satu nilai yang informan dan tak berdimensi. Bagaimanapun juga hal ini menunjukkan gambaran begitu kompleknya permasalahan polusi udara di dalam mengartikan kondisi lingkungan yang sebenarnya. Secara umum parameter-parameter yang dipergunakan dalam perhitungan indeks kualitas udara adalah SPM (*Suspended Particulate*

Matter) atau TSP (*Total Suspended Particulate*), S02 (*Sulfur dioxide*), CO (*Carbon monoxide*), Ox (dalam hal ini ozon), hidrokarbon dan visibilitas atau jarak pandang juga dapat diambil sebagai pertimbangan dalam penentuan indeks kualitas udara.

Data Indeks Standar Pencemar Udara diperoleh dari pengoperasian Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien Otomatis. Sedangkan Parameter Indeks Standar Pencemar Udara meliputi :

a. Partikulat (PM10)

b. Karbondioksida (CO)

c. Sulfur dioksida (SO2).

d. Nitrogen dioksida (NO2).

e. Ozon (O3)

Perhitungan dan pelaporan serta informasi Indeks Standar Pencemar Udara ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yaitu Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997.

Tingkat persentase kualitas udara dalam RPJMD Kota Batam adalah banyaknya parameter uji yang memenuhi persyaratan baku mutu dari kualitas air baku dari keseluruhan titik dibagi dengan parameter total yang dipersyaratkan dikali seratus persen.

2.7 Gambaran Umum Peran, Strategi, dan Kegiatan BP Batam Tahun 2015-2019

Sebagaimana penjelasan pada awal Bab II, diketahui bahwa terdapat dua birokrasi pemerintahan di Wilayah Batam, yakni Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Dengan demikian penjabaran umum mengenai Renstra BP Batam untuk periode 2015-2019 menjadi penting untuk disertakan dalam rancangan awal RPJMD Batam Tahun 2016-2021.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 disebutkan bahwa BP Batam mempunyai tugas dan fungsi untuk mengembangkan daerah Batam dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor Perhubungan, Perdagangan, Industri, Maritim, Pariwisata, Perbankan dan sektor lainnya. Adapun peran BP Batam dalam 5 (lima) tahun kedepan berdasarkan Renstra BP Batam Tahun 2015-2019 adalah :

1. Pemantapan dalam manajemen pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (KPBPB-Batam), melalui penciptaan peraturan dan regulasi yang mendukung iklim investasi yang sehat serta peningkatan profesionalisme sumber daya pengelola KPBPB-Batam;
2. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di kawasan PBPB–Batam, serta pengelolaan pengamanan lahan dan asset investasi;
3. Percepatan pembangunan konektivitas, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut, Bandar udara serta transportasi darat;
4. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, melalui pelayanan lalu lintas barang serta pelayanan investasi dan pemasaran;
5. Membangun kontinuitas jaringan teknologi informasi nasional, melalui pembangunan fasilitas pusat data/data centre dan pemulihan data/*data recovery centre*;
6. Membangun infrastruktur prasarana dasar, meliputi pengelolaan dan penyelengaraan air dan lingkungan serta pemukiman dan perumahan pekerja;
7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan rujukan yang berkualitas, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan umum.

BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Kinerja Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun, yang dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Dengan demikian dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Gambaran kinerja keuangan Kota Batam aktiva, secara umum disajikan untuk periode tahun 2011-2015, penghitungan rata-rata pertumbuhan penyajian datanya diuraikan mulai tahun 2009 sebagai data dasar atau kondisi eksisting periode tahun 2011-2015. Data kinerja keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Adapun

data kinerja keuangan tahun 2011-2015 diperoleh dari LKPJ Akhir Masa Jabatan Periode 2011 – 2015.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Secara umum komponen APBD Kota Batam terdiri atas: (1) Komponen Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Komponen Belanja Daerah, yang di dalamnya terdapat Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan (3) Komponen Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Kinerja APBD Kota Batam secara keseluruhan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dilihat dari pencapaian realisasi pendapatan daerah yang melampaui target pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014(Tabel 3.1); dengan catatan pada tahun 2015 realisasi pendapatan hanya sebesar 91,99% dari targetnya. Sedangkan realisasi belanja daerah Kota Batam menunjukkan keberhasilan upaya-upaya penghematan belanja daerah Kota Batam; yang ditandai dengan realisasi belanja daerah di bawah targetnya.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2012	1.400.898.812.647,63	1.490.029.364.338,29	106,36	89.130.551.690,66
2013	1.665.079.927.019,00	1.749.105.595.933,83	105,05	84.025.668.914,83

2014	1.949.038.435.213,34	2.021.540.370.494,82	103,72	72.501.935.281,48
2015	2.104.943.277.115,23	1.936.406.807.579,72	91,99	-168,536,469,535.51

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Batam

Tahun	Target	Realisasi	%	Bertambah/Berkurang
2012	1.480.722.555.165,34	1.378.395.207.767,42	92,97	-102.327.347.397,92
2013	1.808.648.575.640,04	1.675.134.478.242,67	92,62	-133.514.097.397,37
2014	2.168.207.401.217,08	1.967.612.947.196,65	90,75	-200.594.454.020,43
2015	2.377.621.224.007,14	2.154.059.184.726,10	90,60	-223.562.039.281,04

A). Komponen Pendapatan

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akun pendapatan daerah terdiri atas 3 kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

PAD terdiri atas:

- Penerimaan pajak daerah
- Penerimaan retribusi daerah
- Penerimaan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan

- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Adapun pendapatan dari Dana perimbangan terdiri atas:

- Bagi hasil pajak
- Bagi hasil sumber daya alam
- Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus

Sedangkan pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang sah bersumber dari:

- Bantuan/Hibah
- Dana Penyesuaian
- Dana Darurat

Analisis Pendapatan Daerah menggunakan angka rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan Pendapatan Daerah, sekaligus digunakan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan Pendapatan Daerah di masa yang akan datang.

Kinerja pendapatan daerah Kota Batam menunjukkan peningkatan sejak tahun 2011 dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 17,29%. Pada tahun 2011, pendapatan Kota Batam sebesar Rp 1.279.229.000 meningkat menjadi Rp 2.021.540pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, menurun menjadi Rp 1.936.406. Sumber pendapatan terbesar berasal dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,89%. Meski demikian, Pendapatan Asli Daerah Kota Batam menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yaitu sebesar rata-rata 41,96%. Adapun komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah juga menunjukkan pertumbuhan yang positif yaitu sebesar rata-rata 39,39%.

Jika melihat Tabel 3.3, keseluruhan komponen pendapatan Kota Batam menunjukkan nilai pertumbuhan yang positif, kecuali komponen transfer Pemerintah Pusat–Dana bagi hasil pajak yang menunjukkan nilai pertumbuhan negatif. Hal ini mungkin disebabkan oleh penerimaan pajak nasional yang juga menurun.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Batam untuk Tahun Anggaran 2011–2015 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011-2015

No	Uraian	2011 (Juta Rp)	2012 (Juta Rp)	2013 (Juta Rp)	2014 (Juta Rp)	2015 (Juta Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**1.279.229**	**1.490.029**	**1.749.105**	**2.021.540**	**1.936.406**	**17,29**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**324.579**	**413.178**	**606.340**	**779.944**	**836.713**	**41,96**
1.1.1	Pajak daerah	280.370	335.216	475.172	580.864	614.910	43,14
1.1.2	Retribusi daerah	25.467	41.388	71.027	86.504	84.459	37,55
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.749	1.492	1.960	2.622	3.200	7,40
1.1.	Lain-lain PAD yang sah	16.992	35.081	58.179	109.953	134.143	52,46

4							
1.2	**Dana Perimbangan**	**731.721**	**939.587**	**980.405**	**969.923**	**849.850**	7,89
1.2.1	Transfer pemerintah pusat-Dana bagi hasil pajak	173.083	176.423	122.259	130.571	103.432	-7,46
1.2.2	Dana bagi hasil bukan pajak/SDA	202.854	287.029	269.872	223.560	103.650	12,95
1.2.3	Dana alokasi umum	316.627	429.672	528.839	559.103	529.988	16,87
1.2.4	Dana alokasi khusus	39.157	46.462	59.434	56.687	112.778	11,04
1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**222.928**	**137.263**	**162.359**	**271.671**	**249.841**	39,39
1.3.1	Hibah	2.118	765	1.062	1.565	4.952	82,98

1.3.2	Dana darurat						
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi	113.944	89.371	68.972	142.590	137.085	26,90
1.3.4	Pendapatan lainnya	106.865	47.126	92.324	127.516	107.804	184,25

Jika dilihat dari tren persentase masing-masing komponen pendapatan daerah Kota Batam (Gambar 3.1), dapat diketahui bahwa sumber pendapatan dari Dana Perimbangan mengalami penurunan tren dan sumber pendapatan dari PAD mengalami peningkatan tren. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kota Batam relatif mulai cukup membaik dan mengarah pada kemandirian pendapatan daerah.

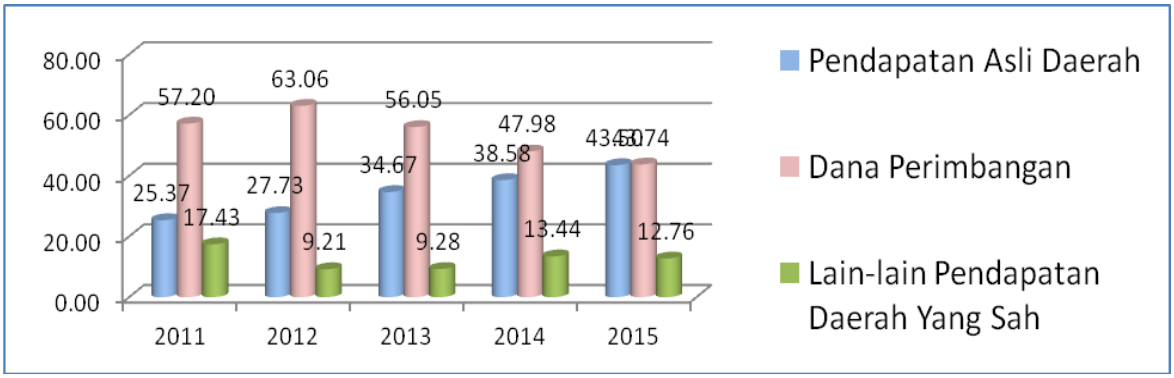

Gambar 3.1. Persentase Komponen Pendapatan Daerah Kota Batam

Apabila dilihat dari proporsi komponen pembentuk PAD (Gambar 3.2), terlihat bahwa pendapatan dari Pajak Daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadapPAD. Adapun Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terkecil terhadap PAD Kota Batam.

Meski demikian, persentase proporsi dari pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan tren proporsi. Persentase proporsi Pajak Daerah mengalami penurunan dari yang semula tumbuh mencapai 86,38% pada tahun 2011 menjadi 73,81% pada tahun 2015. Hal ini berarti proporsi PAD dari komponen lain mengalami peningkatan, terutama yang bersumber dari Lain-lain PAD yang sah yang semula 5,24% pada tahun 2011 menjadi 15,77% pada tahun 2015.

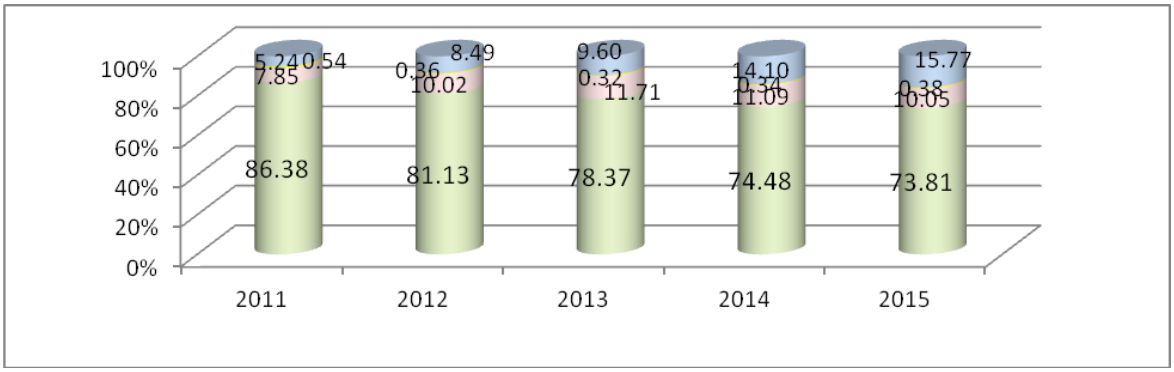

Gambar 3.2. Persentase Komponen Pembentuk PAD Kota Batam

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain. Derajat Kemandirian Daerah ditunjukkan oleh proporsi PAD terhadap total pendapatan, sedangkan Rasio Ketergantungan Daerah ditunjukkan dari proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah.

Perkembangan derajat kemandirian Kota Batam menunjukkan tren meningkat yang semula sebesar 25,37 pada tahun 2011 menjadi 43,50 pada tahun 2015. Sedangkan rasio ketergantungan daerah Kota Batam

menunjukkan tren menurun yang semula sebesar 74,63 pada tahun 2011 menjadi 56,50 pada tahun 2015. Meskipun ketergantungan Pemerintah Kota Batam terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat atau Daerah lainnya masih cukup tinggi, namun dengan perkembangan derajat kemandirian yang terus meningkat menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kota Batam relatif cukup baik. Apabila kinerja ini dipertahankan, maka keuangan Pemerintah Kota Batam dapat mengarah pada kemandirian daerah.

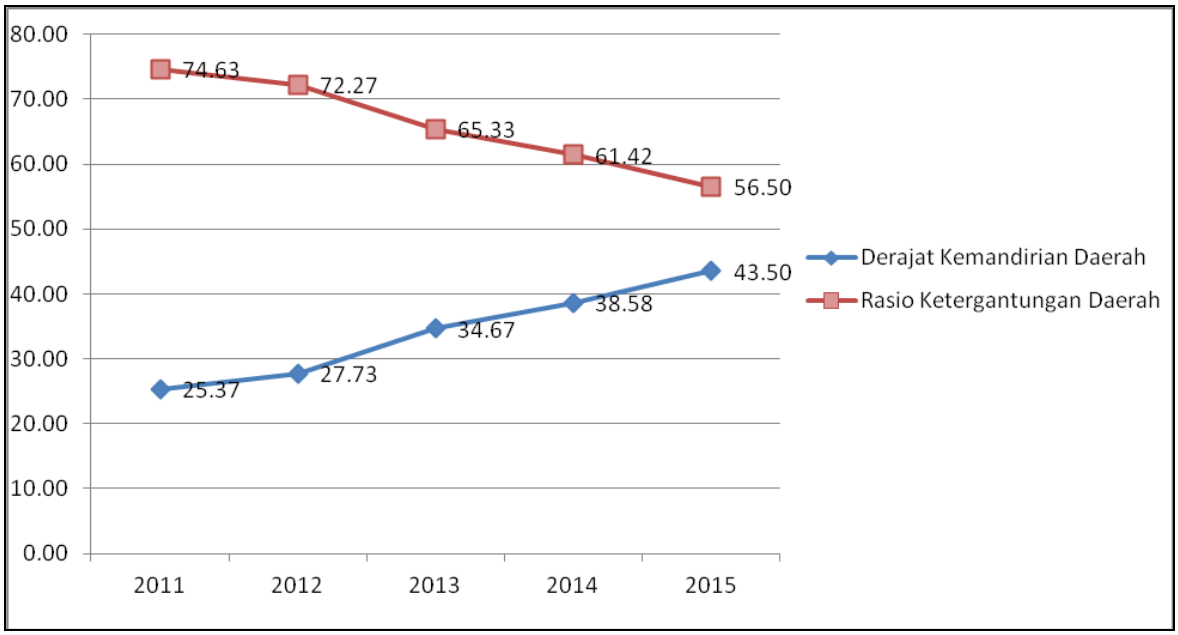

Gambar 3.3. Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Daerah Kota Batam

B). Komponen Belanja

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan

program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas Belanja Pegawai; Belanja Hibah dan Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan; dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu belanja langsung terdiri atas belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal.

Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2013 -2015 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Perkembangan belanja daerah Kota Batam menunjukkan peningkatan yaitu sebesar Rp 1.675.134.478.242,67 pada tahun 2013 menjadi Rp 1.967.612.947.196,65 pada tahun 2014 dan Rp 2.154.059.184.726,10 pada tahun 2015 (Tabel 3.4).

Tabel 3.4. Nilai Belanja Daerah Kota Batam Periode 2013 – 2015

No.	Uraian	2013	2014	2015
I.	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**633.523.824.789,04**	**687.875.592.969,04**	**717.620.276.199,00**
I.1	Belanja Pegawai	579.633.522.769,00	628.563.915.977,00	670.989.832.650,00
I.2	Belanja Hibah	30.216.267.497,10	26.767.500.000,00	40.349.299.300,00
I.3	Belanja Bantuan Sosial	20.438.760.000,00	31.434.453.000,00	4.619.860.000,00
I.4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik	835.789.362,59	1.097.045.392,04	1.378.252.449.00
I.5	Belanja Tidak Terduga	2.399.485.160,35	12.678.600,00	283.031.800,00

II.	**BELANJA LANGSUNG**	**1.041.610.653.453,63**	**1.279.737.354.227,61**	**1.436.438.908.527,10**
II. 1	Belanja Pegawai	234.484.566.752,00	289.226.276.805,18	398.761.685.239,45
II. 2	Belanja Barang dan Jasa	453.251.447.828,36	497.763.393.671,13	513.344.691.519,85
II. 3	Belanja Modal	353.874.638.873,27	492.747.683.751,30	524.332.531.767,80
	TOTAL	**1.675.134.478.242,67**	**1.967.612.947.196,65**	**2.154.059.184.726,10**

Penggunaan terbesar dari belanja daerah ada pada Belanja Langsung yaitu sebesar 56,56% pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 66,69% pada tahun 2015 (Gambar 3.4).

Meski nilai Belanja Langsung mengalami peningkatan namun tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang mengalami perlambatan. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena alokasi anggaran belanja Kota Batam tidak diarahkan pada sektor-sektor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Batam.

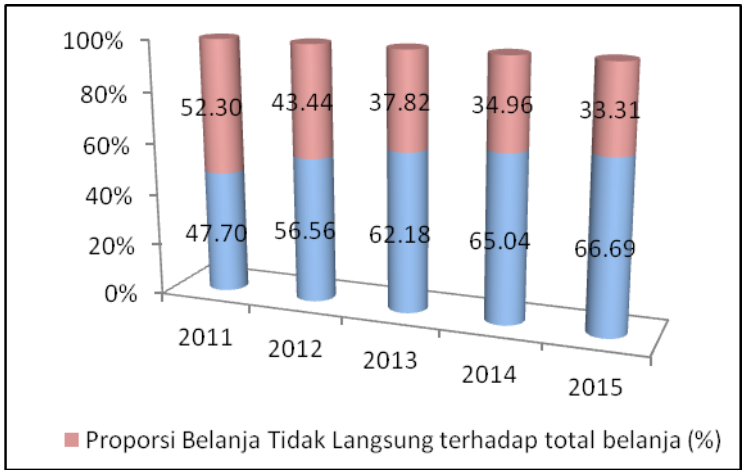

Gambar 3.4. Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Kota Batam.

Apabila dilihat dari rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Batam, terlihat adanya kecenderungan menurun sejak tahun 2012 hingga 2014 tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2015 hal ini disebabkan adanya

tambahan tunjangan hari raya dari pemerintah pusat (Gambar 3.5). Adapun rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Kota Batam terlihat adanya peningkatan sejak tahun 2012 hingga 2015 (Gambar 3.6). Dengan adanya gambaran kondisi tersebut, terlihat adanya komitmen Pemerintah Kota Batam untuk mengalokasikan prioritas belanja daerah kepada pos-pos anggaran pembangunan Kota Batam.

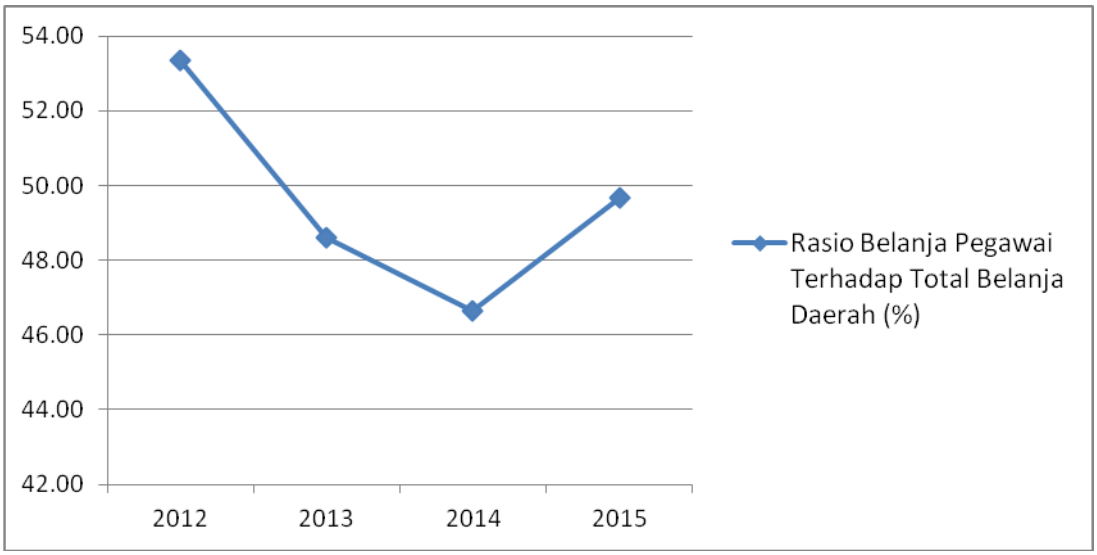

Gambar 3.5. Persentase Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah Kota Batam

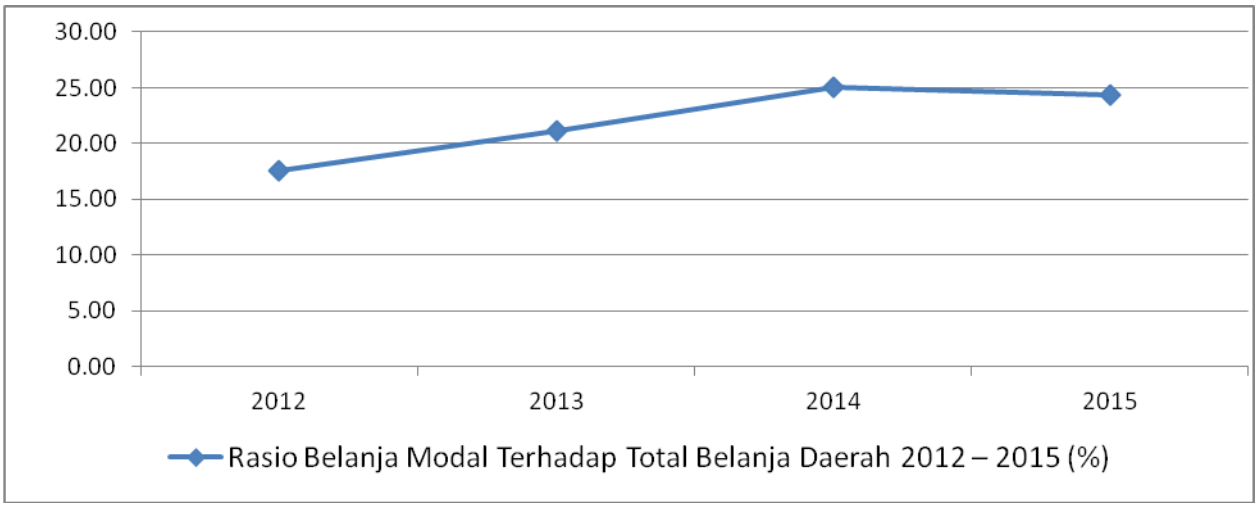

Gambar 3.6. Persentase Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah

C). Komponen Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan daerah, terdiri atas: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah. Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan daerah terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Batam untuk periode 2012-2015 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Batam

Tahun	Penerimaan Pembiayaan	Penggunaan SILPA Tahun Lalu	Pembiayaan Netto	Penerimaan Kembali Pinjaman
2012	88.152.954.948,59	88.152.954.948,59	79.474.730.093,71	0,00
2013	202.015.219.662,58	191.108.886.664,58	184.866.219.662,58	10.906.332.998,00
2014	269.651.846.317,74	258.837.337.353,74	212.750.523.593,74	10.814.508.964,00
2015	264.969.086.841,91	264.969.086.841,91	263.969.086.841,91	0

Dari data di atas terlihat bahwa penerimaan pembiayaan daerah Kota Batam semakin meningkat setiap tahunnya, dimana SILPA memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pembiayaan daerah. Khusus tahun 2014, terdapat penerimaan kembali pinjaman yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman kepada Pemda lainnya yaitu sebesar Rp 10.814.508.964,00.

Adapun dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Batam, terlihat adanya peningkatan pembiayaan netto yang semula Rp 79.474.730.093,71 pada tahun 2012 menjadi Rp 263.969.086.841,91 pada tahun 2015.

Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Kota Batam semakin meningkat sejak tahun 2012 dari sebesar Rp. 8.678.224.854,88 menjadi Rp. 56.901.322.724,00 di tahun 2014. Namun, pada tahun 2015 turun drastis hingga menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,00 disebabkan anggaran lebih diperuntukan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.6. berikut.

Tabel 3.6. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Batam

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	2.000.000.000,00	42.940.400.000,00	-
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemda Lainnya	-	-	174.922.724,00	-
4	Pembayaran hutang kegiatan tahun sebelumnya	5.678.224.854,88	-		-
5	Pemberian Pinjaman kepada	-	-	-	-

	Perusahaan Negara				
6	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	15.149.000.000,00	13.786.000.000,00	-
7	Pemberian Pinjaman dana bergulir	3.000.000.000,00	-	-	1.000.000.000,00
JUMLAH		8.678.224.854,88	17.149.000.000,00	56.901.322.724,00	1.000.000.000,00

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada tahun 2011, Kota Batam memiliki aset senilai Rp. 2,57 triliun (Tabel 3.7) dengan tingkat pertumbuhan 15,85% per tahun, sehingga menjadikan aset

Kota Batam senilai Rp 3,43 triliun pada tahun 2015 karena adanya penyisihan piutang, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2011 senilai Rp. 2,44 triliun meningkat menjadi Rp 2,86 triliun pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,29% per tahun setelah diperhitungkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Aset tetap ini meliputi 83,41% dari seluruh aset Pemerintah Kota Batam.

Adapun jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Batam hanya berupa kewajiban jangka pendek, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 7,32 milyar. Dari tahun 2011 hingga 2015, jumlah kewajiban Pemerintah Kota Batam relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2012 dan tertinggi tahun 2015. Pada tahun 2015 kewajiban jangka pendek Pemerintah Kota Batam sebesar Rp 27,07 milyar. Oleh karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Batam tahun 2011 senilai Rp. 2,57 triliun meningkat hingga senilai Rp 4,19 triliun pada tahun 2014, sedangkan

pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi Rp 3,43 triliun. Dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,72 % per tahun.

Neraca daerah Kota Batam ditunjukkan pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.7. Neraca Daerah Kota Batam Tahun 2010-2014

No.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	RERATA PERTUMBUHAN
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	
I	**ASET**	**2,576,719.00**	**2,933,416.00**	**3,542,909.00**	**4,191,642.98**	**3,434,803.48**	8,72
A	**ASET LANCAR**	**110,082.00**	**245,969.00**	**592,012.00**	**698,801.37**	**405,854.82**	60,60
1	Kas di Kas Daerah	83,444.00	188,395.00	248,966.00	250,736.26	29,759.12	17,63
2	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	936.00	955.00	5,159.00	9,332.10	6,151.28	122,26
3	Kas di Bendahara Kapitasi	0.00	0.00	0.00	3,598.29	0.00	-
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	3,774.00	1,757.00	4,712.00	3,080.78	9,550.09	72,53
5	Kas di Bendahara Penerimaan	219.00	0.16	20.00	38.79	21.82	-
6	Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.74	
7	Piutang Pajak	1,222.00	362.00	192,308.00	245,838.84	275,741.90	-
8	Piutang retribusi	646.00	1,240.00	3,040.00	971.28	1,032.12	43,83
9	Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00	(260,150.79)	-
10	Bagian Lancar tuntutan Perbendaharaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
11	Bagian Lancar tuntutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

No.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	RERATA PERTUMBUHAN
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	
	Ganti Rugi						
12	Piutang Lainnya	12,960.00	40,880.00	125,789.00	173,256.85	320,175.56	136,42
13	Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26	
14	Persediaan	6,878.00	12,376.00	12,015.00	11,948.18	21,983.70	40,11
B	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	18,857.00	21,794.00	31,659.00	80,901.40	88,937.87	56,68
1	**Investasi Non Permanen**	9,721.00	12,721.00	18,721.00	21,221.93	22,221.93	24,02
a	Investasi Non Permanen Lainnya	9,721.00	12,721.00	18,721.00	21,221.93	22,221.93	24,02
b	Dana Bergulir Diragukan tertagih	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2	**Investasi Permanen**	9,135.00	9,072.00	12,937.00	59,679.47	66,715.94	-
a	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9,135.00	9,072.00	12,937.00	59,679.47	66,715.94	103,75
C	**ASET TETAP**	2,444,756.00	2,657,083.00	2,875,150.00	3,344,597.82	2,865,028.95	4,72
1	Tanah	812,579.00	812,579.00	749,870.00	690,111.38	698,096.30	(3,63)
2	Peralatan dan Mesin	290,167.00	374,188.00	377,436.00	463,040.83	523,416.26	16,39
3	Gedung dan Bangunan	595,049.00	659,219.00	802,632.00	1,040,468.45	1,204,654.90	19,49
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	732,271.00	792,845.00	921,806.00	1,111,972.8	1,355,910.3	16,78

No.	URAIAN	2011 (Juta Rp)	2012 (Juta Rp)	2013 (Juta Rp)	2014 (Juta Rp)	2015 (Juta Rp)	RERATA PERTUMBUHAN
					5	7	
5	Aset tetap Lainnya	14,688.00	15,227.00	22,221.00	28,567.60	38,096.51	27,88
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00	3,024.00	1,182.00	10,436.71	6,626.92	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0.00	0.00	0.00	0.00	(961,772.32)	
D	**DANA CADANGAN**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
E	**ASET LAINNYA**	3,024.00	8,570.00	44,088.00	67,342.39	74,981.83	165,48
1	Aset Tidak Berwujud	3,024.00	8,570.00	15,270.00	20,411.16	31,319.71	87,17
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	0.00	(18,820.27)	
3	Aset Lain-lain	0.00	0.00	28,817.00	46,931.22	62,482.39	-
JUMLAH ASET		**2,576,719.00**	**2,933,416.00**	**3,542,909.00**	**4,191,642.98**	**3,434,803.48**	**8, 72**
II	**KEWAJIBAN**	7,328.00	2,167.00	8,357.00	11,049.62	27,074.18	98,12
A	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7,328.00	2,167.00	8,357.00	11,049.62	27,074.18	98,12
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3.00	0.00	1.00	69.48	431.13	-
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	7,325.00	2,167.00	8,356.00	10,980.14	26,643.05	97,31

No.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	RERATA PERTUMBUHAN
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	
III	**EKUITAS DANA**	2,569,391.00	2,931,249.00	3,534,552.00	4,180,593.36	0.00	(11,76)
A	**EKUITAS DANA LANCAR**	**102,752.00**	**243,800.00**	**583,654.00**	**687,751.75**	**0.00**	48,63
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	88,151.00	191,108.00	258,837.00	266,677.95	0.00	13,82
2	Pendapatan yang ditangguhkan	219.00	0.16	20.00	38.79	0.00	3,073
3	Cadangan untuk piutang	14,829.00	42,483.00	321,138.00	420,066.97	0.00	193,30
4	Cadangan untuk persediaan	6,878.00	12,376.00	12,015.00	11,948.18	0.00	(5,88)
5	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	(7,325.00)	(2,167.00)	(8,356.00)	(10,980.14)	0.00	36,65
B	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**2,466,639.00**	**2,687,449.00**	**2,950,897.00**	**3,492,841.61**	0.00	(15,72)
1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	18,857.00	21,794.00	31,658.00	80,901.40		29,10
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2,444,756.00	2,657,083.00	2,875,150.00	3,344,597.82		(16,70)

No.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015	RERATA PERTUMBUHAN
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (Tidak Termasuk Dana Cadangan)	3,024.00	8,570.00	44,088.00	67,342.39		137,65
C	**EKUITAS DANA CADANGAN**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
IV	**EKUITAS**	0.00	0.00	0.00	0.00	3,407,729.30	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**2,576,719.00**	**2,933,416.00**	**3,542,909.00**	**4,191,642.98**	**3,434,803.48**	**8,72**

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah yang dapat dilakukan melalui perhitungan rasio (Tabel 3.8). Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (*Leverage*). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu:

1. *Current Ratio*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya. Dari Tabel 3.8 dapat ketahui bahwa Rasio lancar Pemerintah Kota Batam berada di atas angka 1, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kota Batam dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan kas yang dimilikinya tergolong tinggi.
2. *Quick Ratio*, yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang lebih likuid, dimana Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak likuid sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan. Dengan melihat Tabel 3.8, Rasio Cair Pemerintah Kota Batam capaiannya lebih dari 1, artinya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Tabel 3.8. Hasil Perhitungan Neraca Daerah Kota Batam

Tahun	Rasio Lancar	Rasio Cair	Rasio Hutang Terhadap Aset	Rasio Hutang Terhadap Modal
2012	88,19	107,79	0,0007	0,0007
2013	30,97	69,40	0,0024	0,0024
2014	24,29	61,81	0,0026	0,0026
2015	1.74	14,18	0.0079	0.0079

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Rasio yang digunakan yaitu:

1. Rasio total hutang terhadap total aset, adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya menggunakan aset yang dimilikinya yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan informasi semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva Pemerintah Kota Batam tergolong kecil, yaitu hanya 0,0007 pada tahun 2012 dan 0,0079 pada tahun 2015. Hal ini berarti kewajiban-kewajiban jangka panjang pemerintah daerah sangat kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan

aset yang dimilikinya, pemerintah akan mampu membayar kewajiban jangka panjangnya.

2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Dari Tabel 3.8 diketahui bahwa rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kota Batam tergolong baik dengan nilai rasio 0,0007 pada tahun 2012 dan 0,0079 pada tahun 2015.

Hasil analisis terhadap *current ratio* dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Batam adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada Tabel 3.8. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Batam relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelayanan kepada publik.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Periode 2012–2015

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi belanja yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung menurun. Pada tahun 2012, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 64,83%, menurun menjadi 59,68% pada tahun 2013, 57,11% pada tahun 2014, dan 34.21% di

tahun 2015 (Tabel 3.9). Dengan menurunnya penggunaan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, diharapkan proporsi penggunaan belanja untuk pembangunan cukup besar sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik.

Tabel 3.9. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Batam

Tahun Anggaran	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Proporsi
1	**2**	**3**	**4=(2/3) x 100%**
2012	893.593.781.083,00	1.378.395.207.767,42	64,83%
2013	999.770.638.858,47	1.675.134.478.242,67	59,68%
2014	1.123.673.224.380,77	1.967.617.828.158,85	57,11%
2015	708.343.147.999,00	2.070.361.420.977,10	34,21%

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Untuk menyalurkan *surplus* dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut.

Defisit riil anggaran Kota Batam disajikan pada Tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10. Analisis Defisit Riil Anggaran Kota Batam

NO.	Uraian	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.749.105.595.933,83	2.021.540.370.494,82	1.936.406.807.579,72
2.	Belanja Daerah	1.675.134.478.242,67	1.967.612.947.196,65	2.154.059.184.726,10
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	17.149.000.000,00	56.901.322.724,00	1.000.000.000,00
Surplus/Defisit riil		56.822.117.691,16	-2.973.899.425,83	- 218.652.377.146,38

Berdasarkan Tabel 3.10 ini selama kurun waktu 2013, APBD Kota Batam mengalami *surplus* yang berarti realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah. Namun pada tahun 2015 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah yakni sebesar Rp. 218.652.377.146,38. Kemampuan untuk menutup defisit riil dapat dilihat dari hasil analisis sumber penutup defisit riil pada tabel 3.11 berikut ini:

Tabel 3.11. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Batam

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.490.029.364.338,29	1.749.105.595.933,83	2.021.540.370.494,82	1.936.406.807.579,72
	Dikurangi				

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	realisasi:				
2.	Belanja Daerah	1.378.395.207.767,42	1.675.134.478.242,67	1.967.612.947.196,65	2.154.059.184.726,10
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.678.224.854,88	17.149.000.000,00	56.901.322.724,00	1.000.000.000,00
A	Surplus/Defisit riil	102.955.931.715,99	56.822.117.691,16	-2.973.899.425,83	-218.652.377.146,38
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:				
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	88.152.954.948,59	191.108.886.664,58	258.837.337.353,74	264.969.086.841.91
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	
7.	Penerimaan	-	-		

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Pinjaman Daerah				
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	10.906.332.998,00	10.814.508.964,00	
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	88.152.954.948,59	202.015.219.662,58	269.651.846.317,74	264.969.086.841.91
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	191.108.886.664,58	258.837.337.353,74	266.677.946.891,91	46.316.709.695,53
	KOREKSI SILPA				-1.501.690.249,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun				44.815.019.446,53

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	berkenaan setelah Koreksi				

Dari Tabel 3.11 terlihat bahwa pada tahun 2012-2013 Pemerintah Kota Batam mempunyai *surplus* riil yang cukup besar sebagai akumulasi dari *surplus* ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sementara pengeluaran pembiayaan lebih kecil. Kondisi demikian menggambarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Batam cukup kuat untuk membiayai belanja langsung dan belanja tidak langsung.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

3.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Batam.

Komponen belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dalam Belanja Tidak Langsung seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota Dewan, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, belanja bunga, dan belanja bagi hasil. Adapun komponen belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dalam Belanja Langsung seperti belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan), belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya), serta belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor. Sedangkan komponen belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dalam Pembiayaan Pengeluaran meliputi pembentukan dana cadangan dan pembayaran pokok utang. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama disajikan dalam Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12. Analisis Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pertumbuhan
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(%)
A	Belanja Langsung	104.451	138.964	176.076	260.691	75,77
B	Belanja Tidak Langsung	295.344	324.427	303.946	329.040	6,29
C	Pembiayaan Pengeluaran	8.678	15.149	13.960	1.000	35,78
	TOTAL	408.474	478.541	493.983	590.731	26,91

Dari Tabel 3.12 terlihat bahwa jenis belanja dengan nilai pengeluaran wajib dan mengikat yang paling besar ada pada jenis belanja tidak langsung. Meski demikian, rata-rata pertumbuhan untuk pengeluaran

periodik wajib dan mengikat pada belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan terkecil yaitu sebesar 1,77% per tahun, sedangkan terhadap belanja langsung mengalami pertumbuhan sebesar 29,87% per tahun. Komponen belanja tidak langsung terbesar yang merupakan periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah komponen belanja gaji dan tunjangan.

Adapun pembiayaan pengeluaran mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran pembiayaan pada tahun 2013 sebesar Rp 15,149 milyar yang dialokasikan untuk penyertaan modal pemerintah daerah Kota Batam, pembayaran pinjaman dalam negeri kepada Pemda lainnya, serta pemberian pinjaman kepada perusahaan daerah. Hal ini berarti pengeluaran pembiayaan Kota Batam bersifat insidental. Walaupun begitu, secara keseluruhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Batam mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 10,19% per tahun.

3.3.2 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Alokasi anggaran untuk belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama diproyeksikan mengalami peningkatan selama periode 2016-2021. Belanja tidak langsung merupakan komponen terbesar dari belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama untuk periode 2016 – 2021 disajikan dalam Tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.13. Proyeksi Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

No.	Uraian	Data Tahun Dasar*	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi	
				2016	2017
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
A	Belanja Langsung	176.076	19,22	322.803	367.076
B	Belanja Tidak Langsung	303.946	14,53	215.201	244.717
C	Pembiayaan Pengeluaran	13.960	33,36	18.618	24.829
	TOTAL	493.983		556.622	636.622
No.	Uraian	Proyeksi			
		2018	2019	2020	2021
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Rp)
A	Belanja Langsung	423.653	496.192	589.446	709.583
B	Belanja Tidak Langsung	282.435	330.794	392.963	473.055
C	Pembiayaan Pengeluaran	33.112	44.159	58.890	78.537
	TOTAL	739.200	871.145	1.041.299	1.261.175

Ket.: Data Tahun Dasar* = data tahun dasar diasumsikan data tahun 2014

3.3.3 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021

Dengan melihat performa Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2012-2014, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi lagi, yang diikuti dengan berbagai upaya-

upaya untuk dapat mencapainya. Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama periode tahun 2009–2014, yang kemudian disesuaikan dengan perkiraan inflasi dan kondisi perekonomian nasional. Proyeksi pendapatan daerah Kota Batam disajikan dalam Tabel 3.14 berikut:

Tabel 3.14. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Batam 2016-2021

No.	Uraian	Data Tahun Dasar*	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi	
				2016	2017
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
1	PENDAPATAN	2.104.943	10,75	2.399.911	2.452.598
2	Pendapatan Asli Daerah	812.739	14,43	891.918	1.149.791
3	Dana Perimbangan	936.414	13,31	1.011.502	1.011.502
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	355.789	-1,9	496.490	200.856
No.	**Uraian**	**Proyeksi**			
		2018	**2019**	**2020**	**2021**
		(Juta Rp)	**(Juta Rp)**	**(Juta Rp)**	**(Rp)**
1	PENDAPATAN	**2.752.196**	**3.021.110**	**3.323.255**	**3.643.214**

No.	Uraian	Data Tahun Dasar*	Tingkat pertumbuhan	Proyeksi	
				2016	2017
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
2	Pendapatan Asli Daerah	**1.285.290**	**1.425.670**	**1.565.633**	**1.718.407**
3	Dana Perimbangan	**1.205.558**	**1.321.998**	**1.449.877**	**1.590.327**
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**261.347**	**283.441**	**307.745**	334.479

Ket: *= data tahun dasar diasumsikan sama dengan realisasi tahun 2015

Berdasarkan penghitungan tersebut, proyeksi pendapatan untuk tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp. 2,399 triliun, dan meningkat menjadi Rp. 2,452 triliun pada tahun 2017. Diproyeksikan pada akhir periode RPJMD 2016-2021, pendapatan daerah Kota Batam akan menjadi Rp. 3,643.214 triliun. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan.

Adapun beberapa asumsi yang digunakan antara lain :

1. Target Pertumbuhan ekonomi dalam periode 2016 sampai dengan tahun 2021 diasumsikan sebesar 7 persen sampai dengan 7,5 persen. Sedangkan untuk menghitung proyeksi pajak daerah selain mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi juga mempertimbangkan pertumbuhan riil (PDRB ADHB) sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran yang diproyeksikan pertumbuhannya rata-rata tumbuh di atas 14,88 persen per tahun.
2. Laju inflasi diperkirakan antara 5,0 persen sampai dengan 6,0 persen.
3. Perkiraan perkembangan dana perimbangan, utamanya berasal dari Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2016 dan seterusnya diestimasikan akan mengalami peningkatan mengingat di tahun-tahun sebelumnya sering mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai Dana Alokasi Umum sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional kebijakan kenaikan gaji pegawai negeri sipil.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi, dengan cara:

- Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak

daerah;

- Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
- Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi pengunaan anggaran daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN)dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

3.3.4 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan proyeksi pendapatan daerah dan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan untuk periode 2016–2021. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam disajikan dalam Tabel 3.15 berikut:

Tabel 3.15. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Batam untuk Mendanai Pembangunan Daerah

No.	Uraian	Proyeksi	
		2016	2017
		(Juta Rp)	(Juta Rp)
1.	Pendapatan	2.399.911	2.552.598
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)		
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	181.949	45.000
	Total penerimaan	2.581.860	2.597.598
	Dikurangi:		
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	556.622	636.622
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.025.239	1.960.976

No	Uraian	Proyeksi			
		2018	2019	2021	2021
		(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)	(Juta Rp)
1.	Pendapatan	**2.752.196**	**3.021.110**	**3.323.255**	**3.643.214**
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)				
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	40.000	35.000	30.000	25.000
	Total penerimaan	2.792.196	3.403.473	3.719.424	3.668.214
	Dikurangi:				

No.	Uraian	Proyeksi			
		2016		2017	
		(Juta Rp)		(Juta Rp)	
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	739.200	871.145	1.041.299	1.261.175
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	2.052.996	2.181965	2.311.956	2.407.039

Proyeksi sisa lebih riil perhitungan anggaran didasarkan pada hasil penghitungan komponen sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (Tabel 3.15) dengan laju pertumbuhan sebesar -12,75%. Hal ini di satu sisi menunjukkan adanya inefisiensi anggaran, namun di sisi lain menunjukkan adanya potensi *surplus* penerimaan daerah. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

Dari tabel di atas terlihat bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Batam relatif cukup besar. Biaya yang dapat dialokasikan untuk pembangunan Kota Batam pada tahun 2016 sebesar Rp 2,025 triliun meningkat hingga menjadi Rp 2,407 triliun pada tahun 2021. Meski demikian, proyeksi kapasitas kemampuan daerah disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, substansi dari Bab VIII RPJMD adalah menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta jabaran program yang menjadi tanggung jawab PD. Untuk memenuhi kriteria perencanaan berbasis kinerja, maka disajikan pula perbandingan antara pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Setelah program prioritas dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka pada bab ini dirumuskan alokasi pagu yang bersifat indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif ini merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Batam berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari

APBD Kota Batam, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dari APBD Kota Batamdan bersifat indikatif.

Adapun skema Indikasi rencana program prioritas RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 disajikan pada gambar 8.1 di bawah ini.

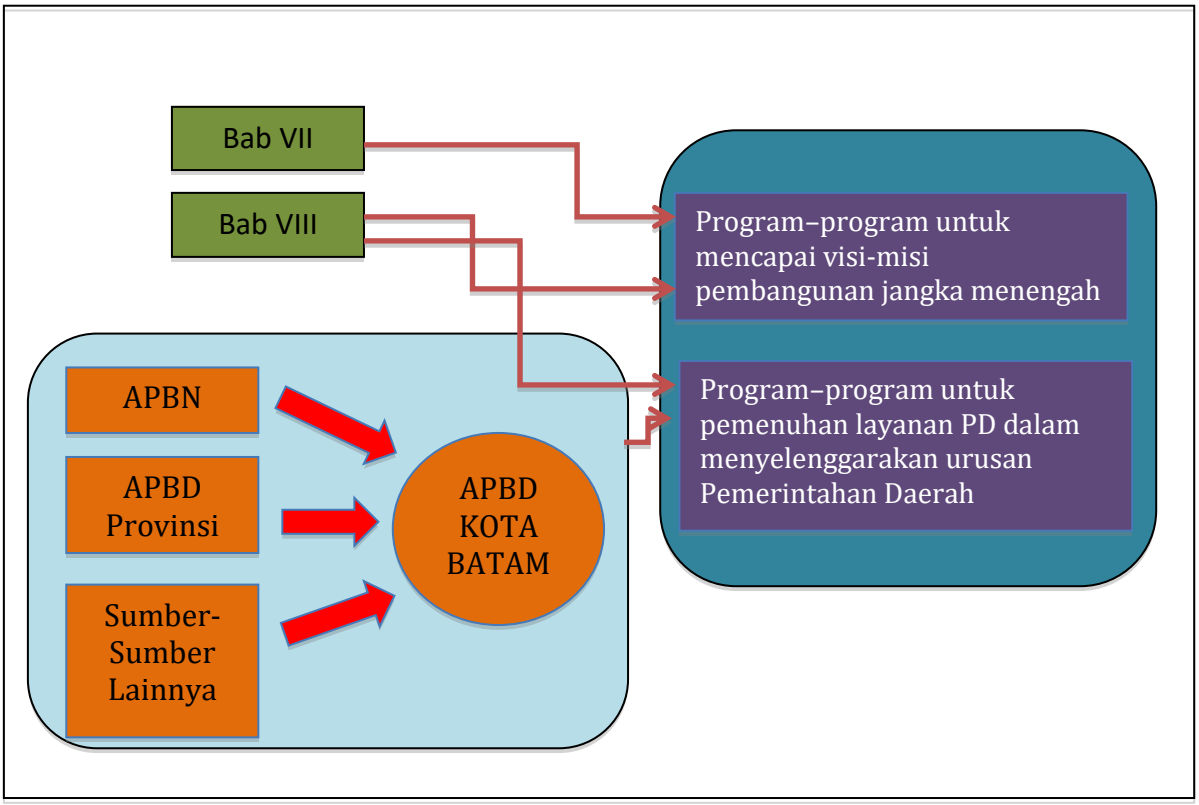

Gambar 8.1. Skema Indikasi Program Prioritas dan Pendanaan RPJMD Kota Batam 2016 – 2021.

Berikut adalah table indikasi rencana program prioritas pembangunan Kota Batam beserta pagu indikatifnya untuk periode 2016 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
NON URUSAN																	
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	persentase	100%	100%	355.745	100%	355409	100%	356463	100%	427481	100%	468394	100%	1.963.573	Semua
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	persentase	30%	40%	89.144	45%	74991	50%	80155	55%	87939	60%	92078	60%	424.307	Semua
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
PERENCANAAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
3	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	persentase	45%	45	6.319	50	5976	55	6540	60	7123	65	7773	95%	33.731	PD Pengampu Penunjang Urusan Perencanaan
		Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	persentase	40%	90		92		94		96		98		90%		
		Partisipasi perusahaan dalam pembangunan Kota Batam melalui dana CSR	persentase	0	10		30		50		60		80		80		
KEUANGAN																	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	Opini BPK	WTP	WTP	12.681	WTP	12.243	WTP	12.248	WTP	13.292	WTP	13.445	WTP	63.815	PD Pengampu Penunjang Urusan Keuangan
		Peningkatan PAD	Rp	891 M	1,1 T		1,3 T		1,4 T		1,5 T		1,7 T		1,7T		
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
5	Program pengelolaan, peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian	persentase	37,6	46.67 %	3.905	60.00%	4.650	73.33%	5.155	86.67%	5.681	100.00 %	6.261	100.00 %	31.974	PD Pengampu Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Diklat
		Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat	persentase	30,56	17.75 %		54.32%		68.55%		83.48%		100.00 %		100.00 %		
		Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur	persentase	41,63	60.00 %		75.00%		83.33%		91.67%		100.00 %		100.00 %		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan	Total dokumen seluruh Pemko Batam	16	3	800	4	850	4	900	4	950	4	1000	35	4.500	PD Pengampu Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan
BENCANA																	
7	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Penanganan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana	persentase	40	50	936	60	2.846	65	3.155	70	3.477	75	3.832	80	15.810	PD Pengampu Penunjang Urusan Bencana
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
8	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan	Pencegahan Konflik social dan keagamaan	jumlah konflik	0	0	18.531	0	1590	0	1805	0	1985	0	2366	0	9.058	PD Pengampu Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Program Pengembangan dan partisipasi budaya politik	Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pileg	persentase	32		275		323	68	237		346		105	35	1.286	PD Pengampu Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilpres	persentase	58,6							65				65		
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilgub	persentase	45							60				60		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilwako	persentase	53							60				60		
FUNGSI LAINNYA																	
Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif																	
10	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan & peraturan perundang-undangan	Peringkat LPPD Provinsi	Peringkat dari Gubernur	3	3	4.309	2	3715	1	4124	1	4536	1	5013	1	21.697	PD Pengampu Fungsi Lainnya Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif
		Peringkat LPPD Nasional	Peringkat dari Kemendagri	40 besar	30 besar		20 besar		10 besar		5 besar		3 besar		3 besar		
		Nilai Laporan Kinerja	Penilaian Kemenpan	CC	B		B		B		B		B		BB		
		Jumlah PD yang telah memiliki SOP	Persen	0	5		7		9		12		17		100		
		Produk Hukum (Perda dan Perwako) dan Bantuan Hukum	Perda	0	7		7		7		7		7		35		
			Perwak	0	10		10		20		20		20		80		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
			o														
			MoU	0	5		10		10		10		15		50		
		Persentase Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tupoksi PD	persentase	70%	100%	150	100%	200	100%	250	100%	300	100%	350	100%	1.250	PD Pengampu Fungsi Lainnya Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif, PD Pengampu Fungsi Lainnya

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
																	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemko Batam	IKM PD	Indeks	67,75	1.600	70	2.000	75	2.200	80	2.400	85	2.600	85	10.800	PD Pengampu Fungsi Lainnya Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD																	
13	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	persentase	60%	65%	43.322	70%	46.491	75%	51.544	80%	56.796	85%	62.595	85%	260.748	PD Pengampu Fungsi Lainnya Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																	
14	Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan	persentase	42%	46	3.337	50	3798	54	4238	58	4862	62	5501	62%	21.736	PD Pengampu Fungsi Lainnya Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	persentase	85%	87		89		91		93		95		95%		Daerah
URUSAN WAJIB																	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
PENDIDIKAN																	
15	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	1.1. APK SD Laki-Laki		103,8	105	27.044	106,19	38.563	107,38	42.754	108,57	47.111	109,76	51.920	109,76	207.392	
		1.2. APK SD Perempuan		98,5	99,47		100,44		101,41		102,38		103,35		103,35		
		2. APM SD		91,9	92,25		92,92		93,91		94,58		95,25		95,25		
		2.1. APM SD Laki-laki		94,3	94,3		94,94		96,22		96,86		97,5		97,5		
		2.2. APM SD Perempuan		89,5	90,2		90,9		91,6		92,3		93		93		
		3. APK SMP		93,5	93,51		94,32		95,13		95,94		96,75		96,75		
		3.1. APK SMP Laki-Laki		93	94,1		95,2		96,3		97,4		15		1. APK SD		

102,24

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		3.2. APK SMP Perempuan		92,4	92,92		93,44		93,96		94,48		95		95		
		4. APM SMP		90	90,75		91,5		92,25		93		93,75		93,75		
		4.1. APM SMP Laki-laki		90,2	90,96		91,72		92,48		93,24		94		94		
		4.2. APM SMP Perempuan		89,8	90,54		91,28		92,02		92,76		93,5		93,5		
		5. Persentase SD/ SDLB Berakreditasi Minimal A sekurang-kurangnya sebanyak 29,81%	persentase	16,56	19,21		21,86		24,51		27,16		29,81		29,81 %	0	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		6. Persentase SD/ SDLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 67,91%	persentase	37,73	43,77		49,8		55,84		61,87		67,91		67,91 %		
		7. Persentase SMP/ SMPLB Berakreditasi Minimal A sekurang-kurangnya sebanyak 53,95%	persentase	30,83	35,45		40,08		44,7		49,33		53,95		53,95 %		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		8. Persentase SMP/ SMPLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 51,32%	persentase	29,32	33,72		38,12		42,52		46,92		51,32		51,32 %		
		Angka Putus Sekolah SD		0,75	0,55		0,3		0		0		0				
		Angka Putus Sekolah SMP		1,51	1,2		1		0,85		0,75		0,5				
		% tingkat kelulusan SD	persentase	100	100		100		100		100		100				
		% tingkat kelulusan SMP	persentase	100	100		100		100		100		100				
16	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1. APK PAUD		77,6	79,26	2.674	80,91	5.165,00	82,57	5.891,00	84,22	6.757,00	85,88	7.936,00	85,88	28.423	
		1.1. APK PAUD Laki-laki		30,14	30,97		31,8		32,62		33,45		34,28		34,28		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		1.2. APK PAUD Perempuan		47,46	48,29		49,12		49,94		50,77		51,6		51,6		
		2. APM PAUD		74,35	75,95		77,54		79,14		80,73		82,33		82,33		
		2.1. APM PAUD Laki-laki		28,17	28,97		28,77		29,77		31,36		32,16		32,16		
		2.2. APM PAUD Perempuan		46,18	46,98		47,78		47,78		49,37		50,17		50,17		
		3. Persentase TK Berakreditasi Minimal A	persentase	16	20		35		45		60		75				
		4.Persentase TK Berakreditasi Minimal B	persentase	20	35		49		60		75		89				

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
17	Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan	1. Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional yaitu sekurang-kurangnya:	persentase			3.327		27942		28588		29259		30000		119.116	
		1.1. SD/SDLB		3,83%	3,83%		3,83%		3,83%		3,83%		3,83%		3,83%		
		1.2. SMP/MTs		8,08%	8,08%		8,08%		8,08%		8,08%		8,08%		8,08%		
		1.3. SMA/SMALB		17,29%	17,29 %		17,29%		17,29%		17,29%		17,29%		17,29 %		
		1.4. SMK		4,74%	4,74%		4,74%		4,74%		4,74%		4,74%		4,74%		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
18	Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif	masyarakat yang lulus masuk PTN negeri yang dibiayai untuk pengentasan pendidikan S1	jumlah orang	60	60	2.514	65	9.040	70	10.310	75	11.825	80	13.889	80	47.578	
KESEHATAN																0	
19	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima (5) jenis tenaga kesehatan (tenaga Kesmas, Kesling, Gizi, Kefarmasian & analis kesehatan)	persentase	70	80	24.392	85	220	85	250	85	290	90	310	90	25.462	PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
		Jumlah dokumen anggaran, perencanaan dan data kesehatan yang dihasilkan	dokumen	12	12		12	390	13	430	13	490	14	570	14	1.880	
20	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Tersedianya Obat, BHP dan Alat Kesehatan Rujukan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam	persentase	75%	78%	18.037	80%	500	83%	18.522	85%	20.587	88%	27.587	88	85.233	
		Persentase Ketersediaan obat dan Alkes di pelayanan kesehatan dasar	persentase	85%	85		90	17.722	90		90		90		90	17.722	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
21	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas tersertifikasi akreditasi	persentase	0	5	45.445	10	55363	15	66185	20	71516	25	73588	25	312.097	
		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat	kecamatan	1	2		3		4		5		6		6		
		Jumlah kebijakan PHBS yang dikeluarkan Pemerintah	kebijakan	2	3		5		7		8		9		9		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Persentase Puskesmas yang melaporkan pelaksanaan kebijakan PHBS	persentase	60	65		70		75		80		80		80		
22	Peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	persentase	55%	60%	90.000	70%	2000	75%	1871	80%	392	85%		90%	94.263	
23	Program Jaminan Kesehatan Daerah	Persentase penduduk yang memiliki SJSN/ Peserta BPJS Kesehatan	persentase	60	70	23.576	75	23575	80	24175	85	25986	85	30986	85	128.298	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
24	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan lingkungan	Prevalensi HIV pada penduduk	persentase	< 0,1	< 0,1	4.153	< 0,1	3855	≤ 0,1	4434	≤ 0,1	5034	≤ 0,1	6991	≤ 0,1	24.467	
		Presentase HIV yang diobat	persentase	49	52		55		58		61		64		64		
		Angka keberhasilan pengobatan Tb (succes rate)		52	54		56		58		60		62		62		
		Angka kejadian kusta per 100.000 penduduk		1,16	1,2		1,1		1		0,9		0,8		0,8		
		Insiden rate DBD per 100.000 penduduk		56	55		54		53		52		50		50		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Annual paracite insidence (API) per 100 penduduk		< 1	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		
		Angka kejadian filariasis		< 1	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		
		Persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	persentase	91	91,5		92		92,5		93		93,5		93,5		
		Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang terdeteksi dini kanker serviks dan payudara	persentase	0,75	10		15		20		25		30		30		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Prevalensi tekanan darah tinggi	persentase	20	19		18		17		16		15		15		
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	persentase	30	25		20		15		12		10		10		
		Prevalensi merokok pada penduduk usia < 18 tahun	persentase	10	9		8		7		6		5		5		
		Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM	Kel/Desa	20	22		24		26		28		30		30	0	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
25	Program kesehatan keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)	orang	163	156	2.417	152	1720	149	2270	145	3125	141	3275	141	12.807	
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	orang	21	20		19		18		17		16		16		
		Persentase (prevalensi) kekurangan gizi (under weight) pada anak Balita	persentase	5	4,8		4,7		4,6		4,5		4,5		4,5		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Persentase (prevalensi) pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak Baduta	persentase	10	09.05		9		8,7		8,5		8,5		8,5		
		Persentase kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak Balita	persentase	1	0,9		0,85		0,8		0,75		0,75		0,75		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																0	
26	Program Pembangunan, peningkatan,	Panjang jalan yang dibangun	Km	134,83	25	272.723	28	324.733	30	359.919	33	399.311	36	439974	286,83	1.805.785	PD Pengampur Urusan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
	pemeliharaan jalan dan jembatan/pelantar	Panjang Jembatan/ Pelantar Yang Dibangun/ Ditingkatkan	m	140	10		10		10		10		10		190		PU dan Penaatan Ruang
		Panjang jalan yang dipelihara	km	35	35		40		48		53		58		58		
27	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah Titik Lampu PJU Yang Dipelihara	titik	11727	11,987	38.233	12,247	39.074	12,507	42.452	12,767	43.963	13,027	47.839	13,027	213.264	
		Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun	titik	1110	260		260		260		260		260		2410		
		Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi	m	69500	20000		20000		20000		20000		20000		169500		
		Jumlah Peralatan	unit	6	6		4		4		3		2		19		
		Jumlah Peralatan dan Alat Berat Yang Dipelihara	unit	15	21		25		29		32		34		34		
28	Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan	Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan	m	15177	3000	32.140	3000	34.491	4000	39.025	4000	42.905	5000	47.229	34177	193.671	
		Panjang drainase yang dipelihara	km	45	45		48		50		52		55		55		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani	m	380	100		150		200		250		300		1380		
29	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah penduduk yang terlayani air bersih	jiwa	13000	1000	33.724	1100	34.303	1200	37.350	1300	50.245	1375	80.145	18975	235.767	
		Jumlah Penduduk yang terlayani sanitasi	jiwa	1400	600		800		1000		1200		1500		6500		
30	Program Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland	km	5,2	2	21.346	2	19.397	2	21.506	2	23.697	2	26.117	15,2	107.753	
		Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun di wilayah hinterland	m	903	250		250		250		250		250		2.153		
		Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland	titik	379	397		427		457		487		517		517		
		Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun di wilayah hinterland	titik	397	30		30		30		30		30		547		
31	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata	Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam	kecamatan	-	1 kec	750	3 kec	2.250	4 kec	3.000	4 kec	5.000	-	-	12 kec	11.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2 Ruang	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																0	
32	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan	Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/direhabilitasi	unit	104	478	7.369	502	7.959	527	8.596	553	9.283	581	10.026	2.745	43.233	PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Panjang Drainase/ saluran lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan	Meter (M)	13,525	14.145	3.796	14.852	4.100	15.595	4.428	16.375	4.782	17.193	5.165	91.685	22.271	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Jumlah Bangunan Rusunawa & PSU Rusunawa yang dibangun/direhabilitasi	Twin Block (TB)	25 TB	5 TB	12.377	5 TB	13.367	5 TB	14.473	5 TB	15.591	5 TB	16.839	55	72.611	
		Pengembangan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan (Kel)	64 Kel	64 Kel	2.223	64 kel	2.401	64 kel	2.593	64 kel	2.800	64 kel	3.024	64 kel	13.041	
		Panjang Jalan lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi serta dipelihara di kawasan permukiman perkotaan	Meter (M)	109,802	20.250	42.316	21.263	45.701	22.326	49.357	23.442	53.306	24.614	57.570	221.696	248.251	
		Panjang Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan	Meter (M)	3.755	1.251	5.406	1.314	5.838	1.380	6.305	1.449	6.809	1.521	7.354	6.915	31.712	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
33	Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang mememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan	bangunan	665 bangunan	249	231.724	349	217.468	301	154.962	453	55.394	503	69.641	2.452	729.190	
		Mesjid Agung	gedung	0	0	36.503	0	97.342	1	109.510					1	210.000	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
34	Program Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland	Panjang drainase/ saluran lingkungan panjang jalan lingkungan panjang turap/ talud/ bronjong di wilayah hinterland	meter	3970	4.795	12.466	6.795	19.025	8.795	26.384	10.795	34.542	12.795	43.501	47.942,5	135.917,5	
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																0	
35	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	Jumlah Aksi Demo yang diamankan	orang	250 kali	50	2.509	50	4734	50	5314	50	5989	50	6701	250	26.971	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Jumlah Linmas yang diberdayakan	orang	1416	344		344		344		344		344		1416		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
36	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatnya fasiilitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran	Hydrant (unit)	55	10	2.876	10	4.555	10	5.050	10	5.564	10	6.132	105	25.301	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penanggulangan kebakaran	persen	20	30		40		50		60		70		80		
SOSIAL																	
37	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bantuan yang diberikan	Rumah Tangga Sasaran dan jumlah PMKS	100 % dari data PPLS 2011 (36.103 RTS) dan 8.197 PMKS	100 % dari data PPLS dan 8.197 PMKS	11.116	100 % dari data BDT (39.903 RTS) dan 12.082 PMKS	18400	100 % dari data BDT dan 12.082 PMKS	19050	100 % dari data BDT dan 12.082 PMKS	19690	100 % dari data BDT dan 12.082 PMKS	20110	100 % dari data BDT dan 12.082 PMKS	88.367	PD Pengampu Urusan Sosial

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
TENAGA KERJA																	
38	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	orang	1456	1100	8956	2100	27023	500	26415	1550	12850	2200	36009	7450	111.253	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi	orang	1440	1600	6400	2000	12000	600	3600	1700	10200	2000	12000	7900	44200	
		Jumlah tenaga kerja yang terserap/ ditempatkan	orang	11449	13500	2035	14000	2377	14500	2626	15500	2193	17000	3142	74500	12373	
39	Program Peningkatan hubungan industrial yang harmonis	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	jumlah kasus	84	86	3.156	88	1784	90	1962	92	2158	94	2373	94	11.433	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
40	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam	Indeks Pembangunan Gender	persentase	94,45	94.47.00	3.831	94.49.00	3.931	94.51.00	4.031	94.53.00	4.131	94.54.00	4.258	94,54	20.182	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
	pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	persentase	54,31	55.00.00		56.50.00		58.00.00		59.50.00		61.05.00		61,05		Perempuan dan Perlindungan Anak
41	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan perlindungan	persentase	100	100	1.432	100	2.332	100	2.832	100	3.332	100	3.832	100	13.760	
PANGAN																	
42	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Prosentase ketersediaan pangan	persentase	30%	30%	666	32%	790	34%	876	36%	966	38%	1.064	40%	669.937	PD Pengampu Urusan Pangan
PERTANAHAN																	
43	Program Penataan Tata Guna tanah	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	persentase	31.79	47.62	1.208	71.43.00	2.135	100	2.415	-	1.725	-	1.810	100	9.293	PD Pengampu Urusan Pertanahan
		Jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam	dokumen	197	50		102		105		100		108		662		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Fasilitas Penggunaan Sertifikat lahan Masyarakat	dokumen	0	100		100		100		100		100		500		
		Jumlah pengadaan lahan asset Pemko Batam	persil	0	0		139		110		98		97		444		
		Jumlah Kampung Tua yang memiliki Dokunen PL atas nama Pemko Batam	kampung tua	7	8		9		10						34		
LINGKUNGAN HIDUP																	
44	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti/ terverifikasi	persentase	90%	90%	6.791	90%	9.413	90%	10.437	90%	11.500	90%	12.674	90%	50.815	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup Dan Urusan Kelautan & Perikanan
		Ketaatan Usaha dan/ atau kegiatan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan	persentase	35%	0		45%		50%		55%		60%		80%		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
45	Program Peningkatan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi	Persentase peningkatan tutupan terumbu karang	persentase	31	33	580	35	436	37	483	40	532	43	587	43	2.618	
46	Program Peningkatan dan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau	persentase	23	0,2	24.593	0.2	26.549	0.2	26.673	0.2	30.967	0.2	33.445	24	144.219	
		Kawasan Pemakaman yang dikelola	kawasan	2	2		2		2		2		2		10		
		Jumlah ruang terbuka hijau/publik yang dibangun/ditingkatkan	Lokasi	72 Lokasi	12 Lokasi (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	17,484	12 Lokasi (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	20,981	12 Lokasi (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	25,177	12 Lokasi (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	30,213	12 Lokasi (8 lokasi lama, 4 lokasi baru)	36,255	72 lokasi lama, 20 lokasi baru)	130,110	
47	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengangkutan Sampah	persentase	63.29%	1	90. 153	70%	105397	75%	117762	80%	129323	80%	142311	80%	494.793	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
48	Program Lingkungan Sehat	Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3 R (pengomposan, bank sampah, dll)	persentase	2.00%	3%	4.681	4%	2.023	5%	2.243	6%	2.471	7%	2.734	7%	14.152	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																	
49	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil:KK, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian	Persentase KK	84,17%	89	1.738	98	2280	100	2547	100	2.811	100	3.066	100%	12.442	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase KTP	85%	87		98		100		100		100		100%		
			Persentase Akte Kelahiran	75%	77		80		82.5		85		96		100%		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi	PKK 77, LPM 77, Posyandu 450, RT 3215, RW 772, KPM 320	PKK 77, LPM 77, Posyandu 500, KPM 320 org, Kader	42.927	PKK 77, LPM 77, Posyandu 550, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif	39191	PKK 77, LPM 77, Posyandu 600, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif	43641	PKK 77, LPM 77, Posyandu 650, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif	49433	PKK 77, LPM 77, Posyandu 700, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif	55157	PKK 77, LPM 77, Posyandu 700, KPM 320 org, Kader	228.212	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
				org, Kader Siaga Aktif 128 org	Siaga Aktif 256 org		384 org		512 org		512 org		640 org		Siaga Aktif 640 org		
		Meningkatnya swadaya masyarakat	persen	Swadaya 30%, Goro 2000 org	Swadaya 35%, Goro 500 org		Swadaya 40%, Goro 500 org		Swadaya 45%, Goro 500 org		Swadaya 50%, Goro 500 org		Swadaya 50%, Goro 500 org		Swadaya 50%, Goro 2500 org		
		meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan	Jumlah Organisasi	UEM-SP 10, POSYANTEK 9, TTG 31	posyantek 1, TTG 7, PELATIHAN 100 ORANG		UEM-SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang		UEM-SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang		UEM-SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang		UEM-SP 9 POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang		UEM-SP 49, POSYANTEK 9, TTG 35, pelatihan 1100 orang		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
51	Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	persentase	5 persen	6	64.000	7	73.252	8	78.241	9	83.633	10	89.533	10	395.118	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
52	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)	persentase	71,5	72	2.291	3	2.291,00	73	2.838,00	3,05	3.221,00	74	3.721,00	74	14.362	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERHUBUNGAN																	
53	Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian lalu lintas	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	Lokasi	188 Lokasi	198	17.400	208	17.600	218	17.800	228	18.000	228	18.200	228 Lokasi	89.000	PD Pengampu Urusan Perhubungan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
54	program penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	penumpang	0,97jt	1.460 jt	34.826	1.845 jt	40.683	2.230 jt	45.105	2.615 jt	49.701	3jt	54.776	3jt	225.091	
		Panjang Jalan Kota Batam yang di lalui Trans Batam untuk melayani masyakarat (Jumlah Koridor	km	94	181.5 km		201 km		246 km		246 km		246 km		246		
			koridor	(5 kor)	5		7		9		9		9		9		
55	program pembangunan, peningkatan, pemeliharaaan rehabilitasi sarana	Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terbangun	persentase	33	45	22.101	55	27.816	65	30.840	65	33.982	65	37.452	65	152.191	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
	dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara	persentase	20	25		30		40		50		60		60		
		Jalur Sepeda	Km	0	0		2		3,5		5,5		9		9		
5 6	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas	pembangunan pelabuhan di hinterland	pelabuhan	25	2	7.885	2	7.672	2	8.506	2	9.373	3	10.330	35	43.7660	
		Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	kapal	4	3		0		1		1		0		9		
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
57	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	indeks	C (43.76-62.50)	B (62.51-81.25)	1.488	B (62.51-81.25)	6971	B (62.51-81.25)	7585	B (62.51-81.25)	8148	A (81.25-100)	8779	A (81.25-100)	35.511	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
58	Program Peningkatan, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan public berbasis online	persen	0	29	7.206	52	2.000	68	1.000	84	1.000	100	1.000	100	57.615	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																	
59	Program Peningkatan, pembinaan dan pengembangan UKM dan koperasi serta usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina	UMKM	125 UMKM	85 UMKM	1.543	250	2.703	300	2.998	350	3.302	400	3.640	1510	15.017	PD Pengampu Urusan Koperasi dan UKM
		Jumlah Sentra UMKM yang dibentuk	sentra UMKM	0	0		1		1		1		1		4		
		Jumlah koperasi aktif	koperasi	571	596		624		654		684		719		719		
PENANAMAN MODAL																	
60	Peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan	Meningkatnya persentase realisasi Investasi	persentase	15.89%	17	452	18	514	19	570	20	628	22.05		22.05	2.164	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
61	Program Peningkatan, Pembinaan Dan	Prestasi/ Capaian kepemudaan	orang	0	40	7.622	40	6.810	40	11.870	40	1.930	40	1.990	200	30.222	PD Pengampu Urusan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
	Pelayanan Kepemudaan, kepramukaan dan Olahraga	Prestasi Olahraga	orang	95	100		120		140		160		180		700	0	Kepemudaan dan Olahraga
		Budaya olahraga	keg	0	5		5		5		5		5		25	0	
		Prestasi Kepramukaan	orang	380	80		80		80		80		80		780	0	
		Sarana Prasarana terbangun	unit	4	1		2		1		0		0		8	0	
STATISTIK																	
6 2	Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah	Kelengkapan Data SIPD Kota Batam		5%	20%	786	40%	526	80%	566	100%	611	100%	277	100%	2.766	PD Pengampu Urusan Statistik
		Jumlah dokumen pendataanpendukung perencanaan	dokumen	3	2		2		2		2		2		13		
PERSANDIAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
63	Program Keamanan Data dan Informasi	Persentase informasi yang berkualifikasi di Pemerintah Kota Batam	persen	0	5	123	15	500	25	525	35	551	50	578	50	125.394	PD Pengampu Urusan Persandian
KEBUDAYAAN																	
64	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni & Budaya	Jumlah pagelaran seni dan budaya (event)	jumlah	6 event (3 event perlombaan dan 3 event pelestarian)	6	1.183	6	1.347	6	1.494	6	1.646	6	1.814	30 event penyelenggaran	7.484	PD Pengampu Urusan Kebudayaan
PERPUSTAKAAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
65	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung dalam satu tahun		5%	5	612.770	6	712	7	776	8	873	9	979	9	616.110	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
KEARSIPAN																0	
66	Program Penataan Penyelenggaraan Kearsipan	ASN Arsiparis yang di Bina		0	8	109.090	8	116	8	148	8	197	8	250	40	109.801	PD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN PILIHAN																	
KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
67	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	ton	35.345 ton	36.700 ton	1.424	37.500 ton	2.230	38 rb ton	2.472	39 rb ton	2.724	39.804 ton	3.002	39.804 ton	11.852	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
PERTANIAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
68	Program Pembinaan, pengembangan dan pengawasan pertanian dan peternakan	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan	ton	19.015	19.025	2.802	19.338	2.828	19.841	3.136	20.345	3.456	20.849	3.808	20.849	16.030	PD Pengampu Urusan Pertanian
PARIWISATA																	
69	Program Pengembangan sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan Lokal, Jumlah Wisatawan Mancanegara	juta orang	1,5 jt	1,8	2.441	1.900		2.000		2.100		2.200		2,1 jt	2.441	PD Pengampu Urusan Pariwisata
		Length of Stay (Lama Kunjungan)	hari	1,9			2,1		2,03		2,07		2,1		2,13		
PERDAGANGAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
70	Program Perlindungan konsumen dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL yang dibina	PKL	5000 PKL	100	235	100	455	100	504	100	556	100	613	500	2.363	PD Pengampu Urusan Perdagangan
71	Program Penataan, pembinaan dan pengendalian pasar	Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok	persentase	65	65	4.530	70	4.497	75	4.986	75	5.494	80	6.055	80	25.562	PD Pengampu Urusan Perdagangan
PERINDUSTRIAN																	
72	Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri yang dibentuk	sentra industri	0	1	1.321	1	455	1	504	1	556	1	613	5	3.449	PD Pengampu Urusan Perindustrian

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini disajikan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan Kota Batam tahun 2016-2021. Visi, misi dalam konteks ini merupakan perwujudan dari visi misi pasangan Muhammad Rudi – AmsakarAchmad yang telah memenangkan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batam secara langsung pada bulanDesember 2015. Lebih lanjut, RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi, misi ini.

Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur

Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Walikota bersama Wakil Walikota Batam. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

5.1 Visi

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka disusunlah Visi Kota Batam Tahun 2016-2021. Adapun Visi yang tersebut adalah :

"Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat"

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Batam : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warga-nya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batastertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.

Bandar Dunia : Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional AsiaTenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellences*", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

Madani : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Berdaya Saing : Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

Maju : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

Bermartabat : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status.

5.2 MISI

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan

menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi Pertama : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi.* Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Batam yang prima, dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas dan tanggungjawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak membedakan status dari warga-nya. Selain itu sifat transparan harus melekat dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Misi Kedua : *Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera*. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya.

Misi Ketiga : *Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa*. Misi ini dimaksudkan untuk

meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.

Misi Keempat : *Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/ perikanan dalam menopang perekonomian daerah*. Misi ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan, serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan, penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan *value added* terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan sumberdaya pesisir dan laut.

Misi Kelima : *Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik*. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis komoditas yang akan dijual, permodalan, dan kepastian dalam hal *sustainability businesses*. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi

sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.

Misi Keenam : *Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam*. Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di wilayah *hinterland*, sehingga masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di wilayah *hinterland* menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemerataan kesejahteraan masyarakat hingga wilayah *hinterland*.

5.2.1 Hubungan Visi dan Misi RPJPD Kota Batam Tahun 2005-2025 dengan Visi dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah tidak terlepas dari Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Visi Jangka Menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Misi yang dibawa/ diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Visi jangka panjang Kota Batam adalah "*Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Yang Madani*", diwujudkan melalui Visi jangka menengah yaitu "*Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat*".

Adapun Misi 1 jangka panjang (*Mewujudkan Kota Batam Sebagai Bandar Berstandar Internasional*) diwujudkan melalui Misi jangka menengah (Misi 3

: *Mewujudkan Tata Ruang Kota Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Infrastruktur Perkotaan Yang Modern Serta Penataan Permukiman Yang Ramah, Asri Dan Nyaman*), Misi 2 jangka panjang (*Menciptakan Batam Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional*) diwujudkan melalui misi jangka menengah (Misi 4 : *Mewujudkan Penguatan Sektor Industri Dan Mendorong Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alih Kapal, Maritim Dan Pertanian/ Perikanan Dalam Menopang Perekonomian Daerah*), kemudian Misi 3 jangka panjang (*Menciptakan Masyarakat Sejahtera*) diwujudkan melalui Misi jangka menengah (Misi 2 : *Mewujudkan SDM Daerah Yang Bertaqwa, Berdayasaing Dan Masyarakat Yang Sejahtera*, serta Misi 5 : *Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM Dan Koperasi Yang Bersinergi Dengan Kebutuhan Industri Dan Pasar Domestik*), sedangkan Misi 4 jangka menengah (*Menciptakan Pemerintah Swasta Dan Masyarakat Yang Madani*) diwujudkan melalui Misi jangka menengah (Misi 1 : *Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, Dan Mengayomi*, dan Misi 2 : *Mewujudkan SDM Daerah Yang Bertaqwa, Berdayasaing Dan Masyarakat Yang Sejahtera*). Lebih lanjut uraian mengenai hal ini dapat disimak pada Gambar di bawah ini.

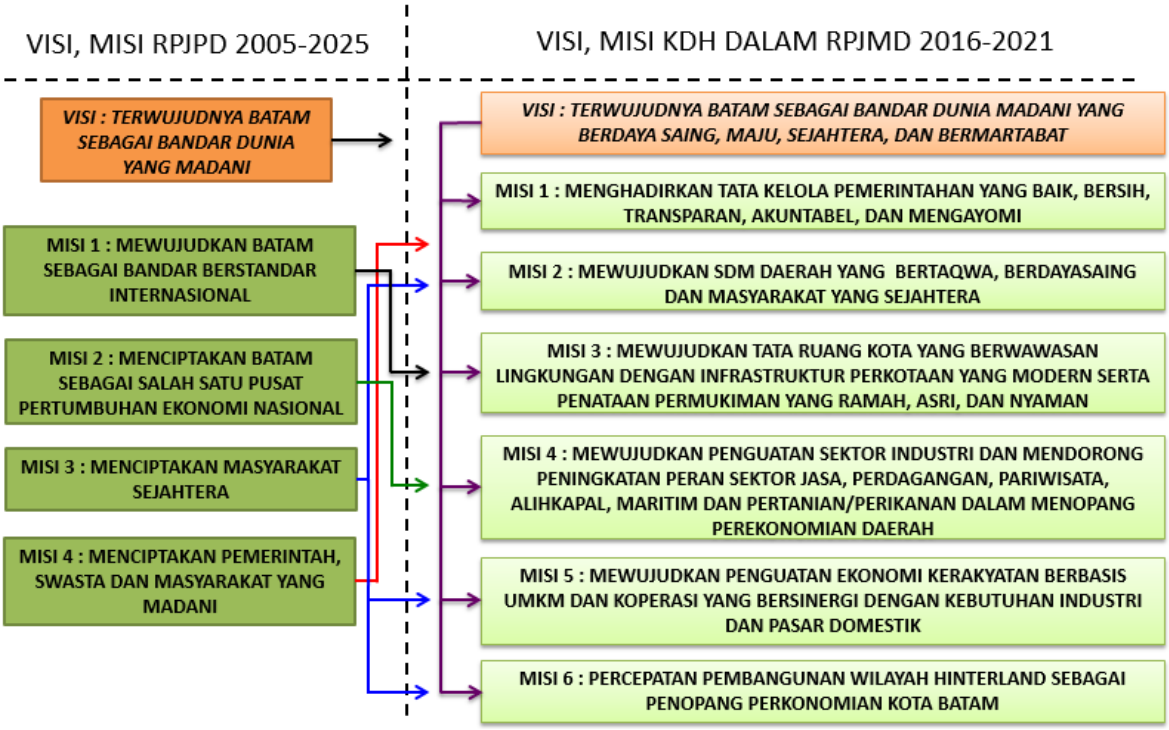

Gambar 5.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Misi 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN MENGAYOMI												
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan transparan	1.Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai dan Ranking dari K/L	Nilai Lakip C	CC	B	BB	BB	BB	A	Nilai Lakip A
					Opini BPK WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK WTP
					LPPD rank 3 seprovinsi	3	2	1	1	1	1	ranking 1 se provinsi
					LPPD rank 40 nasional	40 besar	30 besar	20 besar	10 besar	10 besar	10 besar	ranking 10 besar nasional
		2. Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.	Persentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir melalui dana pemerintah	persentase	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	35 %	35 %
			Persentase Perusahaan yang berperan dalam pembangunan masyarakat melalui dana CSR	Persentase dari PMA, PMDN, Perbankan dan lembaga lainnya	0 %	0 %	10 %	30 %	50 %	60 %	80 %	80 %
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan	Sistem Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik Secara Online	Persentase	Sistem pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan masih bersifat	Manual	Online (29%)	Online (52%)	Online (68%)	Online (84%)	Online (100%)	Online (100%)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		teknologi informasi			manual							
					Sistem Pelayanan public Masih bersifat Kantor							- Sistem pelayanan informasi terintegrasi 31 data
					Tingkat kepuasan masyarakat 66,75%	IKM 70%	IKM 75%	IKM 80%	IKM 85%	IKM 90%	IKM 90%	Tingkat kepuasan masyarakat 90%
3	Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Partisipasi Linmas dalam Ketertiban Umum	orang	120 orang	60	222	222	222	222	222	1170
Misi 2 : MEWUJUDKAN SDM DAERAH YANG BERTAQWA, BERDAYA SAING DAN MASYARAKAT SEJAHTERA												
1.	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	10,8 Tahun	10,9	11	11,2	11,4	11,6	12	12 tahun
			2. Persentase yang melanjutkan kependidikan menengah	Persentase (%)	APK 73,20%	APK 73,2%	APK 75,31%	APK 77,42%	APK 79,53%	APK 81,64%	APK 83,75%	APK 83,75%
					APM 62,95%	APM 62,95%	APM 65,93%	APM 68,92%	APM 71,9%	APM 74,89%	APM 77,88%	APM 77,88%
			3. Bantuan Beasiswa Mahasiswa jalur undangan pada 5 PTN teratas di Indonesia	orang	0 Mahasiswa S1	60	65	70	75	80	85	85 Mahasiswa S1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	1. Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	1. Angka Harapan Hidup	Tahun	72,80 tahun	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,9	72,90 tahun
			2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	per 1.000 KH	21	21	20	19	18	17	16	16
			3. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)	per 100.000 KH	163	160	157	155	152	148	148	148
			Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada bayi umur 0 – 11 bulan	%	93,5	91,5	92	92,5	93	93,5	94	94
			Puskesmas Rawat Inap	persentase	35,30	35,30	47	58,80	70,60	82,40	100	100
3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	angka	94,45	94,46	94,48	94,5	94,52	94,53	94,54	94,54
			IDG (Indeks Pendayagunaan Gender)	angka	54,31	54,7	55	56	57	59	61,05	61,05
		2. Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan	Bantuan yang diberikan	% Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan Jumlah PMKS	100% dari Data PPLS 2011 (36.103 RTS) dan 8197 PMKS	100% dari Data PPLS dan 8197 PMKS	100% dari Data BDT (39.903 RTS) dan 12.082 PMKS	100% dari Data BDTdan 12.082 PMKS	100% dari Data BDT dan 12.082 PMKS	100% dari Data BDT dan 12.082 PMKS	100% dari Data BDT dan 12.082 PMKS	100% dari Data BDT dan 12.082 PMKS
			Jumlah Lembaga/ Pemberdayaan	lembaga	4	2	2	2	2	2	2	16

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Masyarakat berprestasi level provinsi dan nasional									
		3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan penduduk (LPP)	persentase	4.13	3.99	3.78	3.63	3.48	3.34	3.13	3.13
			Kelengkapan Administrasi Kependudukan	KTP	85	87	98	100	100	100	100	100%
				Akte Kelahiran	75	77	80	82.5	85	96	100	100%
				Persentasepemilik KK	84,17	89	98	100	100	100	100	100 %
		4. Meningkatnya Kesadaran/ Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wawasan kebangsaan	persentase	30	35	40	45	50	55	60	60
			Jumlah Konflik Sosial di Masyarakat	Jumlahkasus	0 Kasus		0	0	0	0	0	0 Kasus
		5. Meningkatnya peran olahraga dan kepemudaan dalam pembangunan kualitas kehidupan	Sarana Prasarana pendukung prestasi Kepemudaan dan Olahraga : GOR Mini, Stadion, Tribun, Lapangan	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga	1 GOR Mini	-	-	1 GOR Mini	-	-		2 GOR Mini
					1 Stadion	-	-	-	1 Stadion			2 Stadion
					0		1 tribun					1 tribun

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		masyarakat	Olahraga di Lingkungan masyarakat		0		5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	5 lap	25 lap
4	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran	Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah	Tingkat pengangguran terbuka	persentase	6,64	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6	6
			Serapan Dana IMTA untuk pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja	Persentase	30	50	100	100	100	100	100	100
Misi 3 : MEWUJUDKAN TATA RUANG KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, INFRASTRUKTUR KOTA YANG MODERN, SERTA PENATAAN PEMUKIMAN YANG RAMAH, ASRI DAN NYAMAN SESUAI NILAI BUDAYA BANGSA												
1	Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	1. Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Tersedianya Dokumen RTRW Kota Batam dan Tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang Kota Batam	dokumen	Ranperda RTRW Kota Batam	-	RTRW	RTRW RDTR	RTRW RDTR	RTRW RDTR	RTRW RDTR	Perda RTRW Kota Batam
					Rencana Rinci Tata Ruang Belum Ada	-	-	RDTR	Zonasi	Zonasi Zoning Kawasan Berkembang Cepat	Zonasi	Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR, Zonasi) Zoning Kawasan berkembang Cepat
		2. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Sistem pengendalian		GIS RTRW Kota Batam 2004 - 2014 berbasis Web	Persiapan GIS RTRW baru	GIS RTRW Berbasis Web	GIS RTRW Berbasis Web, Android, IOS	Sinkronisasi dengan Sistem Online lainnya	Peningkatan Sistem	Peningkatan Sistem	Peningkatan Pengembangan GIS RTRW Kota Batam 2016 - 2036 Berbasis Web

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	Luasan Ruang Terbuka hijau	Persentase	23%	23,5	23,8	24	24,5	24,7	25	25%
			Terkelolanya kawasan konservasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penopang usaha perikanan dan jasa kelautan secara berkelanjutan	Ha	66000 Ha	66000	66000	66000	66000	66000		66000 Ha
			KUalitas air Kualitas Udara	Persentase	90%	90,5	91	91,5	92	92,5	93	Kualitas Air 93%
					92 %	92,5	93	93,5	94	94,5	95	Kualitas Udara 95 %
		2. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana	Hydrant	unit	55	-	10	10	10	10	10	105
			Tingkat waktu tanggap (Respone Time Rate)< 15 menit Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	persen	60	60	70	70	75	75	75	75
			Tim Reaksi Cepat (TRC)	orang	10	10	15	30	45	60	75	75
3	Menyediakan infrastruktur kota yang berkualitas	1. Tersedianya sistem transportasi	Meningkatnya Jumlah pengguna transportasi	Jumlah Penumpang Trans Batam	0,97 jt penumpang	1,095 jt	1,476 jt	1,857 jt	2,238 jt	2,619 jt	3 jt	3 jt penumpang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	untuk mengatasi masalah perkotaan	perkotaan yang terpadu dan nyaman	umum	per tahun								
				Panjang Lintasan Trans Batam	94 KM (5 koridor)	94 km (5 koridor)	163 km (7 koridor)	233 km (9 koridor)	233 km (9 koridor)	233 km (9 koridor)	233 (9 koridor)	233 KM (9 koridor)
			Meningkatnya Sarana Prasarana Keselamatan dan kelancaran Transportasi	persentase	33%	35	45	55	65	65	65	65%
			Pembuatan jalur sepeda	km	0	0	2	3,5	5,5	9	9	km
		2. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	persentase	68%	70	72	74	76	78	81	81%
			Persentase jalan utama dengan PJU	persentase	85%	87	88	90	92	94	96	96%
		3. Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir.	Jumlah titik genangan air/ banjir	Titik genangan air/ banjir	30 Titik genangan air/ Banjir (Baseline)	27	24	21	18	15	11	11 Titik genangan air/ Banjir
		4. Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	Pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan	Persentase	65,00%	65	80	100	100	100	100	100
			pengurangan timbulan sampah disumber	Persentase	2%	3	4	6	8	10	14	14%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Menyediakan hunian/ permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi	1. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi masyarakat	Jumlah twin block Rusunawa dan Rusunami	twin block	25 TB Rusunawa	25	30	35	40	45	55	55 TB Rusunawa
			Mesjid Agung	gedung	0	-	-	-	-	1	1	1 Mesjid Agung
			BLK	gedung	0				1		1	1
5	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	1. Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan informasi lahan dan pengadaan lahan Pemerintah Kota Batam untuk pembangunan kantor camat dan lurah pemekaran dan fasilitas pemerintah lainnya seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan Pemakaman serta kawasan fasum dan jaringan jalan di daerah perumahan	Sertifikat Lahan Pemko Batam	Pemko memiliki 630 Persil Lahan yang sudah sertipikat 197 Persil berbentuk PL 188 Persil 245 Persil belum memiliki dokumen	197	50	75	100	100	108	188 Persil bentuk PL menjadi sertipikat 245 Persil yang belum memiliki dokumen menjadi sertipikat
				Pengadaan Persil Lahan				119	90	78	77	44 Persil Kec/ Kel, 13 Persil Puskesmas, 15 SD, 10 SMP, 10 SMA/ SMK, 3 lapangan bola, 1 centra industri, 1 GOR, 240 TPS, 2 TPU, 3 Damkar, 1 BLK, 100 rusunawa (twin block), 1

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												kantor Disnaker
				Jumlah fasos, fasum dan jaringan jalan di daerah perumahan	Fasos dan Fasum sudah dalam bentuk PL an. Pemko Batam 27 Persil, dan yang baru memiliki akta hibah 5 persil			27	5			27 persil fasos fasum yang memiliki dokumen PL menjadi sertifikat, dan 5 persil fasos fasum yang memiliki dokumen hibah menjadi sertifikat
			Sertifikasi tanah masyarakat (Porda)	Sertifikat tanah masyarakat	0 persil		100	100	100	100	100	500 Persil
		2. Terwujudnya penyelesaian Kampung tua Kota Batam	Jumlah penyelesaian Kampung Tua Kota Batam	Jumlah PL KampungTua	7 PL KampungTua	7	8	9	10	0	0	34 PL Kampung Tua
Misi 4 : MEWUJUDKAN PENGUATAN SEKTOR INDUSTRI DAN PENINGKATAN PERAN SEKTOR JASA, PERDAGANGAN, PARIWISATA, ALIH KAPAL, MARITIM DAN PERTANIAN/ PERIKANAN DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN DAERAH												
1	Mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan, serta peningkatan sektor perikanan	Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan,maritim, perikanan dan pertanian	Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial	persentase	84	85	86	88	90	92	94	94
			Kunjungan Wisman	orang	1.545.818	1.612.000	1.708.720	1.811.243	1.919.917	2.035.112	2.157.219	2.157.219
			Lama kunjungan wisatawan (length	hari	1,9	1,93	1,97	2,01	2,05	2,09	2,13	2,13

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	dan pertanian	yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	of stay)									
			kontribusi sektor pertanian/ perikanan dalam PDRB Kota Batam	persen	1,04%	1,04	1,05	1,06	1,09	1,13	1,14	1,14%
			Persentase pertumbuhan investasi Kota Batam	Persen	15,89% (154.773 Juta Rupiah)	19	20	21,5	22	22,2	22,5	22,5% (412.118 Juta Rupiah)
Misi 5 : MEWUJUDKAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS UMKM DAN KOPERASI YANG BERSINERGI DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN PASAR DOMESTIK												
1.	1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tangguh & mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta sektor informal lainnya	1. Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan	Jumlah Pelaku ekonomi yang mendapatkan HKI dan Standarisasi internasional dalam produksi	Jumlah pelaku ekonomi	126 Unit Usaha (115 Merek Dagang, 11 Hak Cipta)	20	40	20	20	20	20	256 Unit Usaha
			Jumlah Wirausaha Pemula	Jumlah Pelaku Usaha	1011 pelaku usaha	100	100	250	300	300	350	2411
			Jumlah koperasi cukup berkualitas dan berkualitas	Jumlah Koperasi	103 koperasi	10	20	20	25	20	30	228
		2. Terpenuhinya Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Ketahanan pangan dan kelancaran distribusi pangan	persentase	30%	30	32	34	36	38	40	40%
		3. Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan tertentu	Jumlah gedung/ kantor/ komersial yang menyediakan ruang untuk	lokasi	3 lokasi	0	1	2	3	4	4	4 lokasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			pedagang informal (tidak permanen), Penyiapan kawasan PKL dan Pasar Induk									
Misi 6 : PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH HINTERLAND SEBAGAI PENOPANG PEREKONOMIAN KOTA BATAM												
	1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses komunikasi di hinterland	1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Hinterland	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland	KM	4,2 KM	1	2	2	2	2	2	15,2 KM
			Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland	M	903 M	250	250	250	250	250	250	2.403 M
			Jumlah titik PJU yang terpasang di wilayah hinterland	titik	379 titik	18	30	30	30	30	30	547 titik
		2.Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara di hinterland	Tingkat Cakupan pelayanan air minum di kawasan non ATB/ Swasta	persentase	27,5%	29	31	33	35	37	39	39%
		3. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland	Panjang jalan lingkungan, Panjang Drainase/ saluran lingkungan, Panjang Turap/ Talud/ Bronjong	meter	3.970	3.970	4.795	6.795	8.795	10.795	12.795	47.945 m

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Kinerja Sasaran						Target Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4. Meningkatnya konektivitas transpotasi di hinterland	Jumlah Dermaga/ Pelantar/ Jetti	Unit	25 Unit	4 (aweng, sunti, punggur)	3	3	3	3	3	41 Unit
			Jumlah Sarana Transportasi Laut	Kapal	4	4	4	3	3			18

5.4 Keselarasan Visi, Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan Visi, Misi RPJMN Tahun 2015-2019

Visi Pembangunan Nasional Republik Indonesia pada periode tahun 2005-2025 adalah: "*Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur*". Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, proses pencapaian visi dan misi nasional dilakukan melalui pentahapan lima tahunan. Dalam proses tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ini adalah merupakan tahapan ketiga dengan Visi"*Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*". Dokumen ini telah ditetapkan pemerintah dengan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015.

Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan Nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan. Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan, warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Gambar 5.2 Keterkaitan Visi RPJPN, RPJMN dan RPJMD

Visi Pembangunan Kota Batam lima tahun mendatang (2016-2021) yaitu "*Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera Dan Bermartabat*", selaras dengan Visi RPJMN 2015-2019 yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dalam hal menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berlandaskan pada pemberdayaan sumber daya manusia.

Lebih lanjut, uraian keterkaitan antara Misi RPJPN Tahun 2005-2025, Misi RPJMN 2015-2019 dan Misi RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dijabarkan dalam skema di bawah ini.

Delapan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025)

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan Bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

Tujuh Misi Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019)

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuh Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Batam (2015-2019)

1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, Dan Mengayomi
2. Mewujudkan Sdm Daerah Yang Bertaqwa, Berdayasaing Dan Masyarakat Yang Sejahtera
3. Mewujudkan Tata Ruang Kota Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Infrastruktur Perkotaan Yang Modern Serta Penataan Permukiman Yang Ramah, Asri, Dan Nyaman
4. Mewujudkan Penguatan Sektor Industri Dan Mendorong Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alihkapal, Maritim Dan Pertanian/Perikanan Dalam Menopang Perekonomian Daerah
5. Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Umkm Dan Koperasi Yang Bersinergi Dengan Kebutuhan Industri Dan Pasar Domestik
6. Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland Sebagai Penopang Perkonomian Kota Batam

Gambar 5.3 Keterkaitan Misi RPJPN, RPJMN dan RPJMD

Selanjutanya matrik hubungan antara RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 dengan Misi, serta Agenda Prioritas RPJMN 2014-2019 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.2 Hubungan Antara Misi RPJMD Kota Batam 2016-2021 dengan Misi dan Agenda Prioritas RPJMN 2015-2019

Misi RPJMD	Misi RPJMN	Agenda Prioritas RPJMN (*Nawacita*)
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi	1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
2. Mewujudkan SDM Daerah yang Bertaqwa, Berdayasaing dan Masyarakat yang Sejahtera	4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 8. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.	1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa
3. Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan dengan Infra-Struktur Perkotaan yang Modern serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri, dan Nyaman	4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
4. Mewujudkan Penguatan Sektor Industri Dan Mendorong Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alihkapal, Maritim Dan Pertanian/ Perikanan Dalam Menopang Perekono-mian Daerah	5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
5. Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Umkm dan	5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

Misi RPJMD	Misi RPJMN	Agenda Prioritas RPJMN (*Nawacita*)
Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri Dan Pasar Domestik		bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
6. Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland Sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam	6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mengetahui permasalahan pembangunan Kota Batam, terlebih dahulu akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT berdasarkan lingkungan strategis yang dimiliki

Bab ini berisi uraian tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Batam tahun 2016-2021. Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini selaras dengan misi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah di jelaskan dalam bab sebelumnya. Untuk mengetahui permasalahan pembangunan Kota Batam, terlebih dahulu akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini berfokus pada kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan atau ancaman (*threat*) secara bersama-sama.

Pada intinya, analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di Kota Batam. Faktor lingkungan internal adalah semua faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (*manageable, controllable*) di Kota Batam, yang termasuk di dalam lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang dalam waktu singkat tidak dapat

dikelola dan dikendalikan (*uncontrollable*), yang meliputi peluang dan ancaman.

6.1 Lingkungan Strategis

Terdapat dua lingkungan strategis yang ada di Kota Batam, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Lebih lanjut, berikut ini dijabarkan faktor penting yang berpengaruh, yakni yang berkaitan dengan faktor kekuatan dan yang berkaitan dengan faktor kelemahan.

6.1.1 Lingkungan Internal

Pertama Faktor Kekuatan, Kota Batam memiliki potensi yang berfungsi sebagai kekuatan, yakni:

1. Posisi Geografis yang Strategis

Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis, yaitu terletak di jalur pelayaran dunia internasional. Keberadaan Negara Singapura dan Malaysia yang sangat dekat di sebelah utara Batam memiliki kontribusi bagi perkembangan Kota Batam, khususnya dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Saat ini Kota Batam menjadi salah satu pintu gerbang (*distribution point*) wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, khususnya ke Kota Batam dan ke daerah sekitar Kepulauan Riau.

2. Kota Batam Sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dimana sebagian besar wilayah Kota Batam telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk,

pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai. Penetapan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berimplikasi terhadap kemudahan pelayanan kegiatan investasi baik untuk investor dalam dan luar negeri. Kondisi tersebut dipandang dapat menggerakan roda perekonomian Kota Batam menuju Kota dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi sehingga diharapkan tingkat kesejahteraan warga kota dapat meningkat.

3. Memiliki Dua Institusi Dalam Melaksanakan Pembangunan

Kota Batam memiliki Karakteristik sistem pemerintahan yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Keberadaan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Pemerintah Daerah Kota Batam dipandang sebagai kekuatan dalam menciptakan kemajuan Kota Batam. Menurut PP No. 5/2011 BP Batam berfungsi mengelola, mengembangkan dan membangun kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Menurut PP No. 6/2007 bidang pengelolaan meliputi bidang ekonomi, perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang lainnya.Sedangkan Pemerintah Daerah Kota Batam menurut UU No. 23/2014 berfungsi menjalankan urusan wajib dan urusan pilihan di wilayahnya. Mengacu pada karakteristik yang telah disebutkan, sinergitas antara BP Batam dengan Pemerintah Daerah Kota Batam dipandang dapat memajukan Kota Batam menjadi Kota yang maju dan mampu berkontribusi positif untuk pembangunan nasional.

Kedua Faktor Kelemahan, disamping memiliki kekuatan, Kota Batam juga memiliki kelemahan-kelemahan, yakni:

1. Pembangunan yang masih belum merata

Pembangunan yang dilaksanakan di Kota Batam sebagian besar masih dilaksanakan di kawasan *mainland*, sedangkan kawasan *hinterland* masih mengalami ketertinggalan. Akibatnya penduduk Kota Batam di kawasan *hinterland* belum terlayani dengan baik.

2. Kurangnya tenaga kerja terampil

Tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kota Batam terbatas jumlahnya. Selain karena sekolah kejuruan yang ada di Kota Batam belum sesuai dengan kebutuhan industri seperti industri perkapalan, juga karena rendahnya minat siswa Kota Batam untuk melanjutkan pendidikan hingga ke Perguruan Tinggi. Dari sisi pelayanan Pemerintah Kota Batam, hal ini berdampak pada kualitas pelayanan Pemerintah Kota Batam kepada warganya.

3. Dualisme kewenangan

Pembagian kewenangan pelayanan belum jelas antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada warga Kota Batam dan pelayanan dalam meningkatkan daya saing Kota Batam belum optimal. Oleh karena itu perlu dikaji ulang dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Batam agar dapat memberikan jaminan kepastian Hukum dan peningkatan daya saing Kota Batam sebagai tujuan investasi.

4. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik

Keterbatasan sarana dan prasarana sangat dirasakan oleh warga Kota Batam. Hal ini salah satunya diakibatkan terbatasnya kewenangan Pemerintah Kota Batam dalam melakukan pembangunan fisik. Keterbatasan sarana dan prasarana ini berdampak pada terbatasnya kualitas pelayanan

publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum.

5. Kurangnya penguasaan dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik

Rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi informasi berakibat pada lemahnya manajemen data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu hal ini berdampak juga pada pembangunan yang tidak tepat sasaran sehingga masyarakat belum merasakan hasil dari pembangunan di Kota Batam.

6.1.2 Lingkungan Eksternal

Adapun peluang dari lingkungan eksternal yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kota Batam, yaitu:

1. Komitmen Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Pusat untuk Mewujudkan Kota Hijau (Green City) dan Kota Cerdas (Smart city)

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan strategis, maka Pemerintah Pusat mencanangkan untuk membangun *Science Park* dan *Techno Park* untuk mewujudkan Kota Batam sebagai Kota Cerdas . Hal ini memberikan peluang bagi Pemerintah Kota Batam untuk melakukan penguasaan dan penerapan teknologi dalam mengelola sumber daya alamnya secara lebih baik dan berkelanjutan. Adapun dalam mewujudkan Pemerintah Kota Batam sebagai Kota Hijau pemerintah membuat beberapa program diantaranya adalah Green Planning and Design, Green Open Space, Green Community, Green Energy, Green Waste, Green Water, Green Transportation dan green building.

2. Komitmen Pemerintah Pusat untuk memajukan potensi kemaritiman Indonesia

Salah satu strategi pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah pemanfaatan potensi kemaritiman Indonesia untuk kemajuan bangsa. Komitmen ini terwujudkan melalui pembentukan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya. Kota Batam yang merupakan kawasan kepulauan dan merupakan salah satu poros maritim Indonesia diharapkan dapat memperoleh manfaat dari hal ini.

3. Tingginya kunjungan wisatawan tiap tahun

Batam merupakan salah satu kota tujuan wisata tertinggi di Indonesia. Hal ini memberi peluang bagi Batam untuk meningkatkan PDRB melalui sektor pariwisata dan perdagangan.

Adapun faktor ancaman dari lingkungan eksternal Kota Batam adalah:

1. Laju inflasi Nasional

Kondisi ekonomi nasional sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ekonomi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal ini laju inflasi nasional memiliki dampak langsung kepada pelaku ekonomi Kota Batam. Apabila laju inflasi terus meningkat dan tidak stabil maka akan memicu kenaikan harga sehingga berdampak negatif terhadap daya beli penduduk dan dunia usaha Kota Batam.

2. Terorisme Global

Posisi Batam yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga menyebabkan Batam rawan menjadi pintu masuknya terorisme global ke

Indonesia. Berkembangnya terorisme berdampak negatif terhadap keberlangsungan sektor ekonomi nasional khususnya Kota Batam.

Analisis SWOT strategi Kota Batam selanjutnya dipetakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6.1 Analisis SWOT Kota Batam

Internal	Eksternal
(+) Kekuatan 1. Posisi Geografis yang Strategis 2. Batam Sebagai Kawasan Strategis Nasional 3. Memiliki Dua Institusi Dalam Melaksanakan Pembangunan 4. Potensi wisata bahari	(+) Peluang 1. Pembangunan *Science Park* dan *Techno Park* 2. Komitmen Pemerintah Pusat untuk memajukan potensi kemaritiman Indonesia 3. Tingginya kunjungan wisatawan tiap tahun
(-) Kelemahan 1. Hasil pembangunan belum merata 2. Kurangnya tenaga kerja terampil 3. Dualisme kewenangan 4. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik 5. Kurangnya penguasaan dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	(-) Ancaman 1. Laju Inflasi nasional 2. Terorisme Global

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, selanjutnya dirumuskan strategi umum pembangunan Kota Batam sebagai berikut:

1. Strategi S-O
   a) Bersinergi dengan BP Batam dalam pemanfaatan potensi kemaritiman dan pariwisata Kota Batam, serta pembangunan Kota Batam berbasiskan teknologi informasi
   b) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan dalam pemanfaatan potensi kemaritiman dan wisata bahari
2. Strategi S-T
   a) Bersinergi dengan BP Batam untuk meningkatkan pengamanan kawasan perbatasan
   b) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha besar dan UMKM dalam diversifikasi pasar berorientasi ekspor
3. Strategi W-O dan W-T
   a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM
   b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
   c) Meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik
   d) Sinkronisasi kebijakan pembangunan bersama BP Batam

Berdasarkan analisa SWOT pada tabel di atas, selanjutnya disusun strategi pembangunan Kota Batam. Sedangkan untuk perumusan arah kebijakan merujuk pada hasil analisa arah kebijakan pembangunan periode lalu, hasil analisa rancangan teknokratik dan hasil analisa Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (PD). Dalam hal ini, penetapan strategi dan arah kebijakan telah disesuaikan dengan visi dan misi daerah. Adapun strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam 2016-2021 tersusun dalam Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Batam

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel, Dan Mengayomi									
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan transparan	1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah	1	Meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan aparatur yang profesional terutama dalam hal pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	1	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi.	Penunjang Urusan Pemerintahan
							2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengawasan dan pengendalian dilingkungan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan
							3	Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan	Penunjang Urusan Pemerintahan
		2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.	Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir.	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan antara lain dengan melibatkan dana CSR	1	Melakukan dan Meningkatkan koordinasi pembangunan di tingkat pusat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan dan koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder	Penunjang Urusan Pemerintahan

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
								lainnya melalui proses musrenbang dan rapat forum koordinasi lainnya	
							2	Pengembangan pola pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time	Urusan Komunikasi Dan Informatika
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	1	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Sistem Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik Secara Online	1	Menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	1	Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas	Penunjang Urusan Pemerintahan
					2	Pengembangan Sistem Informasi dalam Mendukung pelayanan publik	1	Membangun dan menerapkan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi	Penunjang Urusan Pemerintahan, Urusan Kominfo
							2	Memangkas jalur birokrasi perijinan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Penunjang Urusan Pemerintahan
3	Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat	1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Partisipasi Linmas dalam Ketertiban Umum	1	Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban	1	Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan	Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
								ketentraman kota	
Misi 2 : Mewujudkan Sdm Daerah Yang Bertaqwa, Berdaya Saing Dan Masyarakat Yang Sejahtera									
1	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa	1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) Persentase yang melanjutkan ke pendidikan menengah Bantuan Beasiswa Mahasiswa jalur undangan pada 5 PTN teratas di jawa dan Peningkatan SDM ASN untuk S2 dan S3	1	Menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang terjangkau dengan menekankan pentingnya untuk melanjutkan ke pendidikan menengah serta Peningkatan Bantuan Pendidikan Kepada Masyarakat	1	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan anak usia dini	Urusan Pendidikan
							2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah	Urusan Pendidikan
							3	Memberikan Bantuan Pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumber daya masyarakat	Urusan Pendidikan
					2	Meningkatnya budaya baca masyarakat di Kota Batam	1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan keperpustakaan dan arsip kepada masyarakat	Urusan Perpustakaan
2	Meningkatkan kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan	1. Angka Harapan Hidup	1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan	1	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan	Urusan Kesehatan

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
	secara berkelanjutan		kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (KH) 3. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)		kesehatan		Sumber Daya Kesehatan melalui pembangunan puskesmas, pustu, puskesmas rawat inap dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di kawasan tertentu serta peningkatan kualitas pelayanan RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional	
							2	Menerapkan Sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) bagi warga miskin	Urusan Kesehatan
							3	Penguatan Pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gangguan gizi masyarakat	Urusan Kesehatan
3	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1	Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dan peningkatan	1	Meningkatkan upaya pemberdayaan, pengetahuan dan keterampilan serta kemandirian perempuan	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
						pengarusutama n gender (PUG) dalam pembangunan			
					2	Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari KDRT serta perdagangan perempuan dan anak	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		2	Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan	Bantuan yang diberikan	1	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1	Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata	Urusan Sosial
				Jumlah Lembaga/ Pemberdaya an Masyarakat berprestasi level provinsi dan nasional	2	Meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.	1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaa n masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		3	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Persentase Laju Pertumbuha n penduduk (LPP)	1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan layanan kependudukan	1	Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB)	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Meningkatny a pelayanan kependuduk an dan catatan sipil			2	Meningkatkan pelayanan dan persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		4	Meningkatnya Kesadaran/	Persentase partisipasi	1	Menyelenggara kan pembinaan	1	Meningkatkan Pendidikan	Penunjang Urusan

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
			Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.	masyarakat dalam pemilu Jumlah Konflik Sosial di Masyarakat		Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.		Politik, kewaspadaan dini, dan wawasan kebangsaan masyarakat serta nilai-nilai keagamaan	Pemerintahan
		5	Meningkatnya peran olahraga dan kepemudaan dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat	Sarana Prasarana pendukung prestasi Kepemudaan dan Olahraga : Stadion, GOR Mini, Tribun lapangan dan Lapangan Olahraga di Lingkungan masyarakat	1	Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga	1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga yang disertai dengan pembinaannya.	Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga
4	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran	6	Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah	Tingkat pengangguran terbuka Jumlah Tenaga Kerja bersertifikasi	1	Melakukan penguatan lembaga latihan kerja dan pemberian/ pelaksanaan sertifikasi agar memenuhi standar akreditasi	1	Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Ketenagakerjaan, dan kompetensi SDM tenaga kerja dan SDM tenaga kerja	Urusan Tenaga Kerja
Misi 3 : Mewujudkan Tata Ruang Kota Yang Berwawasan Lingkungan Dengan Infrastruktur Perkotaan Yang Modern Serta Penataan Permukiman Yang Ramah, Asri, Dan Nyaman									
1	Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan	1	Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Tersedianya Dokumen RTRW Kota Batam dan Tersedianya Rencana Rinci Tata	1	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan	1	Mempercepat proses penetapan ranperda RTRW Kota Batam dan Penyusunan	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
				Ruang Kota Batam		ruang wilayah Kota Batam dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan		Rencana Rinci Tata Ruang kota Batam serta Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan keterlibatan stakeholder, instansi terkait dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	
		2	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Sistem pengendalian Tata Ruang	1	Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	1	Menerapkan pendekatan zoning regulation pada kawasan-kawasan cepat berkembang	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							2	Mewujudkan integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
					2	Pengembangan sistem informasi spasial	1	Meningkatkan penerapan sistem informasi spasial	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	Mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan	1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	Luasan Ruang Terbuka Hijau	1	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau antara lain melalui menjalin kerjasama dan kemitraan dengan sektor privat dalam penyediaan RTH	1	Meningkatkan luasan RTH publik dan privat melalui penggalangan peran pemerintah, swasta dan penerapan regulasi untuk penambahan ruang terbuka hijau serta peningkatan konservasi flora	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Terkelolanya kawasan konservasi sumberdaya pesisir dan pulau pulau kecil sebagai penopang usaha perikanan dan jasa kelautan secara berkelanjutan	2	Meningkatkan kualitas ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Batam	1	Meningkatkan perlindungan, Pemanfaatan dan penataan lingkungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Batam	Urusan Lingkungan Hidup
				Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan (air dan udara)	3	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	1	Melaksanakan peraturan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung terjaganya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup agar tidak	Urusan Lingkungan Hidup

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
								melampaui daya dukung dan daya tampung Kota Batam	
		2	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana	Tingkat waktu tanggap (Respone Time Rate)< 15 menit Daerah Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		Meningkatkan pelayanan dalam penanganan kebakaran	1	Peningkatan penanganan dan pencegahan kebakaran	Penunjang Urusan Pemerintahan
				Tim Reaksi Cepat (TRC)		Mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan bencana dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kebencanaan		Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana	Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
3	Menyediakan infrastruktur kota yang berkualitas untuk mengatasi masalah perkotaan	1	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman	Meningkatnya Jumlah pengguna transportasi umum	1	Melakukan penataan angkutan umum dan penguatan lembaga pengelola transportasi massal	1	Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi massal serta restrukturisasi trayek angkutan umum	Urusan Perhubungan
				Meningkatnya Sarana Prasarana Keselamatan dan	2	Pembangunan sarana prasarana sistem transportasi	1	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Urusan Perhubungan

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
				kelancaran Transportasi				pendukung transportasi darat dan laut	
								Pembuatan Jalur Sepeda	
		2	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik		Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas	1	Melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan/ pelantar melalui pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							2	memperlebar lahan badan jalan Menunjang Percepatan Pembangunan Flyover dan pengembangan ruas jalan tol	
				Persentase jalan utama dengan PJU			3	Membangun PJU di ruas jalan umum dan meningkatkan sarana prasarana kebinamargaan	

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
		3	Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir.	Jumlah titik genangan air/ banjir	1	Pengembangan sistem tata air yang terpadu dan berkualitas	1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur drainase yang optimal dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							2	Melakukan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan kanal banjir dan normalisasi sungai	
		4	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	Cakupan pelayanan persampahan	1	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas	1	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan nilai keekonomian sampah melalui Sistem 3R dan kepatuhan tentang kawasan bebas sampah serta Pendampingan pembentukan Bank Sampah di tingkat kelurahan, pengembangan jejaring kerja Bank Sampah	Urusan Lingkungan Hidup
							2	Mendorong percepatan pengelolaan sampah di TPA	

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
								dengan sistem WTE (Waste to Energy) melalui pola KPBU	
							3	Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah	
				Persentase pengurangan timbunan sampah disumber	2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai	
4	Menyediakan hunian/ permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik dengan	1	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas	Jum lah sarana prasarana skala kota yang representati ve seperti Rusunawa	1	Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa dan rusunami	1	Mendorong Pelaksanaan Pembangunan rumah susun sewa, rusunami pada lokasi-lokasi strategis dan	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
	konsep Maju, Hijau dan Manusiawi		bagi masyarakat	dan Rusunami, Mesjid Agung, BLK dan peningkatan RTLH		dengan pemerintah pusat dan stakeholders, peningkatan kualitas operasional dan kualitas Prasarana Sarana Utilitas (PSU) serta Meningkatkan kualitas infrastruktur prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman		lahan milik stakeholder atau konsolidasi lahan dan bangunan, meningkatkan kualitas operasional, pembangunan dan peningkatan PSU serta Percepatan penataan dan perbaikan kawasan kumuh skala kota.	
							2	Peningkatan Penataan infrastruktur prasarana dan sarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman	
							3	Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat	
5	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	1	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan	Persentase ketersediaan informasi lahan dan pengadaan lahan	1	Memperkuat basis data lahan aset Pemko Batam yang akurat dan terkini dan	1	Melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi	Urusan Pertanahan

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
			administrasi atas tanah aset pemko Batam, kawasan fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan, tanah masyarakat, serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam serta penataan dan pengadaan kawasan pemakaman dalam meningkatkan pelayanan publik	Pemerintah Kota Batam untuk pembangunan kantor camat dan lurah pemekaran dan fasilitas pemerintah lainnya seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan Pemakaman serta kawasan fasum dan jaringan jalan di daerah perumahan		pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemerintah kota batam, dan dokumen tanah dalam meningkatkan pelayanan publik		eksisting lahan aset Pemko Batam ,pengadaan lahan dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah kota batam	
				Sertifikasi tanah masyarakat (Proda)					
		2	Terwujudnya penyelesaian Kampung Tua Kota Batam	Jumlah penyelesaian Kampung Tua Kota Batam	2	Mendorong percepatan penyelesaian kawasan kampung tua.	1	Mempercepat penyelesaian penetapan definitif kampung tua.	Urusan Pertanahan
Misi 4 : Mewujudkan Penguatan Sektor Industri Dan Mendorong Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alihkapal, Maritim Dan Pertanian/ Perikanan Dalam Menopang Perekonomian Daerah									
1	Mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan, serta peningkatan sektor	1	Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan,maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka	Meningkatnya jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial	1	Melakukan pembinaan hubungan industrial dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan	1	Menginventarisasi dan melakukan pembinaan sarana hubungan industrial dan syarat kerja serta penyelesaian hubungan industrial	Urusan Tenaga Kerja
				Kunjungan	2	Meningkatkan	1	Meningkatkan	Urusan

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
	perikanan dan pertanian		meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Wisman		pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan		kualitas dan kuantitas pariwisata dan objek kebudayaan	Kebudayaan Urusan Pariwisata
				kontribusi sektor pertanian/ perikanan dalam PDRB Kota Batam	3	Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat petani, peternak dan nelayan	1	Meningkatkan kualitas Home Industry dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dan perikanan	Urusan Pangan Urusan Kelautan Dan Perikanan Urusan Pertanian
				Persentase pertumbuhan investasi Kota Batam	4	Meningkatkan peran Pemko Batam dalam mempercepat pertumbuhan investasi	1	Mendorong percepatan pertumbuhan investasi	Urusan Penanaman Modal
Misi 5 : Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Umkm Dan Koperasi Yang Bersinergi Dengan Kebutuhan Industri Dan Pasar Domestik									
1	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tangguh & mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta sektor informal lainnya	1	Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan	Jumlah Pelaku ekonomi yang mendapatkan HKI dan Standarisasi internasional dalam produksi	1	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1	Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, TDI dan standarisasi internasional dalam produksi serta mendorong pembentukan BPR dalam rangka membantu pendanaan sektor umkm	Urusan Perindustrian Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
				Jumlah Wirausaha Pemula					
				Jumlah koperasi cukup berkualitas dan berkualitas					
				Meningkatnya Ketahanan pangan dan kelancaran distribusi pangan	2	Meningkatkan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga	1	Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan	Urusan Pangan Urusan Pertanian Urusan Perdagangan

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
								barang	
		2	Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan tertentu	Jumlah gedung/ kantor/ komersial yang menyediakan ruang untuk pedagang informal (tidak permanen), Penyiapan kawasan PKL dan Pasar Induk	1	Penyediaan Ruang Bagi Sektor Informal Pada Kawasan Tertentu	1	Penyediaan ekonomi informal pada kawasan yang telah ditentukan menurut ketentuan peraturan yang berlaku serta revitalisasi pasar	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Urusan Perdagangan
Misi 6 : Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland Sebagai Penopang Perkonomian Kota Batam									
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses komunikasi di hinterland	1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Hinterland	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun/ ditingkatkan Jumlah titik PJU	1	Melakukan pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland.	1	Pemerataan pembangunan hingga di hinterland	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara optimal	Tingkat cakupan pelayanan air minum di kawasan non ATB/ Swasta	1	Mengembangkan dan memelihara sumber air baku secara berkesinambungan	1	Meningkatkan cakupan layanan air bersih di luar konsesi ATB	
					2	Pengembangan pengelolaan air limbah domestic system setempat	1	Mendorong pengolahan air limbah domestic permukiman melalui pembangunan IPAL komunal	

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Urusan
1		2		3	4		5		6
								dan sosialisasi penggunaan septitanc standar lingkungan hidup, dan pembangunan / peningkatan IPAL system setempat	
		3	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland	Panjang Drainase/ saluran lingkungan Panjang jalan lingkungan Panjang Turap/ Talud/ Bronjong	1	Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan beserta pemukiman di hinterland	1	Peningkatan penataan lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
		4	Meningkatnya konektivitas transpotasi di hinterland	Jumlah Dermaga/ Pelantar/ Jetti Jumlah Sarana Transportasi Laut	1	Pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana dasar	1	Pemerataan pembangunan hingga di hinterland	Urusan Perhubungan

BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, disebutkan bahwa perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan perumusan program pembangunan jangka menangah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya (Bab VI).

Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Batam menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Konkuren(Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) yang dilaksanakan oleh PD di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Adapun penyusunan program pembangunan dalam bab ini merujuk pada (1) Program janji kepala daerah, (2) Program periode lalu, (3) Usulan PD, (4) Permendagri 13/2006, (5) Hasil analisa rancangan teknokratik, (6) Strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD), dan (7) Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Batam. Dalam hal ini, penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan telah disesuaikan dengan misi pembangunan daerah. Uraian lebih lanjut disajikan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Batam

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI 1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN MENGAYOMI										
1	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan aparatur yang profesional terutama dalam hal pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi.	1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	persentase	100	100	Non Urusan	Semua PD
				2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	persentase	100	100	Non Urusan	Semua PD
				3. Program pengelolaan, peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persen	37,6	100	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	PD Pengampu Penunjang Urusan Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
					persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat	Persen	30,56	100		
					Persentase peningkatan penegakan disiplin aparatur	Persen	41,6	100		
				4. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan & peraturan perundang-	Peringkat LPPD se-Provinsi	Peringkat dari Gubernur	3	1	Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif	PD Pengampu Fungsi Lainnya Penyusunan Kebijakan,
					Peringkat LPPD Nasional	Peringkat dari Kemendagri	40 besar	10 besar		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
						2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			undangan	Nilai Laporan Kinerja	Penilaian Kemenpan	C	A	Pelaksanaan Tugas PD dan Pelayanan Administrasi	Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD dan Pelayanan Administrasi
				Jumlah PD yang telah memiliki SOP	Persen	0	100%		
				Jumlah Produk Hukum dan MoU	Perda	0	35		
					Perwako	0	80		
					MoU	0	80		
				Persentase Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	Persen	100	100		
			5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	persen	65	80	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	PD Pengampu Fungsi Lainnya Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
			6. Program Keamanan Data dan Informasi	Meningkatnya informasi berklasifikasi persandian di Pemko Batam	persen	0	50	Persandian	PD Pengampu Urusan Persandian
		Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengawasan dan pengendalian dilingkungan Pemerintah Daerah	7. Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan	Persen	42	62	Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PD Pengampu Fungsi Lainnya Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
						2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan		Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	Persen	85	95		Daerah
			8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tupoksi PD	Persen	70	100	Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD dan Pelayanan Administrasi, Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	PD Pengampu Fungsi Lainnya Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD dan Pelayanan Administrasi, Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
			9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	Opini BPK	WTP	WTP	Keuangan	PD Pengampu Penunjang Urusan Keuangan
				Peningkatan PAD	Rp	891 M	1,7 T	Keuangan	PD Pengampu Penunjang Urusan Keuangan

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Pendapatan BLUD RSUD Kota Batam	persentase	85	100	kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan
					Peningkatan pelayanan BLUD Dana Bergulir Kota Batam	persentase	60	77	Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	PD Pengampu Urusan Kkoperasi, Usaha Kecil dan Menengah
				10. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kajian/Penelitian yang mendukung pembangunan	dokumen	16	35	Penelitian dan Pengembangan	PD Pengampu Penelitian dan Pengembangan
				11. Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah	Kelengkapan Data SIPD Kota Batam	Persentase	5	100	Statistik	PD Pengampu Urusan Statistik
					Jumlah dokumen pendataanpendukung perencanaan	dokumen	3	13		
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.	Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan antara lain dengan melibatkan dana csr	Melakukan dan Meningkatkan koordinasi pembangunan di tingkat pusat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan dan koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya melalui proses musrenbang dan rapat forum koordinasi lainnya	12. Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	persen	45	95	Perencanaan	PD Pengampu Penunjang Urusan Perencanaan
					Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	persen	40	90		
					Partisipasi perusahaan dalam pembangunan kota batam melalui dana CSR	Persen	0	80 %	Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD dan Pelayanan Administrasi	PD Pengampu Fungsi Lainnya Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD dan Pelayanan

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
										Administrasi
			Pengembangan pola pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time	13. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layananan informasi	Indeks	C (43.76-62.50)	A (81.25-100)	Komunikasi dan Informatika	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
					Jumlah aspirasi warga yang direspon dari berbagai saluran media	persentase	40	100		
3	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas	14. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	IKM PD	Indeks	67,75	90	Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD dan Pelayanan Administrasi	Semua PD
			Memangkas jalur birokrasi perijinan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		IKM Kecamatan	Indeks	67,17	90		
					IKM Kelurahan	Indeks	-	90		
		Pengembangan Sistem Informasi dalam Mendukung pelayanan publik	Membangun dan menerapkan system informasi pelayanan public yang terintegrasi	15. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan public berbasis online	persen	0	100	Komunikasi dan Informatika	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
4	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban	Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan	Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman kota	16. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	Jumlah Aksi Demo yang diamankan	demo	250	250	Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PD Pengampu Urusan Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan
					Jumlah Linmas yang diberdayakan	orang	1416	1416		

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ketertiban								masyarakat
MISI 2: MEWUJUDKAN SDM DAERAH YANG BERTAQWA, BERDAYASAING DAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA										
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik	Menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang terjangkau dengan menekankan pentingnya untuk melanjutkan ke pendidikan menengah serta Peningkatan Bantuan Pendidikan Kepada Masyarakat	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan anak usia dini	17. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	1. APK SD	persen	101,2	106,56	Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
					1.1. APK SD Laki-Laki		103,8	109,76	Pendidikan	
					1.2. APK SD Perempuan		98,5	103,35	Pendidikan	
					2. APM SD		91,9	95,25	Pendidikan	
					2.1. APM SD Laki-laki		94,3	97,5	Pendidikan	
					2.2. APM SD Perempuan		89,5	93	Pendidikan	
					3. APK SMP	persen	93,5	96,75	Pendidikan	
					3.1. APK SMP Laki-Laki		93	98,5	Pendidikan	
					3.2. APK SMP Perempuan		92,4	95	Pendidikan	
					4. APM SMP	persen	90	93,75	Pendidikan	
					4.1. APM SMP Laki-laki		90,2	94	Pendidikan	
					4.2. APM SMP Perempuan		89,8	93,5	Pendidikan	
					5. Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal A sekurang-kurangnya	persen	16,56%	29,81	Pendidikan	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
						2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				sebanyak 29,81%					
				6. Persentase SD/SDLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 67,91%	persen	37,73%	67,91	Pendidikan	
				7. Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal A sekurang-kurangnya sebanyak 53,95%	persen	30,83%	53,95	Pendidikan	
				8. Persentase SMP/SMPLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 51,32%	persen	29,32%	51,32	Pendidikan	
				9. Angka Putus Sekolah SD	persen	0,75	0	Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
				10. Angka Putus Sekolah SMP	persen	1,51	0,5	Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
				11. % tingkat kelulusan SD	%	100	100	Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
				12. % tingkat kelulusan SMP	%	100	100	Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
			18. Program Pendidikan	1. APK PAUD	persen	77,6	85,88	Pendidikan	PD Pengampu

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
						2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1.1. APK PAUD Laki-laki		30,14	34,28	Pendidikan	Urusan Pendidikan
				1.2. APK PAUD Perempuan		47,46	51,6	Pendidikan	
				2. APM PAUD	persen	74,35	82,33	Pendidikan	
				2.1. APM PAUD Laki-laki		28,17	32,16	Pendidikan	
				2.2. APM PAUD Perempuan		46,18	50,17	Pendidikan	
				Persentase TK Berakreditasi Minimal A	persen	16	75	Pendidikan	
				Persentase TK Berakreditasi Minimal B	persen	20	89	Pendidikan	
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah	19. Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan Pendidikan	1. Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional yaitu sekurang-kurangnya:	persentase			Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
				1.1. SD/SDLB		3,83%	3,83%	Pendidikan	
				1.2. SMP/MTs		8,08%	8,08%	Pendidikan	
				1.3. SMA/SMALB		17,29%	17,29%	Pendidikan	
				1.4. SMK		4,74%	4,74%	Pendidikan	
				2. Persentase GTK pendidikan menengah yang sesuai dengan maple/	persen	100	100	Pendidikan	

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
					bidang pelajaran					
			Memberikan Bantuan Pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumber daya masyarakat	20. Program Penyediaan Bantuan Pendidkan yang Efektif	masyarakat yang lulus masuk 5 besar PTN negeri yang dibiayai untuk pengentasan pendidikan S1	orang	60	85	Pendidikan	PD Pengampu Urusan Pendidikan
		Meningkatnya budaya baca masyarakat di Kota Batam	Meningkatkan akses dan kualitas layanan keperpustakaan dan arsip kepada masyarakat	21. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung dalam satu tahun	persen	5	9	Perpustakaan	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
				22. Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan	ASN Kearsipan yang dibina di setiap PD	PD	0	40	Kearsipan	PD Pengampu Urusan Kearsipan
2	Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan melalui pembangunan puskesmas, pustu, puskesmas rawat inap dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di kawasan tertentu serta peningkatan kualitas pelayanan RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional	23. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima (5) jenis tenaga kesehatan (tenaga Kesmas, Kesling, Gizi, Kefarmasian & analis kesehatan)	persentase	70	90	Kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan
					Jumlah dokumen anggaran, perencanaan dan data kesehatan yang dihasilkan	dokumen	12	14	Kesehatan	
				24. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Tersedianya Obat, BHP dan Alat Kesehatan Rujukan di RSUD Embung Fatimah	persentase	75%	88%	Kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
						2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kota Batam					
				Persentase Ketersediaan obat dan Alkes di pelayanan kesehatan dasar	persentase	85%	90%	Kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan
			25. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas tersertifikasi akreditasi	kecamatan	0	25	Kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan
				Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat	kecamatan	1	6	Kesehatan	
				Jumlah kebijakan PHBS yang dikeluarkan Pemerintah	paket	2	9	Kesehatan	
				Puskesmas yang melaporkan pelaksanaan kebijakan PHBS	Persentase	60	80	Kesehatan	
				(prevalensi) pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak Baduta	Persentase	10	8,5	Kesehatan	
				kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak Balita	persentase	1	0,75	Kesehatan	
			26. Peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	persentase	55%	90%	Kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan
		Menerapkan Sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) bagi warga	27. Program Jaminan Kesehatan Daerah	Persentase penduduk yang memiliki SJSN/ Peserta BPJS Kesehatan	persentase	60	85	Kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
						2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		miskin							
		Penguatan Pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gangguan gizi masyarakat	28. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan lingkungan	Prevalensi HIV pada penduduk	Persentase	≤ 0,1	≤ 0,1	Kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan
				Presentase HIV yang diobat	Persentase	49	64	Kesehatan	
				Angka keberhasilan pengobatan Tb (succes rate)	Persentase	52	62	Kesehatan	
				Angka kejadian kusta per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	1,16	0,8	Kesehatan	
				Insiden rate DBD per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	56	50	Kesehatan	
				Annual paracite insidence (API) per 100 penduduk	per 1.00 penduduk	< 1	< 1	Kesehatan	
				Angka kejadian filariasis	Persentase	< 1	< 1	Kesehatan	
				Persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persentase	91	93,5	Kesehatan	
				Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang terdeteksi dini kanker serviks dan payudara	Persen	0,75	30	Kesehatan	
				Prevalensi tekanan darah tinggi	Persen	20	15	Kesehatan	
				Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	Persen	30	10	Kesehatan	

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun	Persen	10	5	Kesehatan	
					Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM	Kelurahan	20	30	Kesehatan	
				29. Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)	per 100.000 KH	163	141	Kesehatan	PD Pengampu Urusan Kesehatan
					Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	per 1.000 KH	21	16	Kesehatan	
					Persentase (prevalensi) kekurangan gizi (under weight) pada anak Balita	Persentase	5	4,5	Kesehatan	
					Persentase (prevalensi) pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak Baduta	Persentase	10	8,5	Kesehatan	
					Persentase kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak Balita	Persentase	1	0,75	Kesehatan	
3	Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga	Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dan peningkatan pengarusutaman gender (PUG) dalam pembangunan	Meningkatkan upaya pemberdayaan, pengetahuan dan keterampilan serta kemandirian perempuan	30. Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persentase	94,45	94,54	Pemberdayaan Perempuan dan PA	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase	54,31	61,05	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari KDRT serta perdagangan perempuan dan anak	31. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan perlindungan	Persentase	100	100	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata	32. Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial terhadap PMKS terutama Fakir Miskin/ kemiskinan	% Rumah Tangga Sasaran (RTS)	36.103 jiwa / 12 Kecamata (100%)	39.903 jiwa /12 Kecamatan (100%)	Sosial	PD Pengampu Urusan Sosial
					Meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakat/ Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menanggulangi PMKS	Lembaga	294 PSKS Lembaga dan orang	294 PSKS Lembaga dan orang		
					Terlindungi dan terjaminnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan jiwa PMKS	100% dari Data PPLS 2011 (36.103 RTS)	100% dari Data BDT		
					Terehabilitasinya Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan baik	Jiwa PMKS	8197 jiwa PMKS	12.082 jiwa PMKS		
		Meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan	Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam	33. Program Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah organisasi	PKK 77, LPM 77, Posyandu 450, RT 3215, RW 772, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif	PKK 77, LPM 77, Posyandu 700, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 640 org	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		partisipasi masyaakat dalam membangun kelurahan.	membangun kelurahan.				128 org			
					Meningkatnya Swadaya Masyarakat	Persen	Swadaya 30%, Goro 2000 org	Swadaya 50%, Goro 2500 org		
					Meningkatnya Kapasitas Lembaga dan Ekonomi Kelurahan	Jumlah organisasi	UEM-SP 10, Posyantek 9, TTG 31	UEM-SP 49, Posyantek 9, TTG 35, Pelatihan 1.100 org		
5	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan layanan kependudukan	Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB)	34. Program Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)	Persentase	71,5	74	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatkan pelayanan dan persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil	35. Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil: KK, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian	Persentase KK	84,17	100	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
						Persentase KTP	85	100		
						Persentase Akte Kelahiran	75	100		
6	Meningkatnya Kesadaran/ Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.	Menyelenggarakan pembinaan Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.	Meningkatkan Pendidikan Politik, kewaspadaan dini, dan wawasan kebangsaan masyarakat serta nilai-nilai keagamaan	36. Program Pengembangan dan partisipasi budaya politik	Partisipasi masyarakat dalam pileg	persentase	32	35	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
					Partisipasi masyarakat dalam pilpres	persentase	58,6	65		
					Partisipasi masyarakat dalam pilgub	persentase	45	60		
					Partisipasi masyarakat dalam pilwako	persentase	53	60		

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
				37. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan	Pencegahan konflik social dan keagamaan	jumlah konflik	0	0	Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik
7	Meningkatnya peran olahraga dan kepemudaan dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat	Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga yang disertai dengan pembinaannya.	38. Program Peningkatan, Pembinaan Dan Pelayanan Kepemudaan, kepramukaan dan Olahraga	Prestasi/ Capaian kepemudaan	orang	0	200	Kepemudaan dan Olahraga	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
					Prestasi Olahraga	orang	95	795		
					Budaya Olahraga	keg	0	25		
					Prestasi Kepramukaan	orang	380	780		
					Sarana Prasarana terbangun	unit	4	8		
8	Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah	Melakukan penguatan lembaga latihan kerja dan pemberian/ pelaksanaan sertifikasi agar memenuhi standar akreditasi	Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Ketenagakerjaan, dan kompetensi SDM tenaga kerja dan Aparatur	39. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	orang	1.456	7450	Tenaga Kerja	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
					Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi	orang	1.440	7900	Tenaga Kerja	
					Jumlah tenaga kerja yang terserap/ ditempatkan	orang	11449	74500	Tenaga Kerja	
MISI 3: MEWUJUDKAN TATA RUANG KOTA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN, INFRASTRUKTUR KOTA YANG MODERN, SERTA PENATAAN PERMUKIMAN YANG RAMAH, ASRI DAN NYAMAN SESUAI NILAI BUDAYA BANGSA										
1	Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian	Mempercepat proses penetapan ranperda RTRW Kota Batam dan Penyusunan Rencna Rinci	40. Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya melalui	peta	25	80	PU dan Penaatan Ruang	PD Pengampu Urusan PU dan Penaatan Ruang

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lingkungan	pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	Tata Ruang kota Batam serta Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan keterlibatan stakeholder, instansi terkait dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang		peta analog dan peta digital					
2	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	1. Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	Menerapkan pendekatan zoning regulation pada kawasan-kawasan cepat berkembang							
			Mewujudkan integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang							
		2. Pengembangan sistem informasi spasial	Meningkatkan penerapan sistem informasi spasial							

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung	Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau antara lain melalui menjalin kerjasama dan kemitraan dengan sektor privat dalam penyediaan RTH	Meningkatkan luasan RTH publik dan privat melalui penggalangan peran pemerintah, swasta dan penerapan regulasi untuk penambahan ruang terbuka hijau serta peningkatan konservasi flora	41. Program Peningkatan dan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persen	23	25	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Kebun Raya yang ditanam	Kebun Raya	85 Ha (4500)	85 Ha (7000)		
					Luas Lahan Pemakaman yang dikelola	Ha	2	10		
					Jumlah ruang terbuka hijau/publik yang dibangun/ditingkatkan	lokasi	4	19		
		Meningkatkan kualitas ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Batam	Meningkatkan perlindungan, Pemanfaatan dan penataan lingkungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Batam	42. Program Peningkatan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi	Persentase peningkatan tutupan terumbu karang	Persen	31	43	Lingkungan Hidup	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	Melaksanakan peraturan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung terjaganya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kota Batam	43. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pengaduan lingkungan yang terverifikasi	persentase	90%	100%	Lingkungan Hidup	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
					Ketaatan Usaha dan/ atau kegiatan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan	persentase jumlah yang melapor terhadap jumlah izin PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan	35%	80%	Lingkungan Hidup	

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
						LH) yang dikeluarkan				
4	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana	Mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan bencana dengan meningkatkan kapasitas sarana prasarana kebencanaan	1. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana	44. Program Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Penanganan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana	persentase	65	85	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Meningkatkan pelayanan dalam penanganan kebakaran	Peningkatan penanganan dan pencegahan kebakaran	45. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	meningkatnya fasilitas sarana prasarana dalam penganggulangan kebakaran	persentase	60	80		
					Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penanggulangan kebakaran					
5	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman	Melakukan penataan angkutan umum dan penguatan lembaga pengelola transportasi massal	Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi massal serta restrukturisasi trayek angkutan umum	46. Program Penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal.	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketing	penumpang	0,97 jt	3 jt	Perhubungan	PD Pengampu Urusan Perhubungan
					Panjang Jalan Kota Batam yang di lalui Trans Batam untuk melayani masyakarat (Jumlah Koridor)	Km koridor	94 (5 kor)	233 (11 kor)	Perhubungan	
		Pembangunan sarana prasarana sistem	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan	47. Program Pembangunan,	Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terbangun	persentase	33	65	Perhubungan	PD Pengampu Urusan

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		transportasi	prasarana pendukung transportasi darat dan laut	peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi	Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara	persentase	20	60	Perhubungan	Perhubungan
					Jalur Sepeda	km	0	9	Perhubungan	
		Penataan manajemen perparkiran	Mengembangkan sistem perparkiran yang tertib dan aman, dengan kapasitas pelayanan memadai	48. Program peningkatan,pengamanan dan pengendalian lalu lintas	Meningkatnya cakupan pelayanan parkir	titik lokasi	188	228	Perhubungan	PD Pengampu Urusan Perhubungan
6	Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik	Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas	Melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan/ pelantar melalui pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta memperlebar lahan badan jalan, menunjang Percepatan Pembangunan Flyover dan pengembangan ruas jalan tol	49. Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan/pelantar	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan	km	134,83	286,83	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Pengampu Urusan PU dan Penaatan Ruang
					Panjang Jembatan/ Pelantar Yang Dibangun/ Ditingkatkan	m	140	190		
					Panjang jalan yang dipelihara	km	35	58		
			Membangun PJU di ruas jalan umum dan meningkatkan sarana prasarana kebinamargaan	50. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah Titik Lampu PJU Yang Dipelihara	titik	11727	13,027	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Pengampu Urusan PU dan Penaatan Ruang
					Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun	titik	1110	2410		
					Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi	m	69500	169500		

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Jumlah Peralatan	unit	6	19		
					Jumlah Peralatan dan Alat Berat Yang Dipelihara	unit	15	34		
7	Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir.	Pengembangan sistem tata air yang terpadu dan berkualitas	1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur drainase yang optimal dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir. 2. Melakukan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan kanal banjir dan normalisasi sungai	51. Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan	Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan	m	15177	**34177**	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Pengampu Urusan PU dan Penaatan Ruang
					Panjang drainase yang dipelihara	km	45	**55**		
					Panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani	m	380	**1380**		
8	Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan nilai keekonomian sampah melalui Sistem 3R dan kepatuhan tentang kawasan bebas sampah serta Pendampingan pembentukan Bank Sampah di tingkat kelurahan, pengembangan jejaring kerja Bank Sampah	52. Program Lingkungan Sehat	Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3 R (pengomposan, bank sampah, dll)	Persentase	2.00%	3%	Lingkungan Hidup	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kinerja Pengelolaan	Menyediakan sarana prasarana pengelolaan	53. Program Pengembangan Kinerja	Persentase pengangkutan sampah	Persentase	65 %	100%	Lingkungan Hidup	PD Pengampu Urusan

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persampahan	sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai	Pengelolaan Persampahan						Lingkungan Hidup
			Mendorong percepatan pengelolaan sampah di TPA dengan sistem WTE (Waste to Energy) melalui pola KPBU							
			Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah							
9	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yg berkualitas bagi masyarakat	Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa dan rusunami dengan pemerintah pusat dan stakeholders, peningkatan kualitas	Mendorong Pelaksanaan Pembangunan rumah susun sewa, rusunami pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik stakeholder atau konsolidasi lahan dan bangunan, meningkatkan kualitas operasional, pembangunan dan	54. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan	Jumlah perumahan dan pemukiman yang dibangun/ ditingkatkan	kawasan	**40**	**70**	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		operasional dan kualitas Prasarana Sarana Utilitas (PSU) serta Meningkatkan kualitas infrastruktur prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman	peningkatan PSU serta Percepatan penataan dan perbaikan kawasan kumuh skala kota.							
			Peningkatan Penataan infrastruktur prasarana dan sarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman	55. Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan	Jumlah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan	bangunan	**665**	**2.452**	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat	56. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	persentase	**5**	**10**	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam, kawasan fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan, tanah masyarakat, serta pengadaan aset lahan	Memperkuat basis data lahan aset Pemko Batam yang akurat dan terkini dan pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemerintah kota batam, dan dokumen tanah dalam meningkatkan pelayanan publik	Melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi eksisting lahan aset Pemko Batam ,pengadaan lahan dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah kota batam	57. Program Penataan Tata Guna Tanah	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	Persentase	31,75	100	Pertanahan	PD Pengampu Urusan Pertanahan
					Jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam	Dokumen	197	662		
					Fasilitas Penggunaan Sertifikat Lahan Masyarakat	Dokumen	0	500		
					Jumlah Lahan Aset Pemko Batam	Persil	0	444	Pertanahan	PD Pengampu Urusan Pertanahan

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	untuk kepentingan pemko batam serta penataan dan pengadaan kawasan pemakaman dalam meningkatkan pelayanan public									
11	Terwujudnya penyelesaian Kampung tua Kota Batam	Mendorong percepatan penyelesaian kawasan kampung tua Kota Batam	Mempercepat penyelesaian penetapan definitif kampung tua Kota Batam		Jumlah Kampung Tua yang memiliki dokumen PL an. Pemko Batam	Kampung	0	34	Pertanahan	PD Pengampu Urusan Pertanahan
MISI 4: MEWUJUDKAN PENGUATAN SEKTOR INDUSTRI DAN PENINGKATAN PERAN SEKTOR JASA, PERDAGANGAN, PARIWISATA, ALIHKAPAL, MARITIM DAN PERTANIAN/ PERIKANAN DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN DAERAH										
1	Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan,maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Melakukan pembinaan hubungan industrial dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan	Menginventarisasi dan melakukan pembinaan sarana hubungan industrial dan syarat kerja serta penyelesaian hubungan industrial	58. Program Peningkatan hubungan industrial yang harmonis	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	jumlah kasus	84	94	Tenaga Kerja	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
		Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata dan objek kebudayaan	59. Program Pengembangan sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan Lokal, Jumlah Wisatawan Mancanegara	orang	1,5 jt	2,1 jt	Pariwisata	PD Pengampu Urusan Pariwisata
					Length of Stay (Lama Kunjungan)	hari	1,9	2,13	Pariwisata	PD Pengampu Urusan Pariwisata
				60. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni	Jumlah pagelaran seni dan budaya (event)	jumlah	6 event (3 event perlombaan dan	30 event penyelenggaran	Kebudayaan	PD Pengampu Urusan

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan budaya			3 event pelestarian)			Kebudayaan
		Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat petani, peternak dan nelayan	Meningkatkan kualitas Home Industry dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dan perikanan	61. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	ton	35.345 ton	39.804 ton	Kelautan dan Perikanan	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
				62. Program Pembinaan, pengembangan dan pengawasan pertanian dan peternakan	Meningkatnya produksi Pertanian dan peternakan	ton	19.015	20.849	Pertanian	PD Pengampu Urusan Pertanian
		Meningkatkan peran Pemko Batam dalam mempercepat pertumbuhan investasi	Mendorong percepatan pertumbuhan investasi	63. Program Peningkatan investasi dan Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Batam	persentase	15,89	22,5	Penanaman Modal	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
MISI 5: MEWUJUDKAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS UMKM DAN KOPERASI YANG BERSINERGI DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN PASAR DOMESTIK										
1	Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, TDI dan standarisasi internasional dalam produksi serta mendorong pembentukan BPR dalam rangka membantu pendanaan sektor umkm	64. Program Peningkatan, pembinaan dan pengembangan UKM, dan koperasi serta usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina	UMKM	125 UMKM	1.500	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PD Pengampu Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
					Jumlah Sentra UMKM yang dibentuk	sentra UMKM	0	5		
					Jumlah koperasi aktif	koperasi	571	2094		
				65. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan IKM	Jumlah sentra industri yang dibentuk	sentra industri	0	5	Perindustrian	PD Pengampu Urusan Perindustrian
					Jumlah IKM yang tersertifikasi	jumlah IKM	9 IKM	24		
		Meningkatkan ketersediaan pangan	Menjaga keseimbangan antara permintaan dan	66. Program Penataan, pembinaan dan	Memperlancar jalur distribusi kebutuhan	persentase	65	80	Perdagangan	PD Pengampu Urusan

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dan menjaga stabilitas harga	ketersediaan barang	pengendalian pasar	barang pokok					Perdagangan
				67. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Prosentase ketersediaan pangan	%	30%	40%	Pangan	PD Pengampu Urusan Pangan
2	Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan tertentu	Penyediaan Ruang Bagi Sektor Informal Pada Kawasan Tertentu	Penyediaan ekonomi informal pada kawasan yang telah ditentukan menurut ketentuan peraturan yang berlaku serta revitalisasi pasar	68. Program Perlindungan konsumen dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL yang dibina	PKL	5000 PKL	5500	Perdagangan	PD Pengampu Urusan Perdagangan
MISI 6: MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH HINTERLAND SEBAGAI PENOPANG DAN PENYANGGA PEREKONOMIAN KOTA BATAM										
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Hinterland	Melakukan pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland.	Pemerataan pembangunan hingga di hinterland	69. Program Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland	km	5,2	15,20	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun di wilayah hinterland	m	903	2153		
					Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland	titik	379	517		
					Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun di wilayah hinterland	titik	397	547		
2	Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara optimal	Mengembangkan dan memelihara sumber air baku secara berkesinambungan	1. Meningkatkan cakupan layanan air bersih di luar wilayah konsesi ATB,	70. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi di hinterland	Jumlah penduduk yang terlayani air bersih	Jiwa	13000	18975	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian Kinerja		Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya	Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
							2015 (Awal)	2021 (Akhir)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengembangan pengelolaan air limbah domestic system setempat	Mendorong pengolahan air limbah domestic permukiman melalui pembangunan IPAL komunal dan sosialisasi penggunaan septictank standar lingkungan hidup dan pembangunan/ peningkatan IPAL system setempat		Jumlah penduduk yang terlayani sanitasi	Jiwa	1400	6500		
3	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland	Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan beserta pemukiman di hinterland	Peningkatan penataan lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland	71.Program Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland	Panjang drainase/ saluran lingkungan Panjang jalan lingkungan Panjang turap/ talud/ bronjong di wilayah hinterland	m	**3.970**	**12.795**	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan PD Pengampu Urusan Permukiman
4	Meningkatnya konektivitas transpotasi di hinterland	Pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana dasar	Pemerataan pembangunan hingga di hinterland	72. Program Pengembangan, Pembangunan aksesibilitas dan koneksivitas	pembangunan pelabuhan di hinterland	Pelabuhan	**25**	**41**	Perhubungan	PD Pengampu Urusan Perhubungan
					Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	kapal	**4**	**14**		

BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010, substansi dari Bab VIII RPJMD adalah menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan PD terkait beserta jabaran program yang menjadi tanggung jawab PD. Untuk memenuhi kriteria perencanaan berbasis kinerja, maka disajikan pula perbandingan antara pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Setelah program prioritas dijabarkan dalam bab sebelumnya, maka pada bab ini dirumuskan alokasi pagu yang bersifat indikatif untuk setiap program. Pagu indikatif ini merupakan jumlah dana yang dialokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya mengacu pada standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Batam berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis PD, termasuk dalam menjabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari

APBD Kota Batam, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel 8.1 hanya yang bersumber dari APBD Kota Batamdan bersifat indikatif.

Adapun skema Indikasi rencana program prioritas RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 disajikan pada gambar 8.1 di bawah ini.

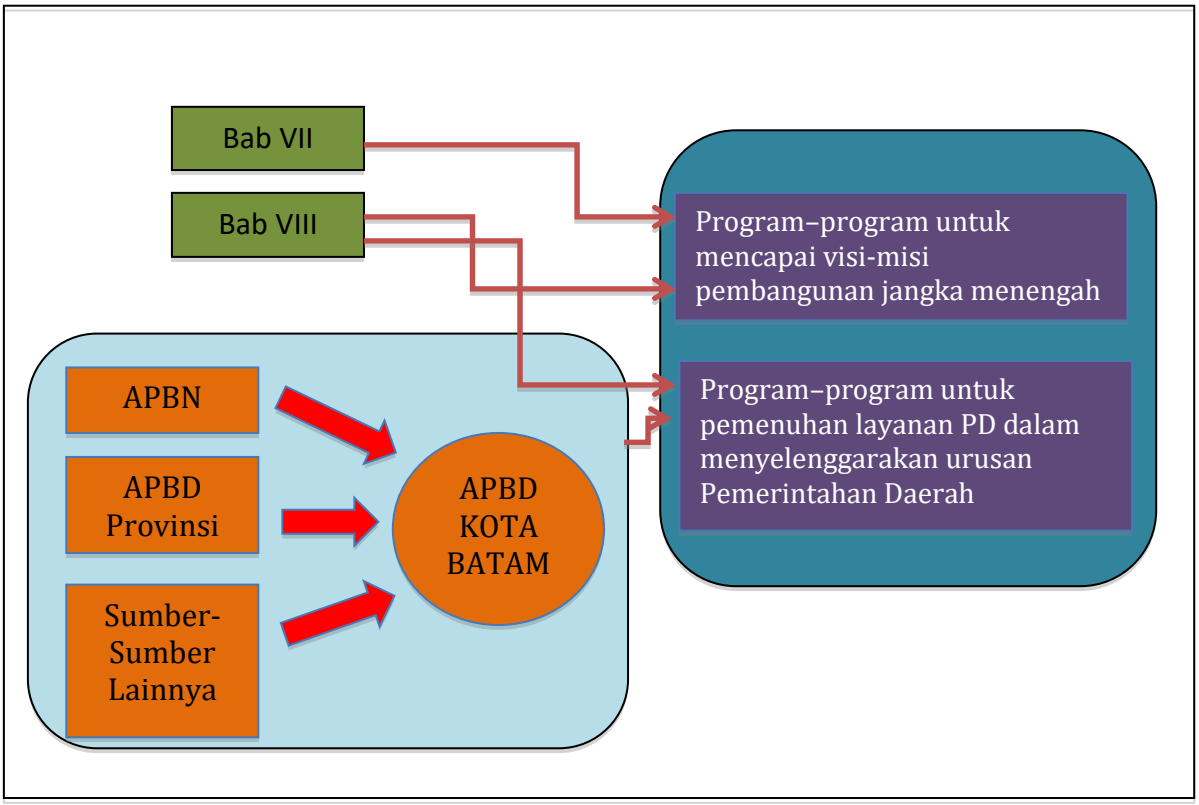

Gambar 8.1. Skema Indikasi Program Prioritas dan Pendanaan RPJMD Kota Batam 2016 – 2021.

Berikut adalah table indikasi rencana program prioritas pembangunan Kota Batam beserta pagu indikatifnya untuk periode 2016 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
NON URUSAN																	
1	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD Kota Batam	persentase	100%	100%	355.745	100%	355409	100%	356463	100%	427481	100%	468394	100%	1.963.573	Semua
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah	persentase	30%	40%	89.144	45%	74991	50%	80155	55%	87939	60%	92078	60%	424.307	Semua
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
PERENCANAAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
3	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD	persentase	45%	45	6.319	50	5976	55	6540	60	7123	65	7773	95%	33.731	PD Pengampu Penunjang Urusan Perencanaan
		Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD	persentase	40%	90		92		94		96		98		90%		
		Partisipasi perusahaan dalam pembangunan Kota Batam melalui dana CSR	persentase	0	10		30		50		60		80		80		
KEUANGAN																	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini Pemeriksaan BPK	Opini BPK	WTP	WTP	12.681	WTP	12.243	WTP	12.248	WTP	13.292	WTP	13.445	WTP	63.815	PD Pengampu Penunjang Urusan Keuangan
		Peningkatan PAD	Rp	891 M	1,1 T		1,3 T		1,4 T		1,5 T		1,7 T		1,7T		
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
5	Program pengelolaan, peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur	Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian	persentase	37,6	46.67 %	3.905	60.00%	4.650	73.33%	5.155	86.67%	5.681	100.00 %	6.261	100.00 %	31.974	PD Pengampu Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Diklat
		Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat	persentase	30,56	17.75 %		54.32%		68.55%		83.48%		100.00 %		100.00 %		
		Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur	persentase	41,63	60.00 %		75.00%		83.33%		91.67%		100.00 %		100.00 %		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
6	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan	Total dokumen seluruh Pemko Batam	16	3	800	4	850	4	900	4	950	4	1000	35	4.500	PD Pengampu Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan
BENCANA																	
7	Program Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Penanganan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana	persentase	40	50	936	60	2.846	65	3.155	70	3.477	75	3.832	80	15.810	PD Pengampu Penunjang Urusan Bencana
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
8	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan	Pencegahan Konflik social dan keagamaan	jumlah konflik	0	0	18.531	0	1590	0	1805	0	1985	0	2366	0	9.058	PD Pengampu Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Program Pengembangan dan partisipasi budaya politik	Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pileg	persentase	32		275		323	68	237		346		105	35	1.286	PD Pengampu Penunjang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilpres	persentase	58,6							65				65		
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilgub	persentase	45							60				60		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilwako	persentase	53							60				60		
FUNGSI LAINNYA																	
Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif																	
10	Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan & peraturan perundang-undangan	Peringkat LPPD Provinsi	Peringkat dari Gubernur	3	3	4.309	2	3715	1	4124	1	4536	1	5013	1	21.697	PD Pengampu Fungsi Lainnya Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif
		Peringkat LPPD Nasional	Peringkat dari Kemendagri	40 besar	30 besar		20 besar		10 besar		5 besar		3 besar		3 besar		
		Nilai Laporan Kinerja	Penilaian Kemenpan	CC	B		B		B		B		B		BB		
		Jumlah PD yang telah memiliki SOP	Persen	0	5		7		9		12		17		100		
		Produk Hukum (Perda dan Perwako) dan Bantuan Hukum	Perda	0	7		7		7		7		7		35		
			Perwak	0	10		10		20		20		20		80		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
			o														
			MoU	0	5		10		10		10		15		50		
		Persentase Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tupoksi PD	persentase	70%	100%	150	100%	200	100%	250	100%	300	100%	350	100%	1.250	PD Pengampu Fungsi Lainnya Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif, PD Pengampu Fungsi Lainnya

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
																	Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemko Batam	IKM PD	Indeks	67,75	1.600	70	2.000	75	2.200	80	2.400	85	2.600	85	10.800	PD Pengampu Fungsi Lainnya Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD																	
13	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu	persentase	60%	65%	43.322	70%	46.491	75%	51.544	80%	56.796	85%	62.595	85%	260.748	PD Pengampu Fungsi Lainnya Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																	
14	Program Penataan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan	persentase	42%	46	3.337	50	3798	54	4238	58	4862	62	5501	62%	21.736	PD Pengampu Fungsi Lainnya Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal	persentase	85%	87		89		91		93		95		95%		Daerah
URUSAN WAJIB																	
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																	
PENDIDIKAN																	
15	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	1.1. APK SD Laki-Laki		103,8	105	27.044	106,19	38.563	107,38	42.754	108,57	47.111	109,76	51.920	109,76	207.392	
		1.2. APK SD Perempuan		98,5	99,47		100,44		101,41		102,38		103,35		103,35		
		2. APM SD		91,9	92,25		92,92		93,91		94,58		95,25		95,25		
		2.1. APM SD Laki-laki		94,3	94,3		94,94		96,22		96,86		97,5		97,5		
		2.2. APM SD Perempuan		89,5	90,2		90,9		91,6		92,3		93		93		
		3. APK SMP		93,5	93,51		94,32		95,13		95,94		96,75		96,75		
		3.1. APK SMP Laki-Laki		93	94,1		95,2		96,3		97,4		15		1. APK SD		

102,24

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		3.2. APK SMP Perempuan		92,4	92,92		93,44		93,96		94,48		95		95		
		4. APM SMP		90	90,75		91,5		92,25		93		93,75		93,75		
		4.1. APM SMP Laki-laki		90,2	90,96		91,72		92,48		93,24		94		94		
		4.2. APM SMP Perempuan		89,8	90,54		91,28		92,02		92,76		93,5		93,5		
		5. Persentase SD/ SDLB Berakreditasi Minimal A sekurang-kurangnya sebanyak 29,81%	persentase	16,56	19,21		21,86		24,51		27,16		29,81		29,81 %	0	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		6. Persentase SD/ SDLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 67,91%	persentase	37,73	43,77		49,8		55,84		61,87		67,91		67,91 %		
		7. Persentase SMP/ SMPLB Berakreditasi Minimal A sekurang-kurangnya sebanyak 53,95%	persentase	30,83	35,45		40,08		44,7		49,33		53,95		53,95 %		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		8. Persentase SMP/ SMPLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 51,32%	persentase	29,32	33,72		38,12		42,52		46,92		51,32		51,32 %		
		Angka Putus Sekolah SD		0,75	0,55		0,3		0		0		0				
		Angka Putus Sekolah SMP		1,51	1,2		1		0,85		0,75		0,5				
		% tingkat kelulusan SD	persentase	100	100		100		100		100		100				
		% tingkat kelulusan SMP	persentase	100	100		100		100		100		100				
16	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1. APK PAUD		77,6	79,26	2.674	80,91	5.165,00	82,57	5.891,00	84,22	6.757,00	85,88	7.936,00	85,88	28.423	
		1.1. APK PAUD Laki-laki		30,14	30,97		31,8		32,62		33,45		34,28		34,28		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		1.2. APK PAUD Perempuan		47,46	48,29		49,12		49,94		50,77		51,6		51,6		
		2. APM PAUD		74,35	75,95		77,54		79,14		80,73		82,33		82,33		
		2.1. APM PAUD Laki-laki		28,17	28,97		28,77		29,77		31,36		32,16		32,16		
		2.2. APM PAUD Perempuan		46,18	46,98		47,78		47,78		49,37		50,17		50,17		
		3. Persentase TK Berakreditasi Minimal A	persentase	16	20		35		45		60		75				
		4.Persentase TK Berakreditasi Minimal B	persentase	20	35		49		60		75		89				

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
17	Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan	1. Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional yaitu sekurang-kurangnya:	persentase			3.327		27942		28588		29259		30000		119.116	
		1.1. SD/SDLB		3,83%	3,83%		3,83%		3,83%		3,83%		3,83%		3,83%		
		1.2. SMP/MTs		8,08%	8,08%		8,08%		8,08%		8,08%		8,08%		8,08%		
		1.3. SMA/SMALB		17,29%	17,29 %		17,29%		17,29%		17,29%		17,29%		17,29 %		
		1.4. SMK		4,74%	4,74%		4,74%		4,74%		4,74%		4,74%		4,74%		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
18	Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif	masyarakat yang lulus masuk PTN negeri yang dibiayai untuk pengentasan pendidikan S1	jumlah orang	60	60	2.514	65	9.040	70	10.310	75	11.825	80	13.889	80	47.578	
KESEHATAN																0	
19	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima (5) jenis tenaga kesehatan (tenaga Kesmas, Kesling, Gizi, Kefarmasian & analis kesehatan)	persentase	70	80	24.392	85	220	85	250	85	290	90	310	90	25.462	PD Pengampu Urusan Kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
		Jumlah dokumen anggaran, perencanaan dan data kesehatan yang dihasilkan	dokumen	12	12		12	390	13	430	13	490	14	570	14	1.880	
20	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Tersedianya Obat, BHP dan Alat Kesehatan Rujukan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam	persentase	75%	78%	18.037	80%	500	83%	18.522	85%	20.587	88%	27.587	88	85.233	
		Persentase Ketersediaan obat dan Alkes di pelayanan kesehatan dasar	persentase	85%	85		90	17.722	90		90		90		90	17.722	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
21	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas tersertifikasi akreditasi	persentase	0	5	45.445	10	55363	15	66185	20	71516	25	73588	25	312.097	
		Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat	kecamatan	1	2		3		4		5		6		6		
		Jumlah kebijakan PHBS yang dikeluarkan Pemerintah	kebijakan	2	3		5		7		8		9		9		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Persentase Puskesmas yang melaporkan pelaksanaan kebijakan PHBS	persentase	60	65		70		75		80		80		80		
22	Peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	persentase	55%	60%	90.000	70%	2000	75%	1871	80%	392	85%		90%	94.263	
23	Program Jaminan Kesehatan Daerah	Persentase penduduk yang memiliki SJSN/ Peserta BPJS Kesehatan	persentase	60	70	23.576	75	23575	80	24175	85	25986	85	30986	85	128.298	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
24	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan lingkungan	Prevalensi HIV pada penduduk	persentase	< 0,1	< 0,1	4.153	< 0,1	3855	≤ 0,1	4434	≤ 0,1	5034	≤ 0,1	6991	≤ 0,1	24.467	
		Presentase HIV yang diobat	persentase	49	52		55		58		61		64		64		
		Angka keberhasilan pengobatan Tb (succes rate)		52	54		56		58		60		62		62		
		Angka kejadian kusta per 100.000 penduduk		1,16	1,2		1,1		1		0,9		0,8		0,8		
		Insiden rate DBD per 100.000 penduduk		56	55		54		53		52		50		50		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Annual paracite insidence (API) per 100 penduduk		< 1	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		
		Angka kejadian filariasis		< 1	< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		< 1		
		Persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	persentase	91	91,5		92		92,5		93		93,5		93,5		
		Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang terdeteksi dini kanker serviks dan payudara	persentase	0,75	10		15		20		25		30		30		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Prevalensi tekanan darah tinggi	persentase	20	19		18		17		16		15		15		
		Prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun	persentase	30	25		20		15		12		10		10		
		Prevalensi merokok pada penduduk usia < 18 tahun	persentase	10	9		8		7		6		5		5		
		Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM	Kel/Desa	20	22		24		26		28		30		30	0	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
25	Program kesehatan keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)	orang	163	156	2.417	152	1720	149	2270	145	3125	141	3275	141	12.807	
		Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	orang	21	20		19		18		17		16		16		
		Persentase (prevalensi) kekurangan gizi (under weight) pada anak Balita	persentase	5	4,8		4,7		4,6		4,5		4,5		4,5		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Persentase (prevalensi) pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak Baduta	persentase	10	09.05		9		8,7		8,5		8,5		8,5		
		Persentase kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak Balita	persentase	1	0,9		0,85		0,8		0,75		0,75		0,75		
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																0	
26	Program Pembangunan, peningkatan,	Panjang jalan yang dibangun	Km	134,83	25	272.723	28	324.733	30	359.919	33	399.311	36	439974	286,83	1.805.785	PD Pengampur Urusan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
	pemeliharaan jalan dan jembatan/pelantar	Panjang Jembatan/ Pelantar Yang Dibangun/ Ditingkatkan	m	140	10		10		10		10		10		190		PU dan Penaatan Ruang
		Panjang jalan yang dipelihara	km	35	35		40		48		53		58		58		
27	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan	Jumlah Titik Lampu PJU Yang Dipelihara	titik	11727	11,987	38.233	12,247	39.074	12,507	42.452	12,767	43.963	13,027	47.839	13,027	213.264	
		Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun	titik	1110	260		260		260		260		260		2410		
		Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi	m	69500	20000		20000		20000		20000		20000		169500		
		Jumlah Peralatan	unit	6	6		4		4		3		2		19		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Jumlah Peralatan dan Alat Berat Yang Dipelihara	unit	15	21		25		29		32		34		34		
28	Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan	Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan	m	15177	3000	32.140	3000	34.491	4000	39.025	4000	42.905	5000	47.229	34177	193.671	
		Panjang drainase yang dipelihara	km	45	45		48		50		52		55		55		
		Panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani	m	380	100		150		200		250		300		1380		
29	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah penduduk yang terlayani air bersih	jiwa	13000	1000	33.724	1100	34.303	1200	37.350	1300	50.245	1375	80.145	18975	235.767	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
		Jumlah Penduduk yang terlayani sanitasi	jiwa	1400	600		800		1000		1200		1500		6500		
30	Program Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland	km	5,2	2	21.346	2	19.397	2	21.506	2	23.697	2	26.117	15,2	107.753	
		Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun di wilayah hinterland	m	903	250		250		250		250		250		2.153		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland	titik	379	397		427		457		487		517		517		
		Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun di wilayah hinterland	titik	397	30		30		30		30		30		547		
31	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam	kecamatan	-	1 kec	750	3 kec	2.250	4 kec	3.000	4 kec	5.000	-	-	12 kec	11.000	
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																0	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
32	Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan	Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/direhabilitasi	unit	104	478	7.369	502	7.959	527	8.596	553	9.283	581	10.026	2.745	43.233	PD Pengampu Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		- Panjang Drainase/ saluran lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan	Meter (M)	13,525	14.145	3.796	14.852	4.100	15.595	4.428	16.375	4.782	17.193	5.165	91.685	22.271	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Jumlah Bangunan Rusunawa & PSU Rusunawa yang dibangun/direhabilitasi	Twin Block (TB)	25 TB	5 TB	12.377	5 TB	13.367	5 TB	14.473	5 TB	15.591	5 TB	16.839	55	72.611	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Pengembangan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan (Kel)	64 Kel	64 Kel	2.223	64 kel	2.401	64 kel	2.593	64 kel	2.800	64 kel	3.024	64 kel	13.041	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
\		- Panjang Jalan lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi serta dipelihara di kawasan permukiman perkotaan	Meter (M)	109,802	20.250	42.316	21.263	45.701	22.326	49.357	23.442	53.306	24.614	57.570	221.696	248.251	
		- Panjang Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan	Meter (M)	3.755	1.251	5.406	1.314	5.838	1.380	6.305	1.449	6.809	1.521	7.354	6.915	31.712	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
33	Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang mememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan	bangunan	665 bangunan	249	231.724	349	217.468	301	154.962	453	55.394	503	69.641	2.452	729.190	
34	Program Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland	Panjang drainase/ saluran lingkungan panjang jalan lingkungan panjang turap/ talud/ bronjong di wilayah hinterland	meter	3970	4.795	12.466	6.795	19.025	8.795	26.384	10.795	34.542	12.795	43.501	47.942,5	135.917,5	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																0	
35	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	Jumlah Aksi Demo yang diamankan	orang	250 kali	50	2.509	50	4734	50	5314	50	5989	50	6701	250	26.971	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
		Jumlah Linmas yang diberdayakan	orang	1416	344		344		344		344		344		1416		
36	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Meningkatnya fasiilitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran	Hydrant (unit)	55	10	2.876	10	4.555	10	5.050	10	5.564	10	6.132	105	25.301	PD Pengampu Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penanggulangan kebakaran	persen	20	30		40		50		60		70		80		
SOSIAL																	
37	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bantuan yang diberikan	Rumah Tangga Sasaran dan jumlah PMKS	100 % dari data PPLS 2011 (36.103 RTS) dan 8.197 PMKS	100 % dari data PPLS dan 8.197 PMKS	11.116	100 % dari data BDT (39.903 RTS) dan 12.082 PMKS	18400	100 % dari data BDT dan 12.082 PMKS	19050	100 % dari data BDT dan 12.082 PMKS	19690	100 % dari data BDT dan 12.082 PMKS	20110	100 % dari data BDT dan 12.082 PMKS	88.367	PD Pengampu Urusan Sosial
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																	
TENAGA KERJA																	
38	Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	orang	1456	1100	8956	2100	27023	500	26415	1550	12850	2200	36009	7450	111.253	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
	Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi	orang	1440	1600	6400	2000	12000	600	3600	1700	10200	2000	12000	7900	44200	
		Jumlah tenaga kerja yang terserap/ ditempatkan	orang	11449	13500	2035	14000	2377	14500	2626	15500	2193	17000	3142	74500	12373	
39	Program Peningkatan hubungan industrial yang harmonis	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun	jumlah kasus	84	86	3.156	88	1784	90	1962	92	2158	94	2373	94	11.433	PD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																	
40	Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam	Indeks Pembangunan Gender	persentase	94,45	94.47.00	3.831	94.49.00	3.931	94.51.00	4.031	94.53.00	4.131	94.54.00	4.258	94,54	20.182	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
	pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	persentase	54,31	55.00.00		56.50.00		58.00.00		59.50.00		61.05.00		61,05		Perempuan dan Perlindungan Anak
41	Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan perlindungan	persentase	100	100	1.432	100	2.332	100	2.832	100	3.332	100	3.832	100	13.760	
PANGAN																	
42	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Prosentase ketersediaan pangan	persentase	30%	30%	666	32%	790	34%	876	36%	966	38%	1.064	40%	669.937	PD Pengampu Urusan Pangan
PERTANAHAN																	
43	Program Penataan Tata Guna tanah	Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi	persentase	31.79	47.62	1.208	71.43.00	2.135	100	2.415	-	1.725	-	1.810	100	9.293	PD Pengampu Urusan Pertanahan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam	dokumen	197	50		102		105		100		108		662		
		Fasilitas Penggunaan Sertifikat lahan Masyarakat	dokumen	0	100		100		100		100		100		500		
		Jumlah pengadaan lahan asset Pemko Batam	persil	0	0		139		110		98		97		444		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
		Jumlah Kampung Tua yang memiliki Dokunen PL atas nama Pemko Batam	kampung tua	7	8		9		10						34		
LINGKUNGAN HIDUP																	
44	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti/ terverifikasi	persentase	90%	90%	6.791	90%	9.413	90%	10.437	90%	11.500	90%	12.674	90%	50.815	PD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Ketaatan Usaha dan/ atau kegiatan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan	persentase	35%	0		45%		50%		55%		60%		80%		
45	Program Peningkatan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi	Persentase peningkatan tutupan terumbu karang	persentase	31	33	580	35	436	37	483	40	532	43	587	43	2.618	
46	Program Peningkatan dan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan Ruang Terbuka Hijau	persentase	23	0,2	24.593	0.2	26.549	0.2	26.673	0.2	30.967	0.2	33.445	24	144.219	
		Kawasan Pemakaman yang dikelola	kawasan	2	2		2		2		2		2		10		
		Jumlah ruang terbuka hijau/publik yang	Lokasi	72 Lokasi	12 Lokasi (8	17,484	12 Lokasi (8	20,981	12 Lokasi (8	25,177	12 Lokasi (8	30,213	12 Lokasi (8	36,255	72 lokasi lama,	130,110	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		dibangun/ditingkatkan			lokasi lama, 4 lokasi baru)		lokasi lama, 4 lokasi baru)		lokasi lama, 4 lokasi baru)		lokasi lama, 4 lokasi baru)		lokasi lama, 4 lokasi baru)		20 lokasi baru)		
47	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengangkutan Sampah	persentase	63.29%	1	90. 153	70%	105397	75%	117762	80%	129323	80%	142311	80%	494.793	
48	Program Lingkungan Sehat	Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3 R (pengomposan, bank sampah, dll)	persentase	2.00%	3%	4.681	4%	2.023	5%	2.243	6%	2.471	7%	2.734	7%	14.152	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
49	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil:KK, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian	Persentase KK	84,17%	89	1.738	98	2280	100	2547	100	2.811	100	3.066	100%	12.442	PD Pengampu Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
			Persentase KTP	85%	87		98		100		100		100		100%		
			Persentase Akte Kelahiran	75%	77		80		82.5		85		96		100%		
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi	PKK 77, LPM 77, Posyandu 450, RT 3215, RW 772, KPM 320 org, Kader	PKK 77, LPM 77, Posyandu 500, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif	42.927	PKK 77, LPM 77, Posyandu 550, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 384 org	39191	PKK 77, LPM 77, Posyandu 600, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 512 org	43641	PKK 77, LPM 77, Posyandu 650, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 512 org	49433	PKK 77, LPM 77, Posyandu 700, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif 640 org	55157	PKK 77, LPM 77, Posyandu 700, KPM 320 org, Kader Siaga Aktif	228.212	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
				Siaga Aktif 128 org	256 org										640 org		
		Meningkatnya swadaya masyarakat	persen	Swadaya 30%, Goro 2000 org	Swadaya 35%, Goro 500 org		Swadaya 40%, Goro 500 org		Swadaya 45%, Goro 500 org		Swadaya 50%, Goro 500 org		Swadaya 50%, Goro 500 org		Swadaya 50%, Goro 2500 org		
		meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan	Jumlah Organisasi	UEM-SP 10, POSYANTEK 9, TTG 31	posyantek 1, TTG 7, PELATIHAN 100 ORANG		UEM-SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang		UEM-SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang		UEM-SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang		UEM-SP 9 POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan 250 orang		UEM-SP 49, POSYANTEK 9, TTG 35, pelatihan 1100 orang		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
51	Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)	Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat	persentase	5 persen	6	64.000	7	73.252	8	78.241	9	83.633	10	89.533	10	395.118	PD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
52	Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)	persentase	71,5	72	2.291	3	2.291,00	73	2.838,00	3,05	3.221,00	74	3.721,00	74	14.362	PD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PERHUBUNGAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
53	Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian lalu lintas	meningkatnya cakupan pelayanan parkir	Lokasi	188 Lokasi	198	17.400	208	17.600	218	17.800	228	18.000	228	18.200	228 Lokasi	89.000	PD Pengampu Urusan Perhubungan
54	program penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal	Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting	penumpang	0,97jt	1.460 jt	34.826	1.845 jt	40.683	2.230 jt	45.105	2.615 jt	49.701	3jt	54.776	3jt	225.091	
		Panjang Jalan Kota Batam yang di lalui Trans Batam untuk melayani masyakarat (Jumlah Koridor	km	94	181.5 km		201 km		246 km		246 km		246 km		246		
			koridor	(5 kor)	5		7		9		9		9		9		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
55	program pembangunan, peningkatan, pemeliharaaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi	Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terbangun	persentase	33	45	22.101	55	27.816	65	30.840	65	33.982	65	37.452	65	152.191	
		Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara	persentase	20	25		30		40		50		60		60		
		Jalur Sepeda	Km	0	0		2		3,5		5,5		9		9		
56	Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas	pembangunan pelabuhan di hinterland	pelabuhan	25	2	7.885	2	7.672	2	8.506	2	9.373	3	10.330	35	43.7660	
		Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut	kapal	4	3		0		1		1		0		9		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
57	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi	indeks	C (43.76-62.50)	B (62.51-81.25)	1.488	B (62.51-81.25)	6971	B (62.51-81.25)	7585	B (62.51-81.25)	8148	A (81.25-100)	8779	A (81.25-100)	35.511	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
58	Program Peningkatan, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan public berbasis online	persen	0	29	7.206	52	2.000	68	1.000	84	1.000	100	1.000	100	57.615	PD Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH																	
59	Program Peningkatan, pembinaan dan pengembangan UKM dan koperasi serta usaha ekonomi masyarakat	Jumlah Pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina	UMKM	125 UMKM	85 UMKM	1.543	250	2.703	300	2.998	350	3.302	400	3.640	1510	15.017	PD Pengampu Urusan Koperasi dan UKM
		Jumlah Sentra UMKM yang dibentuk	sentra UMKM	0	0		1		1		1		1		4		

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
		Jumlah koperasi aktif	koperasi	571	596		624		654		684		719		719		
PENANAMAN MODAL																	
60	Peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan	Meningkatnya persentase realisasi Investasi	persentase	15.89%	17	452	18	514	19	570	20	628	22.05		22.05	2.164	PD Pengampu Urusan Penanaman Modal
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
61	Program Peningkatan, Pembinaan Dan Pelayanan Kepemudaan, kepramukaan dan Olahraga	Prestasi/ Capaian kepemudaan	orang	0	40	7.622	40	6.810	40	11.870	40	1.930	40	1.990	200	30.222	PD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olahraga
		Prestasi Olahraga	orang	95	100		120		140		160		180		700	0	
		Budaya olahraga	keg	0	5		5		5		5		5		25	0	
		Prestasi Kepramukaan	orang	380	80		80		80		80		80		780	0	
		Sarana Prasarana terbangun	unit	4	1		2		1		0		0		8	0	
STATISTIK																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
62	Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah	Kelengkapan Data SIPD Kota Batam		5%	20%	786	40%	526	80%	566	100%	611	100%	277	100%	2.766	PD Pengampu Urusan Statistik
		Jumlah dokumen pendataanpendukung perencanaan	dokumen	3	2		2		2		2		2		13		
PERSANDIAN																	
63	Program Keamanan Data dan Informasi	Persentase informasi yang berkualifikasi di Pemerintah Kota Batam	persen	0	5	123	15	500	25	525	35	551	50	578	50	125.394	PD Pengampu Urusan Persandian
KEBUDAYAAN																	
64	Program Pelestarian dan Pengembangan Seni & Budaya	Jumlah pagelaran seni dan budaya (event)	jumlah	6 event (3 event perlombaan dan 3 event	6	1.183	6	1.347	6	1.494	6	1.646	6	1.814	30 event penyelenggaran	7.484	PD Pengampu Urusan Kebudayaan

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6 pelestarian)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
PERPUSTAKAAN																	
65	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung dalam satu tahun		5%	5	612.770	6	712	7	776	8	873	9	979	9	616.110	PD Pengampu Urusan Perpustakaan
KEARSIPAN																0	
66	Program Penataan Penyelenggaraan Kearsipan	ASN Arsiparis yang di Bina		0	8	109.090	8	116	8	148	8	197	8	250	40	109.801	PD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN PILIHAN																	
KEL																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
6 7	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	ton	35.345 ton	36.700 ton	1.424	37.500 ton	2.230	38 rb ton	2.472	39 rb ton	2.724	39.804 ton	3.002	39.804 ton	11.852	PD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
PERTANIAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17=7+9+11+13+15**	**18=8+10+12+14+16**	**19**
68	Program Pembinaan, pengembangan dan pengawasan pertanian dan peternakan	Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan	ton	19.015	19.025	2.802	19.338	2.828	19.841	3.136	20.345	3.456	20.849	3.808	20.849	16.030	PD Pengampu Urusan Pertanian
PARIWISATA																	
69	Program Pengembangan sektor pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan Lokal, Jumlah Wisatawan Mancanegara	juta orang	1,5 jt	1,8	2.441	1.900		2.000		2.100		2.200		2,1 jt	2.441	PD Pengampu Urusan Pariwisata
		Length of Stay (Lama Kunjungan)	hari	1,9			2,1		2,03		2,07		2,1		2,13		
PERDAGANGAN																	

No	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah (PD) Pengampu Urusan/ Penunjang Urusan/ Fungsi Lainnya
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Dana (Juta Rp)	Target	Total Dana (Juta Rp)	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=7+9+11+13+15	18=8+10+12+14+16	19
70	Program Perlindungan konsumen dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL yang dibina	PKL	5000 PKL	100	235	100	455	100	504	100	556	100	613	500	2.363	PD Pengampu Urusan Perdagangan
71	Program Penataan, pembinaan dan pengendalian pasar	Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok	persentase	65	65	4.530	70	4.497	75	4.986	75	5.494	80	6.055	80	25.562	PD Pengampu Urusan Perdagangan
PERINDUSTRIAN																	
72	Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri yang dibentuk	sentra industri	0	1	1.321	1	455	1	504	1	556	1	613	5	3.449	PD Pengampu Urusan Perindustrian

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai (1) Indikator Makro daerah dan (2) Indikator Kinerja Daerah.

Indikator Makro daerah merupakan indikator yang menggambarkan dampak (*Impact)* dari berjalannya berbagai program dan kegiatan pelayanan Pemerintah Kota Batam, serta sebagai kontribusi Kota Batam Terhadap target indikator makro yang sudah ditetapkan dalam RPJMN dan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Penjabaran mengenai hal tersebut disampaikan dalam Tabel 9.1 dibawah ini.

Tabel 9.1 Penetapan Indikator Makro Daerah

No.	Indikator Makro	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	4.13*	3.99*	3.78*	3.63*	3.48*	3.34*	3.13*	3.13
2	Pertumbuhan Ekonomi	6.75**	6.57	6.33	6.10	5.87	5.63	5.40	5.40
3	Inflasi	4.73**	3.14***	4.46	4.27	4.08	3.90	3.71	3.71
4	Gini Ratio	0.3331**	0.3539	0.3519	0.3499	0.3479	0.3459	0.3439	0.3439
5	Persentase Penduduk Miskin	4.91**	4.58	4.29	3.99	3.69	3.39	3.09	3.09
6	Indeks Pembangunan Manusia	79.34**	79.80	80.18	80.56	80.94	81.31	81.69	81.69
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.09**	5.72	5.63	5.55	5.46	5.38	5.29	5.29
8	Kualitas Air (%)	90	90,5	91	91,5	92	92,5	93	93
9	Kualitas Udara (%)	92	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95

No.	Indikator Makro	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2015	2016	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Meningkatkan cakupan layanan air bersih di luar wilayah konsesi ATB	27,5%	29	31	33	35	37	39	39%

Keterangan :
* Dari angka proyeksi penduduk
**Angka rilis BPS
***Angka year on year September 2016

Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi walikota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Untuk ketersediaan air, kewenangan Pemerintah Kota Batam hanya di daerah yang diluar wilayah mainland, sedangkan di daerah Kota Batam ketersediaan air ditangani oleh sawsta yaitu Adya Tirta Batam (ATB) di konsensi dengan BP Batam. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Penjabaran mengenai hal tersebut disampaikan dalam table 9.2.

Tabel 9.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah	- Nilai Lakip CC - Opini BPK WTP -LPPD rank 3 se provinsi, rank 40 nasional	CC WTP 3 30 besar	B WTP 2 20 besar	BB WTP 1 10 besar	BB WTP 1 10 besar	A WTP 1 10 besar	- Nilai Lakip BB - Opini BPK WTP -LPPD Rank 1 seprovinsi, sepuluh besar nasional
2	Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir.	15%	20%	25%	30%	35%	35%	35%
3	Sistem Pelayanan Terpadu Secara Online	- Sistem pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan masih bersifat manual -sarana dan prasarna pelayanan belum memadai - Sistem Pelayanan publik Masih bersifat Kantor - Sistem pelayanan masih manual - tingkat kepuasan masyarakat 66,75%	Manual IKM 70%	Online IKM 75%	Online IKM 80%	Online IKM 85%	Online IKM 90%	- Sistem pelayanan di kelurahan dan kecamatan secra online pada pelayanan bidang - Sarana dan prasarna menjadi berkualitas - Sistem pelayanan informasi terintegrasi 31 data - Sistem pelayanan online dibidang kepegawaian, perencanaan, keuangan, perpajakan, kesehatan, pendidikan, persampahan dll - Tingkat kepuasan masyarakat 90%

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Partisipasi Linmas dalam Ketertiban Umum	0 orang	222 orang	222 orang	222 orang	222 orang	222 orang	1110 orang
5	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	10,9	11	11,2	11,4	11,6		12 tahun
6	2. Persentase yang melanjutkan ke pendidikan menengah APK	APK 73,20% APK 62,95%	APK 75,31% APM 65,93%	APK 77,42% APM 68,92%	APK 79,53% APM 71,9%	APK 81,64% APM 74,89%	APK 83,75% APM 77,88%	APK 83,75% APM 77,88%
7	3. Bantuan Beasiswa Mahasiswa jalur undangan pada 5 PTN teratas di jawa dan Peningkatan SDM ASN untuk S2 dan S3	60 Mahasiswa S1 10 PNS S2 dan S3	65 S1 10 ASN S2/S3	70 S1 10 ASN S2/S3	75 S1 10 ASN S2/S3	80 S1 10 ASN S2/S3	85 S1 10 ASN S2/S3	85 Mahasiswa S1 50 PNS S2 dan S3
8	Angka Harapan Hidup	72,80	72,80	72,80	72,80	72,80	72,90	72,90 tahun
9	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)	21	20	19	18	17	16	16
10	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)	160	157	155	152	148	148	148
11	IPG	94,46	94,48	94,5	94,52	94,53	94,54	94,54
12	IDG	54,70	55	56	57	59	61,05	61,05
13	Bantuan yang diberikan	100% dari Data PPLS dan 8197 PMKS	100% dari Data BDT (39.903 RTS) dan 12.082 PMKS	100% dari Data BDTdan 12.082 PMKS	100% dari Data BDT dan 12.082 PMKS	100% dari Data BDT dan 12.082 PMKS	100% dari Data BDT dan 12.082 PMKS	100% dari Data BDT dan 12.082 PMKS
14	Jumlah Lembaga/ Pemberdayaan Masyarakat berprestasi level provinsi dan nasional	4	2	2	2	2	2	2
15	Meningkatnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	KTP 85%,	87	98	100	100	100	100
		Akte Kelahiran anak usia 0-18 th 71%	77	80	82.5	85	96	100
		Persentase pemilik KK	89	98	100	100	100	100

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	pileg 32% Pilgub 45% Pilwako 53%	-	-	pileg 35% Pilgub 50% Pilwako 60%-	-	-	pileg 35% Pilgub 50% Pilwako 60%
18	Jumlah Konflik Sosial di Masyarakat	0 Kasus	0	0	0	0	0	0 Kasus
19	Sarana Prasarana pendukung prestasi Kepemudaan dan Olahraga : Stadion, GOR Mini, Tribun Lapangan dan Lapangan Olahraga di Lingkungan masyarakat	(1 stadion, 1 GOR, 2 lap bola) 0 lap olahraga	1 tribun, 1 stadion 5	1 GOR 5	1 stadion 5	- 5	- 5	(3 tsadion, 2 GOR, 1 tribun) 25 Lap Olahraga
20	Tingkat pengangguran terbuka	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	6	6
21	Jumlah Tenaga Kerja bersertifikasi	1.440 Orang	1600	2000	600	1700	2000	7900 orang
22	Tersedianya Dokumen RTRW Kota Batam dan Tersedianya Rencana Rinci Tata Ruang Kota Batam	Ranperda RTRW Kota Batam Rencana Rinci Tata Ruang Belum Ada	-	RTRW	RTRW RDTR	RTRW RDTR Zonasi	RTRW RDTR Zonasi Zoning Kawasan Berkembang Cepat	Perda RTRW Kota Batam Perda Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR, Zonasi) Zoning Kawasan berkembang Cepat
23	Sistem pengendalian	GIS RTRW Kota Batam 2004 - 2014 berbasis Web	Persiapan GIS RTRW baru	GIS RTRW Berbasis Web	GIS RTRW Berbasis Web, Android, IOS	Sinkronisasi dengan Sistem Online lainnya	Peningkatan Sistem	Peningkatan Pengembangan GIS RTRW Kota Batam 2016 - 2036 Berbasis Web
24	Luasan Ruang Terbuka hijau	23 %	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**24%**
25	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan (air dan udara)	kualitas Air 90,5%, Kualitas udara 92,5 %	91 93	91,5 93,5	92 94	92,5 94,5	93 95	Kualitas Air 93% kualitas udara 95 %
26	TRC	TRC 10 Orang	15	15	15	15	15	75 Orang

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
27	Meningkatnya Jumlah pengguna transportasi umum	1,095 jt Orang	1,476jt	1,857jt	2,238jt	2,619jt	3jt	3 jt Orang
28	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	68%	72	74	76	78	81	81%
29	Persentase jalan utama dengan PJU	85%	88	90	92	94	96	96%
30	Jumlah titik genangan air/ banjir	30 titik genangan air/ banjir	27	24	20	16	11	11 Titik genangan air / Banjir
31	Tingkat Cakupan pelayanan air minum di kawasan non ATB/ Swasta	27,5%	31	33	35	37	39	39%
32	Cakupan pelayanan persampahan	65	80	100	100	100	100	100%
33	Persentase pengurangan timbulan sampah disumber	3%	4	6	8	10	14	14%
34	Jumlah twin block Rusunawa dan Rusunami	25 TB Rusunawa	30	35	40	45	55	55 TB Rusunawa
35	Mesjid Agung	0	-	-	1	-	-	1
36	BLK	0					1	1
37	Persentase ketersediaan informasi lahan dan pengadaan lahan Pemerintah Kota Batam untuk pembangunan kantor camat dan lurah pemekaran dan fasilitas pemerintah lainnya seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan Pemakaman serta kawasan fasum dan jaringan jalan di daerah perumahan	Pemko memiliki 630 Persil Lahan yang sudah sertipikat 197 Persil berbentuk PL 188 Persil 245 Persil belum memiliki dokumen	50	75	100	100	108	188 Persil bentuk PL menjadi sertipikat 245 Persil yang belum memiliki dokumen menjadi sertipikat

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Fasum Fasos sudah dalam bentuk PL an. Pemko Batam 27 Persil, dan yang memiliki akta hibah 5 Persil	-	-	27	5	0	27 Persil Fasum Fasos yang memiliki dok PL menjadi sertifikat dan 5 Persil yang memiliki akta hibah menjadi sertifikat
		Pengadaan persil lahan asset Pemko Batam	-	139	110	98	97	44 persil kec/ kel, 13 persil puskesmas, 15 SD, 10 smp, 10 SMA/SMK, 3 Lap Bola, 1 sentra industry, 1 GOR, 240 TPS, 2 TPU, 3 Damkar, 1 BLK, 100 Rusunawa, 1 kantor Disnaker
38	Sertifikasi tanah masyarakat (Proda)	0 persil	100	100	100	100	100	500 Persil
39	Jumlah penyelesaian Kampung Tua Kota Batam	7 Kampung Tua	8	9	10			34 Kampung Tua
40	Kunjungan Wisman	1,6 juta wisman	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,1 Wisman
41	kontribusi sektor pertanian/ perikanan dalam PDRB Kota Batam	1,04 %	1,04	1,05	1,06	1,09	1,13	1,14%
42	Persentase pertumbuhan investasi Kota Batam	19%	20	21,5	22	22,2	22,5	22,5%
43	Jumlah Pelaku ekonomi yang mendapatkan HKI dan Standarisasi internasional dalam produksi	126	20	20	20	20	20	226 Unit Usaha
44	Meningkatnya Ketahanan pangan dan tersedianya data ketahanan pangan	30%	30	32	34	36	38	40%

No.	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
45	Jumlah gedung/ kantor/ komersial yang menyediakan ruang untuk pedagang informal (tidak permanen), Penyiapan kawasan PKL dan Pasar Induk	0 lokasi	0	1	2	3	4	4 Lokasi
46	Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland	5,2 KM	2	2	2	2	2	15,2 KM
47	Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland	903 M	250	250	250	250	250	2.153 M
48	Jumlah titik PJU yang terpasang di wilayah hinterland	397 titik	30	30	30	30	30	517 titk
49	Panjang Drainase/ saluran lingkungan	0 m						28.621,54 m
50	Panjang jalan lingkungan	3.970 m	3.795	5.295	6.795	8.295	10.295	38.443 m
51	Jumlah Dermaga/ Pelantar/ Jetti	25 Unit	4	3	3	3	3	41 Unit

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

1. Pedoman Transisi:

RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) pada periode berikutnya.Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir.

Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.

2. Kaidah Pelaksanaan:

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan pedoman bagi setiap kepala PD menyusun Renstra PD dan pedoman untuk menyusun RKPD.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

A. PD, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;

B. PD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD setiap tahun;

C. PD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra PD;

D. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra PD.

WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI